RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2017

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai wujud dari keinginan yang kuat dari pemimpin daerah untuk memberikan informasi kepada masyarakat atas performansi organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Performansi yang dilaporkan meliputi penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan RLPPD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Bab IV, Pasal 27 yang menjelaskan bahwa kepala daerah wajib memberikan informasi LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan / atau media elektronik. Informasi LPPD kepada masyarakat disampaikan bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah. Muatan ILPPD merupakan ringkasan LPPD .

Oleh karena itu kami sampaikan ringkasan LPPD yang disampaikan kepada pemerintah sebagai berikut :

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai landasan kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama lima tahun telah disusun dan merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2016 - 2021 adalah :

”KABUPATEN SIDOARJO YANG INOVATIF, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN”.

Visi ini dijabarkan ke dalam misi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

Misi 1: Pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipasif dan transparan.

Misi 2: Meningkatnya perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis Industri pengolahan, pertanian, perikanan, pariwisata, UMKM dan Koperasi serta pemberdayaan masyarakat.

Misi 3: Meningkatnya Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan.

Misi 4: Meningkatkan tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlaqul Karimah, berlandaskan keimanan kepada Tuhan YME, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman, dan ketertiban.

Misi 5: Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

B. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyelengarakan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan ini secara teknis dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo.

Sebelum menyajikan kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan maka akan disajikan terlebih dahulu Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) Nomor 09 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Sehingga pengukuran keberhasilan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah periode tahun 2016 - 2021 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan.

Guna mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditetapkan, maka ditentukan Indikator Kinerja Utama sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

i. Indeks Good Governance

Indeks Good Governance adalah suatu praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Indeks Good Governance merupakan hasil survey terhadap tata kelola pemerintahan melalui 4 (empat) aspek, yaitu :

a. Transparansi dan keterbukaan,
b. partisipasi masyarakat,
c. supremasi hukum, dan
d. akuntabilitas kinerja.

Berikut perkembangan Indeks Good Governance di Kabupaten Sidoarjo :

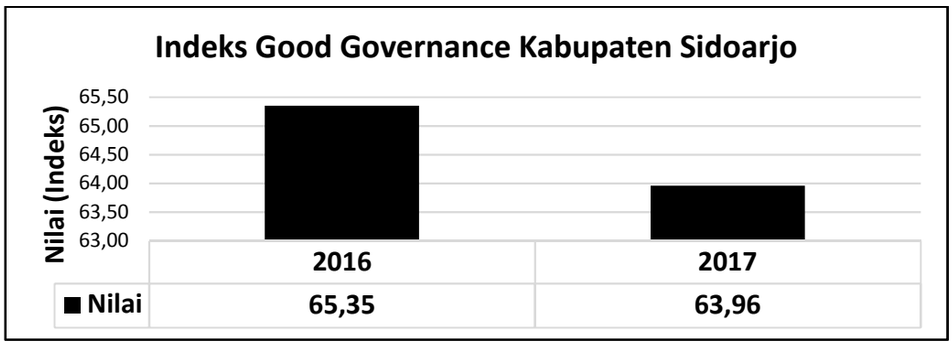

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

ii. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Sidoarjo :

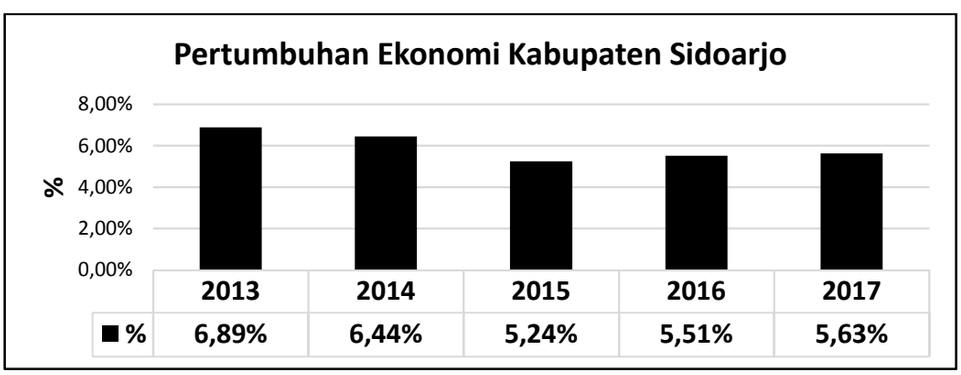

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

iii. Disparitas (Indeks GINI)

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Berikut perkembangan Disparitas (Indeks GINI) di Kabupaten Sidoarjo :

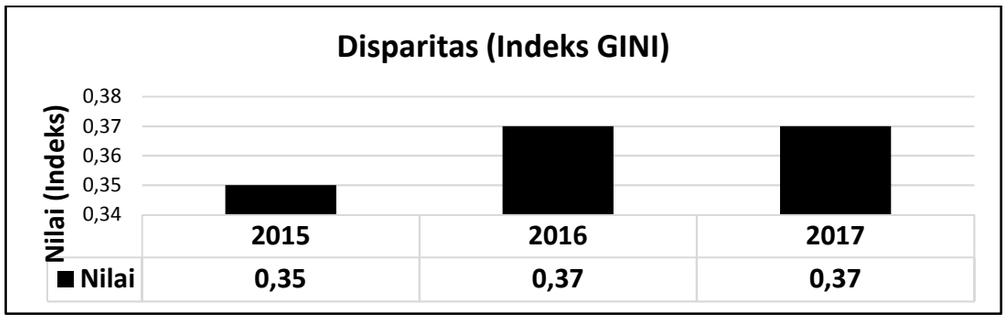

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

iv. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.

Berikut perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo :

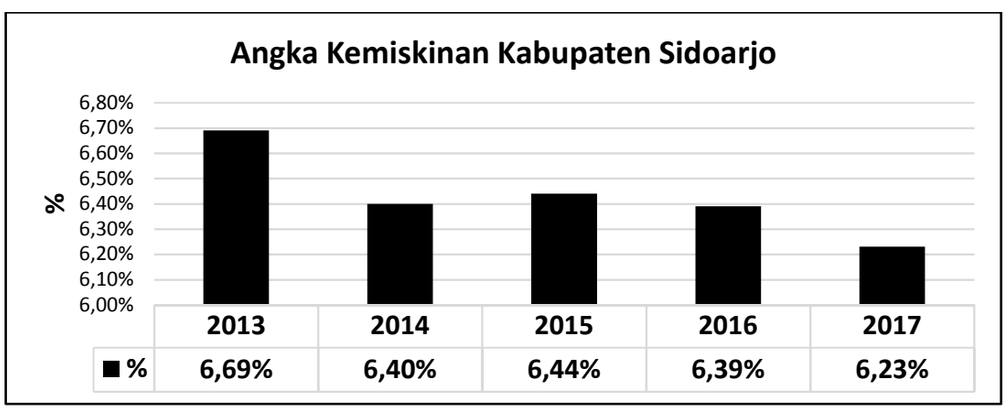

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

v. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sidoarjo :

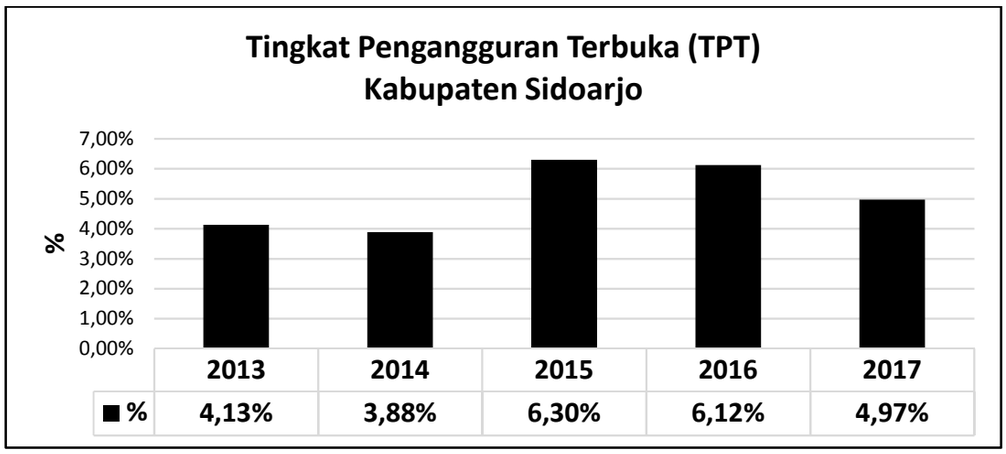

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

vi. Indeks Infrastruktur

Indeks pengukuran infrastruktur mengukur secara agregat dari beberapa jenis infrastruktur yang antara lain meliputi jalan dan jembatan, bendungan, pasar, rusunawa dan jalan kereta api.

Berikut perkembangan Indeks Infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo :

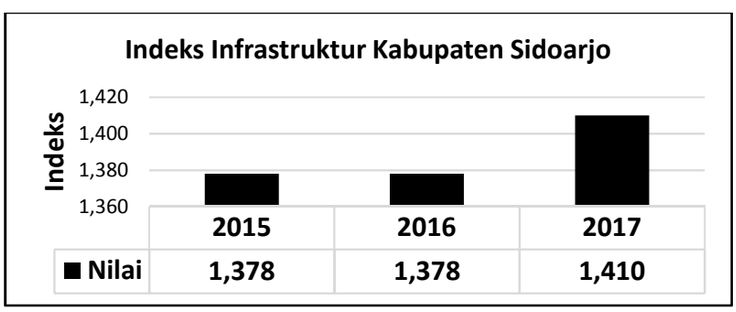

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

vii. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia.

Berikut perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sidoarjo :

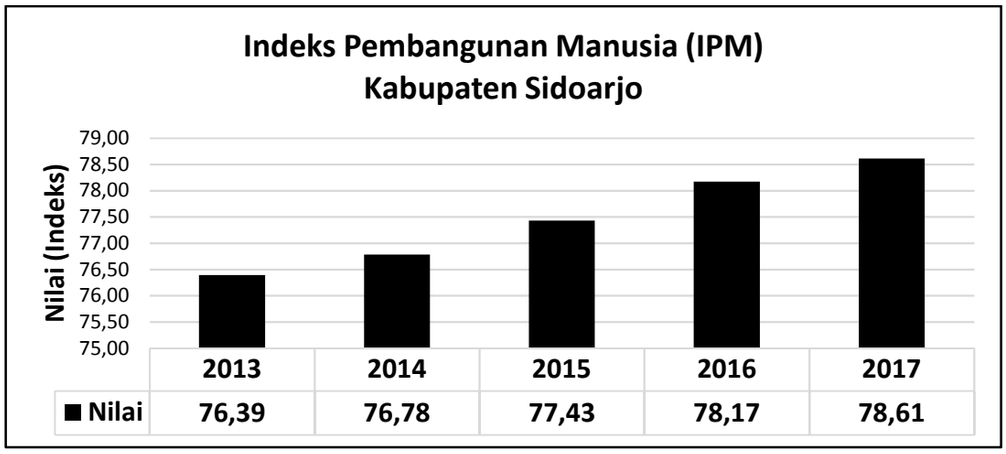

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

viii. Indeks Kebahagiaan

Indeks Kebahagiaan mencakup indikator kepuasan individu terhadap 10 (sepuluh) domain / variabel yang esensial, yaitu :

1. Pekerjaan
2. Pendapatan Rumah Tangga
3. Kondisi Rumah dan Aset
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Keharmonisan Keluarga
7. Hubungan Sosial
8. Ketersediaan Waktu Luang
9. Kondisi Lingkungan
10. Kondisi Keamanan

Berikut perkembangan Indeks Kebahagiaan di Kabupaten Sidoarjo :

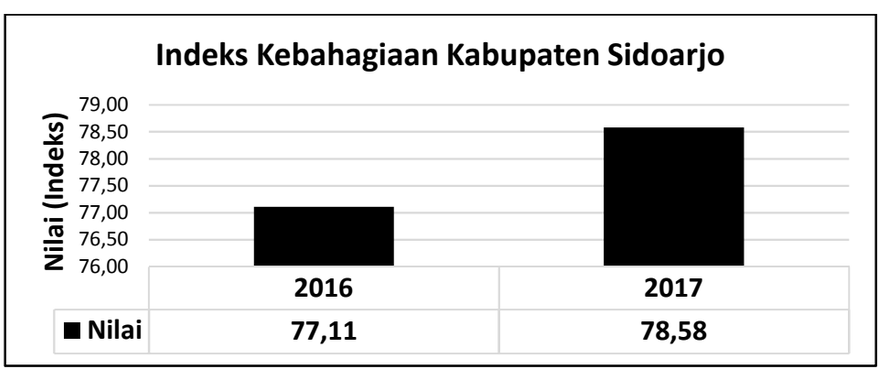

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

ix. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan dari IKLH meliputi 3 (tiga) unsur, yaitu :

a. Indeks Kualitas Air
b. Indeks Kualitas Udara
c. Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Berikut perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Sidoarjo :

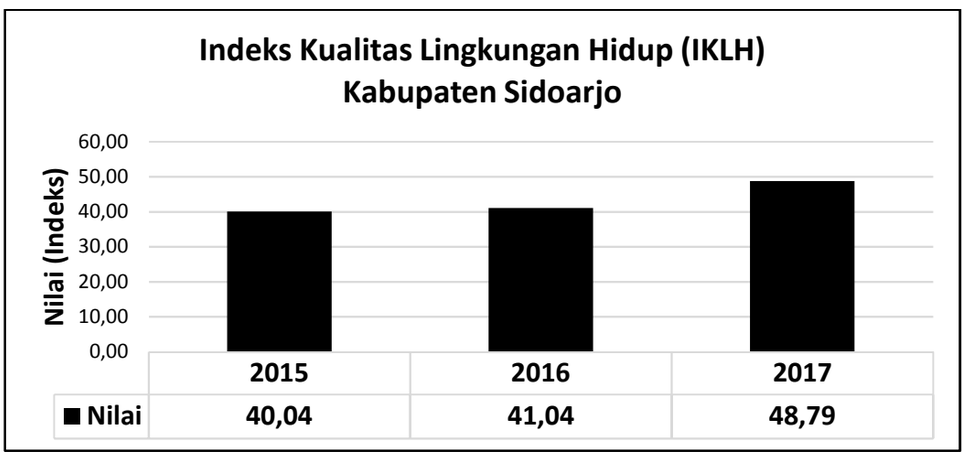

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Uraian pelaksanaan dari masing – masing urusan yang diselenggarakan yaitu :

1. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Program stratejik pembangunan untuk urusan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2017 meliputi :

1. Program Pendidikan Menengah
2. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Layanan Pendidikan
4. Program Perluasan dan Aksesibilitas Pendidikan
5. Program Pendidikan Dasar
6. Program Pendidikan Non Formal dan Informal

7. Program BOSREG

Seluruh program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran "**Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Merata**", dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Rata – Rata Lama Sekolah**

   Rata-Rata Lama Sekolah merupakan kombinasi angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan. Sedangkan definisi Lama Sekolah adalah banyaknya tahun seorang menjalankan pendidikan formal hingga saat dilakukan survey, baik yang sedang dijalani saat ini (sedang bersekolah) atau pun pendidikan yang ditamatkan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk rata-rata lama sekolah di tahun 2017 sebesar 10,50 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 11,82 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 112,38%. Dibandingkan pada tahun 2016 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 10,10 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 1,72 tahun dari 10,10 tahun pada tahun 2016 menjadi 11,82 tahun di tahun 2017. Hasil tersebut menggambarkan peran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terhadap mutu layanan pendidikan sebagai urusan wajib.

   Dengan realisasi angka 11,82 tahun tersebut dapat diartikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sidoarjo rata-rata sudah dapat menyelesaikan pendidikan pada tingkat Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan secara angka perhitungan ketercapaian rata-rata lama sekolah sudah mendekati Wajar Pendidikan Menengah 12 Tahun, pemenuhannya sebesar 1,18 tahun akan kita intervensi melalui program bersama dengan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Perhitungan Rata-rata Lama Sekolah
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017

Ijazah Pendidikan Formal yang Dimiliki	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas yg sedang sekolah / telah berijazah	Lama Masa Pendidikan yg Dihabiskan	Jumlah Penduduk X Lama Pendidikan yg Dihabiskan
Doktor	0	21	0
S2	9.077	18	163.386
S1	155.795	16	2.492.720
DIII	42.351	15	635.265
SMA/SMK/MA	655.247	12	7.862.964
SMP/MTs	338.638	9	3.047.742
SD/MI	0	6	0
Jumlah	1.201.108		14.202.077

***Data diambil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 yang tertuang pada buku Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019**

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2017 sebagai berikut :

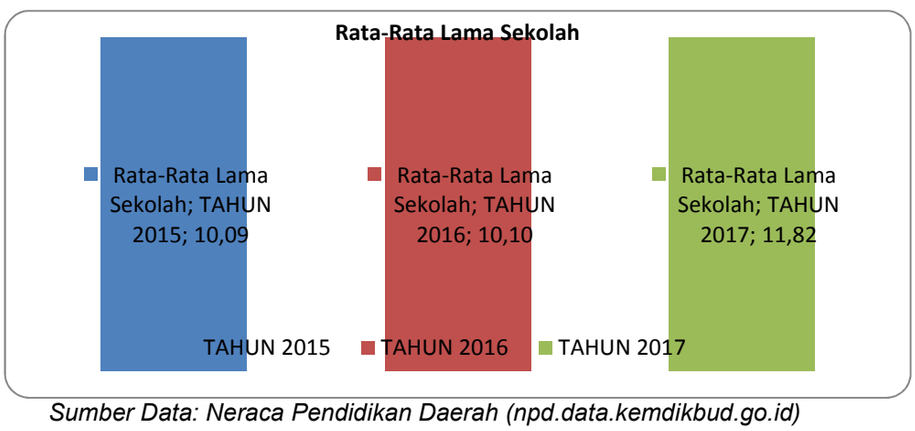

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 - 2021 target untuk angka harapan lama sekolah di tahun 2017 sebesar 14,1 tahun. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 14,13 tahun dengan angka ketercapaian sebesar 100,21%. Dibandingkan pada tahun 2016 realisasi untuk rata-rata lama sekolah sebesar 13,89 tahun. Hal tersebut bisa dikategorikan ada kenaikan sebesar 0,24 tahun.

Dengan realisasi angka 14,13 tahun tersebut dapat diartikan bahwa peserta didik lulusan SD sekarang di Kabupaten Sidoarjo punya potensi untuk bisa melanjutkan pada tingkat pendidikan Diploma II (DII).

Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 sebagai berikut :

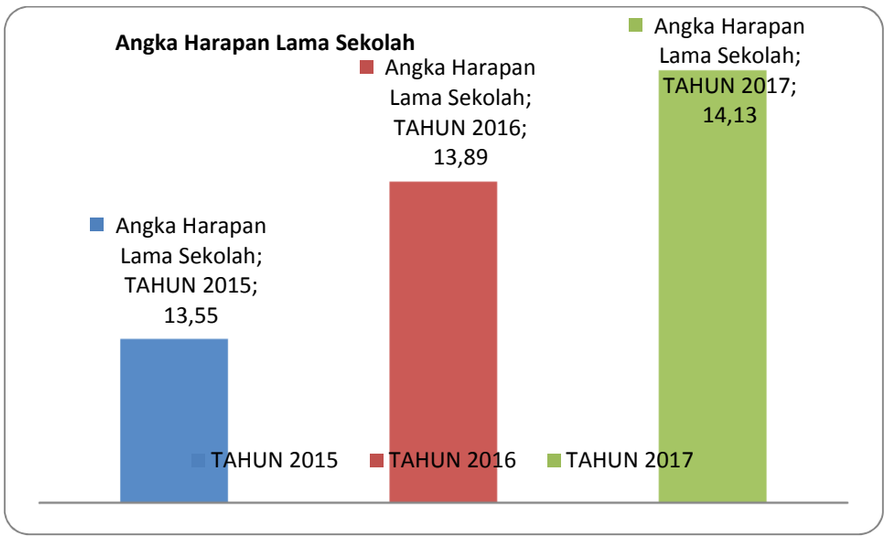

Sumber Data: Neraca Pendidikan Daerah (npd.data.kemdikbud.go.id)

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan angka harapan lama sekolah, antara lain:

- Memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan pendidikan termasuk kepada lembaga sekolah, madrasah dan lembaga-lembaga kursus yang menyelenggarakan pendidikan (pendidikan informal) untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan.
- Memberikan aksesibilitas yang seluas-luasnya tentang layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat tentang pembiayaan sekolah gratis setingkat Wajar Dikdas 9 (sembilan) tahun.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar memprogramkan subsidi biaya pendidikan setingkat SLTA sampai dengan S1 bagi masyarakat Sidoarjo yang kurang mampu baik yang menempuh di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan di luar wilayah Kabupaten Sidoarjo.

3. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN) SD/MI dan SMP/MTs

Pengukuran Rata-Rata Nilai Ujian Nasional merupakan hasil akhir penilaian peserta didik yang merupakan salah satu gambaran pokok keberhasilan pendidikan yang dilakukan di setiap tingkatan pendidikan. Namun demikian

nilai UN bukan merupakan ukuran yang mutlak keberhasilan pendidikan atau peningkatan kinerja pendidikan, melainkan masih banyak faktor yang mempengaruhi hasil penilaian ini.

Untuk setingkat SD/MI target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2017 adalah sebesar 8,25 dengan realisasi sebesar 8,32 dengan angka ketercapaian 100,85%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI Tahun Ajaran 2016/2017 Provinsi Jawa Timur.

Dengan realisasi nilai 8,32 tersebut dapat diartikan bahwa layanan mutu pendidikan lebih meningkat sesuai dengan tujuan pendidikan yang bermutu dan berkualitas.

Untuk setingkat SMP/MTs target yang ditetapkan untuk Nilai rata-rata UN tahun 2017 adalah sebesar 6,85 dengan realisasi sebesar 6,25 dengan angka ketercapaian 91,24%. Data tersebut diambil dari Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SMP/MTs Tahun Ajaran 2016/2017 Provinsi Jawa Timur

Dengan realisasi nilai 6,25 tersebut dapat diartikan bahwa masih ada peningkatan angka ketercapaian dari tahun 2016 sebesar 90,86% menjadi 91,24% meskipun secara nilai menurun. Hal tersebut dikarenakan pemberlakuan Kurikulum 2013 untuk SMP/MTs dan mekanisme Ujian yang menggunakan Sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) untuk SMP/MTs yang sistemnya sulit untuk dipahami oleh peserta didik dalam menentukan jawaban meskipun sudah beberapa kali dilaksanakan simulasi sistem Ujian UNBK. Beberapa informasi dari Kabupaten/Kota lain sekolah yang mengadakan sistem UNBK, nilainya sangat menurun drastis. Begitu juga di Kabupaten Sidoarjo ada sebagian besar sekolah melakukan Ujian Nasional dengan sistem tersebut dan hasilnya kurang memuaskan. Salah satu indikator penurunan realisasi ini terletak pada lembaga Madrasah Tsanawiyah yang mengalami penurunan sangat dominan, sehingga berdampak pada hasil rata-rata Nilai Ujian Nasional SMP/MTs. Yang pada intinya pengelolaan pengukuran mutu pendidikan Madrasah pada wilayah Kementerian Agama, sehingga Dinas Pendidikan secara normatif tidak mempunyai alat ukur untuk meningkatkan mutu.

Perkembangan nilai ujian nasional untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs dapat dilihat pada grafik berikut :

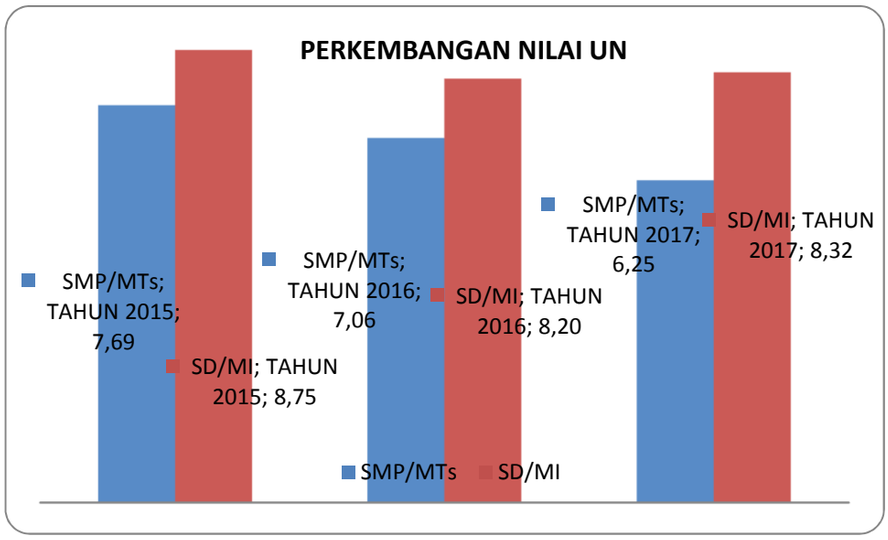

Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2016/2017 Provinsi Jawa Timur

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan nilai ujian nasional, antara lain:

- Peningkatan sarana prasarana UNBK berupa komputer PC
- Meningkatkan pembinaan berupa simulasi UNBK
- Meningkatkan secara bersama layanan mutu pendidikan dengan Kementerian Agama Kabupaten Sidoarjo.

Dalam mendukung capaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 – 2021, tujuan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata, dengan indikator sasaran program sebagai berikut :

1. Angka Kelulusan

Untuk menilai kualitas secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten diukur dengan angka kelulusan. Kemampuan sekolah untuk meluluskan anak didiknya akan berbanding lurus dengan kualitas tersebut.

Target Angka Kelulusan yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 100% dan SMP/MTs sebesar 100%. Sedangkan realisasi Angka Kelulusan yang dicapai pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 100% dan SMP/MTs sebesar 100%.

Perkembangan Angka Kelulusan pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

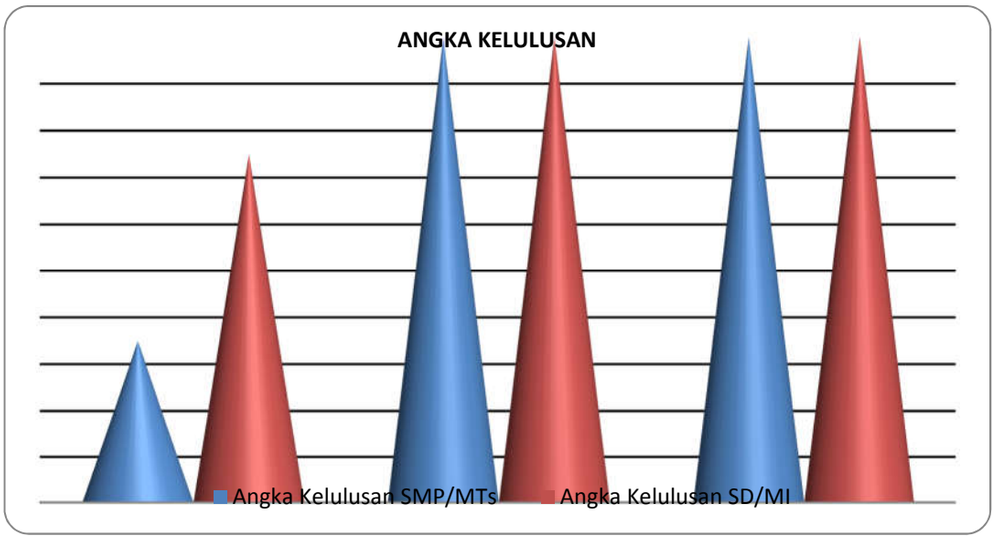

Sumber Data : Laporan Hasil Ujian Sekolah/Madrasah SD/MI dan SMP/MTs Tahun Ajaran 2016/2017 Provinsi Jawa Timur

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan target 100% Angka Kelulusan, yaitu :

- Terwujudnya sarana prasarana UNBK berupa perangkat unit komputer.
- Simulasi UNBK yang diselenggarakan pada satuan pendidikan melalui Proktor yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4

Untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik sesuai dengan standar nasional pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama minimal S1/D4. Di Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik sesuai dengan Data Pendidikan Nasional (Dapodik) untuk lembaga negeri dan swasta sering terjadi perubahan seiring dengan perkembangan layanan pendidikan yang berkualitas. Di Kabupaten Sidoarjo jumlah tenaga pendidik pada tahun 2017 sebanyak 11.897 orang, sedangkan yang sudah memenuhi standar kualifikasi S1/D4 sebanyak 11.701 orang atau mencapai 98,35%. Ditahun 2016 realisasi yang dicapai sebesar 95,68%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga pendidik baik negeri dan swasta berupaya meningkatkan mutu kualifikasi pendidikan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan di Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan Guru/Pendidik yang memenuhi standar kualifikasi S1/D4 pada tahun 2017 sebagai berikut :

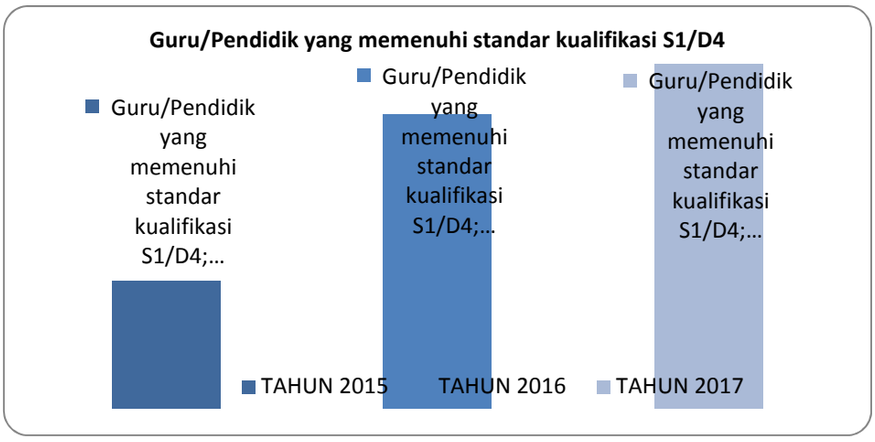

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

3. Guru/pendidik yang telah bersertifikasi

Persentase Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi adalah merupakan salah satu indikator kinerja sasaran untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing. Di tahun 2017 ini target yang ditetapkan sebesar 47,65% terrealisasi sebesar 56,03%, dengan angka ketercapaian 117,59%.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan guru/tenaga pendidik yang bersertifikasi profesi mengalami peningkatan yang berdampak pada layanan mutu pendidikan yang berkualitas.

Perkembangan Guru/Pendidik yang telah bersertifikasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

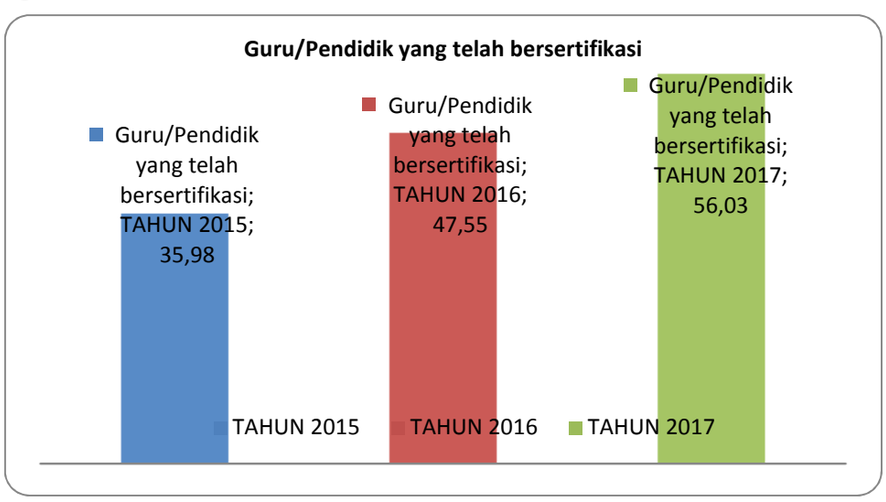

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

4. Persentase Satuan Pendidikan yang Terakreditasi

Di tahun 2017, realisasi untuk satuan pendidikan yang terakreditasi lebih meningkat dibandingkan dengan realisasi di tahun 2016. Ini bisa dilihat dari data yang tersaji dalam Dapodik Tahun 2017. Di tahun 2017 target yang ditetapkan untuk Persentase SD yang terakreditasi A sebesar 67,83% terrealisasi sebesar 77,86%, dengan angka ketercapaian 114,79%. Untuk SMP target yang ditetapkan sebesar 61,61% terrealisasi sebesar 73,37% dengan angka ketercapaian 119,09%.

Perkembangan satuan pendidikan yang terakreditasi A pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

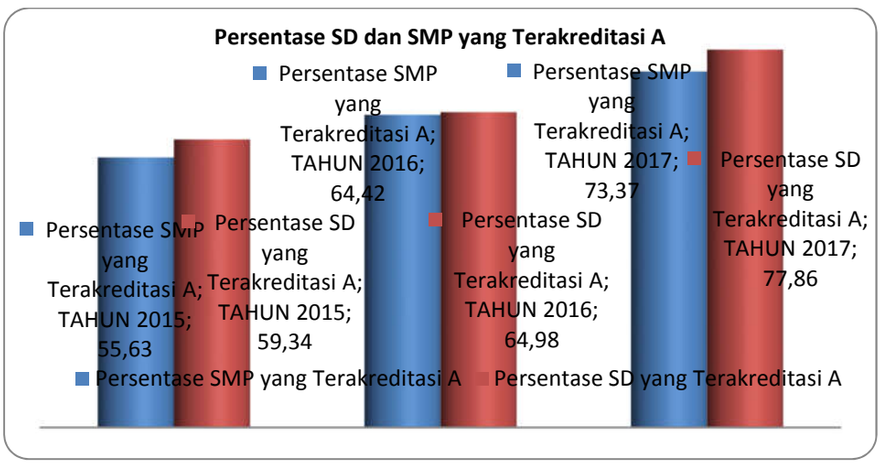

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan persentase SD dan SMP yang terakreditasi A yaitu:

Peningkatan pemenuhan standar nasional pendidikan berupa :

1) Peningkatan sarana prasarana gedung sekolah/ruang kelas dan ruang penunjang lainnya.
2) Peningkatan standar proses/standar kelulusan berupa kegiatan-kegiatan penunjang evaluasi latihan Ujian Sekolah berupa Try Out.
3) Peningkatan standar pendidik dan tenaga kependidikan dengan memberikan tambahan kesejahteraan untuk Guru Tidak Tetap dan
4) Pegawai Tidak Tetap dan memberikan bantuan kesejahteraan kepada lembaga swasta untuk guru swasta.

5. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar merupakan perbandingan antara jumlah seluruh peserta didik sekolah untuk jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah seluruh anak usia sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target yang ditetapkan untuk APK tahun 2017, PAUD sebesar 92,35%, SD/MI sebesar 107,61% dan SMP/MTs sebesar 98,78%. Sedangkan realisasi APK yang dicapai pada tahun 2017 untuk PAUD sebesar 92,78%, SD/MI sebesar 107,71%, dan SMP/MTs sebesar 98,85%. Jika dibandingkan dengan Realisasi APK tahun 2016, maka terjadi kenaikan pada jenjang PAUD sebesar 0,6%, jenjang SD/MI mengalami kenaikan sebesar 0,59%, dan jenjang SMP/MTs mengalami kenaikan sebesar 0,34%.

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

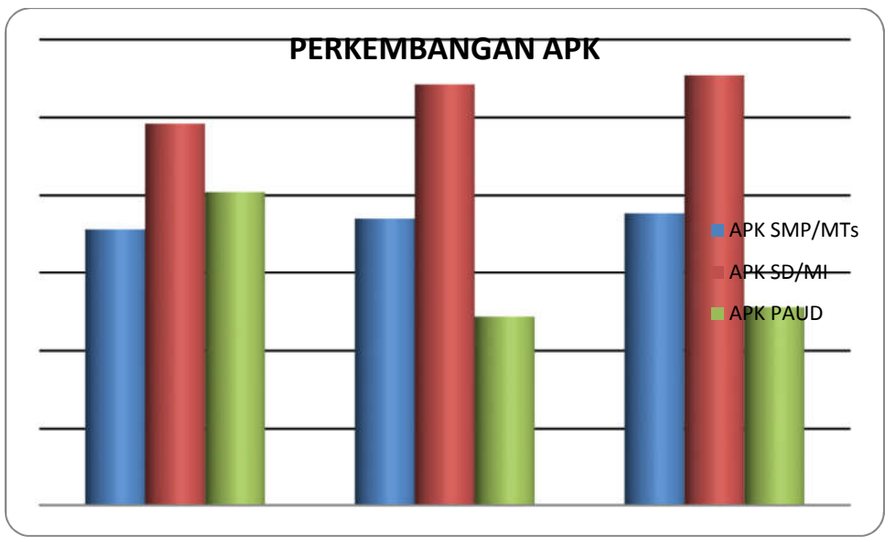

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APK, antara lain:

1) Pemberlakuan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri untuk biaya investasi dan operasional dan untuk Sekolah swasta meringankan beban orang tua
2) Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara online
3) Pemberian bantuan kepada sekolah swasta berupa hibah partisipatif untuk penambahan ruang kelas baru.

6. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partispasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun yang bersekolah di SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK dibagi seluruh jumlah anak usia 7 s.d 12 tahun; 13 s.d 15 tahun dan 16 s.d 18 tahun untuk jenjang pendidikan tersebut.

Target APM yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 95,91% dan SMP/MTs sebesar 78,65%. Sedangkan realisasi APM yang dicapai pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 96,42% dan SMP/MTs sebesar 79,58%.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) yaitu :

1) Sistem PPDB pada penerimaan tingkat satuan pendidikan baik madrasah ataupun sekolah pada usia normatif terutama pada siswa kelas 1 (satu) sekolah swasta
2) Keberadaan siswa di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Surabaya, Gresik, Mojokerto dan Pasuruan menentukan angka partisipatif
3) Masih banyak siswa melanjutkan di luar Kabupaten Sidoarjo pada Pondok Pesantren

Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

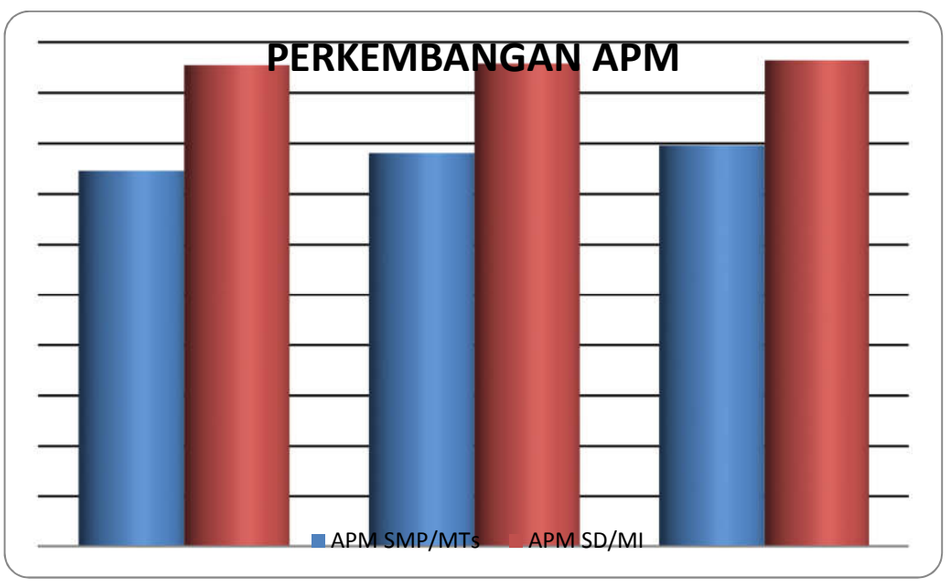

Sumber Data: Dapodik dan Data Penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan peningkatan APM, antara lain:

1) Kebijakan bersama tentang mekanisme penerimaan peserta didik baru antara Kementrian Agama Kabupaten Sidoarjo dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
2) Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sekolah wilayah perbatasan sebagai sekolah rujukan
3) Mendorong sekolah formal untuk melakukan koordinasi dengan Kementrian Agama pada program Diniyah setingkat SD dan SMP dan pemberlakuan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

7. Angka Putus Sekolah (APS)

Angka putus sekolah adalah angka (jumlah peserta didik) putus sekolah per 100 peserta didik pada setiap jenjang pendidikan.

Target APS yang ditetapkan pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 0,01% dan SMP/MTs sebesar 0,08%. Sedangkan realisasi APS yang dicapai pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 0,00% dan SMP/MTs sebesar 0,06%.

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

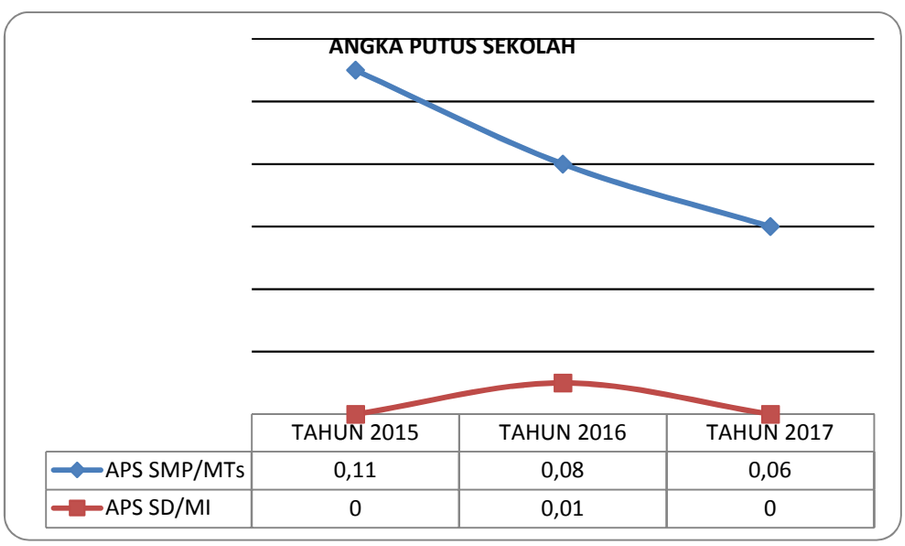

	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017
APS SMP/MTs	0,11	0,08	0,06
APS SD/MI	0	0,01	0

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

Upaya – upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan penurunan APS, yaitu :

1) Pemberlakuan Pendidikan Gratis bagi Sekolah Negeri untuk biaya investasi dan operasional dan untuk Sekolah swasta meringankan beban orang tua
2) Pemberian Bantuan Personal Pendidikan bagi Siswa Miskin berprestasi
3) Program Pemerintah Pusat melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Pada angka Putus Sekolah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut menggambarkan bahwa angka melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bisa dikategorikan berhasil dengan perhitungan lulusan SD bisa tertampung pada jenjang SMP dengan harapan siswa setingkat SMP bisa melanjutkan ke jenjang SMA dengan mengintervensi program pemberlakuan khusus pada siswa yang tidak mampu dengan bantuan biaya operasional dan biaya personal pendidikan dengan membebaskan segala bentuk pembiayaan.

8. Rasio jumlah pendidik terhadap jumlah peserta didik

Rasio ini dapat dihitung dari jumlah pendidik dibanding dengan jumlah peserta didik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 pasal 17 dinyatakan bahwa Rasio minimal jumlah pendidik terhadap peserta didik untuk jenjang SD adalah 1:20 dan jenjang SMP 1:20. Realisasi tahun 2017 untuk rasio ini adalah pada jenjang SD sebesar 1:20 dan SMP sebesar 1:20.

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan guru SD dan SMP Negeri dan Swasta secara umum sudah terpenuhi, untuk meningkatkan mutu pendidik dalam mencapai mutu yang lebih baik, pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan tambahan kesejahteraan pada Guru Tidak Tetap pada lembaga SD dan SMP Negeri.

Perkembangan Rasio jumlah pendidik terhadap jumlah peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

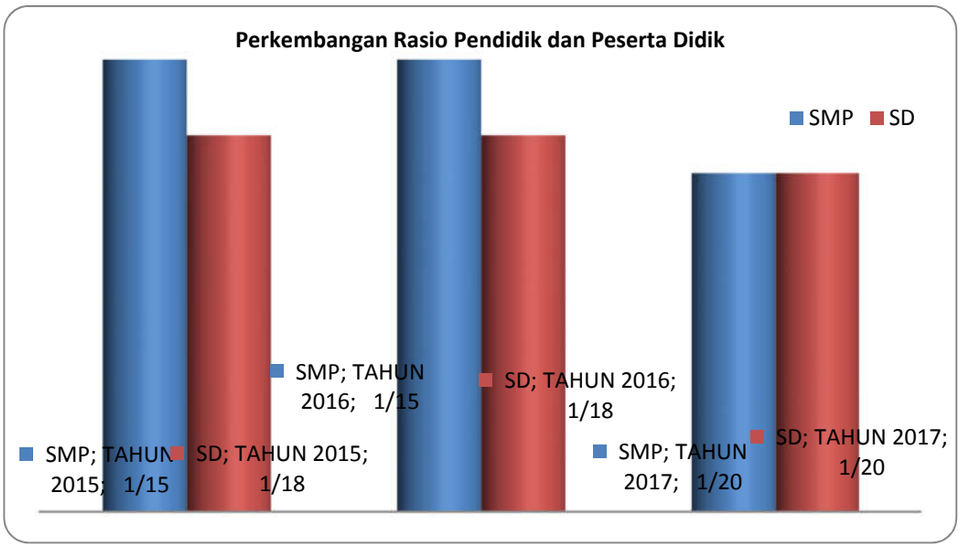

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

9. Rasio jumlah ruang kelas belajar terhadap peserta didik

Rasio ini dapat dihitung dari jumlah kelas dibanding dengan jumlah peserta didik. Standar nasional berdasarkan standar ideal indikator pemerataan pendidikan yang ditetapkan melalui Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar proses satuan pendidikan dasar dan menengah adalah SD/MI sebesar 1:28 dan SMP/MTs sebesar 1:32.

Target yang ditetapkan untuk rasio jumlah kelas belajar terhadap peserta didik tahun 2017 untuk SD sebesar 1:31 dan untuk SMP sebesar 1:33. Realisasi tahun 2017 atas rasio ini adalah untuk SD sebesar 1:28 dan untuk SMP sebesar 1:32.

Dengan angka realisasi tersebut diatas, berarti pemenuhan terhadap Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 sudah sesuai dan dipenuhi. Secara umum ketercukupan ruang kelas terhadap peserta didik sudah terpenuhi untuk lembaga swasta, untuk lembaga negeri masih terdapat proses belajar mengajar yang dilaksanakan di siang hari (double shift) sehingga untuk lembaga negeri perlu menyesuaikan terhadap Permendiknas Nomor 41 Tahun 2017 dengan konsekuensi menambah ruang kelas baru. Perhitungan 1 : 28 itu menggambarkan angka rata – rata secara Kabupaten bukan per lembaga.

Perkembangan Rasio jumlah ruang kelas belajar terhadap peserta didik pada masing-masing jenjang pendidikan pada tahun 2017 sebagai berikut :

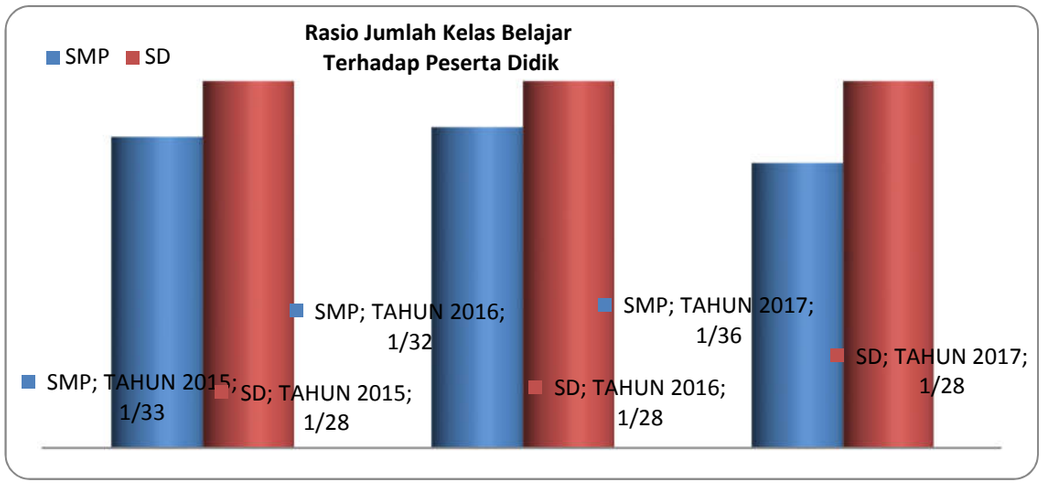

Sumber Data: Dapodik Tahun 2017

2. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kesehatan dengan Perangkat Puskesmasnya dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
2. Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
3. Program Pengembangan dan Pembinaan Sumberdaya Kesehatan
4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar, Khusus dan Penunjang serta Kesehatan Keluarga
5. Program Pencegahan, Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
6. Program Pengelolaan Obat, Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai
7. Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah

Program tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai sasaran ***"Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"***. Indikator-indikator pencapaian sasaran tersebut meliputi :

1. **Angka Harapan Hidup**

Indikator Angka Harapan Hidup adalah salah satu keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan.

Tingginya Angka Harapan Hidup mencerminkan makin membaiknya tingkat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2015 sebesar 73,63, tahun 2016 sebesar 73,67 AHH di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 telah mencapai 73,67 tahun, dari target yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra SKPD yaitu 73,67 tahun.

Angka harapan hidup di Kabupaten Sidoarjo sudah pada kisaran umur 72 sampai dengan 74 tahun, ini sudah sangat baik dan untuk mempertahankan bahkan kalau mungkin meningkatkan diupayakan budaya perilaku/pola hidup sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

Untuk mencapai peningkatan Angka Harapan Hidup Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dalam Renstra SKPD Dinas Kesehatan mencanangkan sasaran Utama "Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat" dengan Indiaktor Kinerja Utama adalah :

1. ***Keluarga Sehat***
2. ***Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas***

Keluarga Sehat adalah adalah keluarga yang memenuhi IKS (Indeks Keluarga Sehat) ≥ 0,800 dari jumlah keluarga yang ada. Adapun indikator Keluarga Sehat , yaitu:

1) Keluarga mengikuti program KB (keluarga berencana)
2) Ibu hamil memeriksakan kehamilannya (ANC) sesuai standar
3) Bayi mendapatkan Imunisasi lengkap
4) Pemberian ASI eksklusif bayi 0 sd 6 bulan\
5) Pemantuan pertumbuhan balita
6) Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7) Penderita hipertensi yang berobat teratur
8) Penderita gangguan jiwa berat yang diobati
9) Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10) Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN
11) Mempunyai sarana air bersih
12) Menggunakan jamban keluarga

1. **Keluarga Sehat**

Program pembangunan kesehatan Indonesia mengacu pada 3 (tiga) pilar program Indonesia sehat yaitu mengedepankan paradigm sehat, penguatan

pelayanan kesehatan dan pemenuhan universal health coverage melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) ditekankan pada integrasi pendekatan akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, pembiayaan serta sarana prasarana termasuk program upaya kesehatan masyarakat dan perseorangan yang mencakup seluruh keluarga dalam wilayah kerja Puskesma dengan memperhatikan manajemen Puskesmas.

Kabupaten Sidoarjo mentargetkan 15% keluarga dengan kategori sehat (Indeks KS ≥ 0.800) pada tahun 2017. Hasil pelaksanaan PIS PK pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1) Jumlah keluarga yang disurvei sebanyak 40% (237.794 KK dari total KK 594.484).
2) Keluarga sehat sebanyak 34,49% dari jumlah keluarga yang disurvei atau 14,01% dari jumlah total keluarga yang ada.

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian keluarga sehat adalah sebagai berikut :

1) pemberdayaan seluruh tenaga Puskesmas agar melakukan pendataan sekaligus intervensi kepada keluarga yang dikunjunginya.
2) berkoordinasi dengan tenaga kesehatan yang menjadi jejaring Puskesmas untuk ikut melakukan pendataan dan intervensi kepada masyarakat.
3) melakukan intervensi kepada keluarga sehingga keluarga pra sehat dapat meningkat menjadi keluarga sehat.
4) memberikan dukungan dana bagi perjalanan tenaga kesehatan ke keluarga di masyarakat.

2. Rata – rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Puskesmas.

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Puskesmas di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 26, mempunyai indeks kepuasan masyarakat rata-rata 81.19. Target kabupaten adalah ≥ 79. Terdapat 4 Puskesmas dengan cakupan IKM ≤ 79 dan 22 Puskesmas telah mencapai target yang ditetapkan.

Puskesmas terus berbenah dalam peningkatan kualitas pelayanan yang berimbas pada semakin tingginya indeks kepuasan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

1) terakreditasinya Puskesmas yang merupakan pengakuan dari lembaga independent tentang kulaitas pelayanan di Puskesmas
2) berinovasi dalam memberikan pelayanan salah satunya dengan system antrian pelayanan melalui SIAP TARIK (Puskesmas Tarik), CAK RAHMAN (Puskesmas Krembung), SI ELOK RUPA (Puskesmas Waru), pelayanan rekam medis paperless terintegrasi mulai antrian sampai mendapatkan obat.
3) rekrutmen tenaga pelayanan Non PNS untuk memenuhi rasio jumlah tenaga pelayanan sesuai standar.
4) menggalakkan promotif dan preventif serta mensinergikan dengan upaya kuratif rehabilitative (home visit, perkesmas dan PIS PK)
5) relokasi Puskesmas Gedangan ke area yang memenuhi standard dan penambahan Puskesmas Induk baru di wilayah padat penduduk pada tahun 2019 di wilayah kerja Puskesmas Candi.

Dalam mendukung capai Indikotor Sasaran Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu : ***"Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat"*** dengan Indikator sasaran ***"Angka harapan Hidup"*** dan Sasaran utama Renstra SKPD Meningkatnya pelayanan kesehatan dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat" dengan Indilkator Utama Keluarga Sehat tersebut dapat dilihat dari Indikator indikator dukungan (Indikator program) antara lain sebagai berikut:

	INDIKATOR
Program : Upaya Kesehatan Masyarakat	1.AKI
	2. AKB
	3.Persentase Balita Stunting
	4. Persentase usia lanjut yang sehat
	5.Persentase desa siaga aktif Purnama Mandiri
Program : Pencegahan & Pengendalian Penyakit	1. Persentase Desa/Kel UCI
	2. Persentase penduduk > 18 Th dengan Hipertensi
	3. Persentase orang terinfeksi HIV positif mendptkan ARV
	4. Angka keberhasilan pengobatan TB
Program : Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Persentase Puskesmas dengan akreditasi minimal dasar
	2. Persentase FKTL dengan akreditasi

	3.Persentase penduduk memiliki jaminan kesehatan
	4.Presentase penyehat tradisional yang memiliki STPT (surat terdaftar pengobat tradisonal)
	5.Persentase keluarga yg disurvey KS
Program : Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	1. Persentase nakes yg memiliki ijin praktek
	2. Persentase Puskesmas yg memiliki alat kesehatan sesuai standar
	3.Persentase IRTP yg mendptkan sertifikat (ijin edar)
	4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin
Program Upaya Kesehatan Masyarakat Di Puskesmas	Puskesmas Terakreditasi

1) Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi (AKB) menunjukkan keberhasilan pelayanan kesehatan suatu wilayah. Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 Angka kematian bayi (AKB) mencapai 5,45 per 1.000 kelahiran hidup lebih rendah dari target adalah sebesar < 12 per 1.000 kelahiran hidup. Tetapi mengalami kenaikan dari kejadian tahun 2016 sebesar 4,26 per 1.000 kelahiran hidup. Kenaikan angka kematian bayi dikarenakan kondisi bayi yang diawali dengan perawatan ibu pada masa hamil yang belum optimal juga di mungkinkan karena kondisi risiko/komplikasi dari ibunya yang menyebabkan bayi dilahirkan dalam kondisi berrisiko. Selain itu juga perawatan setelah lahir yang merupakan masa rentan bayi, baik asupan, lingkungan dan pengatahuan. Proporsi kematian bayi khususnya berdasar masa, 68,18% kematian terbanyak adalah masa neonatus. Hal tersebut disebabkan karena masa neonatus merupakan masa rentan untuk ketahanan tubuh. Berat badan lahir rendah (kurang dari 2500 gram) merupakan salah satu faktor utama yang memberikan kontribusi terhadap kematian perinatal dan neonatal. Keadaan ini terjadi karena beberapa kemungkinan antara lain dari faktor ibu dan janin itu sendiri, yang akhirnya menghambat pertumbuhan hasil konsepsi dan atau merangsang terjadinya persalinan sebelum waktunya.

Angka Kematian Bayi Th. 2015 – 2017 di Kabupaten Sidoarjo

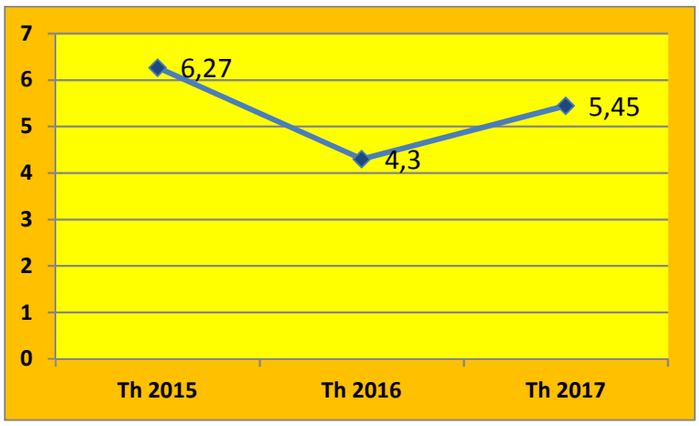

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Selain itu juga bisa digambarkan dari angka kematian Neonatus antara lain di evaluasi berdasarkan :

Berdasarkan Penyebab, secara rinci perkembangan dari tahun 2015 ke tahun 2017 mayoritas disebabkan karena BBLR. Tahun 2017 sebesar 66% naik dibanding tahun 2016 sebesar 58,56%, menyusul Asfiksia sebesar 10% turun dibanding tahun 2016 sebesar 17,16% lebih jelasnya dapat dilihat pada diagram dibawah sebagai berikut :

Presentase Kematian Neonatus Berdasarkan Penyebab Th. 2017

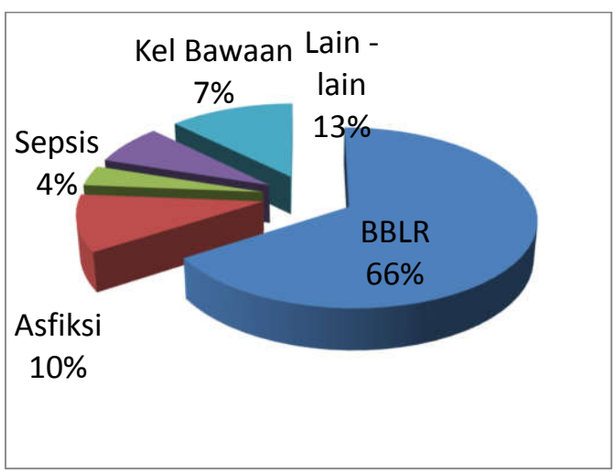

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Berdasarkan Masa/Waktu; di tahun 2017 kematian Neonatus mayoritas pada masa Neonatus dini, lebih rinci dapat digambarkan sebagai berikut:

Presentase Kematian Neonatus Berdasarkan Masa Th. 2017

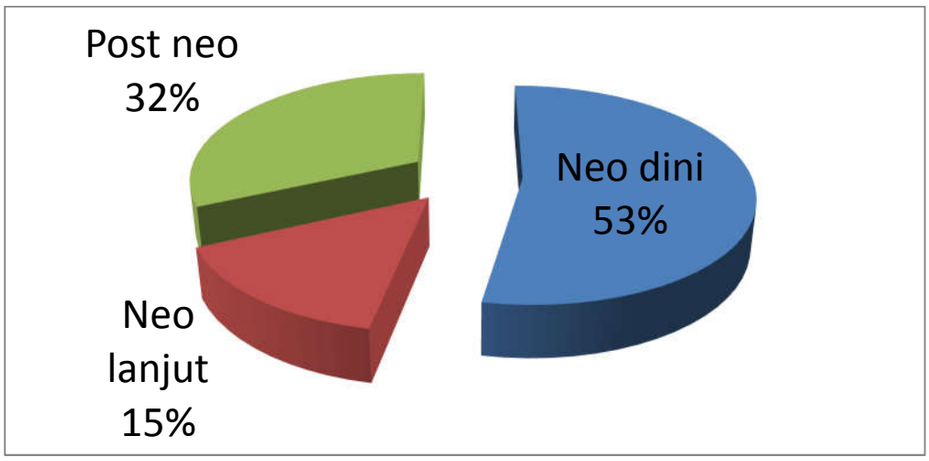

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Beberapa Upaya yang dilakukan dalam penurunan angka kematian bayi adalah :

a) Peningkatan ketrampilan petugas tentang manajemen BBLR, asfiksia, dan penanganan kegawat daruratan bayi,
b) Adanya rujukan dini terencana;
c) Melaksanakan skill assesment pada gawat darurat neonatal dengan sasaran tenaga kesehatan
d) Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian neonatal
e) Pemberian pelayanan ANC terpadu (10 T)

2) Angka Kematian Ibu

Kematian Ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa kehamilan, persalinan dan masa nifas, kecuali kasus kecelakaan. Angka kematian ibu di kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 82,62 per 100.000 kelahiran hidup lebih rendah dibanding dengan target yaitu sebesar < 87 per 100.000 kelahiran hidup, mengalami kenaikan apabila dibandingkan tahun 2016 sebesar 66,34 per 100.000 kelahiran hidup.

Kenaikan AKI ini karena adanya keterlambatan dalam penanganan (3T) yaitu :

a. Terlambat mendeteksi dan ambil keputusan baik oleh tenaga
b. kesehatan maupun masyarakat
c. Terlambat melakukan rujukan
d. Terlambat mendapat penanganan di tempat rujukan

Perkembangan angka kematian ibu sampai dengan tahun 2017 terlihat pada grafik berikut ini :

Angka Kematian Ibu Th. 2015 - 2017

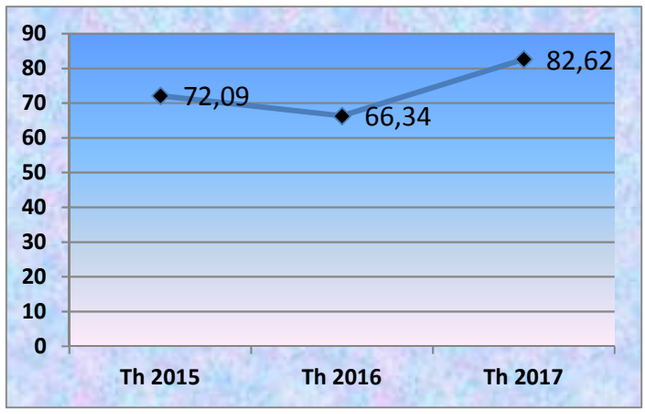

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Adapun penyebab kematian ibu mayoritas disebabkan karena Perdarahan sebesar 40% menyusul karena Pre Eklamsi/ eklamsi sebesar 34% lebih rinci penyebab kematian ibu digambarkan sbb

Penyebab Kematian Ibu Th. 2017

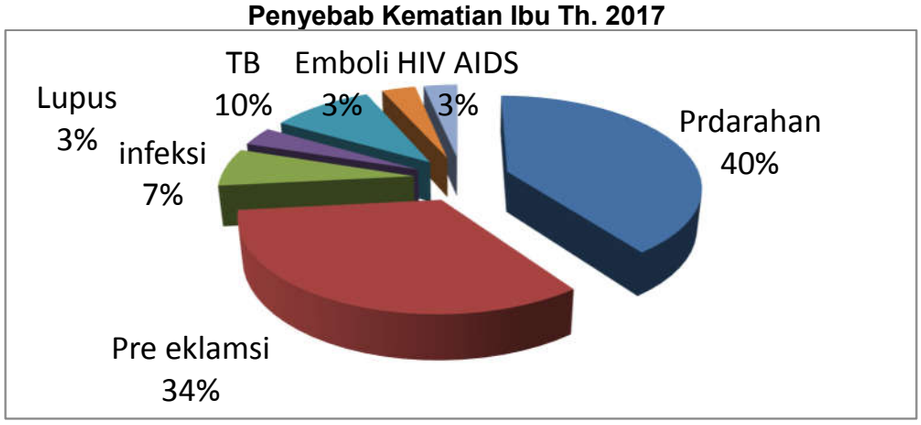

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Upaya – upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan angka kematian ibu yaitu :

a) Pelaksanaan penerapan pelayanan standar ibu hamil (ANC terpadu-10T) dan peningkatan ketrampilan tenaga kesehatan dalam APN (Peer Review Asuhan Persalinan Normal), kelas ibu
b) Pemanfaatan buku KIA bagi semua ibu dan tenaga kesehatan untuk memperoleh informasi dan memantau kesehatan ibu hamil
c) Optimalisasi dan Pemberdayaan Desa dengan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) termasuk penempelan

stiker P4K dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan Masyarakat ini dibentuk dalam Pokja I (Pendataan, Penandaan, Pendampingan), Pokja 2 (Tabulin & Dasolin). Pokja 3 (Donor Darah), Pokja 4 (Ambulance Desa)

d) Melakukan penilaian tatalaksana pada gawat darurat maternal dan neonatal melalui *skill assesment* dengan sasaran tenaga kesehatan (bidan)
e) Melakukan *Audit Maternal Perinatal* (AMP) pada kasus near miss dan atau kematian ibu hamil, bersalin, ibu nifas dan pada perinatal dan neonatal.
f) Optimalisasi jalinan kerjasama dan koordinasi di wilayah, Pembentukan forum Penakib Kabupaten Sidoarjo.

3) Angka Kesakitan HIV / AIDS

Sebagai salah satu penyakit menular yang sama dengan penyakit infeksi yang lain akan tetapi masih adanya stigma di masyarakat., prevalensi HIV/AIDS adalah Angka Perkiraan yang diperoleh dari Jumlah kasus HIV sampai dengan tahun 2017 dibagi dengan Populasi At Risk (Jumlah penduduk).

Kabupaten Sidoarjo tidak mempunyai data Perkiraan Populasi Kunci yang berdasarkan sero survei sehingga menggunakan data kasus HIV riil sebanyak.

Hasil pemeriksaan per 100.000 penduduk sampai dengan tahun 2017 mencapai 117 per 100.000 penduduk. Adapun penemuan kasus HIV/AIDS pada tahun 2017 adalah 464 orang, diantaranya 277 orang adalah Populasi kunci, ibu hamil,pasien TB.

Populasi kunci dan ibu hamil,pasien TB yang sudah diperiksa sebanyak 14.778 orang, yang dinyatakan positif 277 orang dan yang sudah mengakses ARV sebanyak 197 orang (71 %) .

(sumber : Laporan SIHA).

a) Semakin aktifnya *system survelaince* HIV/AIDS
b) Semakin tingginya kesadaran penderita untuk memeriksakan diri.

Upaya pencegahan dan penanggulangan dilakukan melalui penyuluhan masyarakat, penjangkauan dan pendampingan kelompok resiko tinggi dan intervensi perubahan perilaku, layanan konseling dan testing HIV, layanan *Harm Reduction*, pengobatan dan pemeriksaan berkala penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS), Penambahan klinik inisiasi ARV

tidak hanya di puskesmas Krian tetapi juga puskesmas Porong, pengamanan darah donor dan kegiatan lain yang menunjang pemberantasan HIV/AIDS.

4) Cakupan Desa dengan Universal Child Immunization (UCI)

Desa yang termasuk dalam cakupan UCI mencerminkan tingginya cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi di desa tersebut. Pada tahun 2017, dari 353 desa/kelurahan yang ada, terdapat 330 desa/kelurahan atau 93,48% dari target 92%. Sedangkan pada tahun 2016 tercapai 97,73 % yang telah masuk dalam kriteria desa UCI.

Yang belum masuk kriteria desa UCI yaitu wilayah

a. Puskesmas Tanggulangin : Desa Kedungbendo
b. Puskesmas Porong : Desa Renokenongo, Desa Jatirejo, Desa Siring, Mindi, Porong, Glagah arum, Gedang, Juwet
c. Puskesmas Ganting : Desa Tebel, Sruni, Kebon sikep, Bangah
d. Puskesmas Taman : Kalijaten
e. Puskesmas Kedungsolo : Lajuk, kedungboto, Pesawaha, Wunut, Kedung solo, Kesambi, kebonagung
f. Puskesmas Sedati : Banjar kemantren, Buncitan

Capaian UCI tahun 2017 secara Kabupaten menurun sebesar 93,48% (target UCI tahun 2017 sebanyak 88%) Puskesmas yang belum mencapai target UCI adalah Puskesmas Porong dengan capaian UCI sebanyak 20 %, Puskesmas Kedung Solo sebanyak 22,2% Puskesmas Ganting sebanyak 42,9 % dan Puskesmas Sedati sebanyak 87,5 % . Ketidak tercapaian tersebut disebabkan beberapa hal antara lain : sebagian besar terjadinya miskomunikasi petugas Koordinator imunisasi bahwa bayi yang sudah dapat imunisasi MR saat kampanye MR sudah tidak disuntik MR rutin, untuk wilayah Porong disamping kondisi tersebut juga disebabkan karena wilayah kerja Puskesmas Porong dari 10 Desa, 3 Desa tenggelam lumpur Lapindo dimana secara riil Penduduknya sudah pindah ke wilayah desa yang lain namun secara administratif penduduk Desa tersebut masih ada.

Walaupun pencapaian UCI di Kabupaten Sidoarjo sudah mencapai target namun tetap diwaspadai munculnya kasus-kasus PD3I, terutama karena masih ada puskesmas yang belum mencapai target UCI.

Upaya peningkatan kualitas imunisasi dilaksanakan melalui kampanye, peningkatan skill petugas imunisasi, peningkatan kualitas penyimpanan vaksin dan sweeping sasaran, survey DQS (Distric Quality Self Assesment), Survey EVM (Effectif vaksin management) dan RCA.

5) Angka Morbiditas

Untuk menilai pelayanan terhadap penanggulangan penyakit menular maka perlu diukur angka kesakitan beberapa penyakit yang potensial terjadi. Penyakit tersebut adalah TB Paru, Demam Berdarah Dengue.

Angka keberhasilan pengobatan TB (Treatment Succes Rate =TSR)

Angka keberhasilan pengobatan adalah angka yang menunjukkan prosentase pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakterilogis yang menyelesaikan pengobatan (baik yang sembuh maupun pengobatan lengkap) diantara pasien baru TB Paru terkonfirmasi bakteriologis yang tercatat. Sembuh yaitu pasien TB Paru dengan hasil pemeriksaan bakteriologis positif pada awal pengobatan yang hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan menjadi negatif pada salah satu pemeriksaan sebelumnya. Pengobatan lengkap yaitu pasien TB yang telah menyelesaikan pengobatan secara lengkap dimana pada salah satu pemeiksaan sebelum akhir pengobatan hasilnya negatif namun tanpa ada bukti hasil pemeriksaan bakteriologis pada akhir pengobatan.

Angka Keberhasilan Program TB Paru

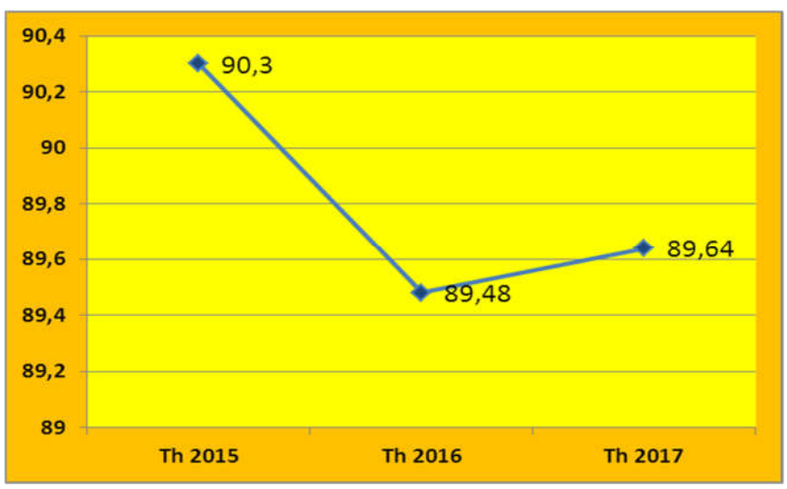

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Target angka keberhasilan pengobatan TB Paru Tahun 2017 adalah sebesar 90 %. Angka keberhasilan pengobatan TB Paru (TSR) selama th 2017 tercapai sebesar 86,44%. Realisasi ini belum sepenuhnya

mencapai target yang ditetapkan,adapun ketidak berhasilan dalam pengobatan antara lain disebabkan Dropout 4,9 %, gagal 1,6 %, Pindah 3,7 % dan meninggal 3,4 %

Penemuan kasus TB tahun 2017 belum dapat dievaluasi karena yang dilaksanakan evaluasi tahun ini adalah yang sudah selesai pengobatan yaitu penemuan kasus TB pada 12 sd 15 bulan yang lalu.

Angka Kesakitan DBD

Target Nasional angka kesakitan DBD (Inciden Rate) tahun 2017 adalah sebesar < 49 per 100.000 penduduk.

Perkembangan angka kesakitan DBD sampai dengan tahun 2017 terlihat pada grafik berikut ini :

Angka Kesakitan DBD per 100.000 penduduk

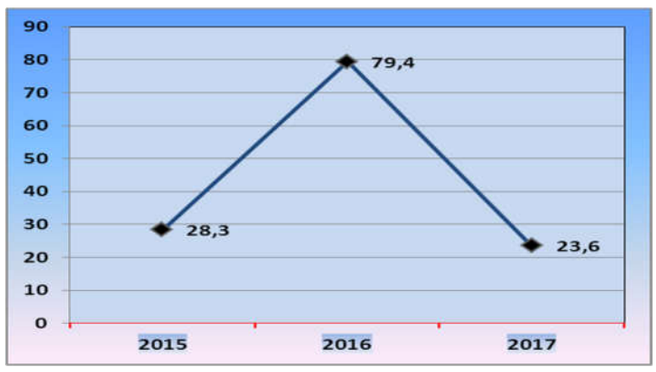

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo

Angka kesakitan DBD Kabupaten Sidoarjo berfluktuasi. Angka kesakitan DBD pada tahun 2017 sebesar 23,6 per 100.000 penduduk, menurun jika dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 79,4 per 100.000 penduduk.

Beberapa Penyebab kasus DBD tetap ada antara lain :

a) Pemahaman tentang PSN belum sepenuhnya benar, sehingga Pelaksanaan PSN masih kurang tepat.
b) Pelaksanaan PSN belum serentak dan berkesinambungan
c) Persepsi Masyarakat untuk memutuskan mata rantai penularan masih dominan dengan cara pengasapan, hal ini tampak pada ABJ masih <95%

Adapun penyebaran kasus DBD terkonfirmasi terdapat pada semua wilayah Puskesmas, terdiri dari :

1. Desa endemis terdiri dari 138 Desa/Kelurahan

2. Desa sporadis terdiri dari 191 Desa/Kelurahan
3. Desa potensial terdiri dari 18 Desa/Kelurahan
4. Desa bebas terdiri dari 6 Desa/Kelurahan (Desa yang tenggelam).

Kabupaten Sidoarjo mempunyai 5 % Desa/Kelurahan Potensial, Desa potensial adalah wilayah dengan ABJ < 95% sehingga Potensial sebagai wilayah endemis DBD, yang memungkinkan penularan DBD sangat tinggi, hal ini dipengaruhi antara lain curah hujan dan mobilitas penduduk yang tinggi, disertai masalah lemahnya kesadaran masyarakat selain melaksanakan PSN dengan benar, rutin dan berkesinambungan juga sebagai anggota keluarga menjadi pelaksana 1 R 1 J (Satu Rumah Satu Jumantik)..

Namun demikian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mencegah penularan DBD yang efektif sehingga penyebarannya dapat ditekan serendah mungkin. Upaya yang telah dilakukan pemerintah kabupaten antara lain :

- Meningkatkan kerjasama lintas sektor di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
- Meningkatkan kerasama dengan Rumah Sakit dan Puskesmas untuk menetapkan wilayah sasaran pelaksanaan penanggulangan focus
- Memotivasi petugas DBD Puskesmas untuk meningkatkan kualitas dan frekuensi penyuluhan tentang DBD dan PSN 3M Plus.
- Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang DBD sehingga masyarakat dapat mencegah secara dini DBD dengan meningkatkan intensitas kegiatan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN.
- Meningkatkan kualitas SDM juru pemantau jentik (Jumantik) Desa/Kelurahan melalui refreshing dan Memberdayakan masyarakat secara berjenjang tentang strategi satu rumah satu jumantik
- Memotivasi tokoh masyarakat untuk mengajak masyarakat di sekitarnya melakukan gerakan 3M plus (Menguras, Menutup dan Mengubur serta Mencegah Gigitan Nyamuk).

6) Akreditasi Puskesmas

Akreditasi adalah pengakuan yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi standar Akreditasi. Tujuan akreditasi adalah meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; meningkatkan perlindungan

bagi sumber daya manusia kesehatan, masyarakat dan lingkungannya, serta Puskesmas, Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi sebagai institusi; dan meningkatkan kinerja Puskesmas

Yang dimaksud dengan Klinik Pratama, tempat praktik mandiri dokter, dan tempat praktik mandiri dokter gigi dalam pelayanan kesehatan perseorangan dan atau kesehatan masyarakat.

Terdapat 9 bab sebagai instrument penilaian akreditasi yang terdiri dari administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

a. Administrasi Manajemen meliputi sistem penyelenggaraan Puskesmas, sarana prasarana, lokasi yang sesuai standar, ketenagaan dan pemeliharaan sarana prasarana
b. Upaya kesehatan masyarakat meliputi sistem penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat, komunikasi koordinasi dengan lintas sektor maupun lintas program, pelaksanaan dan evaluasi program.
c. Upaya kesehataan perorangan meliputi layanan kinis sesuai standar, obat, laboratorium, peralatan klinis, alat kesehatan sesuai standar, proses peningkatan dan pengembangan kompetensi tenaga klinis
d. Mutu yang merupakan mutu puskesmas secara keseluruhan yaitu perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas baik di masyarakat maupun klinis perorangan secara berkesinambungan (continues quality improvement), seluruh karyawan berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan yang berfokus pada pelanggan, memperhatikan keselamatan pelanggan, dan melakukan penyempurnaan yang berkelanjutan

Klasifikasi kelulusan akreditasi :

a. PARIPURNA → Apabila semua standar dipenuhi lebih dari 80%
b. UTAMA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 80% dan mutu dijalankan lebih dari 60%
c. MADYA → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 40%

d. DASAR → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp dijalankan lebih dari 75% dan mutu dijalankan lebih dari 20%
e. TIDAK TERAKREDITASI → Apabila sistem pengelolaan Puskesmas, ukm dan ukp kurang dari 75% dan mutu dijalankan kurang dari 20%

Sebanyak 26 Puskesmas yang ada di Kabupaten Sidoarjo, 18 Puskesmas telah terakreditasi dan 8 Puskesmas sedang dalam proses pendampingan dan penilaian akreditasi pada tahun 2018.

Puskesmas yang telah terakreditasi sebanyak 18, yaitu sebagai berikut:

a. Terakreditasi Utama sebanyak 10 Puskesmas.
b. Terakreditasi Madya sebanyak 6 Puskesmas.
c. Terakreditasi Dasar sebanyak 2 Puskesmas.

Upaya untuk selalu mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan yang ada melalui akreditasi dengan langkah sebagai berikut :

a. melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan secara berkala sesuai dengan standar yang ada.
b. pengajuan reakreditasi bagi Puskemas yang telah 3 tahun terakreditasi.
c. memotivasi Puskesmas untuk terakreditasi paripurna dan melakukan monitoring evaluasi pascaakreditasi untuk meningkatkan pencapaian standar Akreditasi secara berkesinambungan.

7) Prosentase desa siaga aktif Purnama Mandiri

Desa Siaga Aktif Purnama Mandiri adalah desa yang berada pada tingkat perkembangan Purnama dan Mandiri. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes No. 1529 Tahun 2010, yaitu adanya 8 Indikator :

a. Forum desa berjalan
b. Kader kesehatan ada 6-8 orang
c. Adanya Kemudahan akses pelayanan kesehatan dan Posyandu & UKBM lainnya didesa tersebut aktif
d. Dukungan dana untuk kegiatan tingkat desa terpenuhi oleh Pemerintah Desa, dan kelompok masyarakat serta dunia usaha.
e. Adanya dukungan peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.
f. Adanya peraturan Peraturan Bupati tentang hidup sehat dan adanya pembinaan PHBS di tingkat rumah tangga.

Target Desa aktif purnama mandiri pada tahun 2017 sebesar 44 % dan tercapai 44 %.

Program pembangunan untuk urusan kesehatan yang menjadi tanggung Jawab Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah Program Peningkatan Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pada dasarnya diharapkan dengan optimalisasi layanan kesehatan pada RSUD Sidoarjo akan memberikan dukungan terhadap kualitas hidup masyarakat Sidoarjo yang muaranya akan memberikan pengaruh terhadap Angka Harapan Hidup masyarakat Sidoarjo secara lebih optimal.

Peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan RSUD, tingkat keberhasilan kinerjanya diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. **Keuangan RSUD**

   Cost Recovery Rate (CRR)

   Mengukur kontribusi pendapatan fungsional terhadap belanja operasional pelayanan. Selain itu CRR dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana pendapatan fungsional rumah sakit mampu membiayai kegiatan operasional pelayanan termasuk gaji pegawai Rumah Sakit. Indikator ini mencerminkan efisiensi penggunaan dana operasional Rumah Sakit dalam melayani pasien. Bila nilai CRR di atas 100% maka CRR-nya baik.

   Capaian CRR tanpa gaji :

TAHUN	PENERIMAAN	BELANJA OPERASIONAL	% CRR
2015	275.862.548.776,76	247.350.721.301,76	111,53%
2016	397.800.028.398,55	341.466.701.333,81	116,50%
2017	416.523.355.646,81	390.528.622.978,55	106,66%

   Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa CRR (subsidi gaji tidak diperhitungkan) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif namun tetap diatas 100%. Ini berarti pendapatan RS mampu membiayai kegiatan operasional RS tanpa membayar gaji PNS.

   Target RSUD terhadap CRR tanpa gaji adalah diatas 100%

   CRR dengan gaji :

TAHUN	PENERIMAAN	BELANJA OPERASIONAL	% CRR
2015	275.862.548.776,76	291.500.725.352,76	94,64%
2016	397.800.028.398,55	386.865.242.471,81	102,83%
2017	416.523.355.646,81	435.259.261.048,55	95,70%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa CRR (subsidi gaji diperhitungkan) dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami fluktuatif. Capaian CRR Tahun 2017 bila subsidi gaji PNS diperhitungkan sebesar 95,70%. Perlu dilakukan evaluasi biaya pada setiap unit agar bisa dilakukan pengendalian biaya, sehingga pendapatan yang diperoleh dapat membiayai semua kegiatan yang ada. Dengan harapan bahwa semua biaya yang dikeluarkan bisa untuk menghasilkan pendapatan dan dapat mengurangi atau menghilangkan biaya yang tidak perlu.

Target RSUD terhadap CRR dengan gaji adalah diatas 94%

2. <u>Kualitas RSUD</u>

***a. Bed Occupancy Ratio* (BOR)**

BOR merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat tinggi rendahnya pemanfaatan tempat tidur rumah sakit dalam kurun waktu tertentu. Tingkat pemanfaatan diukur dari penggunaan tempat tidur yang tersedia.

Standar BOR yang ditetapkan untuk setiap Rumah Sakit sebesar 60% s.d 85%. Hal ini untuk menggambarkan ketika tingkat pemanfaatan kurang dari 60% maka rumah sakit tersebut kurang diminati oleh masyarakat, sedangkan bila lebih dari 85% dikhawatirkan akan mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan.

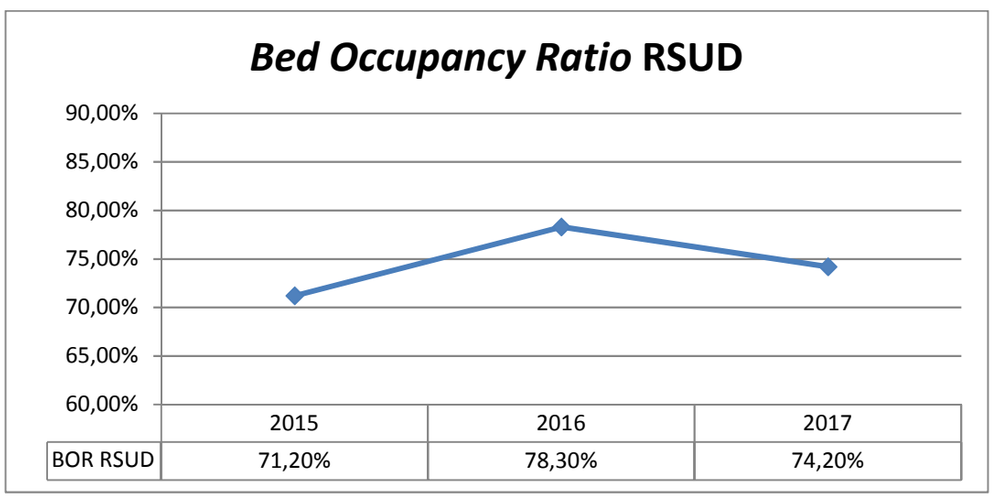

Sumber Data : RSUD Kab. Sidoarjo

Dari data tersebut diatas terlihat bahwa realisasi BOR RSUD Sidoarjo tahun 2017 pada angka 74,20%, angka yang ideal untuk pelayanan kepada masyarakat, ditunjukkan pula pada tahun 2015 capaiannya pada

angka 71,20% dan tahun 2016 pada angka 78,30%. Selama 3 tahun capaian BOR di RSUD Kab. Sidoarjo tetap berada di kisaran target yang telah ditetapkan dan akan diupayakan menjaga tingkat BOR selalu berada dalam kisaran angka target 60% s.d 85%.

b. *Average Length of Stay* (ALOS)

ALOS merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur rata–rata lama waktu pasien mendapat perawatan. Standar ALOS yang ditentukan di seluruh Rumah Sakit termasuk di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo sebesar 6 s.d 9 hari. Angka ALOS yang terlalu rendah mengindikasikan kualitas layanan kesehatan baik dan secara ekonomi akan mengurangi *cost* yang dikeluarkan seorang pasien, sedangkan terlalu tingginya ALOS mengindikasikan lambatnya penanganan oleh tenaga medis.

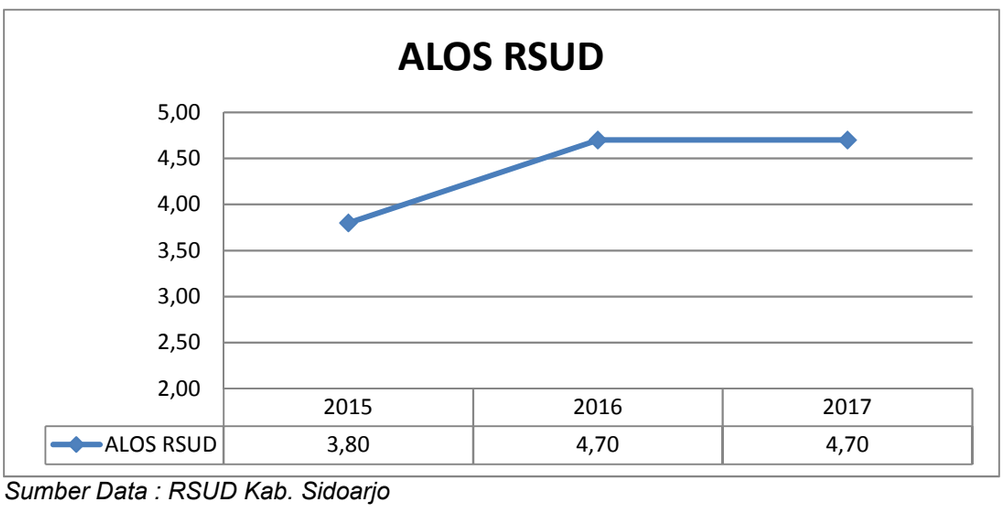

Sumber Data : RSUD Kab. Sidoarjo

Capaian angka ALOS berada pada tahun 2017 kisaran 4,70 hari, sedangkan pada tahun 2015 capaian ALOS sebesar 3,80 dan tahun 2016 berkisar pada 4,70 hari. Selama 3 tahun angka ALOS berfluktuasi dan berada pada kisaran antara 3.80 – 4.70 hari. Angka ALOS yang rendah di RSUD Kabupaten Sidoarjo dpat bermakna bahwa pelayanan diberikan dengan cepat dan tepat sehingga pasien dapat segera pulih, namun di sisi lain dapat diartikan bahwa tingkat NDR yang cukup tinggi juga memberi konstribusi yang cukup signifikan terhadap rendahnya angka ALOS.

c. *Turn Over Interval* (TOI)

Turn Over Interval adalah indikator yang digunakan untuk mengukur waktu rata-rata tempat tidur kosong atau waktu antara satu tempat tidur ditinggalkan oleh pasien sampai ditempati lagi oleh pasien lain. Waktu interval ini dimaksudkan agar diperoleh waktu yang cukup untuk persiapan pergantian pasien baru sehingga tidak terjadi *infeksi 39osocomial.*

Standar yang ditetapkan untuk TOI dan target kinerja yang ditetapkan sebesar 1 s.d 3 hari.

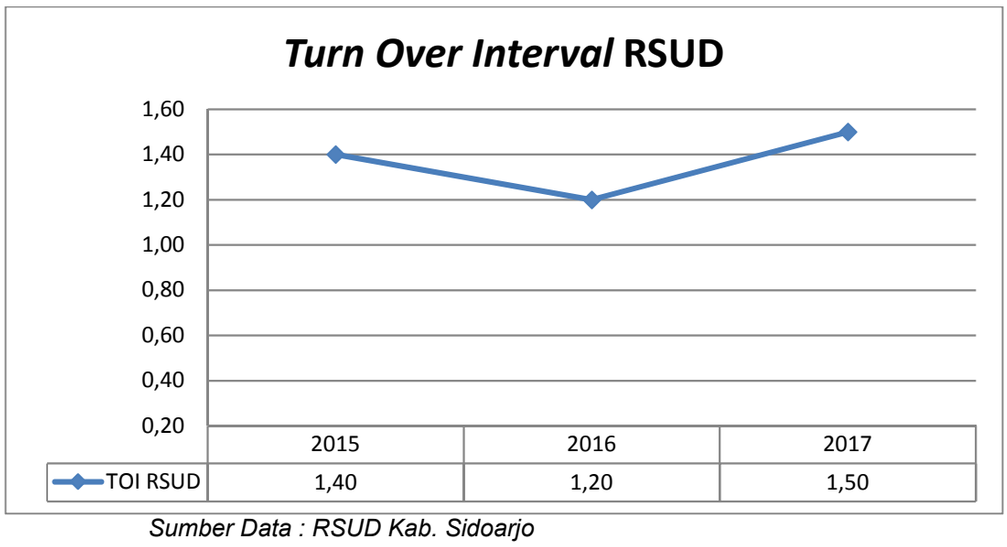

Sumber Data : RSUD Kab. Sidoarjo

Realisasi yang dicapai oleh rumah sakit pada tahun 2017 ini adalah 1,5 hari artinya rata-rata tempat tidur tidak dihuni pasien selama 1,5 hari. Hal ini menunjukkan bahwa TOI RSUD Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ideal karena masih berada dalam range standar TOI, sedangkan angka TOI tahun 2015 adalah 1.4 hari dan tahun 2016 angkanya 1,2 hari menunjukkan selama 3 tahun capaian TOI masih termasuk ideal karena masih berada dalam standar TOI. RSUD Kabupaten Sidoarjo tetap harus memperhatikan proses sterilisasi ruangan sebelum digunakan kembali sehingga tidak berdampak kepada menurunnya mutu pelayanan rumah sakit.

d. *Net Death Rate* (NDR)

Net Death Rate (NDR) merupakan salah satu *key performance indicator* sebuah Rumah Sakit. Meningkatnya Nilai NDR pada sebuah rumah sakit merupakan sebuah indikasi telah terjadi penurunan kinerja yang

berakibat menurunnya kualitas atau mutu pelayanan di rumah sakit tersebut. Adapun perkembangan NDR pada RSUD Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2017 sebagai berikut :

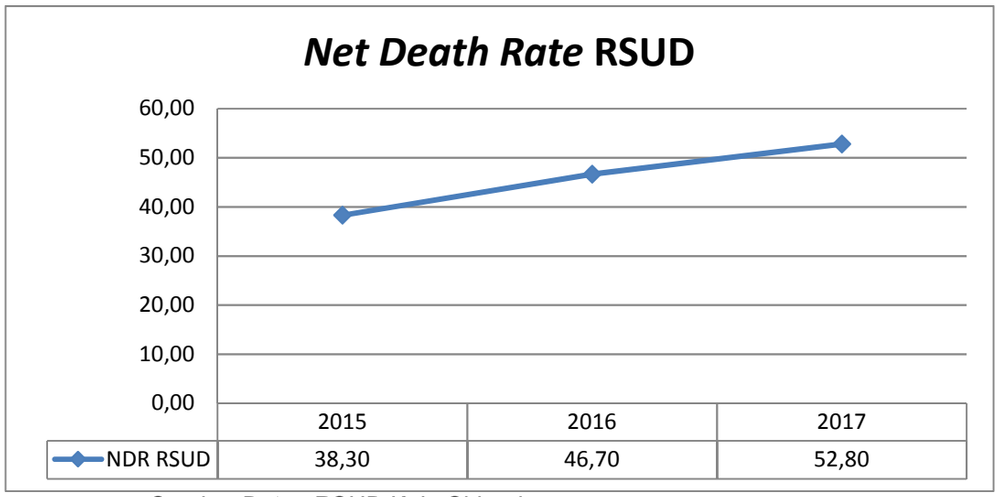

Sumber Data : RSUD Kab. Sidoarjo

Realisasi NDR tahun 2017 sebesar 52,8 permill dari target yaitu ≤ 38,3 permill.

Angka *Net Death Rate* (NDR) pada tahun 2017 yang tinggi disebabkan oleh:

a) Kondisi pasien pra rujukan sudah dalam kondisi kritis, data pra rujukan yang jelek merujuk pada level Emergency Severity Index (ESI) atau Index Kegawat daruratan. Semakin rendah angka ESI maka semakin membahayakan nyawa seseorang. Pada tahun 2017 pasien dengan ESI level 1 dan 2 atau pasien dengan kondisi yang buruk masuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo sebesar 9,01%, sedangkan Instalasi Gawat Darurat melayani pasien True Emergency pada tahun 2017 sebesar 98,64 %

b) Kondisi tersebut diatas dapat dimaklumi, karena RSUD Kabupaten Sidoarjo adalah salah satu dari 7 (tujuh) pusat rujukan regional di Jawa Timur. Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya yang berada di wilayah Bangil. Pasuruan, Mojosari dan Mojokerto akan merujuk pasien dengan tujuan utama RSUD Kabupaten Sidoarjo. Dan dalam banyak kasus pasien rujukan dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya tersebut dirujuk ke RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam kondisi yang sudah parah.

Upaya yang akan dilakukan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan antara lain :

- Penambahan sarana prasarana untuk peningkatan pelayanan, tahun 2017 pembangunan IGD 4 lantai, dan Gedung HD 2 lantai;
- Penambahan alat-alat kedokteran penunjang pelayanan kepada masayarakat, alat Kateterisasi Jantung, CT Scan 128 slices;
- Penambahan ruang high care unit di setiap ruang rawat inap;
- Pemenuhan sarana dan prasarana standard high care unit;
- Peningkatan kompetensi SDM Medis dan paramedis secara kontinyu dengan melakukan pelatihan-pelatihan dalam hal pemberian layanan terhadap pasien;
- Peningkatan peran Pengendalian dan Pencegahan Infeksi;
- Monitoring yang berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan (Panduan Pelayanan Klinik, Clinical Pathway, Daftar Obat Medik dan Audit Medik).

e. Persentase Pasien Keluar Hidup

Pasien Keluar Hidup merupakan indikator kinerja RSUD Kabupaten Sidoarjo hasil dari Reviu Renstra Tahun 2017. Indikator ini menggambarkan jumlah pasien keluar hidup yang di rawat inap pada RSUD Kabupaten Sidoarjo dalam 1 tahun, Indikator ini diperoleh dari membandingkan jumlah pasien keluar hidup dengan jumlah pasien masuk rawat inap. Tahun 2017 diperoleh capaian presentase pasien keluar hidup sebesar 93,50 % dari target yang ditetapkan sebesar 94%.

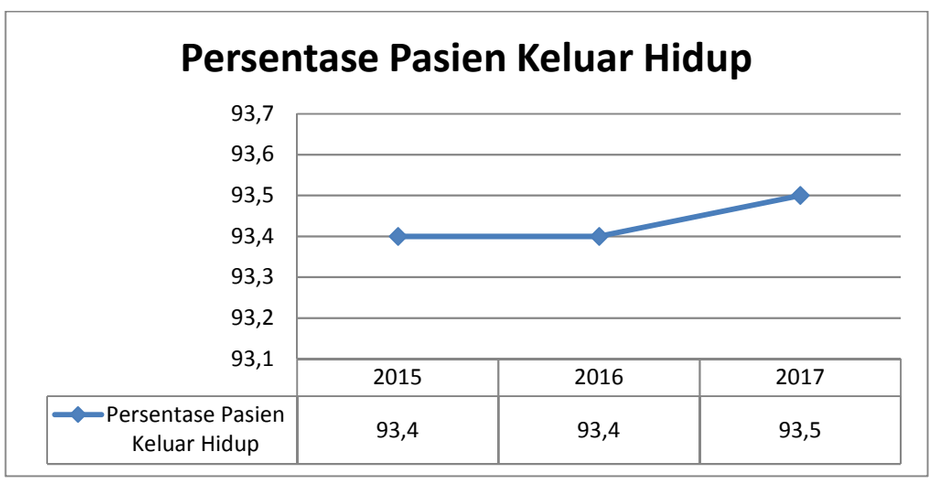

Sumber Data : RSUD Kab. Sidoarjo

Persentase Pasien Keluar Hidup di RSUD Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. Pada tahun 2016 persentase pasien keluar hidup sebesar 93,4% sedangkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 93,4%. Selama tiga tahun terakhir persentase pasien keluar hidup di RSUD Kabupaten Sidoarjo berkisar antara 93,4% s.d 94,5%. Pada tahun 2017 Persentase Pasien Keluar Hidup di RSUD Kabupaten Sidoarjo belum memenuhi target karena tingginya Angka *Net Death Rate* (NDR) di RSUD Kabupaten Sidoarjo.

f. Status akreditasi rumah sakit

Status Akreditasi Rumah Sakit adalah pengakuan yang diberikan kepada Rumah Sakit oleh Pemerintah melalui badan yang berwenang dalam hal ini Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) untuk memenuhi standar pelayanan dengan tingkat kelulusan yang telah ditentukan. Pada Tahun 2017 RSUD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Akreditasi yang kedua dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit
2014	Paripurna
2017	Paripurna

Dari data diatas menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan akreditasi yang pertama tahun 2014 dengan hasil paripurna dan akreditasi yang kedua pada tahun 2017 dengan hasil paripurna pula. Penilaian akreditasi berlaku selama 3 (tiga) tahun untuk kemudian dilakukan re akreditasi selanjutnya. Tingkat paripurna adalah tingkat kelulusan tertinggi yang dapat diraih oleh rumah sakit. Rumah Sakit dikatakan lulus akreditasi paripurna apabila memenuhi 15 (lima belas) standar akreditasi Rumah Sakit versi 2012 dengan nilai minimum 80%.

15 standar akreditasi rumah sakit versi 2012 meliputi :

1. Sasaran Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
2. Hak Pasien dan Keluarga (HPK);
3. Pendidikan Pasien dan Keluarga (PPK);
4. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP);
5. Millenium Development Goal’s (MDG’s);

6. Akses Pelayanan dan Kontinuitas pelayanan (APK);
7. Asesmen Pasien (AP);
8. Pelayanan Pasien (PP);
9. Pelayanan Anestesi dan Bedah (PAB);
10. Manajemen Penggunaan Obat (MPO);
11. Manajemen Komunikasi dan Informasi (MKI);
12. Kualifikasi dan Pendidikan Staff (KPS);
13. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI);
14. Tata Kelola, Kepemimpinan dan Pengarahan (TKP);
15. Manajemen Fasilitas dan Keselamatan (MFK).

Pada tahun 2017 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan akreditasi yang kedua dengan nilai 92,6% dari target Renstra sebesar ≥80%.

Upaya – upaya peningkatan status akreditasi baik dari aspek kualitas maupun pelayanan, antara lain :

1. Melakukan inovasi dan terobosan di bidang pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan;
2. Penguatan Kapasitas Kelembagaan;
3. Peningkatan SDM yang kompeten di bidangnya;
4. Peningkatan dan penambahan sarana prasarana kesehatan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.

g. Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi. RSUD Kabupaten Sidoarjo juga menjadi Rumah Sakit Pendidikan sejak tahun 2013 dan sudah melakukan akreditasi sebagai rumah sakit pendidikan sejak tahun 2013. Status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan yang telah dicapai sebagai berikut :

Tahun	Status Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan
2013	B (berlaku 3 tahun)
2016	A (berlaku 5 tahun)

Akreditasi Rumah Sakit Pendidikan pada RSUD Kabupaten Sidoarjo dilakukan terakhir pada tahun 2016 dengan hasil akreditasi A. Status Akreditasi A berlaku selama 5 tahun (2016 – 2021). Sedangkan status akreditasi Rumah Sakit Pendidikan A harus memenuhi standar sebagai berikut :

1. Standar Visi, Misi, Komitmen dan Persyaratan;
2. Standar Manajemen dan Administrasi;
3. Standar Sumber Daya Manusia untuk program pendidikan klinik;
4. Standar penunjang pendidikan;
5. Standar perancangan dan pelaksanaan program pendidikan klinis yang berkualitas.

Dengan nilai pencapaian Standar Rumah Sakit Pendidikan lebih dari 79% sampai dengan 100%. Pada tahun 2016 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 90% dengan target di Renstra sebesar 90%.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Program pembangunan untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Penyusunan dan pelaksanaan Perencanaan Teknis Tata Bangunan
2. Program Pendataan, Evaluasi, Pengawasan dan Penertiban Bangunan
3. Program Penyusunan Perencanaan Teknis, Pengendalian, Pemanfaatan dan Pengolahan Data Kebinamargaan
4. Program Pembangunan dan Peningkatan Infrastruktur Kebinamargaan
5. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Infrastruktur Kebinamargaan
6. Program Pengendalian Banjir
7. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Jaringan Irigasi
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
9. Program Perencanaan dan Pengendalian atas Perancangan Kota

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian***, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap**

Untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebinamargaan maka pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus menyediakan jalan dan jembatan bagi masyarakat. Panjang jalan kabupaten sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, menjadi sepanjang 1.009,68km :

Dari seluruh jalan yang ada tersebut kondisinya sebagai berikut :

No	Kondisi	2015	%	2016	%	2017	%
1	Baik	848,68	84,8	849,446	84,6	887,153	87,9
2	Sedang	104,24	10,4	107,5	10,7	80,581	8,0
3	Rusak	48,54	4,8	47,006	4,7	41,946	4,2
	Jumlah	1001,46	100	1003,95	100	1009,68	100

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Dari tabel di atas terlihat bahwa jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 967,734 km atau 87,66% dari target RPJMD.

Jalan kondisi mantap tahun 2017 sebesar 95,90% atau mencapai 109,40% dibanding dengan target RPJMD 2017 yang sebesar 87,66%. Jika dibandingkan dengan jalan kondisi mantap tahun 2016 sebesar 95,30%, terjadi peningkatan jalan kondisi mantap sebesar. 0,60%

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan panjang jalan dalam kondisi mantap, antara lain :

1. Kegiatan Pembangunan Jalan;
2. Kegiatan Peningkatan Jalan;
3. Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

Pada tahun 2017 telah dilakukan kegiatan Pembangunan/peningkatan serta Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dengan rincian sebagai berikut :

A. Pembangunan Jalan, diantaranya adalah :

1. Pembangunan Jl. Permisan - Tanjungsari (Ljt) Kec. Jabon
2. Pembangunan Jl. Tanjekwagir - Mojoruntut Kec. Krembung
3. Pembangunan Jl. Pejangkungan - Jatikalang (Ljt) Kec. Prambon
4. Pembangunan Jl. Kedungsugo - Kajartrengguli (Ljt) Kec. Prambon
5. Pembangunan Jl. Kedungsugo – Kedungkembar Kec. Prambon
6. Pembangunan Jl. Lingkar Barat (Ljt) Kec. Candi
7. Pembangunan Penahan Jl. Ds. Kragan Rt. 8 Rw 2 Kec. Gedangan
8. Pembangunan Penahan Jl. Ds. Kragan Rt. 3 Rw 1 Kec. Gedangan
9. Pembangunan Jl. Keret - Wonomlati (Ljt) Kec. Krembung
10. Pembangunan Jl. Dsn Parengan Desa Kraton Kec. Krian
11. Pembangunan Jl. Lingkar Timur (Ljt) Kec. Sidoarjo
12. Pembangunan Frontage Road Waru - Buduran (Ljt) Kec. Sidoarjo
13. Pembangunan Jl. Desa Bulang Kec. Prambon
14. Pembangunan Jl. Tambakkemerakan - Krian (Gresikan) Kec. Krian

B. Peningkatan Jalan, diantaranya pada lokasi sebagai berikut :

1. Peningkatan Jl. Barengkrajan - Ngelom (Ljt) Kec. Krian
2. Peningkatan Jl. Bulang - Prambon (Ljt) Kec. Prambon
3. Peningkatan Jl. Kedensari - Wunut Kec. Tanggulangin
4. Peningkatan Jl. Kedungrejo - Wadungasri (Ljt) Kec. Waru
5. Peningkatan Jl. Ngaban - Kedungbanteng Kec. Tanggulangin
6. Peningkatan Jl. Pamotan - Candipari Kec. Porong
7. Peningkatan Jl. Pilang - Tulangan (Ljt) Kec. Wonoayu
8. Peningkatan Jl. dan Jembatan Porong - Krembung (Ljt) Kec. Porong
9. Peningkatan Jalan Simpang 4 Kebonagung Kec. Sukodono

10. Peningkatan Jalan Tarik-Mliriprowo (Ljt) Kec. Tarik
11. Peningkatan Jalan Wage-Pepelegi (Ljt) kec. Taman
12. Peningkatan Jalan Sumokali-Durungbedug Kec. Candi
13. Peningkatan Jalan Ds. Tebel RT 05 RW 06 s/d RT 4 RW 7 Kec. Gedangan
14. Peningkatan Jalan, Saluran dan Trotoar Jalan Jaksa Agung Suprapto Kec. Sidoarjo
15. Peningkatan Jalan, Saluran dan Trotoar Jalan Bringinbendo-Sidodadi Kec. Taman
16. Peningkatan Jalan dan Saluran Sekardangan-Gebang Kec. Sidoarjo
17. Peningkatan Jalan dan Saluran Ds. Sambungrejo Kec. Sukodono
18. Peningkatan Jalan, Saluran dan Trotoar Jl. Bringinbendo - Sidodadi (Ljt) Kec. Taman
19. Peningkatan Jalan Barengkrajan - Ngelom (Ljt) tahap 2 Kec. Taman
20. Peningkatan Jalan Kebonagung - Kemasan (DAK) Kec. Sukodono
21. Peningkatan Jalan Beton Krembung - Kepadangan Kec. Krembung
22. Peningkatan Jalan Beton Prambon - Gedangrowo Kec. Prambon
23. Peningkatan Jalan. Ds. Sidomulyo Kec. Krian
24. Peningkatan Jalan Kartini Kec. Sidoarjo
25. Peningkatan Jalan Sultan Agung Kec. Sidoarjo
26. Peningkatan Jalan Ngampelsari-Balonggabus Kec. Candi
27. Peningkatan Jalan Dusun Mlaten Desa Mliriprowo Kec. Tarik
28. Peningkatan Jl. Kalanganyar - Kalanganyar Pantai, Kec. Sedati
29. Peningkatan Jalan Pulungan - Kalanganyar Pantai, Kec. Sedati
30. Peningkatan Jl. Desa Keret, Kec. Krembung
31. Peningkatan Jl. Sidorejo Kec. Krian

C. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan, diantaranya pada lokasi sebagai berikut:

1. Pemeliharaan berkala jalan Sidoarjo – Krian Kecamatan Krian
2. Pemeliharaan berkala jalan Krian – Balongbendo Kecamatan Krian
3. Pemeliharaan Jalan Desa Banjarsari
4. Pemeliharaan Jl. Prasung - Dukuhtengah, Kec. Buduran
5. Pemeliharaan Jl. Ganting - Wage, Kec. Gedangan
6. Pemeliharaan Jl. Sidorejo - Barengkrajan, Kec. Krian
7. Pemeliharaan Jl. Klagen - Tropodo, Kec. Taman
8. Pemeliharaan Jl. Wonocolo - Sepanjang, Kec. Taman

9. Pemeliharaan Jl. Banjarkemantren - Sidokepung, Kec. Buduran
10. Pemeliharaan Jl. Kalanganyar - Segorotambak, Kec. Sedati
11. Pemeliharaan Jl. Kwangsan - Gemurung, Kec. Sedati
12. Pemeliharaan Jl. Wadungasih - Prasung, Kec. Buduran
13. Pemeliharaan Jl. Jabaran - Watesari, Kec. Balongbendo
14. Pemeliharaan Jl. Singkalan - Kedungsukodani, Kec. Balongbendo
15. Pemeliharaan Jl. Jedongcangkring - Simpang, Kec. Prambon
16. Pemeliharaan Jl. Pulungan - Kwangsan, Kec. Sedati
17. Pemeliharaan Jl. Medaeng - Medaeng, Kec. Sedati
18. Pemeliharaan Jl. Krian - Stasiun PJKA (Desa Magersari), Kec. Krian
19. Pemeliharaan Jl. Gelam - Kedungkendo, Kec. Candi
20. Pemeliharaan Jl. Mojoruntut - Cangkring, Kec. Krembung
21. Pemeliharaan Jl. Jenggot - Kesambi, Kec. Krembung
22. Pemeliharaan Jl. Sidomulyo - Penambangan, Kec. Krian
23. Pemeliharaan Jl. Barengkrajan - Sidomulyo, Kec. Krian
24. Pemeliharaan Jl. Panjunan - Suko, Kec. Sukodono
25. Pemeliharaan Jl. Candi - Kedungkendo, Kec. Candi
26. Pemeliharaan Jl. Bligo - Wedoroklurak, Kec. Candi
27. Pemeliharaan Jl. Putat - Kalidawer, Kec. Tanggulangin
28. Pemeliharaan Jl. Lemujut - Keret, Kec. Krembung
29. Pemeliharaan Jl. Kedungsolo - Kandangan, Kec. Krembung
30. Pemeliharaan Jl. Kalitengah - Gempolsari, Kec. Tanggulangin
31. Pemeliharaan Jl. Modong - Grabagan, Kec. Tulangan
32. Pemeliharaan Jl. Kedungbanteng - Balongdowo, Kec. Tanggulangin
33. Pemeliharaan Jl. Bakalan Wringinpitu - Tarik, Kec. Tarik
34. Pemeliharaan Jl. Kalitengah - Kalidawir, Kec. Tanggulangin
35. Pemeliharaan Jl. Jimbaran - Kepunten, Kec. Tulangan
36. Pemeliharaan Jl. Kenongo - Kenongo, Kec. Tulangan
37. Pemeliharaan Jl. Sugiwaras - Tenggulunan, Kec. Candi
38. Pemeliharaan Jl. Randegan - Lajuk, Kec. Tanggulangin
39. Pemeliharaan Jl. Kupang - Kedungrejo, Kec. Jabon
40. Pemeliharaan Jl. Dukuhsari - Semambung, Kec. Jabon
41. Pemeliharaan Jl. Putat - Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin
42. Pemeliharaan Jl. Grabagan - Simoketawang, Kec. Tulangan
43. Pemeliharaan Jl. Jati Alun - alun - Kajeksan, Kec. Tulangan
44. Pemeliharaan Jl. Sudimoro - sudimoro, Kec. Tulangan
45. Pemeliharaan Jl. Pesawahan - Kedungboto, Kec. Porong

46. Pemeliharaan Jl. Ngaban - Kalitengah, Kec. Tanggulangin
47. Pemeliharaan Jl. Gempolsari - Gempolsari, Kec. Tanggulangin
48. Pemeliharaan Jl. Segodobancang - Temu, Kec. Tarik
49. Pemeliharaan Jl.Kedungpandan - Tambak, Kec. Jabon
50. Pemeliharaan Jl. Glagaharum - Permisan, Kec. Jabon
51. Pemeliharaan Jl. Kupang - Tambak Kalisogo, Kec. Jabon
52. Pemeliharaan Jl. Tarik - Kedungbocok, Kec. Tarik
53. Pemeliharaan Jl. Banjarasri - Glagaharum, Kec. Tanggulangin
54. Pemeliharaan Jl. Lajuk - Wangkal, Kec. Tanggulangin
55. Pemeliharaan Jl. Sawotratap - Wage, Kec. Gedangan
56. Pemeliharaan Jl. Jabaran - Gagang Kepuhsari, Kec. Balongbendo
57. Pemeliharaan Jl. Sugihwaras - Sumorame (Depan SMPN 3 Candi), Kec. Candi
58. Pemeliharaan Jl. Sidodadi - Sambibulu, Kec. Taman
59. Pemeliharaan Jl. Jati - Cemengkalang, Kec. Sidoarjo
60. Pemeliharaan Jl. Wonoayu - Candinegoro, Kec. Wonoayu
61. Pemeliharaan Jl. Jambangan - Sumokali, Kec. Candi
62. Pemeliharaan Jl. Pagerwojo/Baldes - Entalsewu, Kec. Buduran
63. Pemeliharaan Jl. Pagerwojo - Entalsewu, Kec. Buduran
64. Pemeliharaan Jl. Porong - Kedungcangkring, Kec. Porong
65. Pemeliharaan Jl. Kedungcangkring - Dukuhsari, Kec. Jabon
66. Pemeliharaan Jl. Seketi - Gagangkepuhsari, Kec. Balongbendo
67. Pemeliharaan Jl. Watugolong - Barengkrajan, Kec. Krian
68. Pemeliharaan Jl. Besuki - Kupang, Kec. Jabon
69. Pemeliharaan Jl. Pejangkungan - Bulang, Kec. Prambon
70. Pemeliharaan Jl. Juwetkenongo - Krembung, Kec. Porong
71. Pemeliharaan Jl. Wilayut - Pekarungan, Kec. Sukodono
72. Pemeliharaan Jl. Pekarungan - Terungwetan, Kec. Sukodono
73. Pemeliharaan Jl. Pucang - Blurukidul, Kec. Sidoarjo
74. Pemeliharaan Jl. Tanggul - Katerungan, Kec. Wonoayu
75. Pemeliharaan Jl. Kebonagung - Tambakrejo, Kec. Porong
76. Pemeliharaan Jl. Wonoayu - Mulyodadi, Kec. Wonoayu
77. Pemeliharaan Jl. Tambakkemerakan - Krian, Kec. Krian
78. Pemeliharaan Jl. Semambung - Simoketawang, Kec. Wonoayu
79. Pemeliharaan Jl. Sukodono - Plumbungan, Kec. Sukodono
80. Pemeliharaan Jl. Wonoayu - Jedongcangkring, Kec. Wonoayu
81. Pemeliharaan Jl. Krembung - Bulang, Kec. Krembung

82. Pemeliharaan Jl. Wonokasian - Sumberrejo, Kec. Wonoayu
83. Pemeliharaan Jl. Magersari - Pagerwojo, Kec. Sidoarjo
84. Pemeliharaan Jl. Dukuhtengah - Sawohan, Kec. Buduran
85. Pemeliharaan Jl. Jimbaran Wetan - Jimbaran Wetan, Kec. Wonoayu
86. Pemeliharaan Jl. Pangkemiri - Gagangpanjang, Kec. Tanggulangin
87. Pemeliharaan Jl. Kepadangan - Bulang, Kec. Tulangan
88. Pemeliharaan Jl. Urangagung - Kebonagung, Kec. Sidoarjo
89. Pemeliharaan Jl. Jumputrejo - Karangbong, Kec. Sukodono
90. Pemeliharaan Jl. Suko - Wage, Kec. Taman
91. Pemeliharaan Jl. Durungbedug - Modong, Kec. Candi
92. Pemeliharaan Jl. Lebo - Durungbedug, Kec. Candi
93. Pemeliharaan Jl. Kandangan - Kepadangan, Kec. Tulangan
94. Pemeliharaan Jl. Kludan - Tulangan, Kec. Tanggulangin
95. Pemeliharaan Jl. Tanggulangin - Kludan, Kec. Tanggulangin
96. Pemeliharaan Jl. Pilang - Tulangan, Kec. Tulangan
97. Pemeliharaan Jl. Tulangan - Kepadangan, Kec. Tulangan
98. Pemeliharaan Jl. Buduran - Sidokerto, Kec. Buduran
99. Pemeliharaan Jl. Kepuhkiriman - Brebek, Kec. Waru
100. Pemeliharaan Jl. Kureksari - Kepuhkiriman, Kec. Waru
101. Pemeliharaan Jl. Untung Suropati dan Jl. Trunojoyo (406K dan 407 K)
102. Pemeliharaan Jl. Kombespol M. Duryat (411 k)
103. Pemeliharaan Jl. Pasar Ikan (412 k)
104. Pemeliharaan Jl. Samanhudi
105. Pemeliharaan Jl. Erlangga (421 k)
106. Pemeliharaan Jl. KH. Mukmin (422 k)
107. Pemeliharaan Jl. Desa Sepande
108. Pemeliharaan Jl. Lemahputro - Sumokali (324)
109. Pemeliharaan Jl. Pagerwojo - Pucang (007)
110. Pemeliharaan Jl. Perkantoran, Kec. Sidoarjo
111. Pemeliharaan Jl. Sidokepung - Jumputrejo, Kec. Buduran
112. Pemeliharaan Jl. Ploso - Wage, Kec. Krembung
113. Pemeliharaan Jl. Cemengkalang - Wonokasian, Kec. Sidoarjo
114. Pemeliharaan Jl. Sepande - Sumokali, Kec. Candi
115. Pemeliharaan Jl. Kalisampurno - Kedensari, Kec. Tanggulangin
116. Pemeliharaan Jl. Ketegan - Kedensari, Kec. Tanggulangin
117. Pemeliharaan Jl. Ketegan - Gagangpanjang, Kec. Tanggulangin
118. Pemeliharaan Jl. Jedongcangkring - Kedungkembar, Kec. Prambon

119. Pemeliharaan Jl. Juwetkenongo - Kesambi, Kec. Porong
120. Pemeliharaan Jl. Juwetkenongo - Kesambi, Kec. Porong
121. Pemeliharaan Jl. Tambakrejo - Tanjegwagir, Kec. Krembung
122. Pemeliharaan Jl. Kedungrawan - Wangkal, Kec. Krembung
123. Pemeliharaan Jl. Keret - Janti, Kec. Krembung
124. Pemeliharaan Jl. Porong - Juwetkenongo, Kec. Porong
125. Pemeliharaan Jl. Krembung - Mojoruntut, Kec. Krembung
126. Pemeliharaan Jl. Mliriprowo - Mindugading, Kec. Tarik
127. Pemeliharaan Jl. Gampingrowo - Kedungbocok, Kec. Tarik
128. Pemeliharaan Jl. Gampingrowo - Sebani, Kec. Tarik
129. Pemeliharaan Jl. Wonoplintahan - Kedungwonokerto, Kec. Prambon
130. Pemeliharaan Jl. Tarik - Banjarwungu, Kec. Tarik
131. Pemeliharaan Jl. Kedinding - Gagangkepuhsari, Kec. Tarik
132. Pemeliharaan Jl. Wonomlati - Kebaron, Kec. Krembung
133. Pemeliharaan Jl. Trompoasri - Kedungrejo, Kec. Jabon
134. Pemeliharaan Jl. Tarik - Mliriprowo, Kec. Tarik
135. Pemeliharaan Jl. Klantingsari - Prambon, Kec. Tarik
136. Pemeliharaan Jl. Bakungtemenggungan - Sumokembangsri, Kec. Balongbendo
137. Pemeliharaan Jl. Popoh - Popoh, Kec. Wonoayu
138. Pemeliharaan Jl. Jedongcangkring - Jati Alun - alun, Kec. Prambon
139. Pemeliharaan Jl. Mergosari - Mergobener, Kec. Tarik
140. Pemeliharaan Jl. Pegerngumbuk - Pagerngumbuk, Kec. Wonoayu
141. Pemeliharaan Jl. Dukuhsari - Kupang, Kec. Jabon
142. Pemeliharaan Jl. Ploso - Wonokasian, Kec. Wonoayu
143. Pemeliharaan Jl. Kantor Kodim 0816, Kec. Sidoarjo
144. Pemeliharaan Jl. Sentul - Plumbon, Kec. Tanggulangin
145. Pemeliharaan Jl. Gempolsari - Sentul, Kec. Tanggulangin
146. Pemeliharaan Jl. Gempolsampurno - Kedungsolo, Kec. Porong
147. Pemeliharaan Jl. Simogirang - Tropodo, Kec. Prambon
148. Pemeliharaan Jl. Balongbendo - Kraton, Kec. Balongbendo
149. Pemeliharaan Jl. Jemirahan - Trompoasri, Kec. Jabon
150. Pemeliharaan Jl. Sidodadi - Jati, Kec. Candi
151. Pemeliharaan Jl. Ngaban - Kedungbanteng, Kec. Tanggulangin
152. Pemeliharaan Jl. Karangpuri - Jogosatru, Kec. Wonoayu
153. Pemeliharaan Jl. Plaosan - Mulyodadi, Kec. Wonoayu
154. Pemeliharaan Jl. Kedungbanteng - Banjarpanji, Kec. Tanggulangin

155. Pemeliharaan Jl. Wonomlati - Balonggarut, Kec. Krembung
156. Pemaliharaan Jl. Simoangin - angin - Pagerngumbuk, Kec. Wonoayu
157. Pemeliharaan Jl. Simpang - Bulang, Kec. Prambon
158. Pemeliharaan Jl. Durungbedug - Sidodadi, Kec. Candi
159. Pemeliharaan Jl. Gelang - Kenongo, Kec. Tulangan
160. Pemeliharaan Jl. Kenongo - Kebaron, Kec. Tulangan
161. Pemeliharaan Jl. Janti - Kebaron, Kec. Tulangan
162. Pemeliharaan Jl. Kedinding - Kalimati, Kec. Tarik
163. Pemeliharaan Jl. Kedondong - Tulangan, Kec. Tulangan
164. Pemeliharaan Jl. Pilang - Sawocangkring, Kec. Wonoayu
165. Pemeliharaan Jl. Prambon - Tarik, Kec. Prambon
166. Pemeliharaan Jl. Sawocangkring - Sawocangkring, Kec. Wonoayu
167. Pemeliharaan Jl. Wonokasian - Sawocangkring, Kec. Wonoayu
168. Pemeliharaan Jl. Kepadangan, Kec. Tulangan
169. Pemeliharaan Jl. Tulangan - Kepatihan, Kec. Tulangan
170. Pemeliharaan Jl. Ploso - ploso, Kec. Wonoayu
171. Pemeliharaan Jl. Ketimang - Wonokasian, Kec. Wonoayu
172. Pemeliharaan Jl. Becirongengor - Sawocangkring, Kec. Wonoayu
173. Pemeliharaan Jl. Gampang - Kedungkembar, Kec. Prambon
174. Pemeliharaan Jl. Dsn. Pejagalan - Dsn. Simo Desa Simoangin - angin, Kec. Wonoayu
175. Pemeliharaan Jl. Simoketawang - Simogirang, Kec. Wonoayu
176. Pemeliharaan Jl. Kepatihan - Lajuk, Kec. Tulangan
177. Pemeliharaan Jl. Wonokasian - Wilayut, Kec. Wonoayu
178. Pemeliharaan Jl. Kedungwonokerto - Kendalsewu, Kec. Tarik
179. Pemeliharaan Jl. Watutulis - Simogirang, Kec. Prambon
180. Pemeliharaan Jl. Kepatihan - Gagangpanjang, Kec. Tulangan
181. Pemeliharaan Jl. Lambangan - Karangpuri, Kec. Wonoayu
182. Pemeliharaan Jl. Kemasan - Terungwetan, Kec. Krian
183. Pemeliharaan Jl. Buduran - Sidokepung, Kec. Buduran
184. Pemeliharaan Jl. Sidodadi - Kramatjegu, Kec. Taman
185. Pemeliharaan Jl. Lemahputro - Banjarbendo, Kec. Sidoarjo
186. Pemeliharaan Jl. Buduran - Sidomulyo, Kec. Buduran
187. Pemeliharaan Jl. Sruni - Keboanom, Kec. Gedangan
188. Pemeliharaan Jl. Sepande - Sepande, Kec. Sidoarjo
189. Pemeliharaan Jl. Sidodadi - Lebo, Kec. Candi
190. Pemeliharaan Jl. Gamping - Wonokalang, Kec. Krian

191. Pemeliharaan Jl. Cemandi - Cemandi, Kec. Sedati
192. Pemeliharaan Jl. Wage - Wage, Kec. Taman
193. Pemeliharaan Jl. Singkalan - Singkalan, Kec. Balongbendo
194. Pemeliharaan Jl. Kepunten - Kajeksan, Kec. Tulangan
195. Pemeliharaan Jl. Sarirogo - Anggaswangi, Kec. Sukodono
196. Pemeliharaan Jl. Betro - Damarsi, Kec. Sedati
197. Pemeliharaan Jl. Candi - Kebonsari, Kec. Candi
198. Pemeliharaan Jl. Jati - Banjarbendo, Kec. Sidoarjo
199. Pemeliharaan Jl. Kebonagung - Ganting, Kec. Gedangan
200. Pemeliharaan Jl. Simoketawang - Simoangin - angin, Kec. Wonoayu
201. Pemeliharaan Jl. Penambangan - Balongbendo, Kec. Balongbendo
202. Pemeliharaan Jl. Ngingas - Tropodo, Kec. Waru
203. Pemeliharaan Jl. Bringinbendo - Sidodadi, Kec. Taman
204. Pemeliharaan Jl. Kalisampurno - Wunut, Kec. Tanggulangin
205. Pemeliharaan Jl. Kendalpecabean - Kedungbanteng, Kec. Candi
206. Pemeliharaan Jl. Siwalanpanji - Kemiri, Kec. Sidoarjo
207. Pemeliharaan Jl. Trosobo - Pertapan Maduretno, Kec. Taman
208. Pemeliharaan Jl. Buncitan - Juanda, Kec. Sedati
209. Pemeliharaan Jl. Tebel - Gemurung, Kec. Gedangan
210. Pemeliharaan Jl. Wadungasri (Pondok Candra) - Tambaksumur, Kec. Waru
211. Pemeliharaan Jl. Wadungasri - Tambaksumur, Kec. Waru
212. Pemeliharaan Jl. Wadungasri - Tambaksawah, Kec. Waru
213. Pemeliharaan Jl. Jumputrejo - Suruh, Kec. Sukodono
214. Pemeliharaan Jl. Desa Durungbedug, Kec. Candi
215. Pemeliharaan Jl. Bringinbendo - Tanjungsari, Kec. Taman
216. Pemeliharaan Jl. Gelam RT. 01 Gang Rahayu, Kec. Candi
217. Pemeliharaan Jl. Sruni - Gemurung, Kec. Gedangan
218. Pemeliharaan Jl. Suko - Lebo, Kec. Sidoarjo
219. Pemeliharaan Jl. Dukuhsari - Panggreh, Kec. Jabon
220. PemeliharaanJl. Dukuhsari - Singo Loyo, Kec. Jabon
221. Pemeliharaan Jl. Desa Panggreh, Kec. Jabon
222. Pemeliharaan Jl. Ds. Masangan Wetan - Suko, Kec. Sukodono
223. Pemeliharaan Jl. Dusun Kedungnolo, Kec. Krembung
224. Pemeliharaan Jl. Tanjekwagir - Tanjekwagir, Kec. Krembung
225. Pemeliharaan Jl. Desa Sidokare, Kec. Sidoarjo
226. Pemeliharaan Jl. Dusun Kebonagung Desa Kebonagung, Kec. Porong

227. Pemeliharaan Jl. Rejeni - Rejeni
228. Pemeliharaan Jl. Rejeni - Gading, Kec. Krembung
229. Pemeliharaan Jl. Akses Rumah Tahanan Medaeng, kec. Waru
230. Pemeliharaan Jl. Gelam Gang Sekolahan, Kec. Candi
231. Pemeliharaan Jl. Gelam Gang Kelurahan, Kec. Candi
232. Pemeliharaan Jl. Dusun Balongsari Desa Kebonagung, Kec. Porong
233. Pemeliharaan Jl. Kedungrejo - Kedungpandan, Kec. Jabon
234. Pemeliharaan Jl. Desa Candipari, Kec. Porong
235. Pemeliharaan Jl. Desa Pagerwojo, Kec. Buduran
236. Pemeliharaan Jl. Desa Sumorame, Kec. Candi
237. Pemeliharaan Jl. Pamotan - Candipari, Kec. Porong
238. Pemeliharaan Jl. Sumber Rejo - Urangagung, Kec. Wonoayu
239. Pemeliharaan Jl. Pamotan - Lajuk, Kec. Porong
240. Pemeliharaan Jl. Pademonegoro - Plumbungan, Kec. Sukodono
241. Pemeliharaan Jl. Desa Wunut Selatan, Kec. Porong
242. Pemeliharaan Jl. Sentul - Tuyono, Kec. Tanggulangin
243. Pemeliharaan Jl. Kludan - Kludan, Kec. Tanggulangin
244. Pemeliharaan Jl. Desa Kalidawir, Kec. Tanggulangin
245. Pemeliharaan Jl. Banjarpanji - Bangoan, Kec. Tanggulangin
246. Pemeliharaan Jl. Buncitan - Gisikcemandi, Kec. Sedati
247. Pemeliharaan Jl. Cemengkalang - Cemengkalang, Kec. Sidoarjo
248. Pemeliharaan Jl. Pabean - Ngingas, Kec. Waru
249. Pemeliharaan Jl. Durungbedug - Sumokali, Kec. Candi
250. Pemeliharaan Jl. Lambangan - Lambangan, Kec. Wonoayu
251. Pemeliharaan Jl. Bangsri - Sambibulu, Kec. Taman
252. Pemeliharaan Jl. Perum Bumi Cabean Asri, Kec. Candi
253. Pemeliharaan Jl. Frontage Road Desa Kemantren, Kec. Buduran
254. Pemeliharaan Jl. Larangan - Suko, Kec. Candi
255. Pemeliharaan Jl. Kalitengah - Kalitengah, Kec. Tanggulangin
256. Pemeliharaan Jl. Jedongcangkring - Wonoplintahan, Kec. Prambon
257. Pemeliharaan Jl. Desa Sedatiagung RW. 04, Kec. Sedati
258. Pemeliharaan Jl. Semambung - Sedatigede, Kec. Sedati
259. Pemeliharaan Jl. Kemuning - Mindugading, Kec. Tarik
260. Pemeliharaan Jl. Desa Sekardangan, Kec. Sidoarjo
261. Pemeliharaan Jl. Wonocolo - Sepanjang (Pereng), Kec. Taman
262. Pemeliharaan Jl. Glagaharum - Gempolsari, Kec. Porong

Dalam hal penanganan jembatan jumlah total bangunan jembatan sampai dengan tahun 2017 sebanyak 372 Jembatan yang terbangun pada daerah yang secara teknis memerlukan pembangunan jembatan.

Dari seluruh jembatan yang ada tersebut kondisi yang yang ada sebagai berikut:

NO	KONDISI JEMBATAN	2015	2016	2017	%
1	Jembatan dengan kondisi baik	366	367	370	94.87
2	Jembatan dengan kondisi sedang	8	8	2	0,51
3	Jembatan dengan kondisi rusak	4	5	18	4,62
4	Jumlah jembatan terbangun	**378**	**380**	**390**	**100**

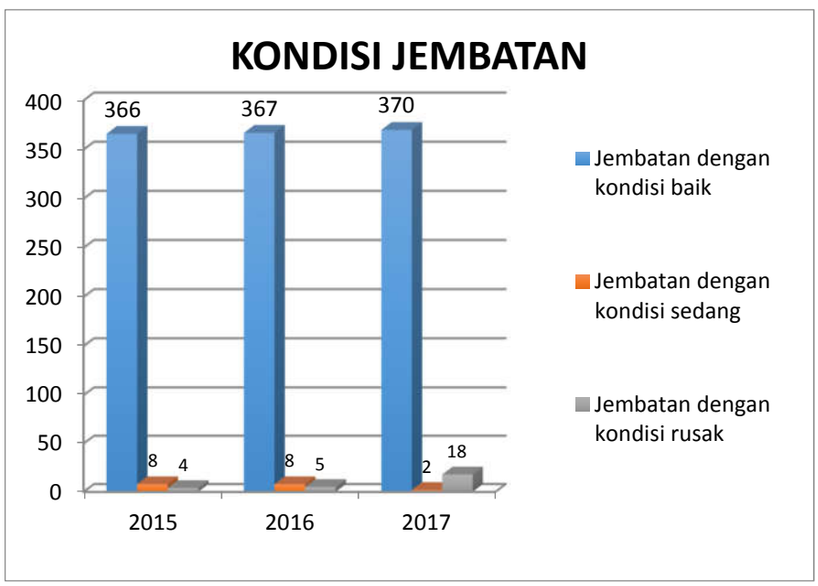

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Dari tabel di atas terlihat bahwa jembatan dalam kondisi baik di tahun 2017 sebanyak 370 jembatan, jika dibandingkan dengan jembatan dalam kondisi baik di tahun 2016 sebanyak 367, sehingga terjadi peningkatan jembatan sebanyak 3 jembatan di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2017 terdapat kegiatan peningkatan jembatan diantaranya :

1. Pembangunan Jembatan Desa Kletek Kec. Taman
2. Pembangunan Jembatan Kelurahan Taman Kec. Taman
3. Pembangunan Jembatan Desa Kloposepuluh Kec. Sukodono
4. Pembangunan Jembatan Sarirogo Kec. Sukodono

Sedangkan rehabilitasi/pemeliharaan yang dilakukan terhadap jembatan diantaranya :

1. Rehabilitasi Deuker Plat Desa Janti Kec. Tarik
2. Rehabilitasi Deuker Plat Desa Gampang Kec. Prambon
3. Rehabilitasi Deuker Plat Desa Ploso Kec. Krembung
4. Rehabilitasi Deuker Plat Desa Tambak Kalisogo Kec. Jabon
5. Rehabilitasi Deuker Pat Desa Kepatihan Kec. Tulangan dan Rehabilitasi Jembatan Desa Modong Kec. Tulangan
6. Rehabilitasi Deuker Plat Ds. Kemiri Kec. Buduran, Rehabilitasi Jembatan Desa Siwalanpanji Kec. Buduran, dan Rehabilitasi Jembatan Desa Bluru Kec. Sidoarjo.
7. Rehabilitasi Duiker Plat Desa Prasung Kec. Buduran
8. Pemeliharaan Duiker Plat Desa Wage Kec. Taman
9. Rehabilitasi Duikerplat Ds. Jumputrejo Kec. Tarik
10. Rehabilitasi Duikerplat Ds. Mindugading Kec.Sukodono
11. Rehabilitasi Deuker Plat Desa Kedungsugo Kec.Prambon

2. Persentase Cakupan Sawah yang dapat dialiri irigasi

Luas baku sawah Kabupaten Sidoarjo yang merupakan Daerah irigasi (DI) Delta Brantas yang pada tahun 2017 seluas 21.842 Ha, dimana pada tahun 2017 kebutuhan air irigasi sebesar 16.777 liter/detik sesuai Rencana Tata Tanam Global (RTTG) Tahun 2017.

Adapun ketersediaan air irigasi untuk wilayah Daerah Irigasi (DI) Delta Brantas sebesar 15.185 liter/detik berdasarkan Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) yang dikeluarkan oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) wilayah Sungai Brantas.

Cakupan layanan irigasi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Cakupan Layanan irigasi Tahun 2017

	Target 2016	Realisasi 2016	Target 2017	Realisasi 2017
Ketersediaan (liter/detik)	19.334	20.235,56	18.934	15.185
Kebutuhan (liter/detik)	21.342	23.262,10	20.842	16.777
Prosentase (%)	**90,59%**	**86,99%**	**90,85%**	**90,51%**

Layanan irigasi dari target 2017 sebesar 90,85% terealisasi sebesar 90,51% mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 dari target 90,59%

dengan realisasi sebesar 86,99%. Realisasi dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan 3,52%.

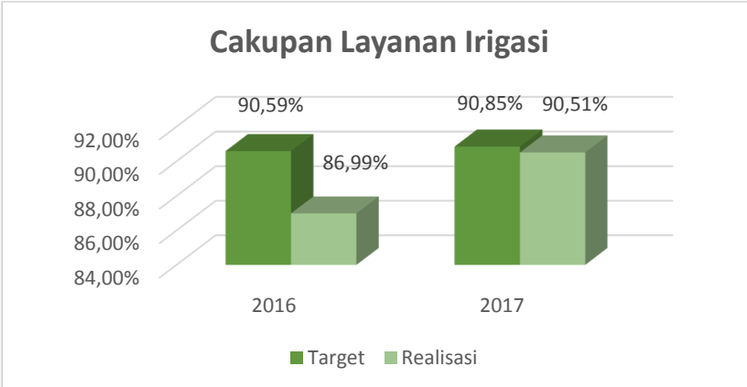

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Realisasi cakupan layanan irigasi sebesar 90,51% ini dapat diatasi melalui :

1. Pemberian air yang dilakukan secara terus menerus maupun dengan pola giliran sesuai ketersediaan debit yang ada.
2. Pemenuhan air irigasi dari dam/ bendung suplisi yang berada di afvoer maupun bantuan pompa air
   sehingga kebutuhan air dapat dicukupi

3. Persentase penurunan Luas Area Banjir

Untuk mengendalikan genangan / banjir di Kabupaten Sidoarjo yang merupakan daerah delta telah dilakukan pengendalian/ penanganan secara koordinatif antar dinas terkait.

Upaya yang telah dilakukan antara lain :

1. Operasional dan Pemeliharaan pintu – pintu air pada Dam/Bendung
2. Normalisasi saluran dan afvoer
3. Ketepatan dalam manajemen pengelolaan air
4. Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase di lingkungan permukiman
5. Operasional rumah pompa / busem

Pada tahun 2017 Luas daerah genangan di *daerah pertanian* di Kabupaten Sidoarjo seluas 490 Ha, mengalami penurunan seluas 19 Ha apabila dibandingkan dengan daerah genangan tahun 2016 yang seluas 509 Ha. Serta untuk daerah pemukiman juga mengalami penurunan seluas 8 Ha yang semula di tahun 2016 seluas 90 Ha menjadi seluas 82 Ha di tahun 2017.

Rincian lebih lanjut lokasi genangan yang terjadi sampai dengan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Lokasi Genangan

	Lokasi	2015 (Ha)	2016 (Ha)	2017 (Ha)
1	Pertanian	515	509	490
2	Permukiman	467	90	82
	Jumlah	**982**	**599**	**572**

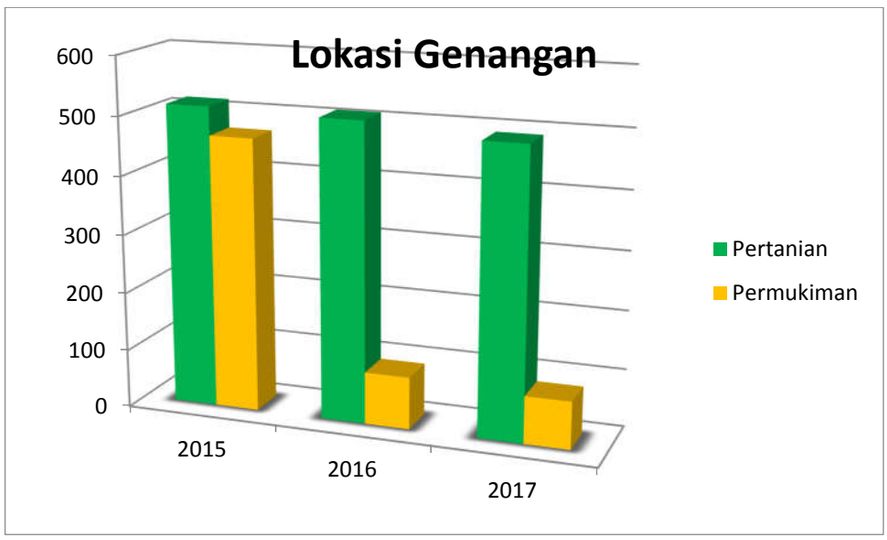

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Penurunan luas genangan baik di pertanian dan pemukiman juga dikarenakan koordinasi antar *stakeholder.* Selain itu upaya penurunan genangan diantaranya adalah adanya peran serta pengembang untuk menyediakan lahan resapan/buzem serta peran masyarakat tidak membuang sampah di saluran, sehingga air yang tergenang dapat mengalir pada saluran yang tersedia.

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanggulangan banjir Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan melaksanakan program Sidoarjo Peduli Sungai (SPS). Tahun 2017 telah dilaksanakan Launching SPS di Kampung Umaha Kecamatan Taman dan dilaksanakan Roadshow SPS di 8 (delapan) Kecamatan, diantaranya : Kecamatan Gedangan, Kecamatan Waru, Kecamatan Sedati, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Taman, Kecamatan Candi, Kecamatan Buduran.

Pada setiap Kecamatan lokasi Roadshow SPS dibuatkan Pilot Project sungai yang dipasang jaring sampah pada setiap batas desa, setelah itu akan dilaksanakan normalisasi oleh Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo. Setiap tahun program dan kegiatan SPS akan terus dilaksanakan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan sungai.

4. **Kesesuaian kegiatan pembangunan sektoral terhadap arahan pemanfaatan ruang (RTRW dan RDTRK)**

Kegiatan penataan ruang dilakukan untuk dapat mewujudkan efisiensi pemanfaatan ruang sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat maupun keserasian/keselarasan antara pemanfaatan ruang dengan daya dukung lingkungan, fungsi lingkungan melalui struktur ruang dan pola ruang yang telah direncanakan di dalam RTRW dan RDTRK serta peraturan zonasinya. Hal ini dilakukan untuk mencapai kenyamanan dan ketertiban pada wilayah ruang tertata lebih baik sesuai dengan zonasinya.

Upaya penanganan kesesuaian pemanfaatan penataan ruang ini ditempuh melalui kebijakan – kebijakan diantaranya :

1. Monev pelanggaran pemanfaatan ruang
2. Mereview Perbup IMB
3. Membuat Perda Menara, Perbup Menara
4. Mereview Perbup PSU Perumahan
5. Mereview Perbup Riil Tapak
6. Penerbitan Rekomendasi Teknis SKRK / Surat Keterangan Rencana Kota

Untuk mendukung 4 (empat) indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu:

1. **Luas Irigasi dalam Kondisi Baik**

Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Sidoarjo hanya ada 1, yakni DI Delta Brantas yang meliputi 2 Saluran Primer, yaitu Saluran Primer Porong Kanal sepanjang 35.581 m dan Saluran Primer Mangetan Kanal sepanjang 59.859 m, serta 46 Saluran Sekunder sepanjang 287.343 m

sehingga total Saluran irigasi di wilayah Kabupaten Sidoarjo sepanjang 381.096 m.

Adapun luas saluran irigasi adalah sebagai sebagai berikut:

Perkembangan Kondisi Saluran Irigasi dari Tahun 2015 – 2017 :

No	Kondisi	2015		2016		2017	
		(%)	Panjang (m)	(%)	Panjang (m)	(%)	Panjang (m)
1	Baik	68	259.145,28	69	262.956,24	70	266.767,20
2	Sedang	15	57.164,4	14,5	55.258,92	14	53.353,44
3	Rusak	17	64.786,32	16,5	62.880,84	16	60.975,36
	Jumlah	100	381.096	100	381.096	100	381.096

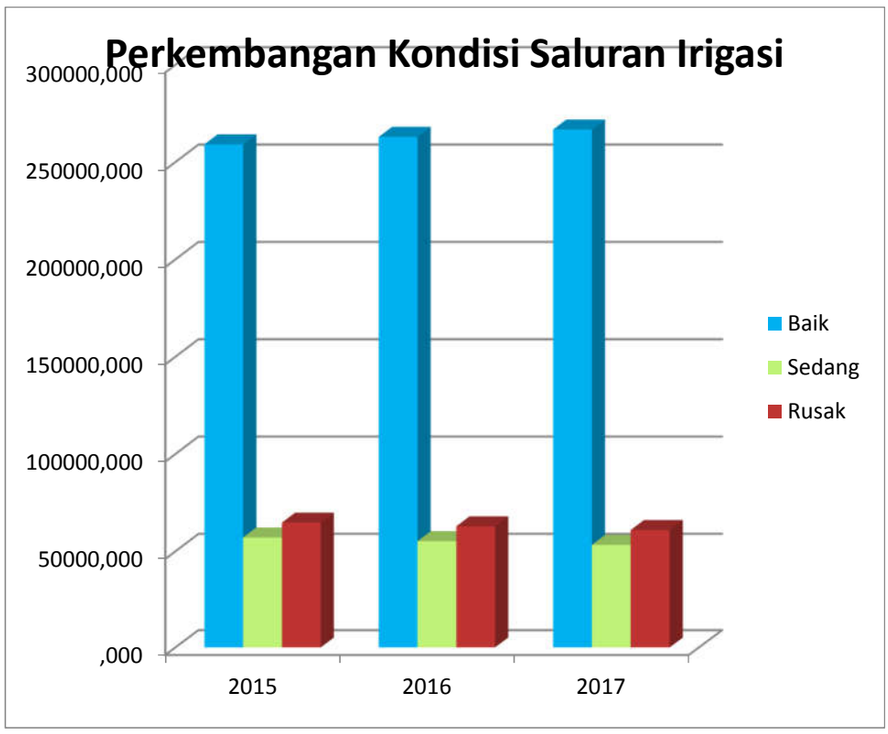

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Dari tabel di atas diketahui bahwa dari tahun 2016 ke 2017 saluran dengan kondisi baik mengalami kenaikan sepanjang 3.810,96 m.

Upaya memperbaiki saluran irigasi yang rusak dilakukan seperti berikut:

1. Pembangunan dan Peningkatan Saluran Irigasi, berupa pembuatan plengsengan dan peninggian tanggul.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Saluran Irigasi berupa pengerukan dan pengambilan sampah yang ada di sungai.

2. Dokumen tata ruang yang disusun

Pada tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo telah mengajukan persetujuan substansi standarisasi RDTRK untuk 9 Kecamatan, yaitu :

(a) RDTRK Kecamatan Sidoarjo.
(b) RDTRK Kecamatan Buduran.
(c) RDTRK Kecamatan Candi.
(d) RDTRK Kecamatan Prambon.
(e) RDTRK Kecamatan Balongbendo.
(f) RDTRK Kecamatan Wonoayu.
(g) RDTRK Kecamatan Tarik.
(h) RDTRK Kecamatan Krian.
(i) RDTRK Kecamatan Tanggulangin.

Selain itu Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan penyusunan beberapa dokumen untuk penataan ruang, antara lain :

- Dokumen RDTR untuk 18 Kecamatan, diantaranya :
  1. RDTRK Kecamatan Sidoarjo.
  2. RDTRK Kecamatan Buduran.
  3. RDTRK Kecamatan Candi.
  4. RDTRK Kecamatan Prambon.
  5. RDTRK Kecamatan Balongbendo.
  6. RDTRK Kecamatan Wonoayu.
  7. RDTRK Kecamatan Tarik.
  8. RDTRK Kecamatan Krian.
  9. RDTRK Kecamatan Tanggulangin.
  10. RDTRK Kecamatan Gedangan.
  11. RDTRK Kecamatan Jabon.
  12. RDTRK Kecamatan Krembung.
  13. RDTRK Kecamatan Porong.
  14. RDTRK Kecamatan Sedati.
  15. RDTRK Kecamatan Sukodono.
  16. RDTRK Kecamatan Taman.
  17. RDTRK Kecamatan Tulangan
  18. RDTRK Kecamatan Waru.

Pelaksanaan program perencanaan tata ruang selain ditujukan untuk pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan kebijakan penataan ruang yang mengarahkan kepada rencana pola ruang dan rencana struktur ruang yang diarahkan sebagai skenario pembangunan Kabupaten Sidoarjo (RTRW,RDTRK dan Peraturan Zonasi), juga ditujukan sebagai acuan dalam pengendalian tata bangunan dan tata lingkungan di Wilayah Kabupaten Sidoarjo (RTBL) sebagai arahan dalam pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.

Selama tahun 2017 dihasilkan 2 dokumen RTBL yaitu :

1) RTBL Lanjutan Aloha – Waru
2) RTBL Lanjutan Lingkar Barat

3. Bangunan ber-IMB

Adapun Untuk perkembangan jumlah bangunan ber IMB pada tahun 2017 ditunjukkan pada grafik dibawah ini.

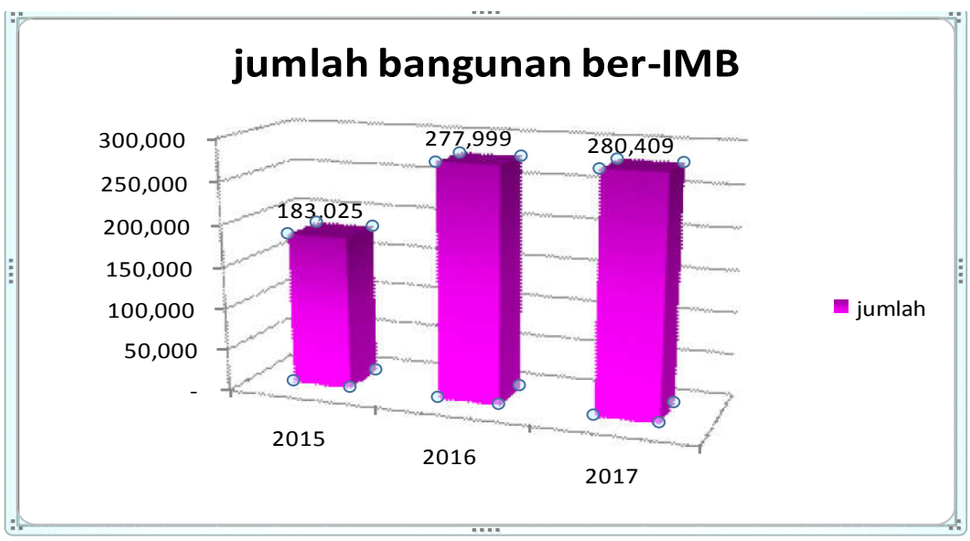

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sidoarjo

Dari grafik terlihat bahwa jumlah bangunan ber IMB dari tahun ke tahun semakin meningkat. Di tahun 2017 bangunan ber IMB sebesar 280.409 lebih banyak apabila dibandingkan dengan bangunan ber IMB di tahun 2016 sebanyak 277.999, dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2.410 bangunan yang ber IMB. Kenaikan bangunan ber IMB disebabkan:

1. Kesadaran masyarakat akan perijinan bangunan
2. Adanya ketentuan yang mengharuskan bangunan ber-IMB untuk pengajuan ke Bank
3. Kemudahan pelayanan perijinan berbasis IT

Beberapa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan jumlah bangunan ber IMB adalah :

- Masih banyak pengajuan IMB yang tidak sesuai kondisi di lapangan
- Perkembangan pertumbuhan bangunan tidak sejalan

4. Perkembangan pembangunan Gedung Serba Guna (GSG)

Kabupaten Sidoarjo mempunyai rencana untuk membangun Gedung Serba Guna (GSG) yang diharapkan pemanfaatannya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat Sidoarjo akan gedung pertemuan yang representative.

Gedung Serba Guna yang telah dibangun adalah Sidoarjo Community Center / SCC yang berfungsi sebagai :

1. Ruang pertemuan berkapasitas ± 2.000 orang dengan penataan ruangan yang eksklusif, tata lampu, tata suara, design ruangan yang mewah
2. Ruang serba guna yang rencananya akan difungsikan sebagai mall pelayanan umum, untuk mempermudah masyarakat Sidoarjo dalam memperoleh layanan umum yang lengkap, mudah dan terintegrasi di satu tempat.

Dalam rangka mendayagunakan hasil pembangunan Gedung Serba Guna yang meskipun belum selesai namun dalam peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 telah digunakan untuk kegiatan Resepsi Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo. Gedung serba guna merupakan salah satu program prioritas dari Bupati Sidoarjo

5. Perkembangan pembangunan Frontage Road (Waru – Buduran)

Kabupaten Sidoarjo mempunyai rencana untuk membangun Frontage Road yang diharapkan pemanfaatannya untuk membantu mengurangi kepadatan lalu lintas pada jalur arteri primer Surabaya – Sidoarjo.

Hal – hal yang telah dikembangkan sampai dengan tahun 2017 antara lain :

- Pembebasan lahan di Desa Sawotratap Kec. Gedangan.
- Melaksanakan pembaharuan penetapan lokasi untuk pembangunan jalan pendamping (frontage road) Waru – Buduran.

- Melakukan koordinasi dengan pihak PT.KAI berkaitan dengan permasalahan tanah PT.KAI dengan tanah milik perusahaan maupun dengan tanah milik warga.
- Pembangunan jalan / peningkatan jalan yang telah dilaksanakan sepanjang 2,500 Km semua diatas tanah hibah dari 11 Perusahaan.
  - Tanah milik TNI AL sudah dilaksanakan proses administrasi hibah namun proses hibah saat ini sampai di Markas Besar TNI di Jakarta.

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Program pembangunan untuk urusan perumahan yang dilaksanakan pada tahun 2017 antara lain :

1. Program Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Lingkungan Permukiman
2. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
3. Program pencegahan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan
4. Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran "***Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian***", dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan rumah layak huni

Jumlah rumah tidak layak huni di tahun 2017 sebanyak 434.843 rumah tinggal.

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2017 sebanyak 51 rumah, melalui bedah rumah dengan pemberian subsidi sebesar Rp. 10.000.000/ KK, selain itu salah satu usaha pemenuhan kebutuhan perumahan melalui pembangunan Rusunawa, telah dibangun sebanyak 5 gedung rusunawa di Kabupaten Sidoarjo,

dimana 5 rusunawa beroperasi dengan baik dan terpelihara atau sekitar 75%

Perkembangan Prosentase Peningkatan Rumah Layak Huni

2015		2016 *)		2017 *)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
350	159	129	70	259	51

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2015 sebanyak 159 unit rumah yaitu program reguler 99 unit di 15 Kecamatan dan Program Terpadu Berbasis Kawasan/PTBK 60 unit di 2 Kecamatan yaitu Tarik dan Krembung, atau terealisir 45,4%, dari target yang direncanakan dalam RPJMD tahun 2015 sebanyak 350 unit rumah untuk capaian di tahun 2015 sebanyak 159 rumah.

Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) juga memperoleh bantuan dari APBD Propinsi yang dilaksanakan oleh KODIM dan Corporation Social Responbility (CSR).

Untuk Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan pada tahun 2016 sebanyak 70 unit rumah atau terealisir 54,26%, dari target yang direncanakan sebanyak 129 unit yang memenuhi syarat. Untuk Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni selain memperoleh bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/perbaikan dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMPKB) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 sebanyak 1.214 rumah, 1000 unit, Corporation Social Responbility/CSR Tahun 2013 sebanyak 100 unit dan Program Terpadu Berbasis Kawasan/PTBK Tahun 2014 sebanyak 75 unit dan Tahun 2015 sebanyak 59 unit, sehingga total rumah yang sudah direhabilitasi sebanyak 2.314 atau 97,31% dari jumlah keseluruhan rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang telah disurvey di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebanyak 2.378 rumah.

Sedangkan untuk jumlah rumah tidak layak huni milik keluarga miskin yang memperoleh bantuan rehabilitasi/ perbaikan pada tahun 2017 sebanyak 51

unit rumah atau terealisir 20%, dari target yang direncanakan sebanyak 259 unit yang memenuhi syarat.

Keberhasilan peningkatan rumah layak huni ini yaitu selain dari kesadaran masing-masing masyarakat akan tetapi harus dibarengi dengan bantuan subsidi materi dari pemerintah untuk bisa mewujudkan Rumah layak huni dan hal ini telah banyak dilakukan

Hambatan dari peningkatan rumah layak huni ini dari kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo bahwa anggaran yang diberikan untuk Kegiatan rumah layak huni masih hanya sebatas untuk sosialisasi kepada masyarakat sedangkan untuk anggaran rehab rumah tidak layak huni berasal dari APBD propinsi.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kebutuhan perumahan layak huni, antara lain :

- Memberikan sosialisasi/ edukasi kepada masyarakat tentang rumah yang layak huni yaitu rumah yang sehat dengan memiliki ventilasi udara, memiliki jamban yang sehat dan sudah memiliki lantai yang berubin
- Meminimalisir rumah tidak layak huni dengan bantuan pemerintah menyediakan rumah susun sewa (Rusunawa) dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah
- Dengan bantuan pemerintah mewujudkan Rumah Layak huni dengan memberikan bantuan berupa materi yang bertujuan untuk perbaikan rumah dari yang tidak layak huni menjadi layak huni

2. Prosentase Penurunan Luas Kawasan Kumuh

Untuk mengukur penurunan luasan kawasan kumuh sesuai dengan SK Bupati seluas 301,08 Ha. Adalah luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi jumlah total luas kawasan kumuh yang ditetapkan. Kemudian hasilnya di kalikan 100 %.

Perkembangan Prosentase penurunan luasan Permukiman kumuh di perkotaan

2015		**2016**		**2017**	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
96,25%	95 %	77,71 %	85,54%	77,71 %	82,78%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo

Untuk menangani permukiman kumuh di wilayah kabupaten sidoarjo maka Target RPJMD 20 % permukiman kumuh di tahun 2017 harus sudah tuntas dan merupakan hal yang besar yang harus dicapai. Oleh karena itu dibutuhkan upaya yang sangat serius dalam memenuhinya. Hingga tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui SK Bupati No.188/452/404.1.3.2/2015 tanggal 27 April 2015 tentang kawasan permukiman kumuh Kabupaten Sidoarjo menyebutkan bahwa terdapat 301,08 Hektar permukiman kumuh tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi di 42 Desa ,13 Kecamatan.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penanganan penurunan luasan permukiman kumuh di perkotaan tercapai 82,78% dari target 77,71%. Penurunan luasan permukiman kumuh di perkotaan diupayakan melalui

Intervensi pembangunan fisik pada 7 indikator kumuh hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan kawasan kumuh seharusnya dilayani oleh sector-sektor terkait.

Untuk mendukung 2 (dua) indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu:

1. **Rumah Tangga ber sanitasi sehat**

   Untuk mengukur jumlah masyarakat yang bisa mengakses rumahtangga dengan sanitasi layak/sanitasi lingkungan (Jamban) yang dibangun oleh Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat yang bisa mengakses sarana sanitasi lingkungan dibagi total penduduk kabupaten dikalikan 100 %.

   Pembangunan sarana sanitasi lingkungan ini dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sanitasi lingkungan secara berkesinambungan kepada separuh dari proporsi penduduk yang belum mendapatkan akses sanitasi. Untuk realisasi prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan pada tahun 2017 tercapai sebesar 94,43% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 94.40% meningkat hanya sebesar 0.02% hal ini dikarenakan pada tahun 2017 untuk pembangunan sanitasi sehat disarankan untuk menggunakan bio septic agar kelestarian lingkungan tetap terjaga.

Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana sanitasi lingkungan (jamban)

2015		2016 *)		2017 *)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
66 %	66 %	70 %	94.40 %	94.01%	94.43%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah rumah tangga ber sanitasi sehat, antara lain :

- Pembangunan jamban sehat di wilayah tidak padat penduduk
- Pembangunan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk

2. Rumah Tangga pengguna air bersih

Untuk mengukur jumlah masyarakat yang bisa mengakses sarana air bersih yang dibangun baik oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan PDAM adalah masyarakat yang bisa mengakses sarana air bersih dibagi total penduduk kabupaten dikalikan 100%.

Perkembangan Prosentase masyarakat yang terlayani sarana air bersih perpipaan PDAM dan non PDAM

2015		2016		2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
33 %	34,18 %	34 %	37,23 %	35%	36,35%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo

3. jalan lingkungan dalam kondisi baik

Untuk mengukur panjang jalan lingkungan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di wiilayah perumahan dan kelurahan adalah panjang jalan lingkungan yang dibangun dalam kondisi baik dibagi total panjang jalan lingkungan yang dibangun. Kemudian hasilnya di kalikan 100 %.

Dengan dibangunnya jalan lingkungan ini diharapkan lingkungan dapat lebih tertata rapi dan masyarakat dapat lebih nyaman menjalankan aktifitas di lingkungannya. Realisasi prosentase jalan lingkungan di perumahan dan kelurahan dalam kondisi baik pada tahun 2017 tercapai sebesar 85%, dari seluruh jalan lingkungan yang ada.

Perkembangan Prosentase jalan lingkungan di perumahan dan kelurahan dalam kondisi baik.

2015		2016		2017	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
80 %	80 %	82 %	81,78 %	84%	85%

Sumber Data : Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Sidoarjo

Data jalan Lingkungan dalam kondisi baik

Uraian	2015	2016	2017
Panjang Jalan lingkungan yang terpaving	80,28 km	82,06 km	85,29 km
Jalan yang tidak/ belum terpaving	20,07 km	18,29 km	15,06 km
Total	100,35 km	100,35 km	100,35 km

Target pembangunan jalan lingkungan tahun 2017 10.000m (10 Km) sedangkan yang terealisasi pembangunan jalan paving sepanjang 3.512,09 m (3,5 km)

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jalan lingkungan dalam kondisi baik, antara lain :

- Monitoring jalan yang sudah dibangun
- melakukan pemeliharaan yakni dengan membangun jalan yang rusak baik di jalan lingkungan ataupun jalan perumahan
- Melakukan pembangunan jalan baru dilingkungan permukiman

Selain itu, urusan perumahan rakyat dan permukiman juga mendukung urusan "***Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana***" yang ukuran keberhasilannya diukur dengan :

Indeks Resiko Bencana

Pada Tahun 2014, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluncurkan Index Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2013, yang merupakan potret resiko bencana di daerah.

IRBI 2013 ini berkontribusi dalam penyusunan RPJMN 2015 – 2019 bidang penanggulangan bencana.

Berikut ini adalah Index Resiko Bencana Daerah di wilayah Jawa Timur

Provinsi	Kabupaten/ Kota Prioritas	Indeks Risiko	Tingkat Risiko	Struktur Ruang
BANTEN	Tangerang	200.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
BANTEN	Cilegon	182.4	TINGGI	PKN
DI YOGYAKARTA	Kota Yogyakarta	124.8	SEDANG	PKN
DI YOGYAKARTA	Sleman	153.6	TINGGI	PKW
DKI JAKARTA	DKI Jakarta	123.3	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Bogor	107.2	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Depok	102.4	SEDANG	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Bekasi	164.8	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Cianjur	250	TINGGI	PKN Jabodetabekjur
JAWA BARAT	Kota Bandung	154	TINGGI	PKN Bandung Raya
JAWA BARAT	Bandung Barat	162	TINGGI	PKN Bandung Raya
JAWA BARAT	Cirebon	181.2	TINGGI	PKN
JAWA BARAT	Sukabumi	231.2	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Tasikmalaya	224.8	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Ciamis	215.2	TINGGI	PKW
JAWA BARAT	Pangandaran	215.2	TINGGI	PKW
JAWA TENGAH	Kota Semarang	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Kendal	167.2	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Demak	183.6	TINGGI	PKN Kedungsepur
JAWA TENGAH	Cilacap	215.2	TINGGI	PKN
JAWA TENGAH	Kebumen	203.2	TINGGI	PKW
JAWA TENGAH	Magelang	143.2	SEDANG	PKW
JAWA TIMUR	Malang	219.2	TINGGI	PKN
JAWA TIMUR	Gresik	175.2	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bangkalan	164.4	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Kota Surabaya	166.8	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Sidoarjo	149.6	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Lamongan	174	TINGGI	PKN Gerbangkertosusila
JAWA TIMUR	Bojonegoro	150	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Pasuruan	215.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Banyuwangi	219.2	TINGGI	PKW
JAWA TIMUR	Jember	219.2	TINGGI	PKW

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Index Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo pada poin **149,6** dengan tingkat resiko **Tinggi**.

Merujuk pada tabel diatas, pada hakikatnya penyelenggaraan penanggulangan bencana baik di tingkat pusat dan daerah, jika berpedoman pada dokumen Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Bencana 2015-2019 adalah

menurunkan indeks risiko bencana. Penurunan indeks risiko tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen penyusunnya yaitu komponen **bahaya/ancaman**, komponen **kerentanan** dan komponen **kapasitas**.

Dari ketiga komponen penyusun indeks risiko, komponen bahaya merupakan komponen yang sangat kecil kemungkinan untuk diturunkan, maka indeks risiko bencana dapat diturunkan dengan cara menurunkan tingkat kerentanan (komponen kerentanan) melalui **peningkatan tingkat kapasitas (komponen kapasitas)**. Pengaruh masing-masing komponen (bobot) dalam penentuan indeks risiko bencana adalah komponen bahaya 40%, komponen kerentanan 30% dan komponen kapasitas 30%. Jadi berdasarkan pengaruh dari ketiga komponen penyusun indeks risiko bencana, maka komponen kerentanan berupa coping capacities dan kapasitas merupakan komponen yang paling memungkinkan dilaksanakan untuk menurunkan indeks risiko bencana. Berdasarkan uraian pengaruh masing-masing komponen dalam penurunan indeks risiko bencana, maka target utama dalam penurunan indeks risiko bencana adalah **komponen coping capacities dan kapasitas sebesar 30% selama 5 tahun.**

- **Target Penurunan Tahun 2017**

  Pada Tahun 2017, target penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 9 poin atau IRB pada poin **140,6**. Peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur menggunakan 10 Langkah Mendasar (LM) yang terbagi menjadi beberapa sub pertanyaan yang memuat 71 indikator peningkatan kapasitas ketangguhan daerah.

  Metode penilaian dengan *Forum Group Discuccion* (FGD) dengan Pembagian kelompok yang sesuai dengan bidang dan pengetahuan dari masing-masing pemangku kepentingan.

Sepuluh Langkah Mendasar untuk Menjadikan Kota Lebih Tangguh (UNISDR) yaitu :

(1) Menetapkan organisasi dan koordinasi untuk memahami pengurangan risiko bencana yang didasari pada partisipasi kelompok warga dan masyarakat sipil. Membangun aliansi di tingkat lokal. Memastikan semua departemen/dinas pemerintah memahami peran mereka dalam pengurangan risiko dan kesiapsiagaan bencana.

(2) Menetapkan satu anggaran untuk pengurangan risiko bencana dan menyediakan insentif untuk para pemilik rumah, rumah tangga

berpenghasilan rendah, masyarakat, dunia usaha dan sektor swasta untuk berinvestasi dalam pengurangan risiko yang mereka hadapi.

(3) Melakukan pemutakhiran data tentang ancaman-ancaman dan kerentanan dan menyusun pengkajian risiko dan menggunakannya sebagai landasan bagi rencana-rencana dan keputusan-keputusan pembangunan perkotaan, memastikan bahwa informasi ini dan perencanaan untuk ketangguhan kota anda bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat dan didiskusikan sepenuhnya dengan mereka.

(4) Menanamkan investasi dalam dan merawat infrastuktur penting untuk pengurangan risiko bencana, misalnya drainase banjir, yang disesuaikan apabila perlu untuk mengatasi perubahan iklim.

(5) Mengkaji keselamatan semua sekolah dan fasilitas kesehatan dan meningkatkan fasilitas-fasilitas ini bila perlu.

(6) Menerapkan dan menegakkan peraturan-peraturan pendirian bangunan dan prinsip-prinsip perencanaan tata guna lahan yang realistis dan berwawasan risiko. Mengidentifikasi lahan yang aman untuk warga berpenghasilan rendah dan sejauh memungkinkan mengupayakan perbaikan permukiman-permukiman informal.

(7) Memastikan agar program pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana tersedia di sekolah-sekolah dan masyarakat setempat

(8) Melindungi ekosistem dan penyangga-penyangga alamiah untuk meredam Panduan Pelaksanaan Penilaian Kota/Kabupaten Tangguh Program USAID-APIK 7 banjir, gelombang badai, dan ancaman-ancaman bencana lain yang membuat kota menjadi rentan. Beradaptasi pada perubahan iklim dengan memperkuat praktik-praktik pengurangan risiko bencana yang baik.

(9) Membentuk sistem peringatan dini dan kapasitas manajemen kedaruratan di kota dan melakukan geladi kesiapsiagaan untuk masyarakat secara rutin.

(10) Setelah bencana, memastikan agar kebutuhan-kebutuhan dan partisipasi penduduk yang terdampak menjadi pusat dari upaya rekonstruksi, dengandisertai bantuan untuk mereka dan organisasi-organisasi masyarakat untuk merancang dan membantu respons bencana, termasuk membangun kembali perumahan dan penghidupan.

Skor tertinggi untuk LM adalah di angka 5, yang daoat digambarkan sebagai jaring laba-laba dibawah ini. Semakin angkanya menjauhi 0, maka semakin tangguh suatu kota/kabupaten.

Sehingga, apabila sepuluh LM tersebut memiliki nilai tertinggi skor total adalah 50.

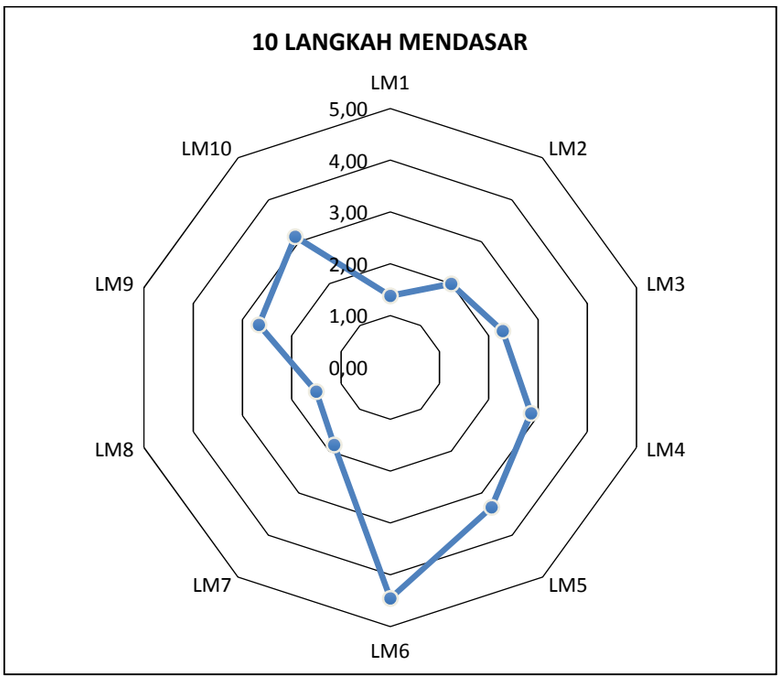

Dari pengisian kuisioner ke sepuluh LM tersebut, didapatkan skor sebagai berikut :

Langkah Mendasar	Rerata
LM1	1.38
LM2	2.00
LM3	2.29
LM4	2.86
LM5	3.33
LM6	4.45
LM7	1.85
LM8	1.50
LM9	2.67
LM10	3.13
	25.45

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah dari keseluruhan LM adalah sebesar 25,45. Selanjutnya poin penurunan Indeks Resiko Bencana dapat dihitung menggunakan perhitungan sebagai berikut :

(25,45 : 50) x 44,88 = 22,85

Adapun hasil penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar :

$$149{,}6 - 22{,}85 = 126{,}75$$

Sehingga Indeks Resiko Bencana pada tahun 2017 menjadi **126,75 (Sedang).**

Penurunan Indeks Resiko Bencana di Kabupaten Sidoarjo

Tahun 2013 (IRBI)	Target 2017	Realisasi	Capaian
149,6	140,6	**126,75**	253,8%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi melebihi target penurunan Indeks Resiko Bencana pada tahun 2017. Hal tersebut dipengaruhi oleh :

1. Telah terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai komando / koordinator penanggulangan bencana di Sidoarjo;
2. Telah terbentuknya beberapa komunitas / kelompok relawan di Kabupaten Sidoarjo diantaranya Srikandi Tangguh, Sekardadu, Relawan Sungai, dll;
3. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi bahaya/ancaman bencana di sekitarnya sehingga tanggap bencana lebih cepat;
4. Adanya pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi penanganan bencana di Kabupaten Sidoarjo.

   Beberapa hal di atas dapat mendukung peningkatan kapasitas Kabupaten Sidoarjo menuju kota tangguh bencana.

Untuk mendukung 1 (satu) indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu:

1. Program Peningkatan Kesiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

   Capaian Indikator Kinerja :

   - Persentase Kejadian Kebakaran yang tertangani dalam waktu tanggap

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	30%	24,65%	82,17%
2016	30%	24,80%	82,70%
2017	40%	25,19%	83,97%

Rata-rata respon time pada tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 yaitu sebesar 18,57 menit, dimana capaian pada tahun 2016 adalah 18,74 menit.

Hal tersebut masih belum mencapai target sesuai Permendagri 69 Tahun 2012 tentang Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang pemerintahan dalam negeri di kabupaten / kota dan Permen PU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Perkotaan, dimana respon time rate ditetapkan sebesar 15 menit sejak laporan kebakaran diterima.

Jumlah kejadian kebakaran se-Kabupaten Sidoarjo pada kurun waktu 2015 s.d. 2017 adalah sebagai berikut :

Tahun 2015	280 kejadian, 69 kejadian ditangani dalam waktu tanggap (15 menit)
Tahun 2016	125 kejadian, 31 kejadian ditangani dalam waktu tanggap
Tahun 2017	262 kejadian, 66 kejadian ditangani dalam waktu tanggap

Pada tahun 2017, jumlah kejadian kebakaran meningkat dari tahun sebelumnya (meningkat sejumlah 137 kejadian), dengan rincian sebagai berikut :

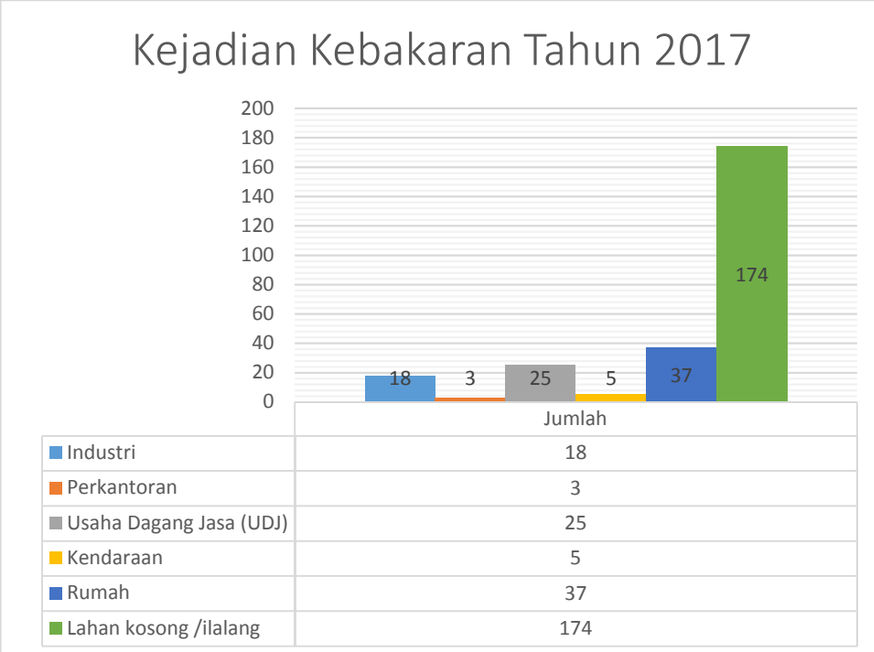

Sumber : Data Penanganan Kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

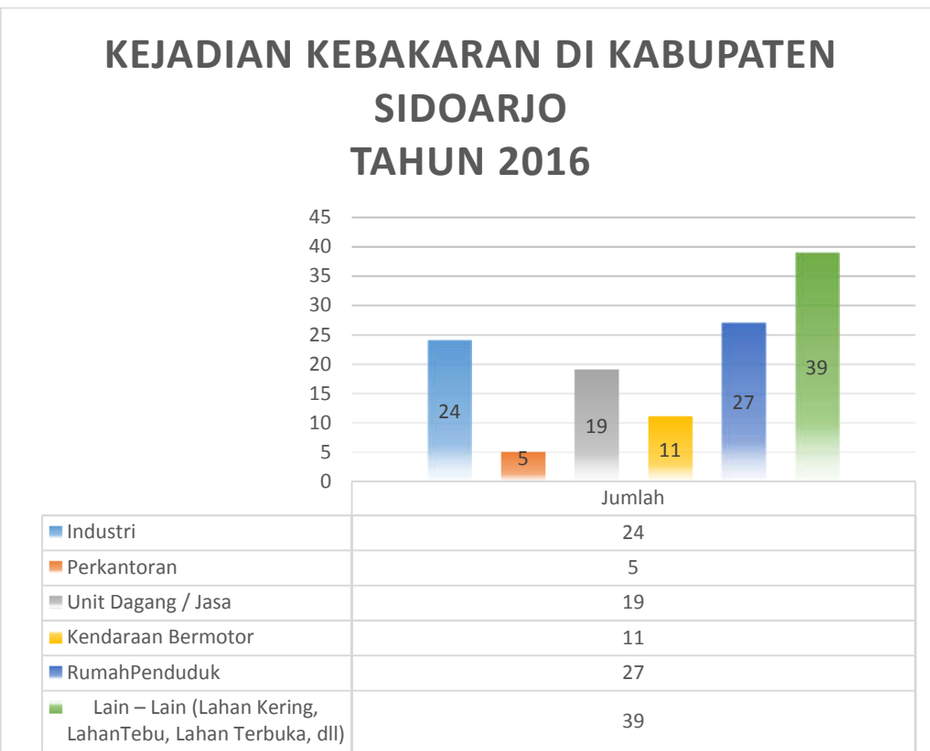

Sumber : Data Penanganan Kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan jumlah kejadian kebakaran pada industri, perkantoran, kendaraan bermotor dan lahan kosong/ilalang.

Banyaknya kejadian kebakaran di tahun 2017 (262 kejadian) disebabkan oleh :

1. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap upaya pencegahan kebakaran
2. Cuaca Musim kemarau yang lebih panjang karena banyak kejadian lahan terbuka/kosong yang terbakar
3. Semakin padatnya hunian penduduk di Sidoarjo yang mengakibatkan sering terjadinya konsleting listrik

Upaya dalam menurunkan dan menanggulangi bencana kebakaran antara lain:

1. Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan, dan lain lain)
2. Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran
3. Revitalisasi Pos Damkar Porong;
4. Penambahan personil pemadam kebakaran;
5. Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau menambah pos Pemadam kebakaran/Pembangunan posko PMK pembantu di wilayah Taman dan Krian (dalam tahap pembangunan)
6. Inventarisasi Data kasus kebakaran melalui penyusunan profile daerah untuk membuat peta rawan bencana yang terintegrasi dengan software/aplikasi;
7. Sosialisasi Aplikasi **SIGAP** (Sidoarjo Tanggap – Adalah Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam melaporkan kejadian bencana secara real time di Kabupaten Sidoarjo)
8. Pengadaan Mobil DAMKAR dan menambah sarana prasarana penunjang dan peralatan keamanan serta penambahan personil Pemadam Kebakaran
9. Mengadakan bimtek relawan dan aparatur diantaranya Simulasi Penanganan Bencana dan Bimtek bagi Relawan dan mengadakan Sosialisasi Kebencanaan di sekolah dan masyarakat;

- Persentase wilayah Kabupaten yang sudah mempunyai pos PMK

Jumlah pos Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun 2017 adalah sebanyak 4 (empat) pos, yaitu di Buduran (pos induk), Waru, Krian dan Porong.

Berdasarkan hasil penelitian Teknis Pengurangan Resiko Kebakaran Tahun 2015, kebutuhan pos pemadam kebakaran untuk Kabupaten Sidoarjo adalah sebanyak 36 pos. Tetapi dikarenakan banyaknya faktor kendala / hambatan baik internal maupun eksternal target tersebut belum tercapai.

2. Program pencegahan dini, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan manajemen logistik kebencanaan

Capaian Indikator Kinerja :

- Persentase logistik kebencanaan yang tersalurkan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan

Pada tahun 2017 terdapat 25 kejadian bencana yang terdiri dari :

Kejadian Bencana	Jumlah kejadian	Penyaluran logistik
Banjir	6	100%
Puting Beliung	14	100%

Permasalahan

Permasalahan secara umum terhadap penanggulangan bencana adalah:

- Terjadinya pendangkalan sungai / drainase / afvour
- Kemampuan daya tampung ke saluran / drainase kurang memadai
- Respon time 15 menit belum tercapai
- Masih terdapat keterlambatan informasi kejadian kebakaran dari masyarakat
- Lalu lintas semakin padat terutama pada jam-jam sibuk
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan

Solusi yang telah dilakukan untuk menanggulangi bencana adalah:

- Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan korban terdampak bencana;
- Normalisasi sungai / drainase / afvour;
- Menambah jumlah sarana prasarana;

- Sosialisasi PRB (Pengurangan Resiko Bencana) pada masyarakat ;
- Sosialisasi pencegahan bahaya kebakaran di kecamatan;
- Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui :

1. Sekolah Sungai

   Output :

   a. Terbentuknya relawan Sekolah Sungai sebanyak 30 orang;
   b. Terlaksananya kegiatan Bersih-Bersih Sungai di Kali Pelayaran Kecamatan Taman, yang diikuti oleh ± 1500 orang;
   c. Terlaksananya program lanjutan Sekolah Sungai yaitu Kegiatan Peduli Sungai yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR di 7 (tujuh) kecamatan

2. Desa Tangguh Bencana

   Output :

   a. Terlaksananya kegiatan Desa Tangguh Bencana di 4 (empat) desa di Kecamatan Jabon yaitu Desa KedungPandan, Desa Semambung, Desa Kupang dan Desa Kedungrejo yang didanai oleh APBN;
   b. Terlaksananya Desa Tangguh Bencana di Desa Bungurasih Kecamatan Waru yang didanai oleh APBD (Gladi Lapang/ Simulasi);
   c. Terbentuknya relawan desa sebanyak 30 orang;
   d. Terlaksananya program lanjutan KKN Tematik Penanggulangan Bencana oleh Universitas Dr. Soetomo Surabaya berupa Pemasangan Biopori dan memanen air hujan

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan OPD yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Program pembangunan untuk urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Program pengembangan wawasan kebangsaan
3. Program pendidikan politik masyarakat
4. Program pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

5. Program pembinaan operasional, pengembangan dan pengendalian perlindungan masyarakat
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Penegakan Peraturan Perundang-undangan daerah

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum dalam masyarakat yang berbudaya*** Untuk menganalisa tingkat keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Rasa Aman

Indeks Rasa Aman digunakan untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD untuk indeks rasa aman adalah 0 % (0 konflik), sedangkan capaian tahun 2017 adalah 0%, sehingga tercapai 100%.

Keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kenyamanan/rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia salah satunya yaitu kebutuhan akan ketentraman.

Mendasari definisi rasa aman diatas, indeks rasa aman dalam hal ini dapat diartikan sebagai petunjuk angka sebagai tolak ukur untuk mengukur dan mengetahui sejauhmana tingkat rasa aman/nyaman/ketentraman yang dirasakan warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Pada tahun 2017 telah dilakukan survei/pengukuran indeks rasa aman di Kabupaten Sidoarjo, dengan responden 100 orang tersebar di 8 (delapan) kecamatan memperoleh hasil Nilai Indeks Rasa Aman / IRAn = 72,44 dengan kategori Rasa Aman Tinggi.

- ***Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:***
  Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban daerah
- ***Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :***
  Belum optimalnya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat/FKDM di Kabupaten/Kecamatan/Kelurahan/Desa
- ***Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya :***
  Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

2. Indeks Toleransi

Indeks Toleransi digunakan untuk mengukur kohesi sosial, yaitu toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal, dengan tujuan :

a. mendeskripsikan tingkat toleransi masyarakat di Kabupaten Sidoarjo
b. Mendiskripsikan pengalaman masyarakat terkait toleransi di Kabupaten Sidoarjo

Pada tahun 2017 telah dilakukan survei/pengukuran indeks toleransi di Kabupaten Sidoarjo dengan 100 Responden/orang tersebar di 5 (lima) Desa dengan memperoleh hasil nilai indeks toleransi 72,25 dengan kategori Toleransi Tinggi.

- ***Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :***
  1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas Warga Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan
  2. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM dan SARA, berkeadilan, bertanggung jawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.
- ***Kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :***
  1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi dalam proses politik
  2. Lemahnya penegakan supremasi hukum, rendahnya kesadaran hukum pada masyarakat dan kurangnya perhatian terhadap kelompok masyarakat yang rentan akan pelanggaran HAM dan SARA
- ***Rencana Tindak Lanjut Tahun Berikutnya :***
  1. Mendukung pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilu yang lebih demokratis, jujur dan adil dalam rangka penegakan kedaulatan rakyat di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
  2. Meningkatkan pemahaman HAM di jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat, kemampuan pemahaman terhadap masalah dan strategi pemecahan masalah guna menghindari terjadinya konflik yang berdampak pada disintegrasi bangsa

Keberhasilan pencapaian 2 (dua) indikator sasaran tersebut didukung dengan capaian indikator-indikator program yang memberikan konstribusi atas sasaran diatas yaitu :

a. Persentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diselesaikan.

Penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini adalah tindakan Non Yustisial. Temuan indikasi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat didapat dari hasil patroli dan penertiban non yustisial.

Berikut penyajian data penyelesaian gangguan tibumtranmas tahun 2017 :

NO	Jenis Gangguan Tibumtranmas	Jumlah Gangguan Tibumtranmas	Jumlah yang diselesaikan
1	PKL	614	614
2	PMKS	32	32
3	Bangunan Liar	492	492
4	RHU (Rumah hiburan umum)	147	147
5	Reklame Insidentil dan Tetap	89 (800m^2)	89 (800m^2)
6	Perijinan	53	53
7	Retribusi	-	-
	JUMLAH	**1427**	**1427**

Pada tahun 2017, prosentase gangguan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, mengalami penurunan 5,89% dari tahun 2016 dari sebanyak 2.016 pelanggar menjadi sebanyak 1.427 pelanggar pada tahun 2017.

Berikut grafik penyelesaian gangguan tibumtranmas per-tahunnya.

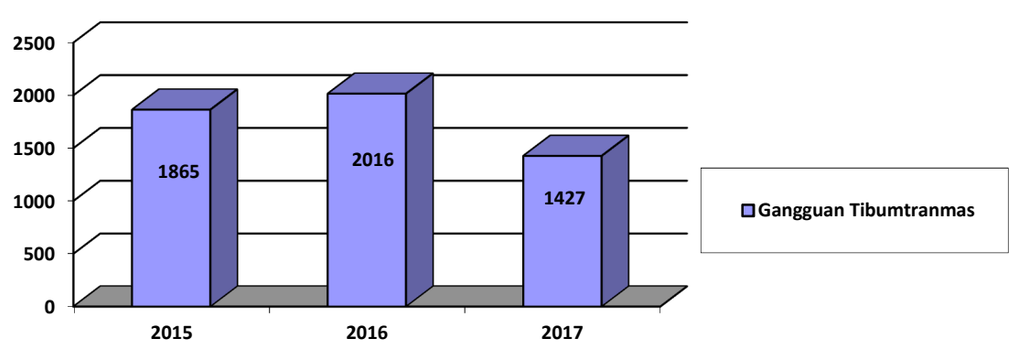

Penindakan terhadap gangguan tibumtranmas pada tahun 2017 lebih difokuskan pada penertiban keberadaan bangunan liar. Hal ini guna

mendukung program pengendalian banjir dan estetika kota yang dilakukan instansi/OPD teknis. Sepanjang tahun 2017 Satpol PP Kabupaten Sidoarjo telah menertibkan sejumlah 492 bangli di beberapa titik lokasi.

Locus upaya penertiban bangli dan PKL dititiberatkan pada sepanjang 9 (sembilan) jalur utama. Berikut penyajian data sasaran wilayah 9 (sembilan) jalur utama dan hasil penyelesaian penanganan pada tahun 2017 :

NO	SASARAN WILAYAH	FOKUS LOKASI PENERTIBAN	UPAYA DAN HASIL PENANGANAN
1	Jl. Raya Waru	Jl. Kertomanunggal Ds. Kedungrejo (sisi sebelah timur rel kereta api)	Penertiban Gabungan 27 Bangli
2	Jl. Raya Gedangan	Jl. A. Yani Depan PT. Tirtomas	Penertiban Gabungan 3 Bangli
3	Jl. Raya Buduran	Jl. Raya Buduran Sisi barat rel kereta api	Penertiban Gabungan 10 bangli
4	Jl. A. Yani, Gajah Mada, Jl. Mojopahit Sidoarjo	Jl. A. Yani, Gajah Mada, Jl. Mojopahit Sidoarjo	- Penertiban - Penjagaan lokasi
5	Jl. Raya Candi	- Jl. Raya Candi Ds. Sumorame depan PT. Prima Dinamika Santosa - Jl. Raya Candi depan eks kantor UPPA Candi	Penertiban Gabungan 25 bangli Penertiban Gabungan 13 bangli
6	Jl. Raya Tanggulangin	- Jl. Raya Ngaban Ds.Ngaban (sisi timur jalan) - Jl. Raya Tanggulangin Ds. Ketapang dan Kalitengah	Penertiban Gabungan 23 bangli Penertiban Gabungan 52 bangli
7	Jl. Raya Porong	Jl. Raya Siring	Penertiban Gabungan 6 bangli

NO	SASARAN WILAYAH	FOKUS LOKASI PENERTIBAN	UPAYA DAN HASIL PENANGANAN
8	Area Gading Fajar	Area Gading Fajar	- Penertiban - Penjagaan lokasi
9	Jl. Raya Taman Pinang	Jl. Raya Taman Pinang	- Penertiban - Penjagaan lokasi

Selain data penertiban skala prioritas bangli dan PKL diatas, juga dilakukan penertiban di lokasi lain atas dasar aduan dan koordinasi dengan pihak kecamatan dan OPD teknis, seperti di Desa Pagerwojo Kec. Buduran, Desa Tambakkemeraan Kec. Krian, Sepanjang jalan arteri Porong – Tanggulangin, Desa Tenggulunan Kec. Candi, Perum. Pesona Permata Gading Desa Blurukidul Kec. Sidoarjo, dan Jl. Letjen Sutoyo Desa Medaeng Kec. Waru.

b. Persentase anggota Satlinmas yang aktif dalam pengendalian lingkungan

Penjelasan mengenai indikator program ini menguraikan 2 (dua) variabel pendukung, antara lain sebagai berikut :

1. Rasio jumlah Satlinmas terhadap Jumlah RT (Rukun Tetangga)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 ahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2008 Tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, disebutkan ideal komposisi personil Satlinmas di Kabupaten/Kota adalah jumlah personil Satlinmas berbanding dengan jumlah RT (Rukun Tetangga).

Kondisi riil jumlah RT di seluruh wilayah Kabupaten Sidoarjo sebanyak 8.427, sedangkan jumlah personil Satlinmas yang ada sampai dengan tahun 2016 terdata sebanyak 7.318 Personil. Target pemenuhan/penambahan anggota Satlinmas pada tahun 2017 adalah 0,90% (337 personil). Pencapaian target dilakukan dengan kegiatan Pembinaan Potensi Masyarakat. Secara eksplisit kegiatan dimaksud berupa Sosialisasi terhadap warga masyarakat perihal urgensi keberadaan dan partispasi satlinmas dalam pengendalian keamanan lingkungan, ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan tanggap bencana. Sasaran utama *locus* sosialisasi ditujukan pada Desa/Kelurahan yang masih minim jumlah personil satlinmasnya.

Dari penetapan target tahun 2017 (0,90%/337 personil), pemenuhan/penambahan anggota satlinmas telah tercapai pada angka

347 personil. Berikut penyajian data perihal pemenuhan anggota satlinmas.

NO	URAIAN DATA	TARGET RENSTRA 2017	REALISASI KINERJA 2017
1	Rasio jumlah anggota linmas terhadap jumlah RT (sesuai SPM 1 RT / 1 anggota linmas)	1 : 0,90 (337Orang)	1 : 0,90 (347 orang)

NO	URAIAN DATA	JUMLAH
1	Jumlah RT Se-Kabupaten Sidoarjo	8.427
2	Jumlah linmas desa yang harus dipenuhi/direkrut selama 3 tahun (2017 – 2019)	1.109
3	Jumlah Linmas yang harus direkrut tahun 2017 (target)	337 (0,90)
4	Jumlah Linmas Desa yang telah direkrut tahun 2017 (pencapaian target)	347
5	Jumlah total anggota satlinmas se-Kabupaten Sidoarjo tahun 2017	7.665

Berikut Grafik Peningkatan/Penambahan Anggota Satlinmas di Kabupaten Sidoarjo

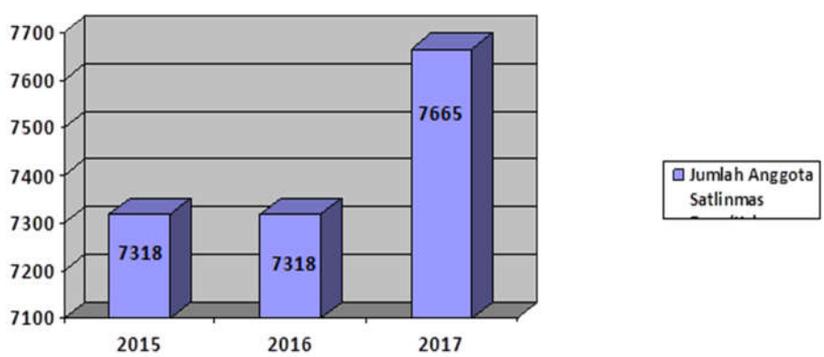

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perekrutan anggota satlinmas desa/kelurahan antara lain :

- Rata-rata personil anggota linmas di desa/kelurahan sudah lanjut usia

- Rendahnya minat masyarakat terhadap linmas sehingga menyulitkan proses perekrutan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak yang belum memahami fungsi kelinmasan
- Pemerintah desa/kelurahan masih banyak belum mengalokasikan anggran untuk kegiatan linmas

Upaya/langkah untuk pemenuhan personil Satlinmas pada tahun selanjutnya antara lain :

- Melakukan inventarisasi dan menganalisa jumlah satuan linmas yang dibutuhkan di tingkat RT
- Melakukan Sosialisasi tentang pentingnya kebutuhan Satlinmas di setiap RT kepada Kepala Desa/lurah dan Kepala RW
- Melakukan Sosialisasi peran dan fungsi linmas kepada Camat, Kepala desa/lurah, tokoh masyarakat dan LSM.

2. Peran Aktif Satlinmas Dalam Pengendalian Lingkungan dan Tanggap Bencana

Pengkoordinasian dan pengerahan satlinmas desa/kelurahan merupakan tupoksi dari Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan ditujukan pada partsipasi dan fungsi kelinmasan seperti pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, tanggap bencana dan kegiatan sosial kemasyarakatan (*sesuai Permendagri No. 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat*).

Pada tahun 2017 telah dilakukan pengerahan anggota satlinmas desa/kelurahan sejumlah 635 personil, dari target yang ditetapkan tahun 2017 sejumlah 550 personil. Fokus pengerahan dititikberatkan pada partisipasi penanganan bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tercatat sepanjang tahun 2017 terjadi beberapa bencana alam yang menimpa beberapa wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Berikut penyajian data terkait pengerahan anggota satlinmas dalam kegiatan tanggap bencana di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017.

NO	LOKASI DAN JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	ANGGOTA SATLINMAS YANG DIKERAHKAN
1	Kecamatan Jabon (Desa Kupang, Desa Kedungrejo, Desa	Bulan Januari	30 personil

	Tambakkalisogo, Desa Semambung, Desa Kedungpandan) Banjir		
2	Kecamatan Krian (Desa Terung kulon, Desa Keboharan) Angin puting beliung	Bulan Januari	35 personil
3	Kecamatan Waru (Desa Tambakjabon, Desa Tambaksawah)	Bulan Nopember	20 personil

Dari tabel diatas dapat dilihat keterlibatan dan peran serta anggota satllinmas dalam penanggulangan dan tanggap bencana di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan kegiatan tanggap bencana sinergis dan mendukung dengan salah satu indikator indeks rasa aman yaitu indikator keamanan dari bencana.

c. Persentase kasus pelanggaran peraturan daerah yang ditangani

Ruang lingkup penegakan peraturan daerah salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadinya pelanggaran peraturan daerah dengan langkah penindakan represif yustisial. Bentuk pelaksanaannya diimplementasikan dengan penyelenggaraan Sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi pelaku pelanggaran peraturan daerah.

Jumlah penyelesaian pelanggaran peraturan daerah melalui proses sidang tipiring pada tahun 2017 sebanyak 460 pelanggar. Kondisi ini mengalami peningkatan 0,35 % dari tahun 2016 yang menyidangkan sebanyak 425 pelanggar.

Berikut Tabel Jumlah Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda tahun 2017

NO	JENIS PELANGGARAN PERDA	JUMLAH PELANGGAR YANG DI TIPIRING
1	Perda 10 Tahun 2013 (PKL)	386
2	Perda 6 Tahun 2012 (sampah)	74
JUMLAH		460

Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah

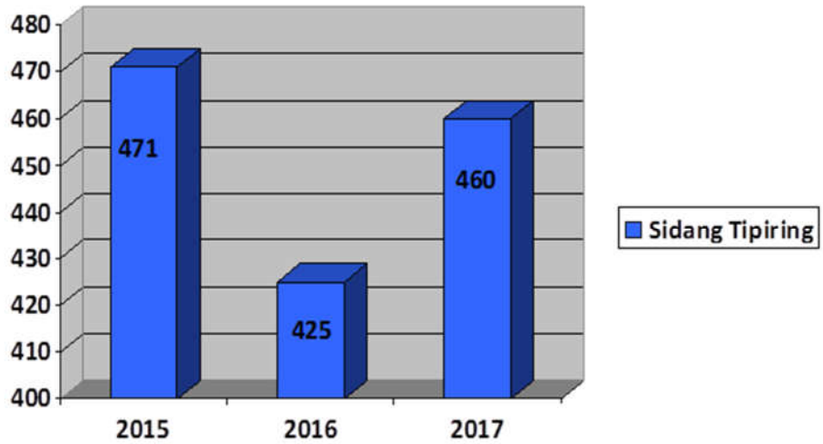

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Sidoarjo

Dari data diatas dapat diketahui terjadi peningkatan jumlah pelanggar yang ditindak secara pro yustisial pada tahun 2017, hal tersebut dikarenakan peningkatan jumlah kegiatan penegakan peraturan daerah/sidang tipiring tahun 2017.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan peraturan daerah secara yustisial antara lain :

- Pelaksanaan sanksi administrasi belum berjalan dengan optimal (OPD pengampu perda belum optimal melaksanakannya)
- Kebanyakan perda yang ada saat ini memuat sanksi 6 (enam) bulan sehingga dalam penegakannya membutuhkan waktu yang lama (pemberkasan biasa)
- Tenaga PPNS yang ada saat ini kurang mencukupi
- Kurangnya dukungan anggaran di Kesekretariatan PPNS

Adapun upaya – upaya untuk pencegahan pelanggaran peraturan daerah antara lain :

- Intensifitas kegiatan penertiban dan pengawasan terhadap kegiatan di masyarakat yang berpotensi melanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah
- Melaksanakan koordinasi dengan organisasi Perangkat Daerah (OPD) penginisiasi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah

- Melakukan pengarahan/penyuluhan agar masyarakat dan badan hukum mematuhi peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah bersama dengan OPD lainnya
- Melakukan pembinaan dan/atau sosialisasi kepada para pelanggar peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah

d. Jumlah kegiatan Kewaspadaan, Keamanan dan Kenyamanan Daerah

Pada Tahun 2017 kegiatan Kewaspadaan, Keamanan dan Kenyamanan Daerah dilaksanakan sebanyak tiga kali (3) kegiatan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Peran-Peran FKDM yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kab. Sidoarjo JL. Raya A.Yani No.4 Sidoarjo pada tanggal 5 April 2017
2. Kegiatan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Paham Radikalisme bagi Takmir Masjid yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kab. Sidoarjo JL. Raya A.Yani No.4 Sidoarjo pada tanggal 10 Agustus 2017
3. Kegiatan Peningkatan Cegah dan Deteksi Dini menjelang Pilkades dan Pilkada Tahun 2018 yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kab. Sidoarjo JL. Raya A.Yani No.4 Sidoarjo pada tanggal 30 Nopember 2017

e. Jumlah Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan

Pada Tahun 2017 kegiatan Penigkatan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan sebanyak tujuh (7) kali kegiatan, kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pemahaman Peduli Hak Azasi Manusia yang dilaksanakan di Puncak Ayana Hotel dan Resort Trawas Mojokerto pada tanggal 21 s/d 22 Februari 2017
2. Kegiatan Penguatan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang dilaksanakan di Royal Tretes View Hotel JL. Gajah Mada No. 6-7 Prigen Pasuruan pada tanggal 29 s/d 30 Maret 2017
3. Kegiatan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Taruna Cinta Tanah Air bagi Pelajar SMA/SMK Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan di GreenSA Inn Sunan Ampel Surabaya JL. Raya Juanda No. 86 Sidoarjo pada tanggal 23 s/d 24 Mei 2017
4. Kegiatan Bimtek Peningkatan Wasbang bagi Pengurus FPK Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan Hotel Halogen JL. Raya Juanda No. 18 Sidoarjo pada tanggal 28 s/d 29 Juli 2017

5. Kegiatan Mengikuti Lomba Kejuaraan Marching Band Piala Raja Hamengkubowono yang dilaksanakan di GOR Among raga Yogyakarta dan Jalan Malioboro Yogyakarta pada tanggal 28 s/d 30 Oktober 2017
6. Kegiatan Semalam Nusantara di Sidoarjo yang dilaksanakan di Alun-alun Kab. Sidoarjo pada tanggal 19 Nopember 2017
7. Kegiatan Bimtek Pemahaman bagi Pelajar terhadap Bahaya Narkoba di Sidoarjo yang dilaksanakan di Pendopo Delta Nugraha JL. Cokronegoro No. 1 Sidoarjo pada tanggal 13 Nopember 2017

f. Jumlah kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga

Pada Tahun 2017 kegiatan Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga dilaksanakan sebanyak tujuh (7) kali kegiatan, kegiatan tersebut antara lain :

Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Politik di daerah pada Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak empat (4) kali kegiatan tersebut antara lain :

1. Kegiatan Jambore Ormas Tahun 2017 yang dilaksanakan di Tretes Raya Hotel & Resort Jl. Malabar 168-169 Tretes Prigen pada tanggal 16 s/d 18 Mei 2017
2. Kegiatan Rapat Koordinasi Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Angaran 2016 yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kab. Sidoarjo JL. Raya A.Yani No.4 Sidoarjo pada tanggal 24 Mei 2017
3. Kegiatan Pembinaan LSM Tahun 2017 yang dilaksanakan di Waroeng Redjo JL. Raya Cemengkalang No. 11 Sidoarjo pada tanggal 28 Nopember 2017
4. Kegiatan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 yang dilaksanakan di Aula Bakesbangpol Kab. Sidoarjo JL. Raya A.Yani No.4 Sidoarjo pada tanggal 7 Desember 2017.

6. Urusan Sosial

Urusan sosial dilaksanakan oleh SOPD yaitu Dinas Sosial.

Penyelenggaraan urusan sosial ini mengemban sasaran "***Menurunnya Jumlah Masyarakat Miskin***".

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Penyuluhan, Pelayanan, Pembinaan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut diatas diuraikan sebagai berikut :

Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan dari tahu ke tahun. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 6,23% dari jumlah penduduk, jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 6,39% dari jumlah penduduk, maka angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2,57%.

Berikut perkembangan Angka Kemiskinan di Kabupaten Sidoarjo :

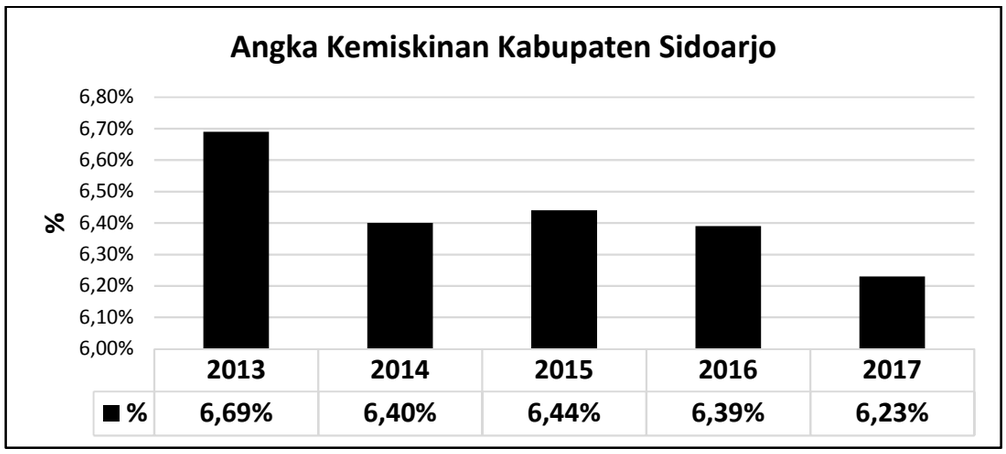

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

Tercapainya persentase penurunan Jumlah Penduduk Miskin dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Target menurunkan angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dengan indicator persentase jumlah PMKS terhadap penduduk yang di targetkan pada tahun 2017 sebesar 1,93 %. Pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah PMKS sebesar 655 orang, sehingga pada akhir tahun 2017 jumlah PMKS sebesar 42.387 orang atau 1,927% terhadap jumlah penduduk. Dengan demikian capaian kinerja sudah melebihi 0,003 % dari target.
2. Jumlah PKMS pada tahun 2015 sebesar 42.286 orang/jiwa (1,922%) terhadap jumlah penduduk, pada tahun 2016 terjadi kenaikan jumlah PMKS sebesar 756 orang/jiwa sehingga jumlah PMKS menjadi 43.042 orang/jiwa (1,957%) terhadap jumlah penduduk, sedangkan pada tahun 2017 terjadi penurunan jumlah PMKS sebesarnya 655 orang/jiwa sehingga jumlah PMKS

pada akhir tahun 2017 menjadi 42,387 orang/jiwa (1,927%) terhadap jumlah penduduk.

Penurunan jumlah PMKS terhadap penduduk sebesar 1,927 % atau sebesar 0,003 % dari target 2017, hal tersebut merupakan keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya :

1. Mengidentifikasi lebih dalam untuk menemukan keluarga besarnya sampai derajat ke 7 (tujuh), agar mau dan mampu untuk ikut berperan aktif dalam melakukan pengasuhan, pembinaan, dan pengawasannya.
2. Mengidentifikasi tingkat kemiskinan dan minat bakat yang dimiliki, untuk dikembangkan melalui pelatihan ketrampilan praktis.

Permasalahan / kendala yang dihadapi dalam upaya penurunan PMKS terhadap jumlah penduduk antara lain :

1. Jenis PMKS yang ditangani ada 5 jenis PMKS adalah
   - Gelandangan
   - Gelandangan Psikotik (sakit jiwa)
   - Pengemis
   - Tuna Susila (WTS)
   - Anak Jalanan (anak-anak yang hidup di jalanan)

   Sedangkan jenis PMKS yang sulit untuk dilakukan pembinaan adalah gelandangan dan gelandangan psikotik.
2. Adanya urbanisasi penduduk yang tidak di imbangi dengan SDM yang memadai sehingga bisa menambah jumlah PMKS di Sidoarjo.

Atas permasalahan tersebut rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan tahun berikutnya :

1. Memberi motivasi kepada keluarga agar mau dan mampu untuk ikut berperan serta aktif dalam memberikan pembinaan dan mau menerima kembali sebagai anggota keluarga besarnya.
2. Memberikan pembinaan/pelatihan ketrampilan praktis untuk bekal peningkatan ekonomi keluarga sesuai dengan minat bakatnya

Untuk mendukung capaian indikator sasaran tersebut diatas, didukung dengan indikator-indikator program yang memberikan kontribusi atas sasaran diatas antara lain yaitu :

1. Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya

   Indikator program ini bisa di lihat dari persentase jumlah keluarga penerima manfaat dari anggaran APBD tahun 2017 sebanyak 4.210 yang terealisasi 100%;
2. Persentase tuna sosial yang terlayani

   Persentase tuna sosial yang dilayani sebanyak 226 orang dengan target 20,25% dari 1.116 tuna sosial yang ada dan terealisasi 20,25% dengan demikian kontribusi capaian kinerja untuk indikator program ini adalah 100 %
3. Persentase penyandang disabilitas yang terlayani

   Persentase penyandang disabilitas yang terlayani sebanyak 20 orang dengan target 0,77% dari 2.585 penyandang disabilitas dan terealisasi 0,77% dengan demikian pada indikator program ini sudah memberikan kontribusi sebesar 100%
4. Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani

   Persentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani sebanyak 250 anak/lansia dengan target 19,34 % dari 1.292 anak/lansia yang ada dan terealisasi 20,12 % dengan demikian pada indikator program ini memberikan kontribusi capaian kinerja sebesar 100 %
5. Persentase PMKS yang terlayani

   Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terlayani dan berada di Liponsos sebanyak 75 orang/bulan (900 orang/tahun) dan sudah terlayani seluruhnya sehingga tersealisasi 100 %.

Upaya yang telah dilakukan dengan capain indikator yang memberikan kontribusi untuk pencapaian sasaran menurunnya jumlah masyarakat miskin adalah :

1. Memberikan motivasi agar mau dan mampu untuk membentuk suatu kelompok kerja/kelompok usaha bersama dan memaksimalkan waktu yang ada dengan memberikan materi langsung lebih banyak praktek.
2. Memberikan motivasi dan mengoptimalkan para pendamping social dalam melakukan pendampingan.
3. Memberikan bimbingan kepada klien dan keluarganya.

Sedangkan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya adalah :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan.

2. Lebih meningkatkan pembinaan, motivasi dan pendampingan terhadap PMKS dan keluarga serta kelompok masyarakat di sekitar klien.
3. Mengupayakan / mengkoordinasikan dengan bidang lain untuk melaksanakan implementaria program.

Secara keseluruhan terhadap jumlah PMKS pada tahun 2016 dilakukan penanganan/pemberdayaan terhadap 28.756 orang/jiwa dan pada tahun 2017 dilakukan penanganan/pemberdayaan terhadap 31.667 orang/jiwa sehingga ada kenaikan penanganan PMKS pada tahun 2017 dibanding tahun 2016 sebesar 10,12 %, dengan rincian sebagai berikut :

Penanganan PMKS Thn. 2016-2017 di Kabupaten Sidoarjo

NO	KEGIATAN	Realisasi Tahun 2016 (Orang)	Target Kegiatan Tahun 2017 (Orang)	Capaian Kegiatan Tahun 2017 (Orang)
1	Program Keluarga Harapan	23.586	-	-
2	Bantuan Permakanan Panti Asuhan	3.672	1.915	1.915
3	Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	1.250	1.000	1.000
4	PKMS yang ditangani di Liponsos	-	900	900
5	PMKS tercover BPJS PBID	-	17.118	17.118
6	Bantuan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Cacat	47	21	21
7	Bantuan Bagi Keluarga Penerima Manfaat (APBD)	-	4.210	4.210
9	Pelatihan Desain Grafis Bagi Tuna Rungu	-	20	20
10	Pelatihan Bagi Tuna Sosial (Pelatihan Menjahit Bagi Ex. Penghuni Lapas	4	20	20
11	Pembinaan ODHA dan Pendamping	-	206	206
12	Bantuan Bagi Perintis Kemerdekaan	9	7	7
13	Bantuan Bagi Warakawuri	100	100	100
14	Bantuan anak jalanan	10	-	-
15	Aslut	78	-	-
16	Pembinaan anak dan lansia	-	250	250
17	Keluarga Penerima Manfaat Prgram Keluarga Harapan yang mendapat jaminan perlindungan kesehatan APBD	-	5.900	5.900
	JUMLAH	28.756	31.667	31.667

Sumber Data : Dinas Sosial Kab. Sidoarjo

Persoalan Sosial walaupun sudah ada penanganan tetap akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan penduduk dan persoalan-persoalan lain yang berdampak social. Sehingga untuk penanganan social harus selalu mendapatkan

perhatian atau dukungan penuh baik masalah kelembagaan maupun pendanaannya.

7. Urusan Ketenagakerjaan

Urusan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja. Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
3. Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Penyelenggaraan Transmigrasi

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka***, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

a. **Tingkat Pengangguran Terbuka**

(Jumlah Tenaga Kerja Yang Terserap dalam 9 Sektor/Bidang Usaha)

Untuk mengukur tingkat ketersediaan kesempatan kerja oleh pemerintah kabupaten maka tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu ukurannya.

Berikut grafik perkembangan tingkat pengangguran tahun 2015 sampai dengan 2017

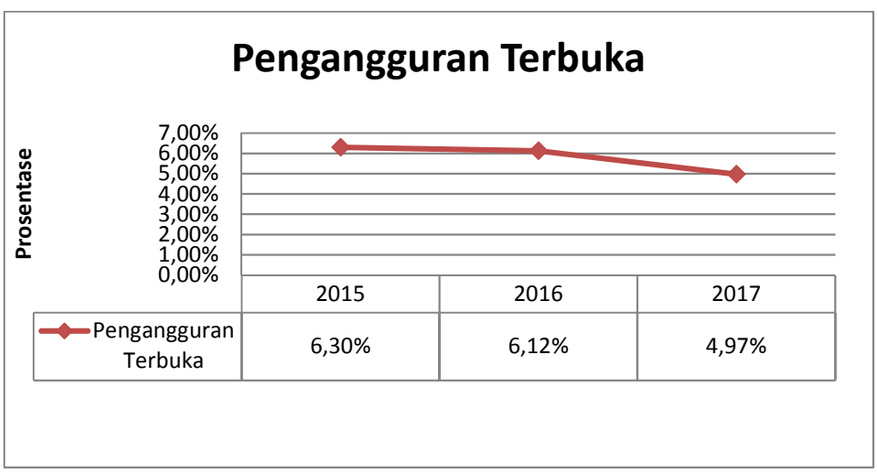

Sumber Data : Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Kemnaker RI

Dari grafik di atas terlihat bahwa tingkat pengangguran terbuka menunjukkan penurunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Dari

6,30 pada tahun 2015 terus menurun menjadi 6,12% pada tahun 2016 dan penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,97%.

Hal ini disebabkan karena adanya Stabilitas perekonomian di Kabupaten Sidoarjo yang cukup mendukung dan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mempermudah investasi.

Dalam perencanaan tenaga kerja daerah 2017 – 2021 perkembangan kesempatan kerja diproyeksikan akan terus meningkat sehingga angka pengangguran di Kabupaten Sidoarjo akan semakin menurun. Pada tahun 2015 jumlah penganggur di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 68.311 orang menurun menjadi 68.058 orang pada tahun 2016 dan menjadi 53.575 orang pada tahun 2017. Namun pertumbuhan angkatan kerja bergerak secara fluktuatif dengan angkatan kerja pada tahun 2015 sebanyak 1.083.519 orang meningkat menjadi 1.112.691 orang pada tahun 2016 namun menurun pada tahun 2017 menjadi 1.075.359 orang.

Dalam upaya mengurangi pengangguran, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Tenaga Kerja berpedoman pada perencanaan tenaga kerja melalui Buku Rencana Tenaga Kerja 2017-2021 yang bekejrasama dengan Kemneterian Ketenagakerjaan RI.

Upaya yang dilakukan untuk menekan angka pengangguran terbuka, antara lain :

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja Menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi sehingga keluaran hasil pelatihan tersertifikasi dan mampu bersaing pada dunia kerja.
2. Menyelenggarakan Bursa Kerja, baik Bursa Kerja Terbuka maupun Bursa Kerja Khusus.
3. Menjalin hubungan industrial yang kondusif guna mengurangi angka perselisihan hubungan industrial yang berdampak pada PHK.

Persentase tenaga kerja yang terserap di 9 sektor

Menurut data statistik dan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan Barenbang Kementerian Ketenagakerjaan berikut disampaikan tenaga kerja yang bekerja pada berbagai bidang / sektor pada tahun 2015, 2016 dan 2017, sebagai berikut :

Penduduk Yang Bekerja di 9 sektor unggulan

SEKTOR	2015	2016	2017
1. Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	64.648	64.999	32.933
2. Pertambangan dan penggalian	1.429	1.153	3.599
3. Industri pengolahan	366.800	368.598	360.215
4. Listrik, gas dan air	2.302	2.396	3.365
5. Bangunan	80.921	93.229	60.372
6. Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel	237.022	249.040	248.286
7. Angkutan, pergudangan dan komunikasi	49.377	50.043	46.157
8. Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan	45.455	47.049	50.815
9. Jasa kemasyarakatan	167.254	168.125	216.142

Sumber data : Pusat PTK Kemnaker RI

Data penduduk yang bekerja pada tahun 2015 – 2017 mengalami perubahan yang bervariasi namun sektor Industri pengolahan dan Perdagangan masih menjadi ikon Kabupaten Sidoarjo walaupun mengalami penurunan, sector Industri pengolahan dan perdagangan merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar. Penurunan dari semua sector banyak beralih pada jasa kemasyarakatan yang pada tahun 2017 mengalami meningkatan yang cukup tinggi dari 168.125 orang pada tahun 2016 menjadi 216.142 orang pada tahun 2017.

Untuk pencapaian sasaran RPJMD dan Sasaran Renstra dengan indikator utamanya didukung dengan program dan indikator program statejik antara lain:

b. **Persentase pencari kerja yang ditempatkan**

Perkembangan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

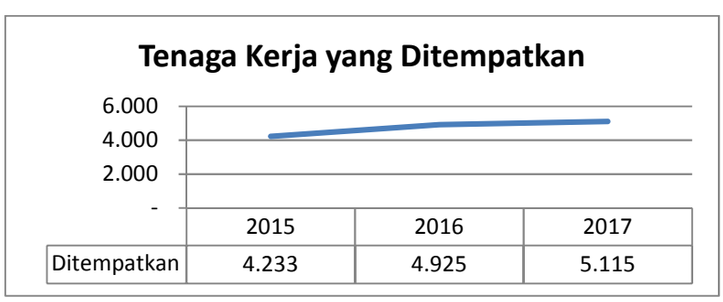

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja Kab. Sidoarjo

Pada tahun 2017, jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan dan terlaporkan sebanyak 5.115 orang dan meningkat dari tahun 2016 sebanyak 190 orang atau 3,86%. Hal ini menunjukkan adanya upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi masalah pengangguran.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penempatan tenaga kerja, antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Bursa Kerja
2. Bekerjasama dengan sektor swasta dalam hal rekruitmen tenaga kerja

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Perjanjian Bersama

Berikut adalah tabel perkembangan jumlah perusahaan yang telah membuat/membentuk sarana hubungan industrial :

Perkembangan perusahaan yang telah membentuk sarana Hubungan Industrial

No	Jenis Sarana HI	2015	2016	2017
1	Peraturan Perusahaan	242	250	463
2	Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	24	34	52
3	LKS Bipartit	155	179	193

Sarana hubungan industrial sangat penting dalam mendukung terciptanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan bekeadilan di dalam perusahaan. Hal ini karena dalam peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tercantum dengan jelas akan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik pengusaha maupun pekerja/buruh.

Sedangkan keberadaan LKS (Lembaga Kerja Sama) Bipartit yang merupakan fórum komunikasi, konsultasi untuk musyawarah antara wakil serikat pekerja/serikat buruh atau pekerja/buruh sangat diperlukan pada tingkat perusahaan guna membahas masalah hubungan industrial dalam rangka peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan pekerja yang menjamin kelangsungan usaha dan terciptanya kesempatan kerja.

Sehingga di Kabupaten Sidoarjo tercipta hubungan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan dan bermartabat, dan para calon investor asing akan menanamkan investasinya di Kabupaten Sidoarjo dengan rasa aman dan nyaman.

Upaya yang dilakukan agar perusahan mau membentuk sarana hubungan industrial melalui perjanjian kerja bersama, yaitu melalui sosialisasi dan pembinaan ke perusahaan.

8. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***"Terwujudnya Pengarusutamaan Gender yang Berkeadilan",*** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Gender Development Indeks (GDI) atau Indeks Pembangunan Jender (IPG) digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas jender. Variabel Penyusun IPG Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2015 dengan menggunakan metode penghitungan baru. Komponen pendukung IPG sama dengan komponen pendukung IPM yaitu meliputi dimensi Kesehatan yang digambarkan dari Angka Harapan Hidup, Pengetahuan yang digambarkan dari Harapan Lama Sekolah dan Rata – rata lama Sekolah serta Ekonomi yang digambarkan dengan Pengeluaran Perkapita.

Perkembangan IPG adalah sebagai berikut :

IPG Th. 2015-2017 di Kabupaten Sidoarjo

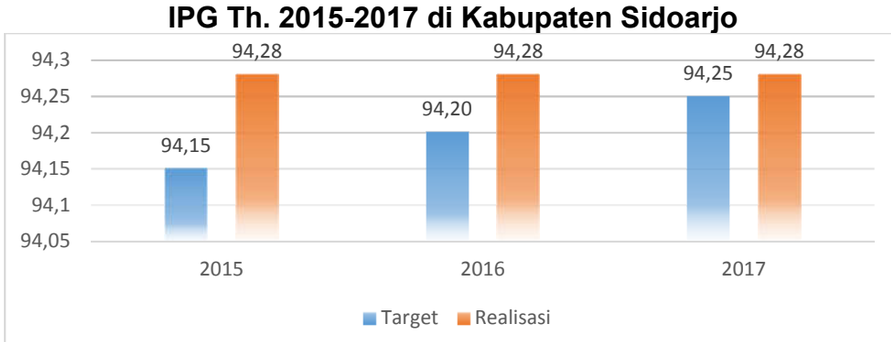

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB Kab. Sidoarjo

Adapun komponen pendukung IPJ Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 (Proyeksi) adalah sebagai berikut :

1) Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76%;
2) Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Sidoarjo untuk penduduk laki-laki dari 70,99 tahun sedangkan untuk penduduk perempuan 74,94 tahun;
3) Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu untuk penduduk laki-laki 13,61% sedangkan untuk penduduk perempuan 14,14%;
4) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu untuk penduduk laki-laki dari 10,63 tahun, sedangkan untuk penduduk perempuan 9,64 tahun;
5) Pengeluaran perkapita, laki-laki 17,91% sedangkan perempuan 12,50%;

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pembangunan Gender (IPG) dapat dilihat bahwa realisasi Indek Pembangunan Gender tahun 2017 sebesar 94,28 % (proyeksi) atau tercapai 100,08% dari target IPG tahun 2017 sebesar 94,25%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 94,20%, terjadi peningkatan 0,05% pada tahun 2017.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Gender Empowerment Measurement (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Jender (IDG) digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusi dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Perkembangan IDG adalah sebagai berikut :

IDG Th. 2015-2017 di Kabupaten Sidoarjo

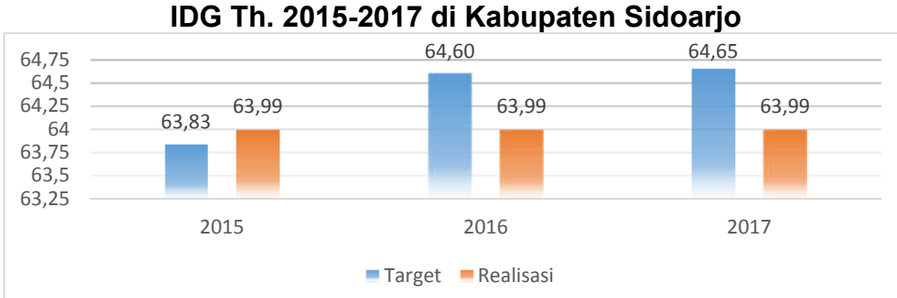

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB Kab. Sidoarjo

Adapun variabel penyusun IDJ Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 (proyeksi) adalah sebagai berikut :

- Proporsi penduduk, jumlah penduduk laki-laki 50,24% sedangkan perempuan sebesar 49,76%
- Keterwakilan di parlemen, laki-laki 86,00 % sedangkan perempuan 14,00%
- Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi, laki-laki 52,76 % sedangkan perempuan 47,24 %
- Proporsi angkatan kerja (persentase penduduk aktif dalam kegiatan ekonomi), laki-laki 71,00 % sedangkan perempuan 29,00 %

Dari hasil penghitungan komponen pendukung Indek Pemberdayaan Gender (IDG) dapat dilihat bahwa pencapaian Indek Pemberdayaan Gender tahun 2017 sebesar 63,99 % (proyeksi) atau tercapai 98,98% dari target IDG tahun 2017 sebesar 64,65%

3. Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak

Untuk mengukur perhatian pemerintah kabupaten terhadap perlindungan perempuan dan anak adalah dengan mengukur sampai sejauhmana fasilitasi yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten terhadap tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Kejadian tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo penanganannya di fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Sidoarjo.

Jumlah kejadian tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan tahun 2017 melalui P2TP2A sebanyak 185 kasus dan 100% teradvokasi.

Perkembangan Temuan Kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah sebagai berikut :

Kasus Kekerasan Dan Trafiking Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Diselesaikan

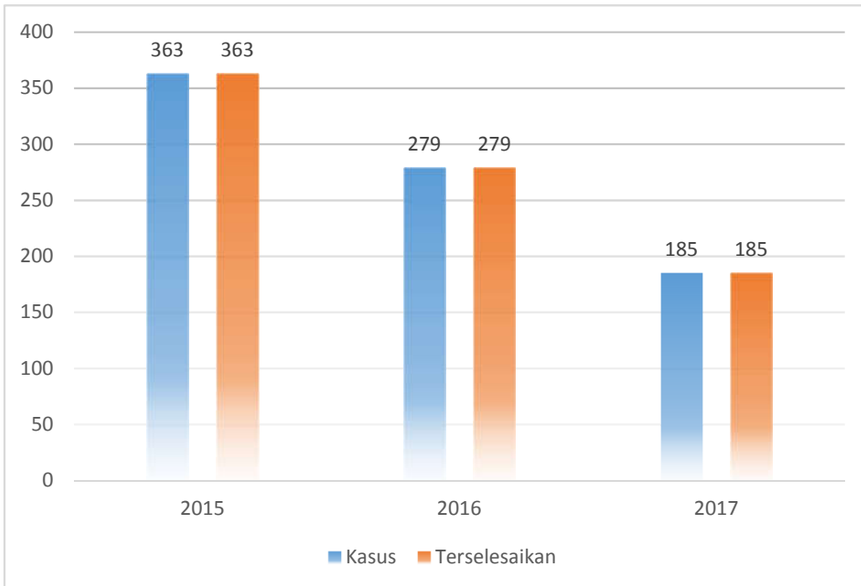

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB Kab. Sidoarjo

Sedangkan apabila dirinci kasus kekerasan yang dialami meliputi :

NO	JENIS KASUS	JUMLAH KASUS	TERADVOKASI	%
1	KDRT UMUM	74	74	100
2	KDRT KHUSUS (Kekerasan Terhadap Istri / KTI)	0	0	0
3	KEKERASAN TERHADAP ANAK (KTA)	16	16	100
4	KEKERASAN DALAM HUBUNGAN KERJA (KDK)	0	0	0
5	KEKERASAN DALAM PACARAN (KDP)	1	1	100
6	KEKERASAN EKONOMI (KE)	4	4	100
7	PELECEHAN SEKSUAL	2	2	100
8	PENCABULAN	42	42	100
9	PERKOSAAN	0	0	-
10	TRAFIKING	2	2	100
11	PENGANIAYAAN	6	6	100
12	LAIN - LAIN	38	38	100
	TOTAL	**185**	**185**	**100**

Upaya advokasi yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus kekerasan pada perempuan dan anak, yaitu :

1. Bekerjasama dengan LSM, Perguruan tinggi, Organisasi profesi, Organisasi masyarakat, Relawan dan Pemerintah
2. Membangun jaringan dengan kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Rumah Sakit Umum (RSU), Dinkes, Psikiater, Kemeterian Agama.
3. Melakukan validasi data korban kekerasan terhadap perempiuan dan anak kesemua pelayanan yang menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4. Untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan yang berpotensi dialami dilakukan Pencegahan yaitu Mensosialisasikan tentang undang undang perlindungan perempuan dan anak melalui sekolah-sekolah, Jaringan P2TP2A kecamatan, Organisasi kemasyarakatan dan Keluarga.

9. Urusan Pangan

Urusan Pangan ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Panga dan Pertanian. Program pembangunan untuk urusan Pangan yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Ketersedian, Cadangan dan Distribusi Pangan
2. Program peningkatan penganekaragaman, kewaspadaan pangan dan gizi
3. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran "***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan"***, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Sub sistem ketersediaan mencakup pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi Kabupaten, cadangan pangan dalam Kabupaten maupun dari luar Kabupaten.

Sub sistem distribusi mencakup pengaturan untuk menjamin aksesibilitas penduduk secara fisik dan ekonomi terhadap pangan antar-wilayah dan waktu serta stabilitas harga pangan strategis. Sub sistem konsumsi mencakup

pengelolaan pangan di tingkat daerah maupun rumah tangga. untuk menjamin setiap individu memperoleh pangan dalam jumlah, gizi, keamanan, keragaman dan keterjangkauan sesuai kebutuhan dan pilihan.

Aspek ketersediaan pangan di Kabupaten Sidoarjo telah mencukupi sampai pelosok wilayah, walaupun produksi tidak cukup tersedia, sehingga untuk mencukupi ketersediaan diperlukan bahan pangan dari luar daerah Kabupaten Sidoarjo. Untuk aspek kualitas pangan dari semua unsur yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, protein nabati maupun hewani telah tersedia dan cukup untuk dikonsumsi meskipun sebagian mendatangkan dari luar daerah. Aspek distribusi yang berfungsi dengan baik akan mampu menggerakkan produk pangan kepada konsumen dalam waktu, tempat, bentuk dan mutu yang diinginkan dengan biaya minimal. Dengan demikian efisiensi sistem distribusi secara langsung ataupun tidak langsung akan berkaitan dengan daya beli masyarakat dan pendapatan petani. Aspek konsumsi pangan dikatakan ideal apabila pangan masyarakat telah memenuhi kaidah pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA). Kondisi itu dapat dilihat dari aspek kuantitas dan aspek kualitas. Kuantitas pangan digunakan untuk mengetahui cukup atau tidaknya jumlah konsumsi pangan penduduk untuk hidup sehat dan produktif, sedangkan kualitas pangan digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.

Tingkat ketersediaan pangan selain dilihat dari kecukupan gizinya, baik energi dan protein, juga dinilai dari sisi keberagaman ketersediaan gizi berdasarkan Pola Pangan Harapan (PPH). PPH tingkat ketersediaan dihitung berdasarkan ketersediaan energi Neraca Bahan Makanan (NBM). Keberagaman ketersediaan pangan akan mendukung pencapaian keberagaman konsumsi pangan sehingga dapat dicapai sasaran konsumsi pangan yang diharapkan.

Dalam perhitungan dan pencapaian skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan mengalami perubahan rumusan. Untuk tahun 2015 dan tahun sebelumnya PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan analisa GAP antara produksi dan konsumsi pangan di Kabupaten Sidoarjo. Tetapi mulai tahun 2016 PPH Ketersediaan dihitung berdasarkan produksi, cadangan dan pasokan pangan dari daerah lain yang dianalisis berdasarkan survey konsumsi pangan masyarakat yang dituangkan dalam Neraca Bahan Makan (NBM). Perubahan rumus dalam perhitungan PPH Ketersediaan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian perhitungan PPH Ketersediaan yang dilakukan pusat.

Skor PPH tingkat ketersediaan berdasarkan Neraca Bahan Makanan tahun 2017 menunjukkan skor 89,32 persen, apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 2,3% hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di kabupaten Sidoarjo sudah cukup beragam.

Perkembangan realisasi pola pangan harapan ketersediaan tahun 2017 terlihat pada data berikut :

PERKEMBANGAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN

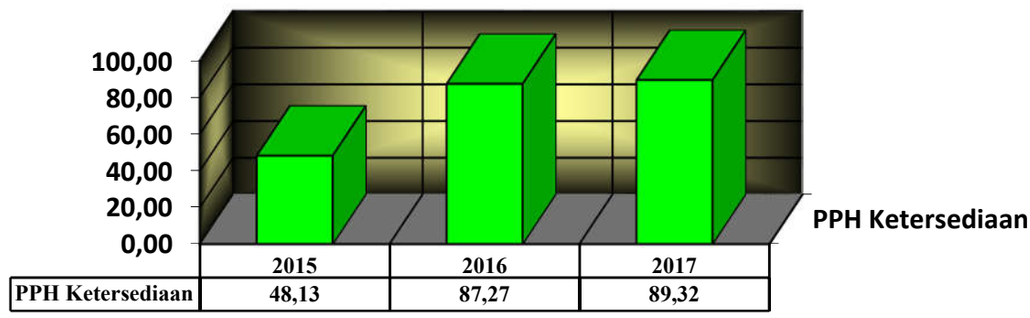

Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi

Adalah nilai capaian yang mencerminkan tingkat konsumsi pangan masyarakat dibanding tingkat konsumsi pangan ideal yang memenuhi kaidah pangan yang beragam,bergizi, seimbang dan aman (B2SA). Kondisii ini dapat dilihat dari aspek kuantitatif dan kualitatif. Dari aspek kuantitatif digunakan untuk mengetahui cukup tidaknya jumlah konsumsi pangan yang dikonsumsi, sedang kualitatif digunakan untuk mengetahui keseimbangan gizi dari aneka ragam pangan yang dikonsumsi penduduk.,

Perkembangan realisasi pola pangan harapan konsumsi tahun 2017 terlihat pada data berikut :

PERKEMBANGAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KONSUMSI

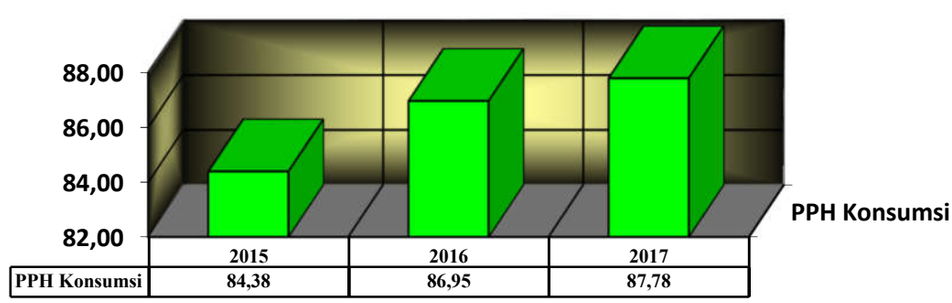

Mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari Skor PPH Konsumsi. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin berimbang dan seimbang Pangan yang dikonsumsi secara beragam dalam jumlah cukup dan seimbang akan mampu memenuhi kebutuhan zat gizi. Capaian Skor PPH Konsumsi pada tahun 2017 sebesar 87,78 , apabila dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0,83 dan sudah mencapai target yang telah ditentukan yaitu sebesar 87,5.

Perkembangan pola pangan harapan diupayakan selalu meningkat dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Mengembangkan rumah pangan lestari dengan menitikberatkan pada budidaya sayuran, buah dan ikan.
b. Pengaturan kestabilan dan kesinambungan penyediaan pangan yang berasal dari produksi kabupaten, cadangan pangan dalam maupun luar kabupaten.
c. Internalisasi konsumsi B2SA untuk meningkatkan kesadaran konsumsi bahan lokal melalui advokasi, kampanye, promosi dan sosialisasi serta jalur pendidikan formal maupun informal;

a. Ketersediaan Pangan Daerah

Hasil produksi kabupaten Sidoarjo untuk pemenuhan kebutuhan pangan daerah dipenuhi dengan ketersediaan pangan khususnya beras.

Perkembangan pemenuhan kebutuhan pangan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Ketersediaan Pangan Utama

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH	(Gr/Kap/Thn)	(Kg/Kap/Thn)	(Ton/Tahun)
1	Padi – Padian	20.14	98,284.24	98.284	212,457.01
	Beras Giling		86,281.97	86.282	186,512.19
	Jagung Pipilan		2,041.59	2.042	4,413.22
	Tepung Terigu		9,960.68	9.961	21,531.59
2	Umbi – Umbian	0.92	10,078.69	10.079	21,786.70
	Ketela Pohon		8,548.43	8.548	18,478.79
	Ubi Jalar		1,530.27	1.530	3,307.91
	Sagu		-	0.000	-
	Kentang		5,725.68	5.726	12,376.97
	Talas		-	0	-

3	Pangan Hewani	22.23	73,080.24	73.08	157,974.56
	Daging Ruminansia		6,256.48	6.256	13,524.38
	Daging Unggas		13,743.17	13.743	29,708.04
	Telur		7,650.42	7.650	16,537.59
	Susu		16,468.27	16.468	35,598.79
	Ikan		26,965.18	26.965	58,289.52
	Jeroan		1,996.72	1.997	4,316.24
4	Minyak dan Lemak	4.95	9,631.36	9.631	20,819.71
	Minyak Sawit		8,958.11	8.958	19,364.38
	Minyak Kelapa		291.37	0.291	629.85
	Minyak Kacang Tanah		271.11	0.271	586.05
	Lemak		110.76	0.111	239.43
5	Buah/Biji Berminyak	0.09	810.40	0.810	1,751.80
	Kelapa		810.40	0.810	1,751.80
6	Kacang - Kacangan	10.00	12,443.75	12.444	26,899.15
	Kacang Tanah		960.01	0.960	2,075.20
	Kacang Kedelai		10,857.12	10.857	23,469.39
	Kacang Hijau		584.95	0.585	1,264.46
	Kacang Merah		41.67	0.042	90.09
7	Gula	2.10	10,078.92	10.079	21,787.19
	Gula Pasir		9,671.93	9.672	20,907.42
	Gula Kelapa		406.99	0.407	879.76
8	Sayur dan Buah	28.90	185,139.45	185.14	400,208.36
	Sayur – Sayuran		135,387.36	135.387	292,661.31
	Buah – Buahan		49,752.09	49.75	107,547.05
	Jumlah Skor PPH	**89.32**	399,547.05	399.55	863,684.47

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan per kapita di Kabupaten Sidoarjo yang paling dominan adalah pada kelompok padi-padian, sayur, buah dan pangan hewani. Ketersediaan padi-padian mencapai 98.284 kg/kap/tahun, sayur dan buah sebesar 185,14 kg/kap/tahun sedangkan pangan hewani mencapai 73.08 kg/kap/tahun.

Pemenuhan kebutuhan pangan harus menjaga produksi pangan dengan tetap menghadapi resiko-resiko yang sewaktu-waktu dapat mengancam sistem produksi pangan kita antara lain :

- stock dan cadangan pangan
- menjaga stabilitas harga(gabah) di tingkat petani

Upaya yang dilakukan antara lain :

- Meningkatkan pemenuhan sayur dan buah di tingkat rumah tangga dengan kegiatan pemanfaatan perkarangan dengan sistem KRPL dan hidroponik
- Meningkatkan kualitas pangan melalui kegiatan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan
- melakukan kegiatan temu kemitraan dengan lembaga penggilingan gabah
- melakukan temu teknis dan rapat koordinasi dengan gapoktan yang memiliki usaha pendistribusian gabah/beras
- melakukan kerjasama dengan lembaga pengilingan melalui bank Jatim berupa dana bergulir untuk pembelian gabah petani.

10. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program pembangunan dan pengembangan infrastruktur Lingkungan permukiman.

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***"Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian",*** dengan indikator kinerja pendukung urusan pertanahan, yaitu penyelesaian kasus pertanahan dan fasilitasi pengadaan tanah.

11. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan hidup dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

Program pembangunan untuk urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
3. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
4. Program Penerangan Jalan dan Lingkungan

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana,** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah :

- Memberikan Informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah :

- Indeks Kualitas / Pencemaran Air
- Indeks Kualitas / Pencemaran Udara
- Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD untuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 50,01. Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 48,79 sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 97,56 %. Apabila dibandingkan

dengan realisasi tahun 2016 sebesar 49,26 maka realisasi di Tahun 2017 mengalami peningkatan. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup didapatkan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi yaitu sebagai berikut:

Komponen Penilaian	**Bobot**	**Nilai Indeks**	**Total Nilai = (Bobot x Nilai Indeks)**
Indeks Kualitas Air	30 %	49,77	14,93
Indeks Kualitas Udara	30 %	82,05	24,62
Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	40 %	23,11	9,24
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			**48,79**

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2017 sebagai berikut

URAIAN	**TAHUN**	
	2016	**2017**
Indeks Kualitas Air	49,54	49,77
Indeks Kualitas Udara	84,04	82,05
Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	22,97	23,11
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	**49,26**	**48,79**

- Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air merupakan hasil dari penjumlahan nilai status mutu air. Jumlah pemantauan kualitas air dilakukan sebanyak 86 pemantauan. Pemantauan kualitas air dilakukan di 13 Afvour / Kali antara lain Afvour Bahgepuk, Afvour Buduran, Afvour Buntung, Afvour Kedunguling, Afvour Kemambang, Afvour Ketintang Pucang, Kali Mangetan Kanal, Kali Pelayaran, Afvour Sekardangan, Afvour Sidokare, Afvour Sumber, Afvour Bulubendo, Kali Porong Kanal. Pemantauan dilakukan masing-masing afvour / kali terdapat 3 lokasi dengan intensitas 2 kali pemantauan di Semester 1 dan 2. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 50,29 Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 49,77 sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 98,97 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 49,54 maka realisasi di Tahun 2017 mengalami peningkatan. Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dari hasil sebagai berikut

Status	Jumlah	Persen	Koefisien	Nilai
Memenuhi	5	6%	70	4,07
Ringan	75	87%	50	43,60
Sedang	6	7%	30	2,10
Berat	0	0%	10	0,00
Jumlah Pemantauan	86			
Nilai Indeks Kualitas Air				**49,77**

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

URAIAN	TAHUN	
	2016	**2017**
Nilai Status Memenuhi	4,83	4,07
Nilai Status Ringan	41,95	43,60
Nilai Status Sedang	2,76	2,10
Nilai Status Berat	0,00	0,00
Nilai Indeks Kualitas Air	**49,54**	**49,77**

- Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan hasil rerata IEU SO_2 dan IEU NO_2 yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Kualitas Udara. Indeks Kualitas Udara diperoleh dari data passive sampler di 4 Kawasan yaitu Transportasi, Industri / Agro Industri, Pemukiman dan Perkantoran / Komersial dilakukan sebanyak 2 kali pemantauan di Semester 1 dan 2. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 84,79 Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 82,05 sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 96,77 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 84,04 maka realisasi di Tahun 2017 mengalami penurunan. Nilai Indeks Kualitas Udara didapatkan dari hasil sebagai berikut

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO_2	15,88	40,00	0,39
SO_2	8,98	20,00	0,45
Rata-Rata			0,42
Indeks Kualitas Udara = 100-((50/0,9)*(Rata-rata-0,1))			**82,05**

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Udara Tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

URAIAN	TAHUN	
	2016	2017
IEU NO_2	0,57	0,39
IEU SO_2	0,21	0,45
Rata-Rata	0,39	0,42
Nilai Indeks Kualitas Udara	**84,04**	**82,05**

- Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi

Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi merupakan hasil pembagian luas tutupan lahan di Sidoarjo dan luas Wilayah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya dikonversi melalui persamaan Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 23,72 Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 23,11 sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 97,43 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 22,97 maka realisasi di Tahun 2017 mengalami peningkatan. Nilai Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2017 diperoleh sebagai berikut

Uraian	Nilai
Jumlah Penduduk	2.214.377
Luas Wilayah (km^2)	714,243
Luas Tutupan Vegetasi (km^2)	5,69
Vegetasi / Luas Wilayah	0,80 %
Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi = 100-((84,3-((Vegetasi/Luas Wilayah)*100))*(50/54,3))	**23,11**

Perkembangan Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan / Vegetasi Tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017
Jumlah Penduduk	2.161.659	2.214.377
Luas Wilayah (km^2)	714,243	714,243
Luas Tutupan Vegetasi (km^2)	4,64	5,69
Vegetasi / Luas Wilayah	0,65 %	0,80 %
Nilai Indeks Tutupan Lahan / Vegetasi	**22,97**	**23,11**

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) belum memenuhi target.

Upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup, antara lain :

1. Meningkatkan penanaman pohon penyerap polutan
2. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembersihan sampah di sungai
3. Melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan seperti program Desa Berseri, Adiwiyata, Sidoarjo Bersih dan Hijau, Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Dokumen Lingkungan dan lain-lain.
4. Melaksanakan koordinasi dengan OPD terkait dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan layak jalan dari kendaraan bermotor
5. Meningkatkan pembangunan taman lingkungan, taman kota, lapangan olah raga, hutan kota, dan lainnya

Untuk mendukung keberhasilan peningkatan kualitas lingkungan hidup, didukung oleh indikator – indikator kinerja sebagai berikut :

- **Pemenuhan Baku Mutu Air**

Pemenuhan baku mutu air diperoleh dari Jumlah sample dengan BOD sesuai baku mutu air dibagi Jumlah sample Air Badan Air yang ada kemudian dikalikan 100 %. Jumlah pengujian kualitas air badan air sebanyak 86 (Delapan Puluh Enam) pengujian. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 28 % Sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 25,58 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 91,36 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 23 % maka realisasi di Tahun 2017 mengalami peningkatan. Nilai presentase pemenuhan baku mutu air Tahun 2017 diperoleh sebagai berikut

Uraian	Jumlah
Jumlah sample dengan BOD memenuhi	22 sample
Jumlah sample yang ada	86 sample
Persentase pemenuhan baku mutu air (%)	**25,58**

Perkembangan Nilai presentase pemenuhan baku mutu air Tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Uraian	Jumlah	Jumlah
Jumlah sample dengan BOD memenuhi (sample)	20	22
Jumlah sample yang ada (sample)	87	86
Persentase pemenuhan baku mutu air (%)	23	25,58

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas air badan air antara lain

a. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam rangka pembersihan sampah di sungai
b. Melaksanakan program yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dan kegiatan terhadap kualitas lingkungan seperti program Desa Berseri, Adiwiyata, Sidoarjo Bersih dan Hijau, Status Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan Dokumen Lingkungan dan lain-lain.

➢ **Pemenuhan Baku Mutu Udara**

Pemenuhan baku mutu udara diperoleh dari Jumlah sample dengan parameter SO_2 dan NO_2 sesuai baku mutu udara ambien dibagi Jumlah sample udara ambien yang ada dikalikan 100 %. Pemantauan kualitas mutu udara ambien tahun 2017 untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan di 30 (Tiga Puluh) titik lokasi. Pemantauan dilakukan sebanyak 2 (Dua) periode yaitu Semester 1 dan Semester 2. Pemantauan kualitas baku mutu udara ambien di titik lokasi sampling diuji terhadap 2 (Dua) parameter yaitu SO_2 dan NO_2. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 100 % sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 100 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 100 %. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100 % maka realisasi di Tahun 2017 dapat mempertahankan realisasi dari tahun sebelumnya. Nilai presentase pemenuhan baku mutu udara Tahun 2017 diperoleh sebagai berikut

Uraian	Jumlah	Jumlah
Jumlah sample dengan SO_2 dan NO_2 memenuhi (sample)	72	72
Jumlah sample yang ada (sample)	72	72
Persentase pemenuhan baku mutu air (%)	100	100

Upaya - upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kualitas udara ambien antara lain

a. Melakukan pemantauan terhadap kualitas udara ambien di beberapa titik pantau yang menjadi pusat kegiatan di Kabupaten Sidoarjo
b. Melaksanakan *Car Free Day*
c. Melaksanakan penanaman pohon yang dapat menyerap polutan di Kabupaten Sidoarjo

➢ **Penanganan sampah**

Indikator ini menggambarkan jumlah sampah yang berhasil ditangani Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dengan semakin banyaknya jumlah sampah yang tertangani berarti polusi yang diakibatkan oleh sampah semakin berkurang yaitu sampah yang dibuang ke sembarang tempat oleh masyarakat semakin berkurang sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya banjir khususnya di wilayah padat penduduk.

Penanganan sampah tersebut difasilitasi dengan sarana transportasi pengangkut sampah berupa 26 unit Dum Truck, 24 Unit Arm Roll dan 10 Unit Pick Up. Dengan kapasitas 8 meter kubik untuk Dump Truck, 6 meter kubik untuk Arm Roll, serta 4 meter kubik untuk Pick Up. Mobilitas tiap kendaraan yaitu 3 Rit untuk tiap harinya.

Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 55 % sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 55 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100 % maka realisasi di Tahun 2017 dapat mempertahankan realisasi dari tahun sebelumnya. Perkembangan persentase sampah yang dikelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tahun 2016-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

URAIAN	SATUAN	TAHUN	
		2016	2017
Jumlah sampah yang ditangani	m^3 / hari	2162	3057
Jumlah produksi sampah	m^3 / hari	5404	5557
Persentase sampah yang dikelola	%	40	55

Upaya yang dilakukan untuk penanganan sampah, antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan pengawasan oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) mengenai program 3 R
2. Memaksimalkan fasilitas operasional TPST yang ada
3. Mengidentifikasi sarana dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas sarana prasarana TPST
4. Memaksimalkan kegiatan pengoperasional TPST sesuai dengan dana pengoperasional yang ada
5. Melakukan sosialisasi program 3 R oleh Tim Sosialisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo untuk Agen perubahan
6. Telah dilakukan pengurugan akses jalan ke TPA agar dapat dilalui kendaraan pengangkut sampah
7. Memberikan kompensasi berupa sembako kepada masyarakat sekitar TPA
8. Penggantian sparepart pada alat berat
9. Memaksimalkan sarpras IPAL yang ada
10. Melakukan koordinasi dengan Kepala Seksi Pengelolaan Sampah terkait pengangkutan sampah yang dapat dialihkan ke TPST
11. Pengadaan kendaraan pengangkutan sampah

Dari permasalahan penanganan sampah tersebut, telah dilakukan pula upaya penanganan melalui pengelolaan sampah mandiri oleh masyarakat berupa pengomposan yang saat ini terdapat di 96 (Sembilan Puluh Enam) lokasi pemilahan sampah atau TPST, yaitu :

No.	Kecamatan	TPST	Lokasi (Desa / Kelurahan)
1	SIDOARJO	BLURU KIDUL (Kawasan)	Bluru Kidul
2		SARIROGO	Sarirogo

No.	Kecamatan	TPST	Lokasi (Desa / Kelurahan)
3		SEKARDANGAN	Sekardangan
4		TAMAN PINANG	Lemahputro
5		RANGKAH KIDUL (Kawasan)	Rangkah Kidul
6		CEMENG BAKALAN	Cemeng Bakalan
7		BANJAR BENDO (Kawasan)	Banjar bendo
8	BUDURAN	SIWALAN PANJI	Siwalan Panji
9		SUKOREJO	Sukorejo
10		DUKUH TENGAH	Dukuh Tengah
11		DAMARSI	Damarsi
12		SAWOHAN	Sawohan
13		WADUNGASIH	Wadungasih
14		SIDOMULYO	Sidomulyo
15		PRASUNG	Prasung
16	CANDI	GELAM	Gelam
17		NGAMPELSARI	Ngampelsari
18		BLIGO	Bligo
19		PASAR LARANGAN	Larangan
20		KECAMATAN CANDI	Durungbedug
21	PORONG	CANDIPARI (Kawasan)	Candipari
22		LAPAS PORONG	Kebonagung
23	KREMBUNG	CANGKRING	Cangkring
24	TULANGAN	KENONGO	Kenongo
25		KEPUH KEMIRI	Kepuh Kemiri
26		KEBARON	Kebaron

No.	Kecamatan	TPST	Lokasi (Desa / Kelurahan)
27		KEPATIHAN	Kepatihan
28		GRABAGAN	Grabagan
29		PANGKEMIRI	Pangkemiri
30		GELANG	Gelang
31		TULANGAN (Kawasan)	Tulangan
32		KEDONDONG	Kedondong
33	TANGGULANGIN	KALISAMPURNO	Kalisampurno
34		BANJARPANJI	Banjarpanji
35		RANDEGAN	Randegan
36		PENATARSEWU	Penatarsewu
37		NGABAN	Ngaban
38		KETEGAN	Ketegan
39		PUTAT	Putat
40	JABON	PANGGREH	Panggreh
41		JEMIRAHAN	Jemirahan
42		RUMAH KOMPOS KALISOGO	Tambak Kalisogo
43	KRIAN	KRATON	Kraton
44		TERUNG KULON	Terung Kulon
45		TERUNG WETAN	Terung Wetan
46		BARENGKRAJAN (Kawasan)	Barengkrajan
47		KATERUNGAN	Katerungan
48		KRIAN	Krian
49		PONOKAWAN	Ponokawan

No.	Kecamatan	TPST	Lokasi (Desa / Kelurahan)
50		TAMBAK KEMERAKAN	Tambak Kemerakan
51		PASAR KRIAN	Krian
52	BALONGBENDO	WONOKUPANG	Wonokupang
53		BAKUNG TEMENGGUNGAN	Bakung Temenggungan
54		JABARAN	Jabaran
55		PENAMBANGAN	Penambangan
56		SUWALUH	Suwaluh
57	WONOAYU	JIMBARAN KULON	Jimbaran Kulon
58		SAWOCANGKRING	Sawocangkring
59		SUMBEREJO	Sumberejo
60		WONOAYU	Wonoayu
61	PRAMBON	BENDOTRETEK	Bendotretek
62		JEDONGCANGKRING	Jedongcangkring
63		SIMPANG	Simpang
64		TAS 5	Temu
65		KEDUNGKEMBAR	Kedungkembar
66	TAMAN	SAMBI BULU	Sambi Bulu
67		TAMAN (Kawasan)	Taman
68		PASAR TAMAN	Sepanjang
69	SUKODONO	PLUMBUNGAN	Plumbungan
70		SURUH 1	Suruh
71		SURUH 2	Suruh
72		MASANGAN WETAN	Masangan Wetan
73	GEDANGAN	KRAGAN	Kragan
74		GEMURUNG	Gemurung

No.	Kecamatan	TPST	Lokasi (Desa / Kelurahan)
75		SEMAMBUNG	Semambung
76		KARANGBONG	Karangbong
77		BANGAH	Bangah
78		SRUNI	Sruni
79		KETAJEN	Ketajen
80		KEBOANSIKEP	Keboansikep
81		TEBEL	Tebel
82	WARU	KEDUNG REJO	Kedung rejo
83		BUNGURASIH	Bungurasih
84		TAMBAK REJO (Kawasan)	Tambak Rejo
85		JANTI	Janti
86		NGINGAS	Ngingas
87		BERBEK	Berbek
88		KEPUH KIRIMAN (REWWIN)	Kepuh Kiriman
89	SEDATI	BANJAR KEMUNING	Banjar Kemuning
90		BETRO	Betro
91		BUNCITAN	Buncitan
92		CEMANDI	Cemandi
93		PEPE	Pepe
94		PRANTI	Pranti
95		SEDATI AGUNG	Sedati Agung
96		SEDATI GEDE (Kawasan)	Sedati Gede
	JUMLAH	**96 TPST**	

- **Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mempunyai manfaat Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya. Ketersediaan RTH di Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NOMOR : 05/PRT/M/2008 yaitu 30 % dikali Luas Wilayah Perkotaan Sidoarjo (35.057,44 Hektar) sehingga luas RTH yang harus ada 10.517,23 Hektar. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 3,60 % (378,62 Hektar) sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 3,60 % (378,62 Hektar) sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 3,57 % maka realisasi di Tahun 2017 mengalami peningkatan. Realisasi Luas wilayah RTH 378,62 Hektar merupakan gabungan luas wilayah RTH Privat dan RTH Publik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Luas RTH Publik yang dikelola Pemerintah Kabupaten Sidoarjo seluas 36,05 hektar.

Upaya dan Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) perumahan yang belum sesuai dengan ketentuan yakni 10% rth privat yang berupa taman depan rumah atau halaman dan 20% rth publik yang dapat berupa taman bermain atau taman publik milik perumahan
2. Menanami pohon di sepanjang potensi ruang hijau seperti pedestrian, sempadan sungai, sempadan rel dan dapat dijadikan jalur ramah lingkungan
3. Melakukan kerjasama pembangunan ruang terbuka hijau dengan institusi institusi yang memiliki program tanggung jawab dan lingkungan (corporate social responsibility)
4. Memanfaatkan ruang-ruang terbangun seperti gedung pemerintahan melalui penanaman tanaman pada atap ataupun tembok bangunan (*green building*)

Rekapitulasi Luasan RTH Publik yang Dikelola sampai dengan tahun 2017:

No	Jenis RTH	Luas RTH
		m^2
1	Taman Aktif	133.478,94
2	Taman Pasif	22.922,77
3	Median Jalan	50.469,20
4	Bahu Jalan	10.874,00
5	Pedestrian	42.710,72
6	Makam	100.000,00
Jumlah		360.455,63
Luasan RTH dalam Ha		**36,05**

Sedangkan taman kota yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Sidoarjo, diantaranya :

No	Taman	Lokasi	Keterangan
1	***2***	***3***	***4***
1	Taman Tanjung Puri	Desa Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo	Bekas tempat pembuangan akhir (TPA)
2	Taman Abirama	Perum. Pondok Jati, Kec. Sidoarjo	Fasum Perum. Pondok Jati
3	Taman Apkasi	Jl. Raya Porong Kec. Porong	Bekas Pasar Porong
4	Taman Dwarakerta	Jl. Raya Porong Kec. Porong	Bekas Kawedanan Porong
5	Taman Abirupa	Desa Tambakemerakan, Kec. Porong	Bekas Pasar Sapi
6	Taman RTH Kec. Taman	Depan Kantor Kelurahan Taman, Kec. Taman	Ex. Tanah TKD Kelurahan Taman
7	Taman RTH Makam Mbah Djaelani	Desa Kajeksan, Kec. Tulangan	Tanah TKD Kelurahan Jatirejo, Kec. Porong
8	Taman Jinan	Kecamatan Sedati	Median Jl. Djuanda
9	Taman Mangundiprojo	Kecamatan Buduran	Sempadan Fly Over Buduran
10	Taman Monumen Perjuangan	Kecamatan Gedangan	Sempadan jalan dan Rel KA
11	Taman RTH Kec. Wonoayu	Desa Mulyo Dadi, Kec. Wonoayu	Kebun Bibit
12	Taman RTH Pagerwojo	Kelurahan Pagerwojo, Kec. Buduran	Tanah DPRD Kab Sidoarjo
13	Taman RTH	Desa Sepande, Kec. Candi	Sempadan Sutet

No	Taman	Lokasi	Keterangan
1	*2*	*3*	*4*
	Gading Fajar		
14	Taman Asa	Desa Siwalanpandji, Kec. Buduran	Sempadan Rel KA
15	Taman 90	Kelurahan Pucang Kec. Sidoarjo	Depan SMAN 1 Sidoarjo

Untuk mendukung keindahan dan dekorasi kota, dipenuhi pula ketersediaan penerangan jalan dan lingkungan, dengan jumlah titik Penerangan Jalan Umum (PJU) 30.015 titik dimana 76,89 % dalam kondisi layak fungsi dan 76,89 % jalan Kabupaten yang telah mendapatkan PJU kondisi layak fungsi tersebut.

- **Kasus Lingkungan Hidup yang diselesaikan**

Meningkatnya pembangunan di berbagai sektor telah mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut dan di dorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyebabkan makin meningkatnya pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran/perusakan lingkungan hidup.

Salah satu upaya pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyikapi kondisi tersebut dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan masyarakat. Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD sebesar 100 % sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 97,73 % sehingga capaian kinerja di Tahun 2017 sebesar 97,73%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 100 % maka realisasi di Tahun 2017 mengalami penurunan. Perkembangan jumlah pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran / perusakan lingkungan hidup dan tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

URAIAN	TAHUN	
	2016	2017
Jumlah pengaduan yang masuk	26	44
Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	26	43
Persentase penanganan pengaduan (%)	100	97,73

Upaya dan Inovasi yang dilakukan untuk penanganan pengaduan masyarakat, antara lain :

1. Mengajukan Surat Keputusan (SK) terkait pendelegasian wewenang sanksi administrasi
2. Pengajuan penetapan Jabatan fungsional PPLHD kepada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sidoarjo dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)

12. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Program pembangunan untuk urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. Program Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
3. Program Penyuluhan dan Pengaduan kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi**, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan

Pada tahun 2017 juga telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. IKM yang didapatkan setelah survei adalah sebesar 84,33 yang termasuk dalam mutu pelayanan kategori A dengan kategori kinerja yang sangat baik

Berikut grafik perkembangan capaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

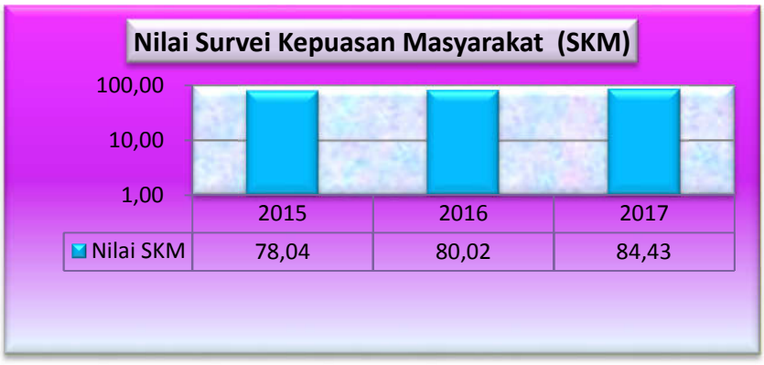

Dari grafik di atas dapat dilihat perkembangan nilai capaian Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dari tahun 2015 hingga tahun 2017 yang terus meningkat. Pada tahun 2015 capaian Nilai SKM sebesar 78,04 dan nilai tersebut meningkat di tahun selanjutnya, pada 2016 nilainya menjadi 80,02 dan di tahun 2017 mencapai 84,43.

Hasil tersebut dapat dicapai dengan melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pelayanan, antara lain :

1. Pengurusan Akta Pencatatan Sipil tanpa dipungut biaya retribusi (gratis).
2. Frekuensi kegiatan penyuluhan/ sosialisasi akta pencatatan sipil lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.
3. Tanggap terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat.
4. Pelayanan Akta Kelahiran secara Jemput Bola (*One Day Service*) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
5. Meminimalkan gangguan pada jaringan SIAK.
6. Melaksanakan Bimbingan Teknis para petugas Operator (Kecamatan dan Dispendukcapil).
7. Pelayanan akta kematian,akta perkawinan dan akta perceraian sistem paket, artinya dalam satu proses pelayanan akta-akta tersebut diatas pemohon pembawa pulang 3 (tiga) produk layanan, yaitu akta kematian/ perkawinan/perceraian, KK dan KTP-EL baru sesuai perubahan elemen data kependudukan yang baru.
8. Menerapkan inovasi-inovasi pelayanan, antara lain ALAMAK, e-tamat, salam 30 menit dll.

Capaian Indikator Kinerja tersebut diatas didukung dengan capaian Indikator Kinerja di tingkat SKPD/OPD (Renstra) dan ditingkat Program yaitu antara lain:

a) Kepemilikan KTP elektronik

Kepemilikan KTP bukan saja merupakan pemenuhan hak perorangan tetapi juga untuk keperluan tertib administrasi kependudukan.

Kartu Tanda Penduduk elektronik atau KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dibuat secara elektronik, dalam artian baik dari segi fisik maupun penggunaannya berfungsi secara komputerisasi. Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berikut grafik perkembangan kepemilikan KTP-el :

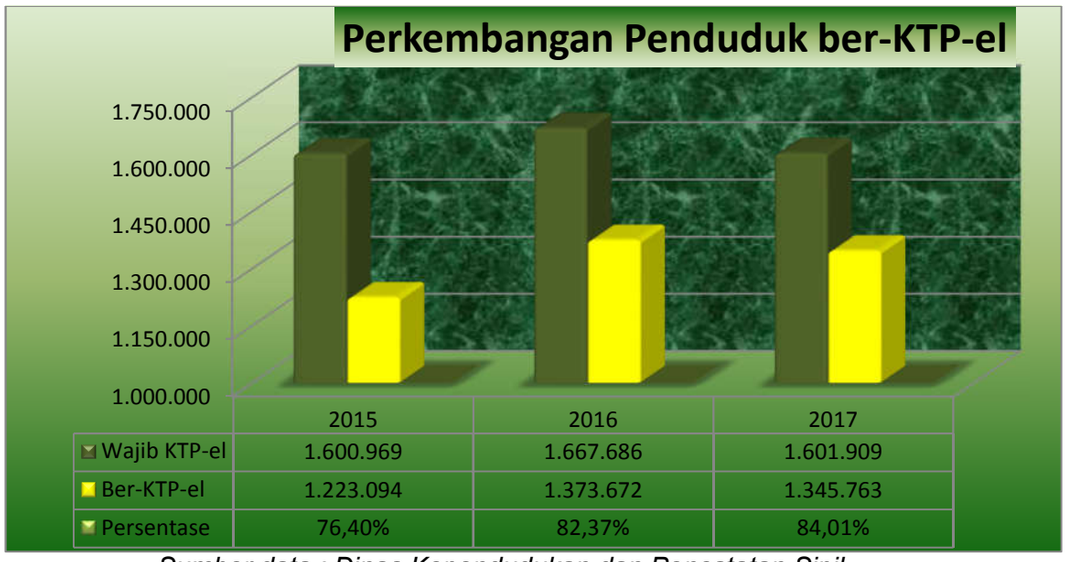

	2015	2016	2017
Wajib KTP-el	1.600.969	1.667.686	1.601.909
Ber-KTP-el	1.223.094	1.373.672	1.345.763
Persentase	76,40%	82,37%	84,01%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat Jumlah penduduk wajib KTP-el pada tahun 2017 adalah 1.601.909 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang sudah memiliki KTP-el sampai dengan tahun 2017 sebanyak 1.345.763 jiwa atau sekitar 84,01% dari jumlah wajib KTP-el melampuai dari target yang ditetapkan sebesar 77%. Jumlah wajib KTP el pada tahun 2017 menurun sekitar 3,9% dari tahun sebelumnya atau tepatnya sekitar 65.777 jiwa. Hal ini disebabkan berbagai faktor, antara lain disebabkan terjadinya mutasi penduduk yang cukup tinggi dimana jumlah penduduk pindah keluar yang merupakan penduduk wajib KTP el lebih banyak pindah bila dibandingkan dengan penduduk yang pindah datang ke Kabupaten Sidoarjo.

Faktor lainnya adalah telah dilakukannya pembersihan database kependudukan, antara lain penghapusan data ganda, NIK invalid, penduduk yang sudah meninggal tetapi masih ada di database, dll yang menyebabkan data tidak valid menjadi terhapus dari database kependudukan, dan hal ini

akan menurunkan jumlah wajib KTP el di Kabupaten Sidoarjo sebesar 2% dari tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk capaian target kepemilikan KTP el pada Tahun 2017 terjadi peningkatan sebesar 1,64% dari tahun lalu (Tahun 2016 kepemilikan KTP-el 82,37%). Kenaikan tersebut memang dirasa kurang signifikan dikarenakan adanya beberapa kendala dalam perekaman/pencetakan KTP-el. Adapun kendala dalam perekaman/pencetakan KTP-Elektronik, antara lain :

a) Koneksi jaringan ke data center Kemendagri kurang bagus.
b) Adanya beberapa alat perekam KTP-Elektronik yang mengalami kerusakan dan gangguan jaringan pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo.
c) Terbatasnya distribusi blanko KTP el pada tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kendala tersebut yaitu:

1) Melakukan koordinasi dengan Kemendagri apabila koneksi jaringan ke data center kurang bagus, agar segera diatasi.
2) Mengadakan alat perekam KTP-el pada tahun anggaran 2017 dan pemeliharaan peralatan pendukung SIAK pada tahun anggaran berikutnya untuk mengurangi gangguan jaringan pada SIAK.
3) Melaksanakan distribusi blanko KTP el secara bertahap sesuai dari arahan Kemendagri.

b) **Kepemilikan Kartu Keluarga**

Di samping kepemilikan KTP-el, masing-masing keluarga perlu memiliki Kartu Keluarga untuk mendukung data kependudukan terutama bagi anggota keluarga yang belum wajib ber-KTP-el. Perkembangan keluarga yang memiliki Kartu Keluarga seperti terlihat pada grafik berikut ini :

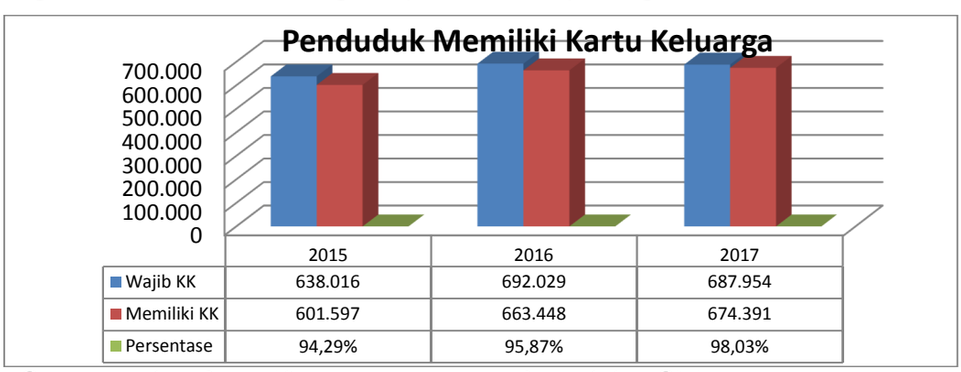

	2015	2016	2017
Wajib KK	638.016	692.029	687.954
Memiliki KK	601.597	663.448	674.391
Persentase	94,29%	95,87%	98,03%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari grafik di atas dapat dilihat jumlah wajib KK yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,6% atau sejumlah 4.075 orang. Penurunan jumlah tersebut dapat disebabkan oleh faktor mutasi penduduk dimana lebih banyak wajib KK yang pindah keluar dan adanya pembersihan data kependudukan di database Dukcapil. Sedangkan prosentase capaian penduduk yang memiliki KK tahun 2017 sebesar 98,03% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 96% serta dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 95,87% ada peningkatan sebesar 2,16%.

Peningkatan penduduk yang memiliki KK ini disebabkan adanya upaya sebagai berikut :

1. Kesadaran masyarakat yang tinggi akan program KK SIAK.
2. Terwujudnya konsistensi sosialisasi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang mendukung pelaksanaan program KK SIAK.
3. Dilakukannya bimbingan teknis bagi SDM Operator SIAK Kecamatan dan Dispendukcapil secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

c) Kepemilikan Akta Kelahiran

Untuk meregistrasi penduduk yang baru lahir maka perlu diterbitkan Akta kelahiran. Akta kelahiran ini dikeluarkan bagi seluruh penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 0,3% yang disebabkan oleh faktor mutasi penduduk pindah keluar dan adanya pembersihan database kependudukan seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Sedangkan penduduk yang mengurus Akta kelahiran sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo sebanyak 29.843 orang, sehingga sampai dengan tahun 2017 penduduk yang memiliki akta kelahiran sebanyak 889.069 orang atau 40,27% dari jumlah penduduk.

Jumlah penduduk yang menurun dari tahun sebelumnya sebanyak 0,3% atau sejumlah 6.959 orang. Penurunan jumlah tersebut dapat disebabkan oleh faktor mutasi penduduk dimana lebih banyak yang pindah keluar dan adanya pembersihan data kependudukan di database Dukcapil

Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016 yang sebesar 859.226 orang, ada peningkatan sebesar 1,47%, yang dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

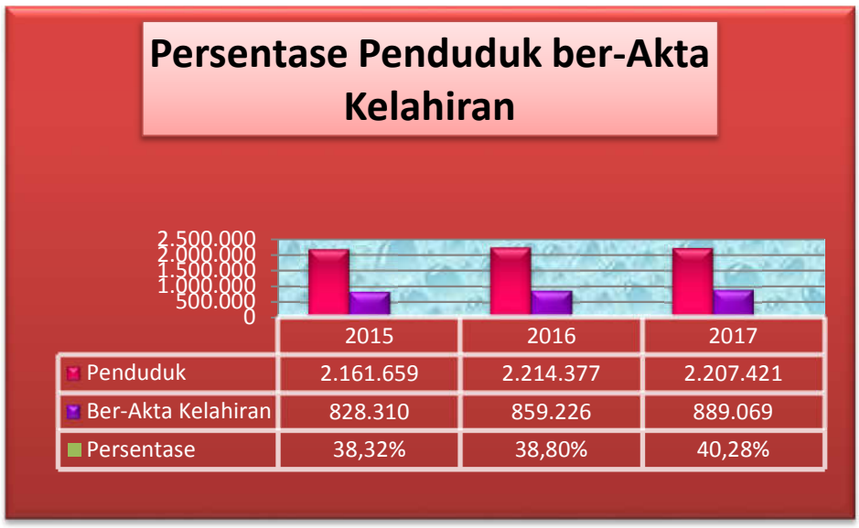

	2015	2016	2017
Penduduk	2.161.659	2.214.377	2.207.421
Ber-Akta Kelahiran	828.310	859.226	889.069
Persentase	38,32%	38,80%	40,28%

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Upaya peningkatan Kepemilikan Akta Kelahiran antara lain:

1. Pelaksanaan pelayananan Akta Kelahiran secara “jemput bola’ (One Day Service) di Desa/Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, UPTD Cabang Dinas Pendidikan, Panti Asuhan, dll.
2. Pengurusan Akta Kelahiran Tanpa dipungut biaya retribusi (gratis).
3. Inovasi pelayanan akta kelahiran ‘ALAMAK’ (Anak Lahir Membawa Akta Kelahiran) yang bekerja sama dengan RSUD dan Puskesmas.
4. Inovasi pelayanan penerbitan akta kelahiran ‘Salam 30 Menit’, yaitu penerbitan akta kelahiran dalam waktu 30 menit untuk anak usia 0-24 bulan.
5. Frekuensi kegiatan penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur, kegunaan dan syarat-syarat pengurusan Akta Kelahiran lebih ditingkatkan serta dilaksanakan secara berkesinambungan.

Sedangkan untuk kepemilikan akta kelahiran anak pada penduduk usia 0 s.d 18 th pada tahun 2017 adalah sebesar 422.717 orang dari jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 528.329 orang atau 80,01% melampaui dari target yang ditetapkan sebesar 64%. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia 0 s.d 18 th sebanyak 390.358 orang dari jumlah penduduk

usia 0 s.d 18 th sebanyak 527.227 orang. Jumlah ini meningkat sebesar 5,97% dari tahun sebelumnya, seperti terlihat pada grafik berikut:

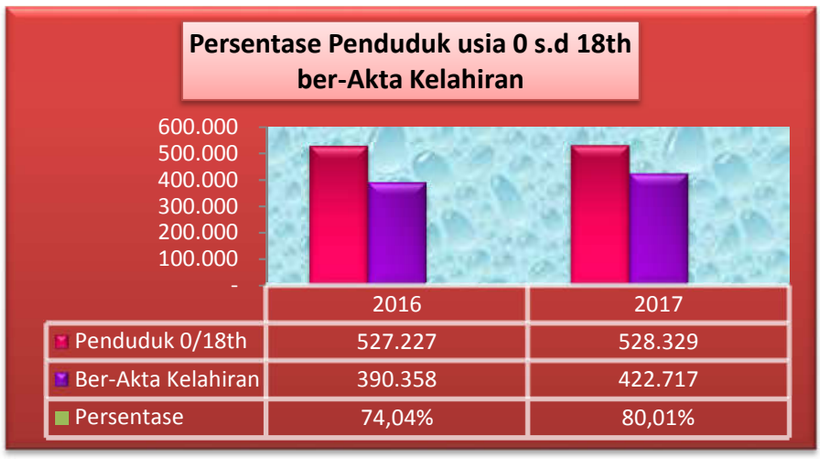

Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13. Urusan Pemberdayaan Masyarakat & Desa

Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

Program pembangunan untuk urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
2. Program Koordinasi, Fasilitasi dan Monev Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran "***Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa***", dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Desa Mandiri

Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan diantaranya terdapat pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan Indeks Desa Membangun menurut Permendesa PDTTrans Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, yaitu untuk mendukung

upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah :

a. menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
b. menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa.

Ruang lingkup pengaturan Indeks Desa Membangun ini meliputi :

a. komponen Indeks Desa Membangun;
b. status kemajuan dan kemandirian Desa; dan
c. penggunaan dan pengelolaan data Indeks Desa Membangun.

Secara umum Pedoman Indeks Desa Membangun (IDM) disusun untuk memberikan panduan kepada pemerintah pusat, daerah, dan Desa dalam memanfaatkan data dan informasi Indeks Desa Membangun sebagai salah satu basis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi pembangunan Desa.

Tujuan khusus penyusunan Indeks Desa Membangun adalah agar bisa digunakan sebagai basis data (base line) pembangunan desa yang menjadi dasar dalam menilai kemajuan dan kemandirian desa, salah satu input (fokus) dalam perumusan isu-isu strategis dan permasalahan utama yang terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, masukan dalam perumusan targeting (sasaran lokasi) terkait dengan target pembangunan nasional dan instrumen koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah daerah dan desa, guna efektifitas capaian sasaran pembangunan nasional.

Status Desa yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu 8,07% atau 26 Desa dengan status Desa mandiri tidak tercapai atau capaiannya 0%. Sedangkan status desa yang dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Status Desa	THN 2017		THN 2016	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1.	Desa Mandiri	0 desa	0%	0 desa	0%
2.	Desa Maju	66 desa	20,49%	57 desa	17,70%
3.	Desa Berkembang	207 desa	64,29%	189 desa	58,70%
4.	Desa Tertinggal	48 desa	14,91%	71 desa	22,05%

5.	Desa Sangat Tertinggal	1 desa	0,31%	5 desa	1,55%
	JUMLAH DESA	322 desa		322 desa	

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun target desa mandiri tidak tercapai namun sudah dihasilkan beberapa perkembangan status desa antara lain:

- Desa Sangat Tertinggal tercapai 1 desa atau 0,31% dari 322 desa yang ada atau tercapai 100% dari target yang direncanakan sebanyak 1 desa;
- Desa Tertinggal tercapai 48 desa atau 14,91% dari 322 desa yang ada atau tercapai 97,96% dari target yang direncanakan sebanyak 49 desa;
- Desa Berkembang tercapai sebanyak 207 desa atau 64,29% dari 322 desa yang ada atau tercapai 137,09% dari target yang ditetapkan sebanyak 151 desa;
- Desa Maju tercapai sebanyak 66 desa atau 20,49% dari 322 desa yang ada atau tercapai 83,54% dari target yang ditetapkan sebanyak 79 desa.

Kendala dihadapi tidak tercapainya target desa mandiri yaitu:

- Kondisi wilayah berdasarkan data yang ada dalam isian koesioner Indeks Desa Membangun
- Pencapaian Desa Mandiri masih terlalu jauh diukur dengan keadaan desa-desa di Sidoarjo saat ini yang mempunyai PADes rata-rata Rp. 125.000.000,- /tahun dan paling tinggi saat ini sementara sebesar Rp. 345.000.000,-
- Percepatan untuk menuju kearah Desa Mandiri adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa yang salah satu penyokong utama PADes adalah dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pengembangan BUMDes baru kita galakkan mulai tahun 2017, sehingga menuju BUMDes yang berhasil yang akhirnya untuk meningkatkan PADes masih membutuhkan waktu.

Keberhasilan peningkatan dari desa tertinggal ke desa berkembang ;

1. Penyiapan Infrastruktur seperti pembangunan jalan paving
2. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
3. Pembinaan secara rutin terhadap kepala desa dan perangkat desa

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh indikator – indikator pendukung, sebagai berikut :

1) Tingkat Usaha Ekonomi Pedesaan

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan melalui perkembangan usaha ekonomi yaitu Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Apabila dilihat dari perkembangan usaha ekonomi melalui UPPKS, P3EL, UED-SP dan BUMDES, dapat disimpulkan bahwa:

Pencapaian kelompok UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) Mandiri

- Realisasi kelompok UPPKS Mandiri tahun 2017 sebanyak 39 kelompok usaha atau 18,84% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 207 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 23% maka capaian dari UPPKS Mandiri tahun 2017 sebesar 81,91% .
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja UPPKS Mandiri Tahun 2016 sebesar 18,69% atau 37 kelompok usaha dari 198 kelompok usaha sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 18,84% maka terdapat peningkatan sebesar 0,15%.
- Apabila realisasi capaian kinerja UPPKS Mandiri tahun 2017 sebesar 18,84%, jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 39% maka capaian kinerja UPPKS Mandiri tercapai sebesar 48,31%

	2015		2016		2017	
	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%	Jumlah UPPKS	%
UPPKS Dasar	92	47,92	98	49,49	103	49,76
UPPKS Berkembang	69	35,94	63	31,82	65	31,40
UPPKS Mandiri	31	16,15	37	18,69	39	18,84
	192		198		207	

Pencapaian UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam) Mandiri

- Realisasi UED-SP Mandiri tahun 2017 sebanyak 26 kelompok usaha atau 20,00% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 130 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 21% maka capaian kinerja dari UED-SP Mandiri tahun 2017 sebesar 95,24% .
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri Tahun 2016 sebesar 20,00% atau 26 kelompok usaha dari 130 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 20,00% maka kelompok usaha UED-SP Mandiri tahun 2017 belum ada perkembangan.
- Apabila realisasi capaian kinerja UED-SP Mandiri tahun 2017 sebesar 20,00%, jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 33% maka capaian kinerja UPPKS Mandiri tercapai sebesar 60,61%.

	2015		2016		2017	
	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%	Jumlah UED-SP	%
UED-SP Dasar	62	47,69	60	46,15	60	46,15
UED-SP Berkembang	47	36,15	44	33,85	44	33,85
UED-SP Mandiri	21	16,15	26	20,00	26	20,00
	130		130		130	

Pencapaian P3EL (Program Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal) Mandiri

- Dalam tahun 2017 realisasi P3EL Mandiri sebanyak 35 kelompok usaha atau 16,06% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 218 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 20% maka capaian kinerja dari P3EL Mandiri tahun 2017 sebesar 80,30%
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri Tahun 2016 sebesar 17,07% atau 35 kelompok usaha dari 205 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 16,06% maka

kelompok usaha P3EL Mandiri tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 1,01%

- Apabila realisasi capaian kinerja P3EL Mandiri tahun 2017 sebesar 16,06% jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 32% maka capaian kinerja P3EL Mandiri tercapai sebesar 50,19%.

	2015		2016		2017	
	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%	Jumlah P3EL	%
P3EL Dasar	107	53,77	113	55,12	126	57,80
P3EL Berkembang	62	31,16	57	27,81	57	26,15
P3EL Mandiri	30	15,07	35	17,07	35	16,05
	199		205		218	

Pencapaian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Mandiri

- Dalam tahun 2017 realisasi BUMDes Mandiri sebanyak 4 kelompok usaha atau 4,55% dari jumlah kelompok usaha keseluruhan yaitu sebanyak 88 kelompok. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017 yaitu sebesar 20% maka capaian kinerja dari BUMDes Mandiri tahun 2017 sebesar 22,75%
- Jika dibandingkan dengan realisasi capaian kinerja BUMDes Mandiri Tahun 2016 sebesar 9,76% atau 4 kelompok usaha dari 41 kelompok usaha, sedangkan realisasi tahun 2017 sebesar 4,55% maka kelompok usaha BUMDES Mandiri tahun 2017 terjadi penurunan sebanyak 5,21%
- Apabila realisasi capaian kinerja BUMDes Mandiri tahun 2017 sebesar 4,55% jika dibandingkan dengan target Renstra akhir periode (2021) sebesar 28% maka capaian kinerja P3EL Mandiri tercapai sebesar 16,25%.

	2015		2016		2017	
	Jumlah BUMDes	%	Jumlah BUMDes	%	Jumlah BUMDes	%
BUMDes Dasar	13	72,22	27	65,85	74	84,09
BUMDes Berkembang	2	11,11	10	24,39	10	11,36
BUMDes Mandiri	3	16,67	4	9,76	4	4,55
	18		41		88	

Perkembangan capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut :

Persentase Capaian Lembaga Ekonomi yang Mandiri

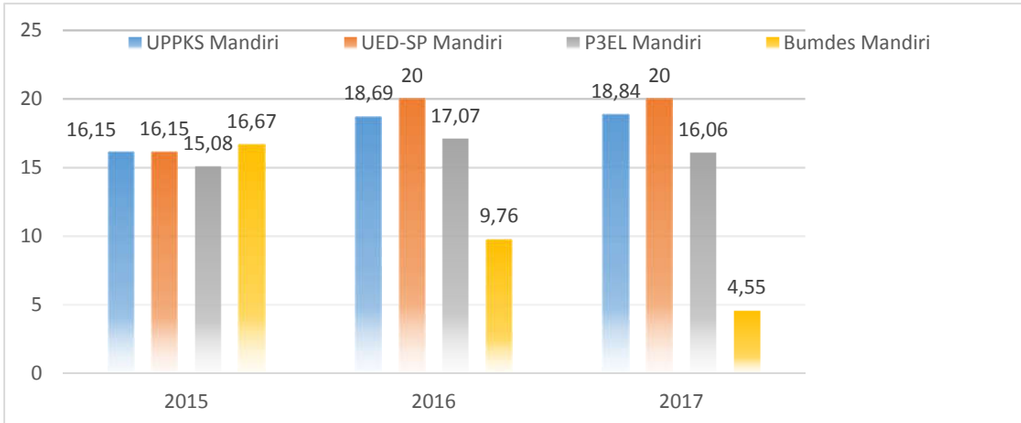

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB Kab. Sidoarjo

Dari grafis terlihat bahwa perkembangan usaha ekonomi masyarakat pedesaan mencerminkan keberhasilan peningkatan peran serta dan inovasi masyarakat.

Adapun upaya yang dilakukan untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan yaitu :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia secara profesional dalam pengelolaan lembaga ekonomi
2. Mencari trobosan dan kerja sama dengan pihak lain dalam mengembangkan lembaga ekonomi

2) Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai ketentuan

Dalam tahun 2017, desa yang melaksanakan administrasi pemerintahan desa sesuai ketentuan dengan tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan di Kabupaten Sidoarjo tercapai sebesar 96,89%, yaitu sebanyak 312 desa dari jumlah desa yang ada sebanyak 322 desa.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang baik meliputi :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah desa (RPJMDes)
2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)

3. Penyusunan RAPBDes
4. Penyusunan Laporan Penyelengggaraan Pemerintah Desa (LPPDes)
5. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPDes)
6. Laporan Realisasi APBDes beserta Dokumen Perdes Keuangan
7. Mengisi buku Inventaris Kekayaan dan Aset desa
8. Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Berikut perbandingan antara desa dengan administrasi pemerintahan yang sudah baik dengan yang belum baik di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 :

Administrasi Pemerintahan Desa Yang Baik dan Desa yang Tidak Baik

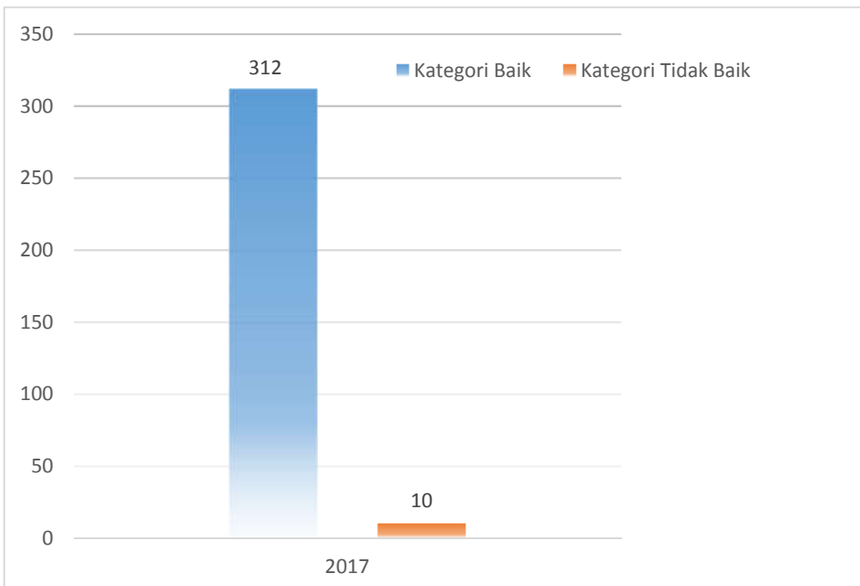

Sumber Data : Dinas PMD P3A KB Kab. Sidoarjo

Upaya pembinaan yang ditempuh untuk mewujudkan administrasi pemerintahan desa yang baik antara lain :

1. Pembinaan ke kecamatan secara rutin kepada Kepala Desa, Sekdes, Bendahara dan Kaur. Perencanaan
2. Monitoring dan Evaluasi secara rutin

14. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana.

Program pembangunan untuk Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah Program Pengelolaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat***, dengan indikator kinerja pendukung urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sebagai berikut :

a. Prevalensi Peserta KB Aktif

Tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau disebut juga Persentase PUS yang ikut KB atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) adalah perbandingan antara jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif, dibandingkan dengan jumlah seluruh Pasangan Usia Subur (PUS) yang terdapat di suatu daerah/wilayah dalam suatu periode yang sama.

Dalam tahun 2017, tingkat prevalensi Peserta KB Aktif atau Persentase PUS yag ikut KB atau CPR di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 81,29%, yaitu perbandingan antara jumlah Peserta KB Aktif sebanyak 306.116 akseptor dengan jumlah seluruh PUS yaitu sebanyak 376.576 pasangan. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2016 yaitu sebesar 80,25%, maka tingkat prevalensi Peserta KB Aktif tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 1,04%.

Perkembangan Peserta KB Aktif terlihat pada grafik berikut :

PERKEMBANGAN PESERTA KB AKTIF

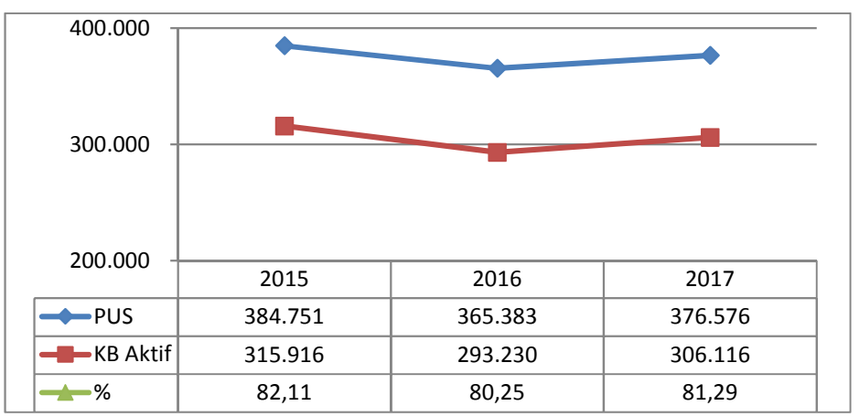

	2015	2016	2017
PUS	384.751	365.383	376.576
KB Aktif	315.916	293.230	306.116
%	82,11	80,25	81,29

Sumber : Dinas PMD,P3A,KB

Perkembangan peserta KB Aktif ini disebabkan karena adanya peningkatan dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat melalui Kampung KB. Selanjutnya perlu dilakukan pembinaan bagi peserta KB Aktif secara terus menerus agar tidak terjadi drop out dalam penggunaan alat kontrasepsi.

c. **Persentase Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)**

Salah satu upaya penurunan angka kelahiran selain penggunaan alat kontrasepsi adalah Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bagi penduduk perempuan, sedangkan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan PUP tersebut adalah persentase perkawinan dibawah umur, yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk perempuan yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia dibawah 20 tahun (<20 tahun) dengan jumlah keseluruhan penduduk wanita yang melangsungkan perkawinan pertama dalam periode yang sama.

Dalam tahun 2017, capaian PUP di Kabupaten Sidoarjo sebanyak 12.056 orang atau 99,60%, dari perkawinan pertama secara keseluruhan yaitu 12.104 orang dengan persentase perkawinan dibawah umur sebesar 0,40% atau sebanyak 48 orang terjadi di 7 (tujuh) kecamatan. Jika dibandingkan dengan capaian perkawinan dibawah umur tahun 2016 sebanyak 22 orang atau 0,20% dari jumlah keseluruhan penduduk perempuan yang melangsungkan pernikahan pertama yaitu sebanyak 10.960 orang, maka terjadi peningkatan, yang disebabkan oleh “ Pergaulan bebas serta pengaruh dari perkembangan teknologi informasi “.

Dengan pengertian semakin kecil pernikahan pertama bagi perempuan dengan usia dibawah 20 tahun maka Pendewasaan Usia Perkawinan di kabupaten sidoarjo semakin berhasil. Perkawinan dibawah umur atau peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dapat berhasil disebabkan meningkatnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi.

Perkembangan Persentase Wanita Menikah di Bawah Umur (<20 tahun) terlihat pada grafik berikut :

PERKEMBANGAN WANITA MENIKAH DI BAWAH UMUR

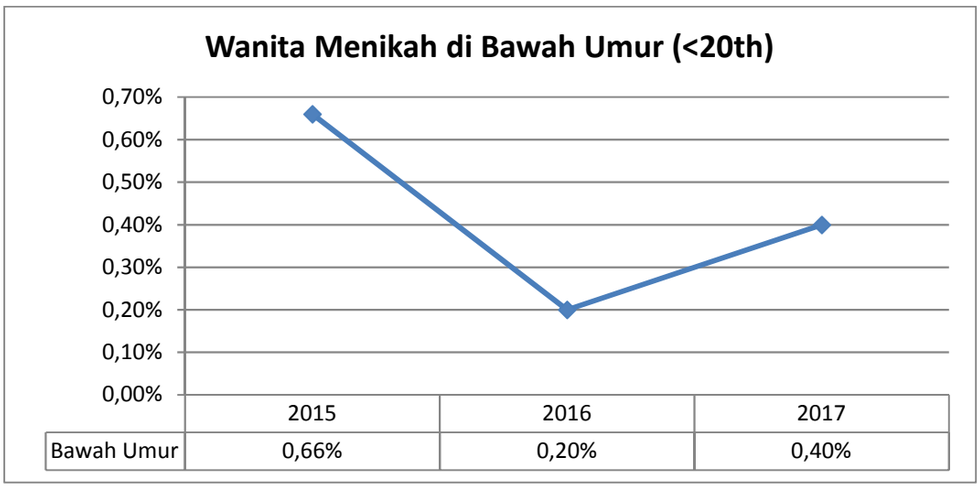

Sumber : Dinas PMD,P3A,KB

d. **TFR (Total Fertility Rate)**

Total Fertility Rate (TFR) ini menunjukkan rata rata jumlah anak yang dimiliki Wanita Usia Subur (WUS) sepanjang siklus kehidupan reproduksinya.

Realisasi Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 / WUS. Jika dibandingkan capaian TFR tahun 2016 sebesar 1,99 /WUS maka capaian tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,01 / WUS. Jika dibandingkan dengan target TFR tahun 2017 sebesar 2,08/WUS maka capaian TFR tahun 2017 sebesar 95,19% semakin kecil terjadinya kelahiran semakin baik.

Dengan tercapainya Total Fertility Rate tahun 2017 sebesar 1,98 /WUS, pembinaan kepada Pasangan Usia Subur (PUS) dalam memberikan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tetap dilakukan secara kontinyu, atau memberikan informasi kepada masyarakat agar peduli terhadap Kesehatan Reproduksi dengan cara mengatur jarak kelahiran dan membatasi jumlah anak yang dilahirkan melalui Program Keluarga Berencana.

e. CBR (Crude Birt Rate)

Salah satu ukuran yang sering dipakai untuk mengetahui tingkat kelahiran di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu adalah Angka Kelahiran Kasar atau Crude Birt Rate (CBR). Nilai CBR dapat dimanfaatkan untuk acuan mengetahui tingkat populasi penduduk di suatu wilayah.

Realisasi Crude Birt Rate (CBR) tahun 2017 sebesar 16,8 /1000 penduduk yang menunjukkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo terjadi kelahiran 16 orang atau 17 orang per 1000 penduduk

15. Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan merupakan urusan yang konstribusinya terhadap pencapaian visi dan misi kabupaten cukup penting, khususnya dalam upaya peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, terminal dan lahan parkir yang layak, termasuk uji kelayakan kendaraan angkutan umum.

Penyelenggaraan urusan perhubungan ini utamanya dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Program pembangunan untuk urusan Perhubungan pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Program peningkatan pelayanan angkutan
2. Program evaluasi pengendalian dan pengamanan lalu lintas
3. Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut, Udara, dan Postel

Hasil yang dicapai dari pelaksanaan program pembangunan urusan perhubungan dalam rangka mendukung sasaran "***Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas dalam Penyediaan Infrastruktur penunjang perekonomian***" dengan pencapaian indikator kinerja, sebagai berikut :

1. IKM Bidang Perhubungan

Dinas Perhubungan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang perhubungan dengan hasil sebagai berikut :

Tahun	Unit Kerja	Indeks IKM	Kriteria
2015	UPT.PKB	65,6	Baik
2016	UPT.PKB	72,43	Baik
	UPT.Angkutan	73,93	Baik
2017	UPT.PKB (layanan Uji KIR)	78,98	Baik
	UPT. Angkutan (Rekomendasi Izin Trayek)	75,00	Baik
	Bidang Menrek (Rekomendasi Andalalin)	75,00	Baik

IKM Bidang Perhubungan

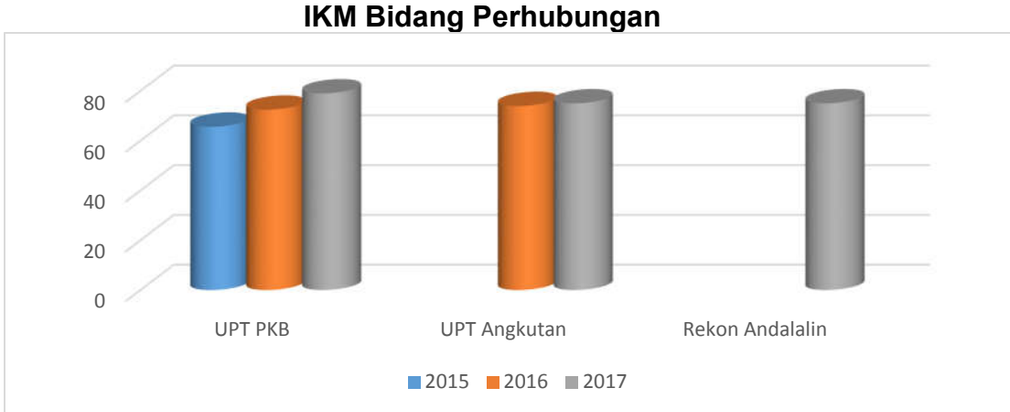

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo

1) IKM UPT PKB

   Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan publik di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo pada Tahun 2017 sebesar 78,98 dengan kategori “Baik”

   Nilai IKM ini meningkat dibandingakn dengan Tahun 2016 sebesar 72,43 dengan kategori “Baik” dan Tahun 2015 sebesar 65,6 dengan kategori “Baik”

   Hal tersebut dikarenakan semakin baiknya prosedur pelayanan dan waktu pelayanan terutama waktu tunggu hasil pengujian kendaraan.

2) IKM Angkutan (Rekomendasi Izin Trayek)

   Secara umum seluruh mutu unsur pelayanan publik di unit pelayanan UPT Izin Angkutan pada Tahun 2017 adalah 75,00 nilai ini termasuk kategori “Baik”.

   Nilai IKM ini meningkat dibandingakn dengan Tahun 2016 sebesar 73,93 dengan kategori “Baik”.

   Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pelayanan ditinjau dari variable persyaratan ,kompetensi pelaksana, produk spesifikasi pelayanan, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

   Sejak September 2017 Izin Trayek Angkutan/Rekomendasi izn trayek sudah dialihkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

3) IKM Rekomendasi Andalalin

   Pada Tahun 2017 juga dilakukan penilaian IKM layanan rekomendasi Andalalin yang diselenggarakan oleh Bidang Menrek dengan nilai 75,00 dengan kategori “Baik”

   Hal ini disebabkan baiknya pelayanan ditinjau dari variable persyaratan ,kompetensi pelaksana, produk spesifikasi pelayanan, maklumat pelayanan serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

2. **Tingkat keberhasilan pelaksanaan uji KIR**

Indikator ini menggambarkan tingkat keberhasilan uji Kir atas angkutan Umum secara lebih berkualitas, sehingga diharapkan adanya pengurangan pelangaran terhadp kemampuan angkut kendaraan serta secara kualitas angkutan umum yang telah dilakukan uji KIR menjadi angkutan yang layak untuk dioperasikan.

Kendaraan Wajib Uji dan Lulus Uji Tahun 2015, 2016 dan 2017

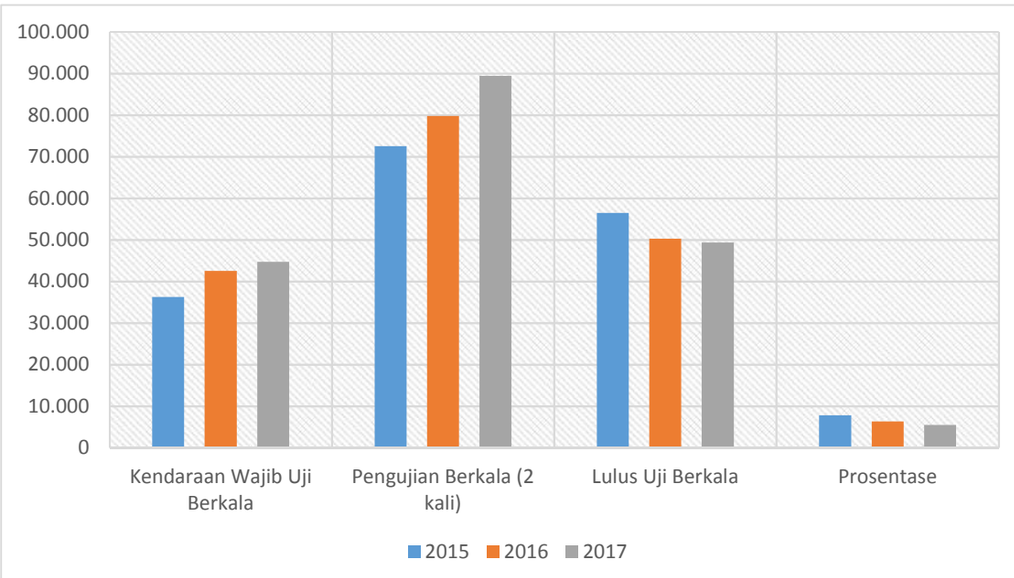

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo

3. **Sarana dan Prasarana Perhubungan**

Indikator ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menyediakan/mendukung sarana dan prasarana Perhubungan yang layak sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun definisi Sarana adalah segala sesuatu dalam hal ini adalah angkutan umum yang dapat dipakai/difungsikan untuk memperlancar arus angkutan orang sesuai dengan tujuannya sebagai alat dalam mencapai maksud tujuan.

Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan dan proyek).

Data Sarana dan Prasarana Yang Ada di Dinas Perhubungan dari Tahun 2015 , 2016 dan 2017

URAIAN	2015	2016	2017
Sarana :			
1. Angkutan Pedesaan	**506**	**186**	**0**
2. Taksi	**203**	**121**	**0**
3. Bus Kota /Damri Terminal Larangan	**24**	**20**	**0**
Prasarana :			
1. Halte	**44**	**44**	**46**
2. Terminal	**7**	**7**	**7**
3. Dermaga	**12**	**12**	**12**

Untuk Halte Tahun 2017 ada pembangunan Halte BRT 2 (dua) unit di lokasi:

1) Utara Pintu keluar Terminal Bungur Asih.
2) Depan Balai Desa Kali tengah Tanggulangin.

4. Kecukupan Jumlah alat kelengkapan Jalan yang berfungsi dengan baik.

Indikator ini menggambarkan alat perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan, meliputi :

1) Alat pemberi isyarat ;
2) Rambu lalu lintas;
3) Marka jalan;
4) Alat penerangan jalan;
5) Alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas alat pembatas kecepatan, dan alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan;
6) CCTV pemantau lalu lintas dan revitalisasi CC Room.

Berfungsinya alat kelengkapan jalan secara baik dengan jumlah yang cukup diharapkan akan dapat mengurang titik - titik kemacetan di wilayah perkotaan dan kecamatan Kabupaten Sidoarjo.

Data Alat Perlengkapan Jalan yang Terpasang dan Berfungsi Baik dari Tahun 2015 -2017

No	Alat Perlengkapan Jalan	Target	2015	Target	2016	Target	2017
1.	**Pengadaan APILL (Alat Pendahulu Isyarat Lalu Lintas) Revitalisasi**						
a.	Traffic Light (TL)	-	-	3 lokasi	3 lokasi	-	-
b.	Pengadaan Paku Jalan	-	-	283 unit	283 unit	-	-
c.	Warning Light/Flashing Light	4	4	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi	4 lokasi
	Pelican crosiing	1	1	-	-	2 lokasi	2 lokasi
2.	**Pengadaan RPPJ/Rambu Jalan**						
a.	Rambu peringatan ,larangan, dan perintah	-	-	102 unit	102 unit	19 unit	19 unit
b.	Rambu Pendahulu Petunjuk Jalan:			33 unit	33 unit		
	-Rambu lalin tiang F	10	10	-	-	-	-
	-Rambu tiang biasa	70	70	-	-	100 unit	100 unit
3	**Pengecatan Marka Jalan**						
a.	Dana APBD	1,073 m2		1,175 m2	1,175 m2		4.637 m2
b.1.	Dana DAK (marka biasa)	-		260,75 m2	260,75 m2	-	-
b.2.	Speed Trap (pita kejut)			221,70 m2	221,70 m2	-	-
4	**Revitalisasi Guardrail**			3 titik	3 titik	-	-
5	**Cermin Tikung**					20 unit	20 unit
6	**Rambu papan himbauan parkir**					20 unit	20unit

5. Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL)

Dalam upaya mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi, maka dilakukan operasi gabungan penerapan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Kawasan tertib lalu lintas adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar.

Lokasi – lokasi yang menjadi kawasan tertib lalu lintas di Kabuaten Sidoarjo, antara lain :

1) Jl.Jenggolo---Jl.A.Yani--- Jl.Gajah Mada ---Jl. Mojopahit
2) Jl.KH.Mukmin ---Jl.Diponegoro dan Jl.Thamrin
3) Jl. Pahlawan
4) Bandara Juanda Sedati

Disamping itu juga dilakukan pemasangan CCTV pemantau lalu lintas bagi pengguna jalan di 16 titik lokasi yaitu : Jl. Raya TL Candi, Jl. Gatot Subroto (depan pasar larangan), Jl.Gajah Mada, Simpang Babarlayar, Bundaran TPI, Exit Tol Raya Jati, Jl.Sultan Agung depan Masjid, Jl. Cokronegoro, Jl. Gubernur Suryo, Jl.A.Yani /Jl.Jenggala (Minu Pucang), Simpang Tiga Maspion Buduran, Simpang 4 Gedangan, Simpang 4 Pilang Wonoayu, Simpang 4 Seruni. Jl.Prasung dan Simpang 5 Krian.

16. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pelayanan Informasi dan Pemberitaan, Pengelolaan dan Pengaduan Masyarakat
2. Program Pelayanan Perijinan dan Pengembangan Usaha dan Prasarana Laut, Udara dan Postel
3. Program Koordinasi Kebijakan dan Pelayanan Bidang Telematika dan Persandian

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi*** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)

Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan pemeringkatan terhadap implementasi e-Government di Indonesia, dengan tujuan :

1. Menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah

2. Memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang dan obyektif
3. Mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional

Metodologi pemeringkatannya yaitu :

1. Penjelasan proses kepada peserta
2. Pengisian kuisioner oleh peserta
3. Pemeriksaan kuisioner oleh asesor
4. Klarifikasi oleh asesor bila diperlukan
5. Asesmen dan pemberian rating per peserta oleh asesor
6. Normalisasi oleh asesor
7. Sidang asesor
8. Publikasi

Smart city merupakan konsep pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk semua sektor yang lebih luas dari sekedar e-Gov. Smart city adalah konsep pemanfaatan ICT untuk semua kegiatan di daerah, tidak hanya kegiatan pemerintahan lewat e-Gov namun mencakup banyak hal. Misalnya sistem pengendali lampu lalu-lintas, sistem perparkiran terpadu, sistem pengaturan listrik untuk public-utility, sistem pemantau polusi udara/lingkungan, sistem peringatan dini (early warning system) dan lain-lain.

Smart city dalam penerapannya didasarkan pada pertimbangan antara kebutuhan dan kelayakan atau tingkat urgensi smart city di setiap daerah, sedangkan penerapan e-Gov bergantung pada keputusan pimpinan.

Berdasarkan hasil evaluasi PeGI yang dilaksanakan oleh Direktorat e-Government Ditjen APTIKA-KEMKOMINFO RI, Kabupaten Sidoarjo memiliki hasil nilai Pemeringkatan e-Government sebesar 2,68.

Sehubungan dengan hasil nilai tersebut Kabupaten Sidoarjo menempati peringkat ke – 8 di Tingkat Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015. Penilaian PeGI dilakukan 2 tahun sekali akan tetapi pada tahun 2017 belum dilaksanakan penilaian kembali sehingga Tahun 2017 masih memakai penilaian pada tahun 2015.

PeGI Tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2015

NO	KABUPATEN/KOTA	DIMENSI					NILAI RATA-RATA	KATEGORI
		KEBIJAKAN	KELEMBAGAAN	INFRASTRUKTUR	APLIKASI	PERENCANAAN		
1	Kota Surabaya	3.53	3.60	3.73	3.67	3.60	3.63	SANGAT BAIK
2	Kota Malang	3.20	3.33	3.53	3.33	3.20	3.32	BAIK
3	Kabupaten Bojonegoro	3.33	3.07	3.20	3.07	3.06	3.15	BAIK
4	Kabupaten Lamongan	3.22	3.06	3.18	3.13	3.04	3.13	BAIK
5	Kabupaten Gresik	2.93	2.83	2.87	2.70	3.00	2.87	BAIK
6	Kabupaten Banyuwangi	2.73	2.67	2.83	2.87	3.00	2.82	BAIK
7	Kota Pasuruan	2.47	2.83	2.67	2.73	2.73	2.69	BAIK
8	Kabupaten Sidoarjo	2.60	2.60	2.67	2.73	2.80	2.68	BAIK
9	Kota Probolinggo	2.70	2.93	2.40	2.73	2.40	2.63	BAIK
10	Kabupaten Malang	2.60	2.70	2.73	2.33	2.73	2.62	BAIK
	RATA-RATA	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	BAIK

Hal ini menunjukkan bahwa Sidoarjo siap menghadapi tantangan untuk memperbaiki peringkat dalam hal penilaian tersebut.

Upaya untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, maka dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

Pengembangan Fasilitas dan Integrasi Jaringan Teknologi Informasi

Fasilitas dan Jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi yang dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2017 adalah :

1. Pembangunan Jaringan FO yang terkoneksi 7 OPD

   Pembangunan Jaringan FO rencana awal pada tahun 2017 dibangun mulai exit porong s/d Aloha. Namun realisasi pemasangan jaringan FO ini baru dapat mengintegrasikan 7 OPD yang terletak di sekitar Alun-alun yaitu: Dispendukcapil, PUPR, BPBD, Bappeda, Dispora, Sekretariat DPRD, Perikanan, Pendopo.

   Pemanfaatan Jaringan FO hampir 100 % untuk sekitar wilayah Kota Sidoarjo, yaitu koneksi PJU terintegrasi pemasangan kabel FO dengan PJU dapat mempercepat dan mempermurah penarikan kabel FO dan dapat digunakan secara lintas sektor dan terintegrasi dengan kebutuhan OPD lainnya yaitu:

   1. Smart PJU
   2. Monitoring jalan dan lingkungan melalui IP CAM;
   3. Pemasangan sensor-sensor aplikasi;
   4. Free wifi

2. Pengembangunan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi **:**

   a. Pembangunan Command Center

      Pembangunan Command Center digunakan untuk memudahkan Kepala Daerah (Bupati) berkomunikasi dengan Masyarakat, OPD, Kecamatan,

Kelurahan/Desa dalam hal pengambilan kebijakan/keputusan untuk membantu penyelesaian masalah

b. Pembangunan Ruang Server

Ruang Server sangat diperlukan untuk menyimpan server (aplikasi dan database), perangkat jaringan (router, hub dll) dan perangkat lainnya yang terkait dengan operasional sistem sehari-hari seperti UPS, AC dan lain-lain

c. Pembangunan Menara Tower

Tower di Belakang Setda berfungsi sebagai penempatan perangkat sarana radio telekomunikasi yang berupa antena, sektoral, dina disk, dll. Sebagai alat untuk koneksi internet ke Beberapa OPD. Sedangkan Tower yang ada di belakang Pendopo Sidoarjo merupakan tower pendukung untuk Operasional data center dan command center serta penghubung koneksi internet ke OPD

Informatika

Hasil dari Monitoring dan Evaluasi Aplikasi adalah terdapat 84 aplikasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Dari 84 aplikasi tersebut, 37 aplikasi bersifat aktif dan layak digunakan dan sisanya sebanyak 47 aplikasi bersifat pasif/mengalami gangguan dan butuh perbaikan.

Berikut adalah beberapa aplikasi mayor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo:

Aplikasi Basis Data	Aplikasi Administratif	Aplikasi Informatif

• SIAK (Kependudukan)
• SISMIOP
• QGIS
• Perencanaan
  • Musrembang
  • Simtem Informasi Bantuan Desa
• Pembangunan
  • E-Budgeting
• Database Pegawai
  • E-Kinerja (SKP)
  • SIPEKAT
  • SIMPEG
	• Perijinan dan Pelayanan
	  o SIPPADU
	  o BMW
	• Surat Menyurat
	  o Sistem Informasi Perkantoran Maya (SiMAYA)
	• Aplikasi Pelayanan Kesehatan
	  o SIM RSUD
	  o SIAP TARIK
		• Sistem Informasi Publikasi Hukum
		  o Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)
		• Sistem Informasi Perpustakaan
		  o e - perpus
		• Sistem Informasi Kebencanaan
		  o SIGAP

Standarisasi Aplikasi Berdasarkan Hasil Monev di OPD

1. Aplikasi
   - Responsif dan Adaptif
   - Berbasis Web Native / Framework
   - Melakukan benchmark setiap aplikasi dengan spek server
   - Terdapat Manual Kode (Dokumentasi) , Dokumen Pemakaian (User Guide)
2. Media penyimpanan (Server/Database)
   - Menggunakan Virtual Manager
   - Database yang support RDBMS
   - Membuat konfigurasi minimal untuk standarisasi keamanan server

Dalam Pengembangan Informatika secara berkelanjutan untuk memfasilitasi OPD dalam pembuatan aplikasi dan pengembangannya. Salah satu bentuk kegiatannya adalah dengan melakasanakan pembahasan dan verifikasi aplikasi yang dibuat atau dikembangkan oleh OPD sesuai bisnis proses rancang bangun kebutuhan aplikasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan aplikasi yang efektif dan efesien bagi pembuat dan penggunanya.

Pada Tahun 2017 Bidang Pengembangan Informatika sudah membuat rekomendasi pembuatan dan pengembangan aplikasi sebagai berikut:

a. Siap Tarik (Puskesmas Tarik)
b. Berkas Mlaku Dewe (Kecamatan Sukodono)
c. Sigap (Badan Penganggulangan Bencana Daerah)
d. Sikoling (Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan)
e. E-Perpus (Dinas Perpustakaan Dan Arsip)
f. Sistem Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)
g. E-Kinerja (Badan Kepegawaian Daerah)

Sedangkan untuk aplikasi yang masih dalam tahap uji coba sampai dengan saat ini adalah:

a. E-Monkas (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
b. Sipjaki (Bagian Pembangunan)
c. Si Reklame (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah)
d. Ekraf (Bagian Perekonomian Dan Sda)
e. Sipetek (Kecamatan Buduran)
f. Cepet Mule (Kecamatan Tulangan)

Pengelolaan Komunikasi Publik

Untuk meningkatkan hubungan dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan masyarakat diperlukan suatu media informasi dan komunikasi.

Semakin banyak media informasi dan komunikasi yang tersedia diharapkan akan semakin baik hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakatnya.

Bentuk media / sarana komunikasi yang tersedia, diantaranya :

1. PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

   Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses pengumpulan, penyediaan, pengklasifikasian, penyimpanan, pendokumentasian, dan pelayanan informasi.

   Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://ppid.sidoarjokab.go.id .

   Kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka koordinasi PPID, yaitu :

   a. Permintaan Data PPID dari LSM/Pribadi
   b. Rapat PPID
   c. PPID Award tingkat Provinsi

2. KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)

   Media komunikasi tersebut bertujuan menunjang kelancaran komunikasi antar anggota dan pengurus kelompok informasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna informasi yang ada.

   Sedangkan pada tahun 2017 telah diadakan 2 kegiatan dalam rangka media komunikasi, yaitu :

   a. Pameran KIM diadakan Provinsi
   b. Pembinaan KIM (1 Tahun 2 kali)

3. P3M (Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat)

   Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M) berfungsi menerima, melaporkan dan menindaklanjuti pengelolaan pengaduan.

   Media komunikasinya dapat diakses secara online melalui alamat website http://p3m.sidoarjokab.go.id

   Berdasarkan laporan aduan yang ada sebanyak 516 aduan dilaporkan oleh masyarakat dan sebanyak 343 aduan telah ditindaklanjuti atau sekitar 66%.

Hal ini menunjukkan bahwa selama aduan masyarakat telah di respon. Permasalahan yang sering jadi aduan Masyarakat : Dispendukcapil (e-KTP), PUPR (Infrstruktur Jalan), DLHK (Sampah). OPD Satpol PP kurang aktif merespon pengaduan masyarakat.

Pada Agustus 2017 dibentuk Forum Bakohumas ini dimaksudkan untuk mengakomodir pengaduan masyarakat secara langsung dan tepat sasaran.

Pengaduan Masyarakat yang dari Bakohumas Jumlah yang diterima 131 aduan, yang direspon 110 aduan sekitar 83%. Selama tahun 2017 ini sudah dilakukan pengaduan masyarakat dengan melalui Media Sosial (facebook, twitter,instagram, Whatsapp).

Kedepan akan dilakukan pengembangan akses pengelolaan pengaduan lebih baik dengan upaya :

b. Optimalisasi melalui Media Sosial (facebook, twitter,instagram, Whatsapp)
c. Melalui Email

4. Media Center

Media Center merupakan lembaga strategis dalam mempublikasikan berbagai program kerja, kegiatan dan himbauan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat.

Didalam mengelola media center saat ini banyak mengalami beberapa kendala diantaranya media center yang kurang maksimal karena tempat/ruangan, fasilitas kurang memadai dan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan fungsi media center sebenarnya sebagai media komunikasi publik, adalah sebagai berikut :

a. Ruangan yang representatif sebagai ruangan media komunikasi publik bukan hanya dimanfaatkan oleh masyarakat media saja namun dapat digunakan untuk masyarakat bukan media
b. Fasilitas media center memadai
c. Tersedianya data-data yang diperlukan oleh masyarakat

5. Media Pers

Keberadaan Media Pers yang bermitra/bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dibawah koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika berjumlah 69, diantaranya adalah:

a. Media Cetak Harian : 13;
b. Media Cetak Mingguan/Tabloid : 22;
c. Media Online : 17;
d. Media elektronik (TV/Radio) : 17.

Disamping media tersebut diatas Dinas Komunikasi dan Informatika mengkoordinasi Radio LPPL (Suara Sidoarjo), tugas Suara Sidoarjo menyampaikan pesan kepada masyarakat atas keberhasilan pembangunan Sidoarjo

Bentuk Kerjasama/kemitraan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan media massa sebagai berikut :

1. Pembinaan Insan Pers;
2. Jumpa Pers;
3. Advetorial;
4. Study Komparatif Insan Pers

6. Klipping dan Majalah

Dalam mendokumentasi berita harian dari berbagai media massa kami melakukan Klipping ”**Sidoarjo Hari Ini**”, di samping itu juga Dinas Komunikasi dan Informatika juga menerbitkan majalah ”**Gema Delta**” kedua media ini memberikan informasi mengenai hal-hal yang tejadi di Sidoarjo dan Pembangunan Sidoarjo yang lebih baik. Kedua media ini diberikan kepada Semua OPD di Sidoarjo.

17. Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pengembangan Usaha Koperasi
2. Program Peningkatan Pemanfaatan Bantuan Permodalan

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran Meningkatnya Aktivitas Ekonomi Masyarakat, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri
2. Persentase Pertumbuhan Koperasi yang Berkualitas

Atas target dan capaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Usaha Mikro yang Mandiri

Usaha Mandiri merupakan usaha yang berkemampuan berdiri sendiri dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dengan cara berinisiatif dan bekerja keras dalam mengurus dan mengembangkan organisasi usaha, menyediakan modal, menghitung resiko, mengambil keputusan dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan percaya kepada kemampuan diri sendiri.

Perkembangan jumlah usaha mikro selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini:

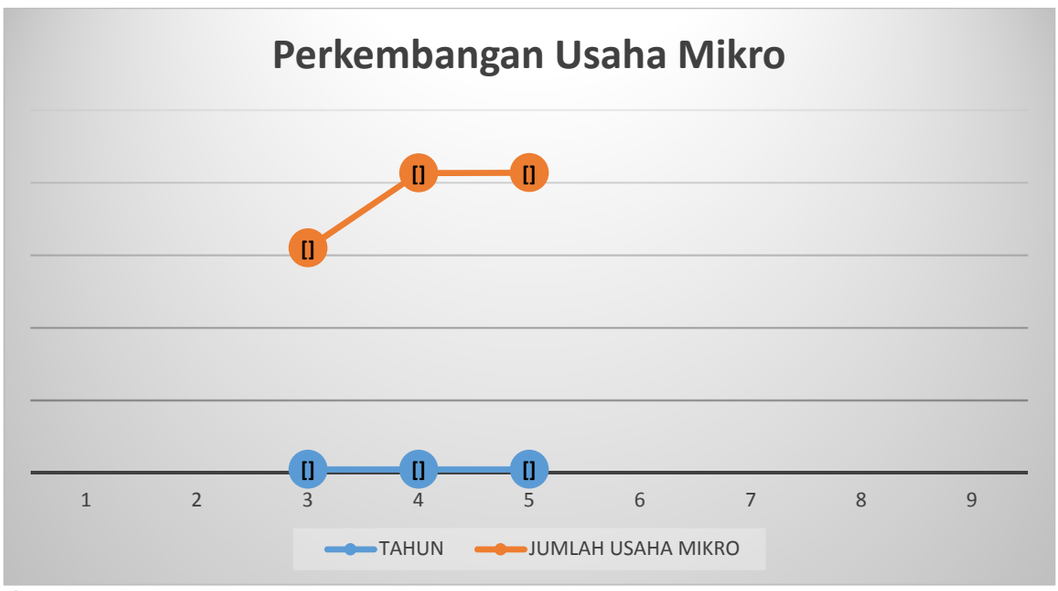

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Prosentase Jumlah Usaha Mikro pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 10,11 % dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 206.725 unit usaha mikro meningkat menjadi 206.934 unit usaha mikro. Lima besar kelompok usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo meliputi :

1. Makanan dan Minuman
2. Fashion
3. Pengrajin Produk Kulit
4. Handicraft
5. Batik

Sedangkan untuk realisasi prosentase usaha mikro yang mandiri juga sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu dari 0,5% atau sejumlah 1.034 usaha

mikro mandiri menjadi 0,73% atau sejumlah 1.510 usaha mikro mandiri, yang artinya pada tahun 2017 ada peningkatan jumlah usaha mikro yang mandiri sebesar 476 usaha mikro. Target ini dapat dicapai melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan Usaha Mikro
2. Pemberdayaan Usaha Mikro
3. Fasilitasi Penyaluran Dana Bergulir kepada Usaha Mikro
4. Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro

➢ **Sertifikasi Usaha Mikro**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa semua profesi wajib bersertifikasi termasuk usaha mikro, maka untuk meningkatkan kompetensi Usaha Mikro dalam menghadapi era globalisasi, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memfasilitasi uji kompetensi bagi usaha mikro.

Sertifikasi kompetensi usaha mikro merupakan proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional yang diubah dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standarisasi Kompetensi Kerja Nasional.

Perkembangan jumlah usaha mikro yang bersertifikasi selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

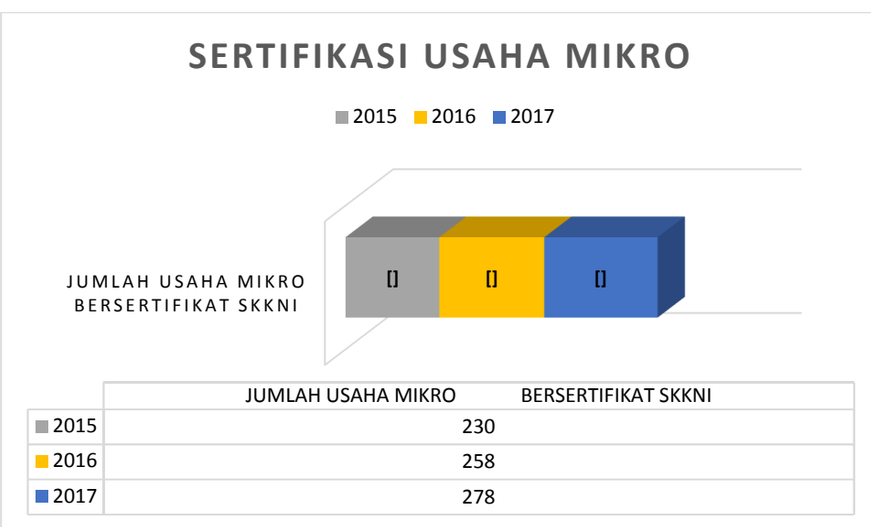

	JUMLAH USAHA MIKRO BERSERTIFIKAT SKKNI
2015	230
2016	258
2017	278

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Pada tahun 2017 jumlah usaha mikro yang dinyatakan lulus uji sertfikasi kompetensi di bidang wirausaha mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu dari 258 usaha mikro menjadi 278 usaha mikro.

- **Pencetakan Wirausaha Baru**

Wirausaha Baru merupakan upaya Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk menumbuhkan usaha mikro yang mandiri dan mengembangkan kewirausahaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi ketrampilan dan kemandirian berusaha yang dapat membangkitkan potensi lokal dan siap menghadapi daya saing global serta untuk menjawab permasalahan yang dihadapi mulai dari tingkat pengangguran, tingkat kesejahteraan dan tingkat kemiskinan.

Pencetakan wirausaha baru mulai dilakukan pada tahun 2017 dengan target sasarannya adalah masyarakat baik mahasiswa, pelajar dan pemuda maupun masyarakat yang sudah mempunyai usaha (minimal 1 tahun). Tujuan pencetakan wirausaha baru ini antara lain :

1. Mendorong dan memacu motivasi untuk berwirausaha.
2. Menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif sebagai bekal dalam berwirausaha.
3. Membangun kemandirian dan daya saing dalam berwirausaha.
4. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang mampu menciptakan kesempatan kerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
5. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Pada tahun 2017 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah mencetak wirausaha baru sebanyak 1.100 wirausaha. Pencetakan wirausaha baru dilakukan melalui pelatihan, pendampingan serta fasilitasi lainnya seperti pemasaran dan pengembangan jaringan. Dalam pelaksanaan untuk pencetakan wirausaha baru, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menggandeng akademisi, pelaku usaha dan komunitas.

2. Persentase Koperasi yang berkualitas

Koperasi berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan

kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial. Parameter yang menjadi dasar koperasi berkualitas adalah apabila memenuhi 5 (lima) aspek yang terdiri dari :

1. Aspek Kelembagaan Koperasi, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
2. Aspek Usaha Koperasi, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi dalam hal rasa tanggungrenteng atau kemauan untuk berbagi resiko (*risk sharing*), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan asset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan keuntungan.
3. Aspek Keuangan Koperasi, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya seperti prosentase pelunasan simpanan wajib dan prosentase besaran simpanan sukarela.
4. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Anggota, ditunjukkan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka.
5. Aspek Manfaat Koperasi terhadap Masyarakat, ditunjukkan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.

Secara garis besar Indikator Koperasi berkualitas dapat dijabarkan dalam 2 (dua) indikator yaitu:

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi yang aktif tentunya telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah seperti memiliki nomer induk koperasi (NIK), Surat Keputusan Anggaran Dasar oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia oleh Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Koperasi aktif mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek badan usaha aktif.

Realisasi persentase koperasi aktif pada tahun 2017 sedikit melampaui target yang ditentukan yaitu sebesar 89,00% dimana sebanyak 1.287 unit koperasi dinyatakan masih aktif beroperasi dari 1.446 unit koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka persentase koperasi aktif terjadi sedikit peningkatan sebesar 0,31% yaitu dari 88,69% atau sejumlah 1.270 koperasi menjadi 89,00% atau sejumlah 1.287 koperasi yang artinya pada tahun 2017 ada peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 17 koperasi. Target prosentase koperasi aktif tahun 2017 dapat dicapai melalui kegiatan berupa :

1. Revitalisasi Koperasi
2. Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Koperasi
3. Penyuluhan dan Fasilitasi Advokasi Koperasi

Perkembangan prosentase koperasi aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

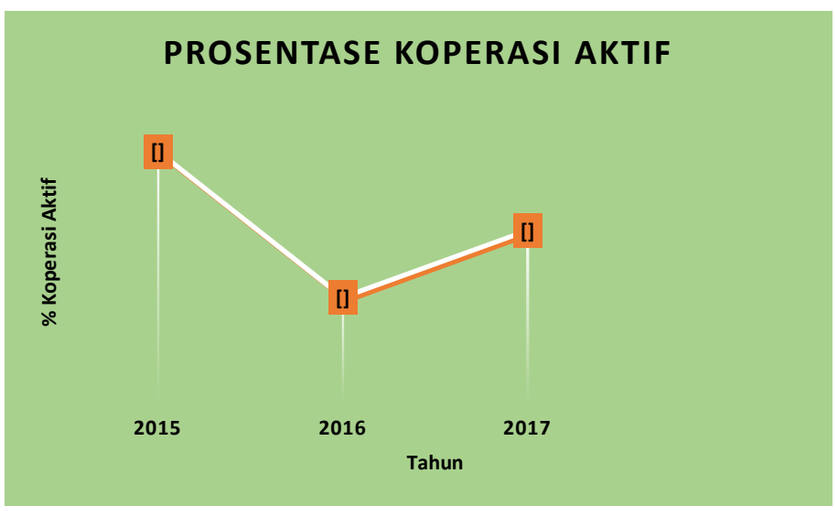

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Perkembangan jumlah koperasi aktif dan tidak aktif selama tiga tahun terakhir, terlihat pada grafik berikut :

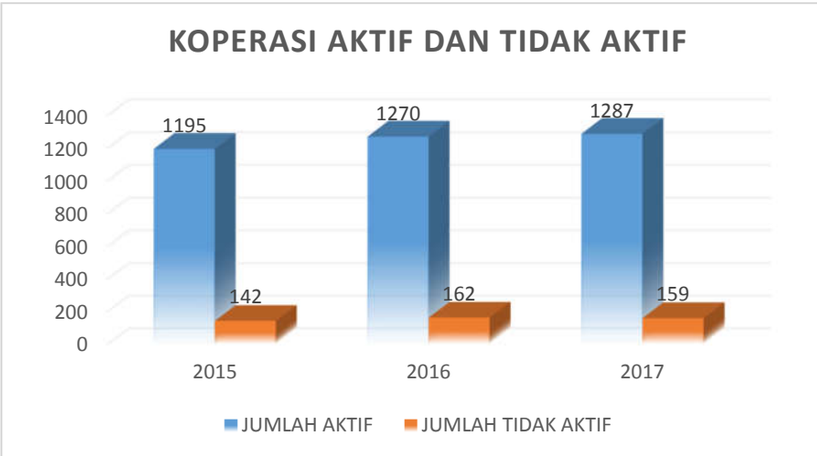

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2) Persentase Koperasi Sehat

Koperasi yang sehat dapat dilihat dari berbagai segi. Selain telah memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah tentunya koperasi yang sehat juga mengupayakan sehat secara organisasi, mental dan usaha. Sehat organisasi dilihat dari rapat anggota dan badan pengurus yang optimal, sehat mental dilihat dari tanggung jawab para anggota dan badan pengurus serta adanya aktivitas maupun kegiatan pengabdian pada masyarakat, sedangkan sehat usaha dilihat dari pengelolaan koperasi yang berlandaskan azas serta prinsip-prinsip dasar koperasi.

Berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi maka koperasi wajib dinilai kesehatannya setiap tahunnya. Adapun penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut :

1. Permodalan
2. Kualitas Aktiva Produktif
3. Manajemen
4. Efisiensi
5. Likuiditas
6. Kemandirian dan Pertumbuhan
7. Jatidiri Koperasi

Koperasi sehat mendukung parameter koperasi berkualitas dari sisi aspek usaha koperasi, aspek keuangan koperasi, aspek manfaat koperasi terhadap anggota, aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Perkembangan jumlah koperasi sehat selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

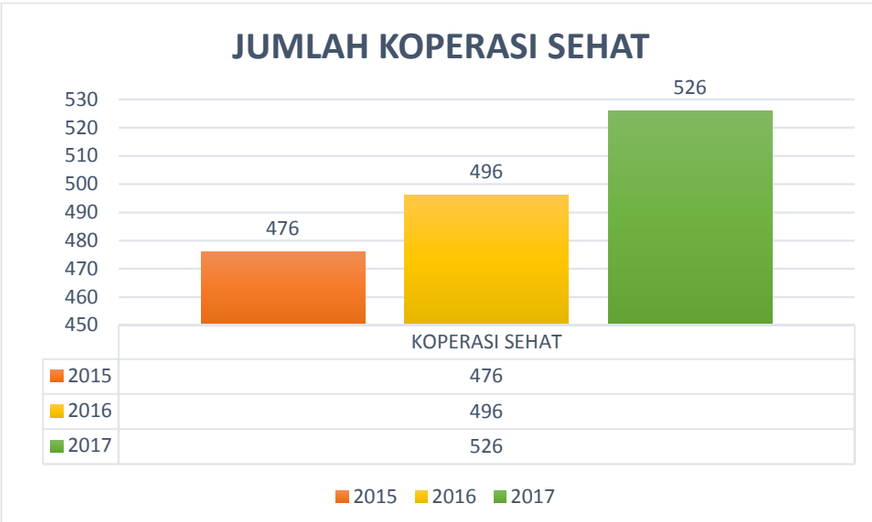

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi persentase koperasi sehat pada tahun 2017 terjadi pelampauan target yaitu dari 36,03% atau sejumlah 463 koperasi menjadi 40, 87% atau sejumlah 516 koperasi. Jika dibandingkan dengan tahun 2016, maka persentase koperasi sehat ada sedikit peningkatan sebesar 1,81% yaitu dari 39,06% atau sejumlah 496 koperasi menjadi 40,87% atau sejumlah 526 koperasi yang artinya pada tahun 2017 ada peningkatan jumlah koperasi sehat sebesar 30 koperasi. Target prosentase koperasi sehat tahun 2017 dapat dicapai melalui kegiatan berupa :

1. Pembinaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Koperasi
2. Monitoring dan Evaluasi Koperasi

Dalam mendukung capaian Indikator Koperasi Sehat dan Aktif tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator dukungan sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Koperasi

Pertumbuhan koperasi didasarkan pada peran anggota di dalam koperasi. Pertumbuhan jumlah anggota yang terus meningkat didukung

dengan tingginya partisipasi anggota untuk menyimpan dan dipergunakan kembali oleh anggota akan semakin meningkatkan jumlah modal untuk memenuhi kebutuhan usaha dan kegiatan operasional sehari –hari. Perkembangan jumlah anggota koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini :

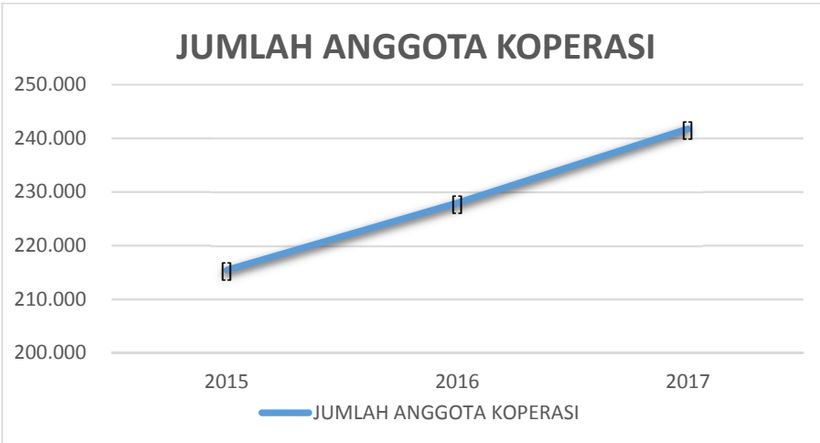

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Jumlah anggota pada tahun 2016 sebanyak 227.944 anggota menjadi 241.755 ditahun 2017 atau terjadi peningkatan sebanyak 13.811 anggota yang tersebar di seluruh koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo.

b. Meningkatnya Jumlah Modal Koperasi

Permodalan merupakan salah satu input usaha koperasi. Semakin besar modal koperasi semakin tinggi kemampuan koperasi melakukan ekspansi usaha. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal luar/pinjaman. Perkembangan jumlah modal koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik berikut ini :

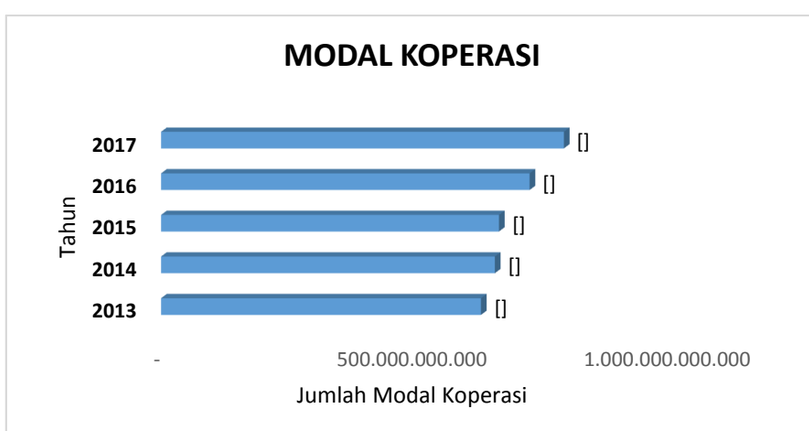

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah modal koperasi pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 dari Rp. 719.103.134.000 menjadi Rp. 785.839.941.000. Kenaikan modal sudah pasti akan lebih besar dari kenaikan SHU, karena SHU merupakan salah satu komponen dari modal sendiri selain simpanan pokok, simpanan wajib, donasi/hibah maupun cadangan resiko dan pinjaman bank serta titipan uang dari anggota pada koperasi (modal luar).

c. Meningkatnya Jumlah Volume Usaha Koperasi

Volume usaha koperasi merupakan total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Volume usaha berkaitan dengan skala ekonomi, semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensinya sebagai perusahaan, sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa yang lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi khususnya yang berasal dari anggota. Berikut ini perkembangan jumlah volume usaha koperasi selama tiga tahun terakhir terangkum pada grafik :

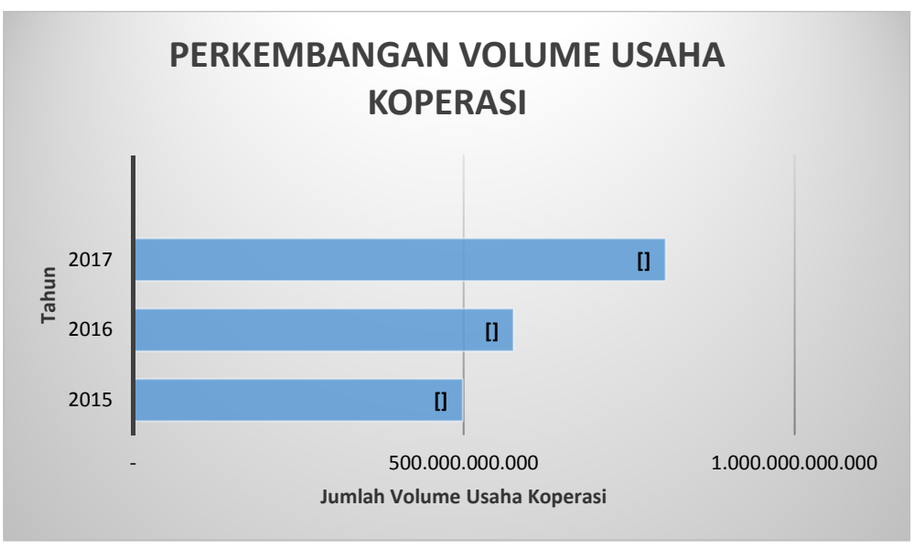

Sumber Data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Realisasi jumlah volume usaha koperasi pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun 2016 dari Rp.575.414.509.000 menjadi Rp.805.200.675.000.

Kenaikan volume usaha koperasi menunjukkan bahwa usaha dan pendapatan koperasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo telah berkembang. Hal ini juga tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melalui pelaksanaan bimbingan teknis antara lain bintek kelembagaan, bintek usaha, bintek pembentukan wirausaha baru.

18. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Program pembangunan untuk urusan penanaman modal yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan
2. Program Pengembangan, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Penanaman Modal

Program-program tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran yaitu "***Meningkatnya investasi daerah**,* tercermin pada indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase Pertumbuhan Nilai investasi daerah (PMA dan PMDN) dan Meningkatnya Jumlah Investor" serta untuk mendukung tercapainya sasaran Renstra SKPD *meningkatnya investasi daerah* dengan Indikator Kinerja Utama *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal* dan Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah.

Majunya perekonomian suatu daerah memang tak dapat lepas dari peran investasi. Investasi menjadi hal penting karena merupakan modal utama dalam menggerakkan potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah.

Salah satu ukuran untuk mengetahui tingginya investasi daerah adalah dengan menghitung pertumbuhan nilai investasi daerah tahun berjalan dengan nilai investasi daerah tahun sebelumnya.

Perkembangan pertumbuhan nilai investasi Kabupaten Sidoarjo terlihat pada grafik berikut :

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI DAERAH

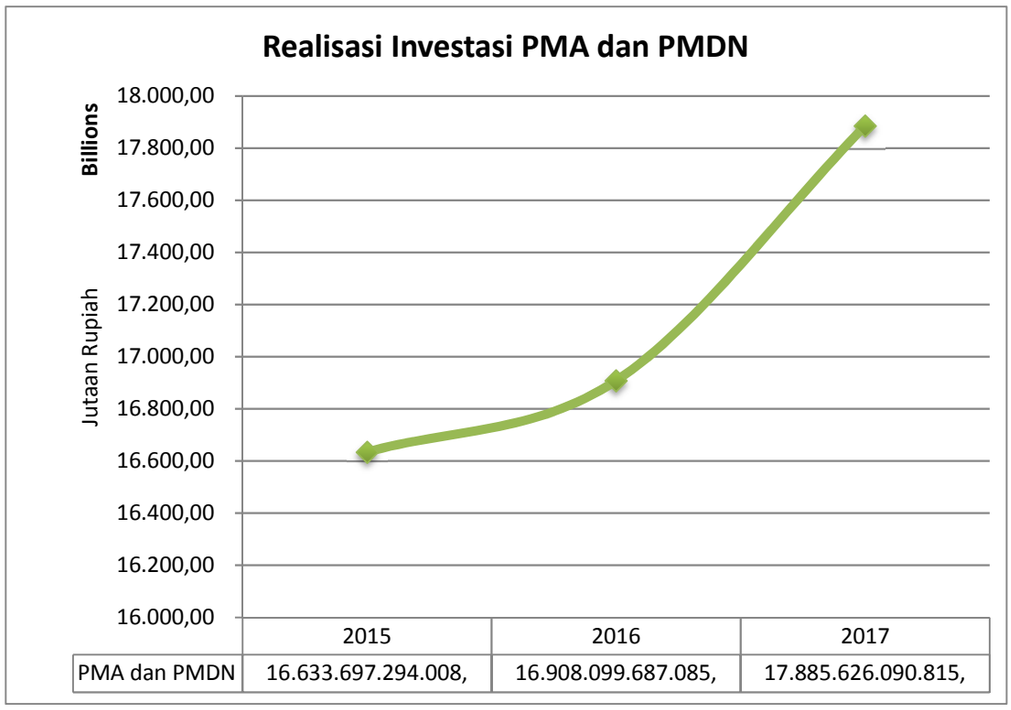

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Nilai investasi tersebut didalamnya termasuk investasi PMA dan investasi PMDN. Dimana pada tahun 2017 terdapat Realisasi pertumbuhan sebesar Rp. 17.885.626.090.815,89 atau 94,53 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16.966.371.239.888,- apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp. 16.908.099.687.085,89 terjadi peningkatan sebesar Rp. 977.526.403.730 (95 %) dan apabila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 16.633.697.294.008,- terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.251.928.796.807 (108 %). Jika dibandingkan target RPJMD sebesar Rp. 16.966.371.239.888,- 105,4% maka atas target yang telah ditetapkan tersebut diatas telah dapat tercapai/terpenuhi demikian dari tahun dasar RPJMD terjadi peningkatan investasi yang cukup signifikan, capaian tersebut sudah memenuhi.

Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan investasi daerah, yaitu :

1. Peningkatan kualitas dan penambahan jumlah sarana prasarana penunjang pelayanan perijinan dan penanaman modal.

2. Optimalisasi pelayanan perijinan online sehingga mempercepat waktu penyelesaian dan menghemat biaya.
3. Pengembangan pelayanan perijinan berbasis system online, sehingga efisien dan akmulasi database terukur.
4. Mengintensifkan fungsi koordinasi dan konsultasi di Internal Organisasi maupun OPD teknis terkait, sehingga proses pemberian pelayanan perijinan dan penanaman modal menjadi lebih baik sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.
5. Optimalisasi kegiatan sosialisasi, Workshop/Gathering Promosi pelayanan perijinan dan penanaman modal sehingga tepat sasaran, termasuk keikutsertaan dalam pameran promosi investasi dan pelayanan public secara rutin, sehingga menarik minat investor dalam dan luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sidoarjo.

a. Nilai Investasi PMA

Perkembangan investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo di gambarkan sebagai berikut :

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI PMA

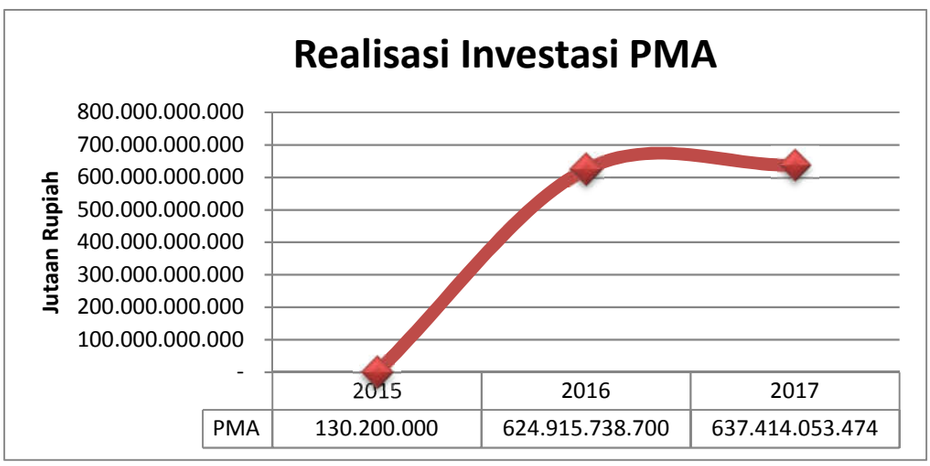

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Realisasi jumlah investasi PMA di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp. 1.698.323.750.000,- dari target yang ditetapkan Rp. 637.414.053.474,- dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.060.909.696.526,- atau 37.53% apabila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah realisasi sebesar Rp. 2.075.761.957.500,- dari target yang ditetapkan Rp. 624.915.738.700,- dengan demikian terjadi peningkatan sebesar Rp. 1.450.846.218.800,-

Berikut data perkembangan nilai investasi PMA :

TARGET REALISASI INVESTASI PMA (DALAM JUTAAN Rp)		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	130,200.000	624,915.738.700
2016	624,915.738.700	2.075.761.957.500
2017	637,414.053.474	1.698.323.750.000

Upaya untuk meningkatkan nilai investasi PMA yaitu :

a. Iklim Investasi yang kondusif.
b. Pemberlakuan perda RT / RW sesuai dengan RDTRK, sehingga ada kepastian peruntukkan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa.
c. Adanya kepastian peruntukan lahan yang bisa di akses melalui website BPN untuk informasi status tanah, letak dan batas bidang tanah serta nilai tanah.
d. Penyederhanaan persyaratan dan prosedur perijinan dengan pelayanan berbasis IT untuk percepatan proses pelayanan investasi.
e. Promosi potensi dan peluang investasi yang berkelanjutan baik ditingkat domestic atau internasional.
f. Tersedianya tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi / keahlian yang dibutuhkan perusahaan.

Kemudahan pelayanan perijinan dengan pemberlakuan paket perijinan online, perijinan online dan tanda tangan elektronik sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perijinan.

b. Nilai Investasi PMDN

Berikut ini adalah grafik jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo.

PERKEMBANGAN NILAI INVESTASI PMDN

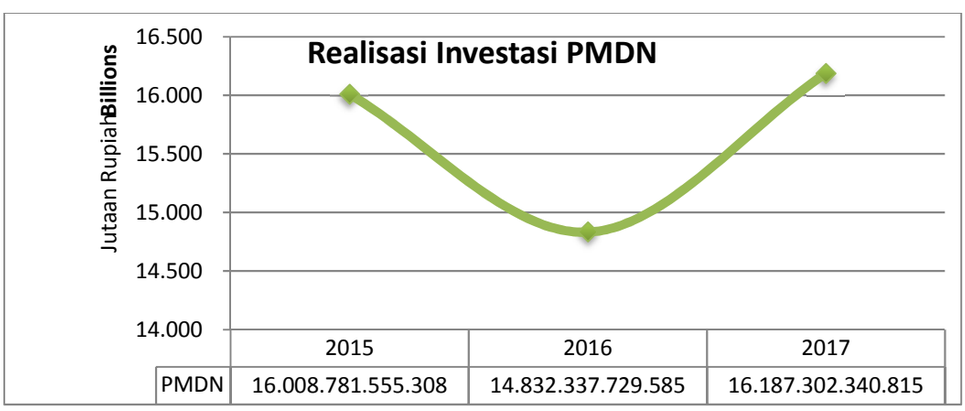

Sumber Data : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidoarjo

Realisasi jumlah investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar Rp. 16.187.302.340.815,- dengan demikian terjadi penurunan sebesar Rp. 141.654.845.599,- atau 1 % apabila dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah realisasi Rp 14.832.337.729.584,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 16,008,781,555,308,-.

Berikut data perkembangan nilai investasi PMDN :

TARGET REALISASI INVESTASI PMDN (DALAM JUTAAN Rp)		
TAHUN	TARGET	REALISASI
2015	16,008,781,555,308	16.008.781.555.308
2016	16,008,781,555,308	14.832.337.729.585
2017	16,328,957,186,414	16.187.302.340.815

Upaya untuk meningkatkan nilai investasi PMDN yaitu :

a. Adanya kepastian peruntukan investasi sesuai dengan bidang industri, perdagangan, perumahan dan jasa
b. Kemudahan pelayanan perijinan dengan pemberlakuan perijinan 1 paket dan paket perijinan online sehingga mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian perijinan.
c. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang memadai (Gas,Jalan,Listrik,dsb)
d. Meningkatkan promosi investasi melalui pameran investasi, pameran pelayanan publik, leaflet, baliho, media elektronik dan situs Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
(www.dpmptsp.sidoarjokab.go.id) dan situs pemerintah kabupaten sidoarjo (www.sidoarjokab.go.id).

19. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pelayanan Pemanfaatan Fasilitas Keolahragaan
2. Program peningkatan peran serta pemberdayaan kepemudaan dan keolahragaan

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya Prestasi dan Peran Serta Pemuda dalam Pembangunan*** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah Prestasi Pemuda yang Diperoleh di Tingkat Regional, Nasional dan Internasional**

   Indikator ini mengukur tingkat keberhasilan pembinaan pemuda di Kabupaten Sidoarjo dengan menghitung jumlah pemuda yang berprestasi pada berbagai bidang di skala Regional, Nasional atau Internasional.

   Pencapaian indikator ini pada tahun 2017 sebanyak 13 prestasi, tercapai 130 % dari target RPJMD sebanyak 10 prestasi.

   Capaian indikator ini meningkat 10 prestasi dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 2 prestasi.

   Rincian prestasi tahun 2017 tersebut antara lain :

No	NAMA	PRESTASI	KETERANGAN
1	Adinda Aisyah Rahma Alam	Lolos Paskibraka Tingkat Provinsi	SMKN 1 Sidoarjo
2	Rasyid Dwi Wijaya	Lolos Paskibraka Tingkat Provinsi	SMA HANG TUAH 5 CANDI
3	Revindia Carina	Miss Global Beauty 2017	Guk Yuk Tahun 2013
4	Vany Fitria	Raki Jawa Timur	Guk Yuk Tahun 2015
5	Ammy Yoga Prajati	Juara II Pemuda Pelopor Bidang Pangan Tk. Nasional	-
6	Miftakhul Jannatin	Juara I Pemuda Pelopor Tingkat Prov. Jawa Timur	-
7	Achmad Irfandi	Duta Pemuda Sidoarjo Perwakilan Jatim Tk. Nasional	-
8	Yonathan Toar Sangari	Juara III Video Film Pendek Tk. Nasional	-
9	Muhammad Putra Rian	Juara I Band Indie dalam Kirab Pemuda Nusantara	Lemonade Band

No	NAMA	PRESTASI	KETERANGAN
10	Adella Pramestie Kirana	Juara I Band Indie dalam Kirab Pemuda Nusantara	Lemonade Band
11	Nathania Grace Edwin	Juara I Band Indie dalam Kirab Pemuda Nusantara	Lemonade Band
12	Achmad Firnanda Darmawan	Juara I Band Indie dalam Kirab Pemuda Nusantara	Lemonade Band
13	Nararya Erly	Juara I Band Indie dalam Kirab Pemuda Nusantara	Lemonade Band

Keberhasilan capaian indikator kinerja ini disebabkan :

1. Adanya kerjasama dan motivasi yang baik diantara Instansi dan masyarakat.
2. Tersedianya fasilitas yang mendukung untuk menjadi lebih baik.
3. Adanya pembinaan yang kompeten dibidangnya.

Untuk lebih meningkatkan prestasi pemuda akan dilakukan pembinaan yang lebih terfokus pada bidang unggulan yang terindentifikasi berpotensi meraih prestasi di tingkat Nasional.

2. Jumlah pemuda yang berwirausaha (sebagai Wira Usaha Baru, WUB)

Untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan, maka pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Sidoarjo perlu dibina secara berkelanjutan, dan dibuka wawasannya mengenai wirausaha sehingga mereka mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dan memberdayakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Target pemuda yang berwirausaha sebagai Wira Usaha Baru (WUB) tahun 2017 sebanyak 18 orang dapat terealisasi sebanyak 18 orang atau 100%, antara lain yaitu :

1. Ghazwu Fikril Haq
2. M. Andri Irawan
3. Moch. Usman Sirojudin
4. Destia Swasdika Putri
5. Achmad Irfandi
6. Dian Suci Setiowati

7. Moch. Aris Febriyawan
8. Muhammad Awwaluddin Firmansyah
9. Ammy Yoga Prajadi
10. Miftakhul Jannatin, S.Si
11. Ifanul Achmad Irfandi
12. Muhamad Dian Agus Hidayat
13. Much.Muhajirin
14. Muchamad Amin
15. Umirul Lisayaroh
16. Nur Nihayatul Wafiroh
17. Khuluqul Karimah
18. Moch.Fariz Ardiansyah

Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 12 orang WUB.

Kenaikan capaian indikator kinerja ini disebabkan :

1. Kepedulian dari atasan kepada bawahan;
2. Adanya koordinasi yang baik dari para peserta dan pihak penyelenggara/pelaksana;
3. Tersedianya fasilitas yang mendukung kegiatan tersebut;
4. Kemampuan dari para peserta yang mampu mengikuti kegiatan.

3. Jumlah Prestasi Olahraga di tingkat Regional, Nasional dan Internasional

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi keolahragaan yang ada. Prestasi di bidang olahraga pada tahun 2017 sebanyak 384 prestasi tercapai 295,38 % dari target 130 prestasi.

Capaian indikator ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 102 prestasi.

Rincian prestasi tahun 2017 sebagai berikut :

No	Cabang Olah Raga	PRESTASI			
		Daerah	Provinsi	Nasional	Internasional
1	Renang	42	3	10	-
2	Judo	-	19	1	-

No	Cabang Olah Raga	PRESTASI			
		Daerah	Provinsi	Nasional	Internasional
3	Atletik	-	14	2	2
4	Bilyard	3	-	-	-
5	Bola Voli Indoor	3	2	-	-
6	Aeromodelling	3	-	-	-
7	Panjat Tebing	-	13	-	-
8	Gulat	6	-	1	-
9	Wushu	10	-	-	-
10	Panahan	-	10	-	-
11	Bulu Tangkis	17	1	3	-
12	Taekwondo	9	-	-	-
13	Muaythai	-	-	14	-
14	Polo Air	-	13	-	-
15	Catur	7	2	-	-
16	Basket	-	1	-	-
17	Anggar	-	27	-	-
18	Dayung	-	2	-	-
19	Sepatu Roda	59	-	1	-
20	Bola Voli Pantai	5	-	4	-
21	Selam	19	-	17	-
22	Pencak Silat	-	-	5	-
23	Senam	-	8	2	-
24	Tenis Lapangan	-	1	-	-
25	Sepak Takraw	-	1	1	-
26	Karate	-	-	3	-
27	Senam Fornas	-	-	11	-
28	Sepatu Kosti Fornas	-	-	2	-

No	Cabang Olah Raga	PRESTASI			
		Daerah	Provinsi	Nasional	Internasional
29	Panco Fornas	-	-	3	-
30	Poco-Poco Fornas	-	-	2	-
	Total	**183**	**117**	**82**	**2**

Kenaikan prestasi olah raga dikarenakan :

1. Di maisng-masing induk cabang olah raga (cabor) diadakan latihan yang berkesinambungan dan berlapis dan berjenjang dari pemula sampai senior;
2. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang latihan tiap cabor yang ada di Kabupaten Sidoarjo;
3. Adanya koordinasi yang baik cabor dengan Pemerintah yang difasilitasi oleh KONI Kabupaten Sidoarjo;
4. Dengan banyaknya latih tanding ditingkat yunior dan senior maka akan meningkat prestasi atlet tiap cabor.

4. Tingkat Kepuasaan Pengunjung Fasilitas Olahraga

Untuk memasyarakatkan olahraga di masyarakat dan untuk meningkatkan prestasi olahraga yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyediakan sarana olahraga yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jumlah sarana olahraga milik pemerintah tahun 2017 berjumlah tiga kawasan yaitu Kawasan Gelora Delta, Stadion Jenggolo dan Gedung Bulutangkis. Agar tujuan/sasaran yang diinginkan tercapai maka sarana dan prasarana olahraga tersebut perlu dikelola dan dipelihara dengan baik.

Pada Tahun 2017, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Sidoarjo telah melakukan Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pengunjung fasilitas olah raga dan hasilnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai angka sebesar 76,68 dan masuk tataran “baik”. Angka ini mengalami kenaikan dari IKM Tahun 2016 yang hanya mencapai 74,93.

Untuk ke depannya Kabupaten Sidoarjo akan terus meningkatkan kualitas pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sehingga bisa meningkatkan pelayanan fasilitas olah raga.

20. Urusan Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendukung sasaran pembangunan "***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi***". Hal ini dimaksudkan melalui penyediaan data dan informasi statistik yang handal akan mendukung upaya kualitas pelayanan publik dalam penyediaan akses informasi publik.

Keberhasilan pelaksanaan urusan statistik didukung dengan ketersediaan dokumen statistik daerah.

Dokumen Statistik Daerah yang disusun

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan penyusunan dokumen statistik daerah untuk mendukung informasi pembangunan yang pada awalnya sebelum dibentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika kegiatan ini dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo, Dokumen- dokumen yang disusun diantaranya :

1. **Indikator Ekonomi;**

   Beberapa indikator ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

   a. Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo;
   b. Tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: industri pengolahan; perdagangan, hotel dan restoran serta pengangkutan dan komunikasi;
   c. Laju inflasi Kabupaten Sidoarjo;
   d. Gini rasio kabupaten Sidoarjo;
   e. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2016;
   f. Pendapatan Asli Daerah;
   g. Realisasi belanja pegawai;
   h. IPM.

2. **Indikator Sosial;**

   Publikasi Indikator Sosial menyajikan data dan informasi terkait dengan kondisi sosial masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang meliputi, yaitu:

   a. Kondisi Geografis
   b. Pemerintahan
   c. Penduduk
   d. Tenaga Kerja
   e. Kesehatan
   f. Pendidikan
   g. Hotel
   h. Pariwisata
   i. Kriminalitas
   j. Bencana Alam

   Cakupan data dalam publikasi ini utamanya adalah untuk tingkat kecamatan dan kabupaten. Sebagian data diasumsikan sebagai representasi kabupaten, meskipun sebenarnya datanya tidak menggambarkan keseluruhan kabupaten, seperti data dari titik stasiun pengamatan cuaca BMKG.

3. **Indeks Harga Konsumen;**
4. **Indikator Kesejahteraan Rakyat;**
5. **Profil Industri besar/sedang**
6. **Sidoarjo Dalam Angka**

   Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2017 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan Kabupaten Sidoarjo setiap tahun yang berisikan data sebagai berikut:

   a. Keadaan Geografis
   b. Pemerintahan
   c. Penduduk dan Tenaga Kerja
   d. Sosial
   e. Pertanian
   f. Industri
   g. Perdagangan
   h. Perhubungan
   i. Keuangan dan Harga-Harga

j. Pendapatan regional Regional Income

7. **PDRB**

   Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

8. **Indeks Pembangunan Manusia**

9. **Kecamatan Dalam Angka**

   Kecamatan Tarik Dalam Angka 2017 merupakan publikasi tahunan yang berupa kumpulan data dan secara komprehensif dari berbagai bidang/ sektor. Tujuan utama publikasi ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara global keadaan masing-masing kecamatan (18 Kecamatan) di Kabupaten Sidoarjo setiap tahun yang berisikan data sebabagi berikut:

   a. Keadaan Geografis
   b. Pemerintahan
   c. Kependudukan
   d. Sosial
   e. Pertanian
   f. Industri
   g. Perhubungan
   h. Keuangan dan Harga-harga

10. **Indeks Good Governance**

11. **Indeks Kebahagiaan**

Untuk pelaksanaan pembuatan dokumen Indikator Ekonomi, Indikator Sosial, Indeks Harga Konsumen, Indikator Kesejahteraan Rakyat, dan Profil Industri Besar/ sedang pelaksanaan penyusunan dokumen tersebut Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan BPS Kabupaten Sidoarjo, Sedangkan untuk Dokumen Sidoarjo Dalam Angka, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia dan Kecamatan Dalam Angka merupakan produk BPS yang dipublikasikan dan digandakan oleh Bidang Statistik untuk kepentingan umum. Kegiatan Indeks Good Governance dan Indeks Kebahagiaan merupakan produk Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika.

Diharapkan informasi-informasi yang dihimpun tersebut dapat memberikan manfaat untuk peningkatan pembangunan Kabupaten Sidoarjo di masa mendatang.

21. Urusan Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendukung sasaran pembangunan "***Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi***". Hal ini dimaksudkan melalui kualitas pengamanan informasi yang handal akan menunjang keberhasilan dalam pengelolaan komunikasi penunjang pelayanan publik yang lebih akurat dan terpercaya.

Program pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2017 untuk urusan persandian yaitu Program Program Koordinasi Kebijakan dan Pelayanan Bidang Telematika dan Persandian

Keberhasilan pelaksanaan urusan persandian didukung dengan kualitas dalam pelayanan pengamanan informasi.

Pelayanan keamanan informasi yang dilakukan

Pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap keamanan informasi dengan output kegiatan, diantaranya :

1. Pemasangan Firewall Jaringan

   Pengadaan perangkat keamanan yang berfungsi untuk mengidentifikasi, memproteksi pelanggaran terhadap sistem jaringan data center Dinas Komunikasi dan Informatika.
2. Penyusunan SOP Keamanan

   Menyusun SOP untuk pengelolaan database terintegrasi pada data center Dinas Komunukasi sebagai standarisasi keamanan informasi menuju ISO : 27001 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)

Pergerakan tata kelola pemerintahan menuju era digital, memunculkan inovasi-inovasi baru. Khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, komunikasi publik dan sebagainya. Hal itu dilakukan sebagai upaya transparansi, mempercepat respons dan pelayanan, serta efisiensi sumber daya.

Kendati begitu, kemudahan-kemudahan itu memunculkan ancaman keamanan, baik data maupun transaksi informasi, yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu.

Dari sinilah peran urusan persandian menjadi penting untuk meminimalisir hal tersebut.

22. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya

Hasil pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk memenuhi sasaran "***Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan, dan Ketertiban Umum dalam masyarakat yang berbudaya***" dan dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

1. **Jumlah Kelompok Seni dan Budaya Daerah yang memiliki daya tarik wisata**

   Perkembangan jumlah kelompok seni budaya tahun 2017 seperti pada grafik berikut :

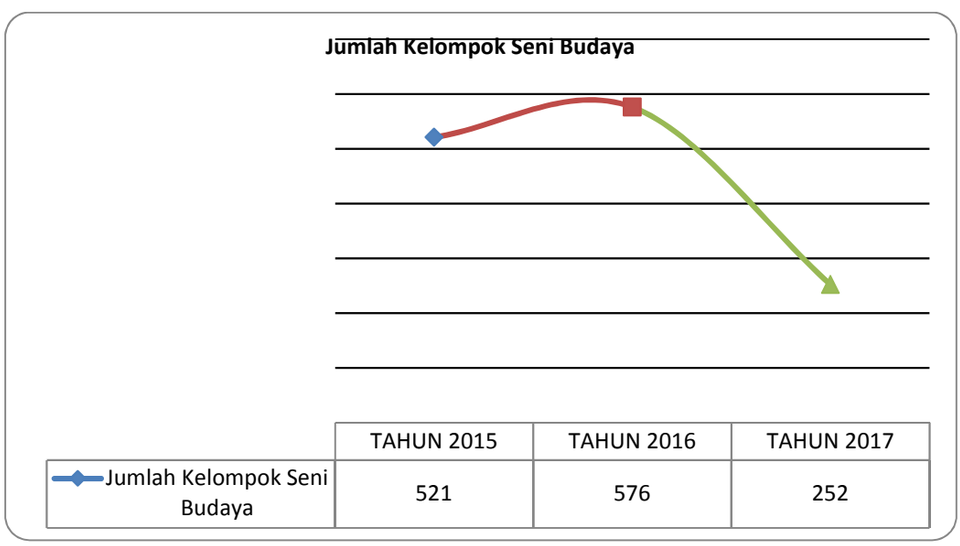

Sumber Data: Kartu Induk Seniman yang ada di Bidang Kebudayaan Tahun 2017

Dilihat dari grafik diatas di tahun 2017 terdapat jumlah kelompok seni dan budaya sebanyak 252 kelompok, terjadi penurunan sebanyak 324 kelompok atau 56,25% jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Penurunan jumlah kelompok seni budaya dikarenakan :

1. Pekerjaan sebagai seniman bukan mata pencaharian utama sehingga apabila mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, maka pekerjaan sebagai seniman ditinggalkan;
2. Kelompok seni dan budaya tidak melakukan registrasi ulang kartu induk (masa berlaku 2 tahun) sehingga tidak terdata di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dari berbagai kegiatan di atas, ada 2 kegiatan seni dan budaya yang memiliki daya tarik wisata yaitu antara lain :

No.	Nama Kegiatan Seni dan Budaya	Uraian Daya Tarik Yang Dimiliki
1.	Tari Banjar Kemuning, berasal dari Desa Banjar Kemuning Kecamatan Sedati menceritakan tentang ketabahan dan kekuatan seorang istri yang ditinggal suami mencari ikan di laut	Gerakan tari lincah dan dinamis menggambarkan keteguhan seorang wanita dan merupakan tarian khas Kabupaten Sidoarjo yang telah diakui keberadaannya dan biasanya diitampilkan sebagai pembuka atau tari selamat datang untuk tamu-tamu kehormatan
2.	Wayang Kulit	Dipentaskan dalam rangka HUT Sidoarjo dan dipagelarkan pada saat Ruwah Desa/Bersih Desa

Jumlah kelompok seni untuk Tari Banjar Kemuning Tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

1. Kreasi Dancer Sidoarjo/KDS (Perum Prima Regency Kav. 38 Kemiri);
2. Delta Trivikarma (Trunojoyo, Sidoarjo);
3. Sanggar Tari SMP PGRI 1 Sidoarjo;
4. Sanngar Tari SMP PGRI 1 Buduran;
5. Sanggar Tari Risky (Candi).

Perkembangan kelompok seni Tari Banjar Kemuning sebagaimana grafik berikut :

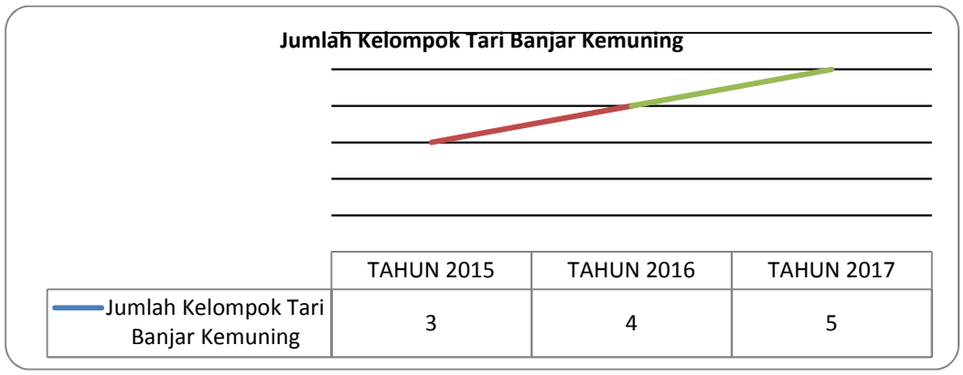

Sumber Data : dari Bidang Kebudayaan

Jumlah kelompok budaya untuk Wayang Kulit di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 sebesar 33 (tiga puluh tiga) kelompok, dengan grafik perkembangan sebagai berikut :

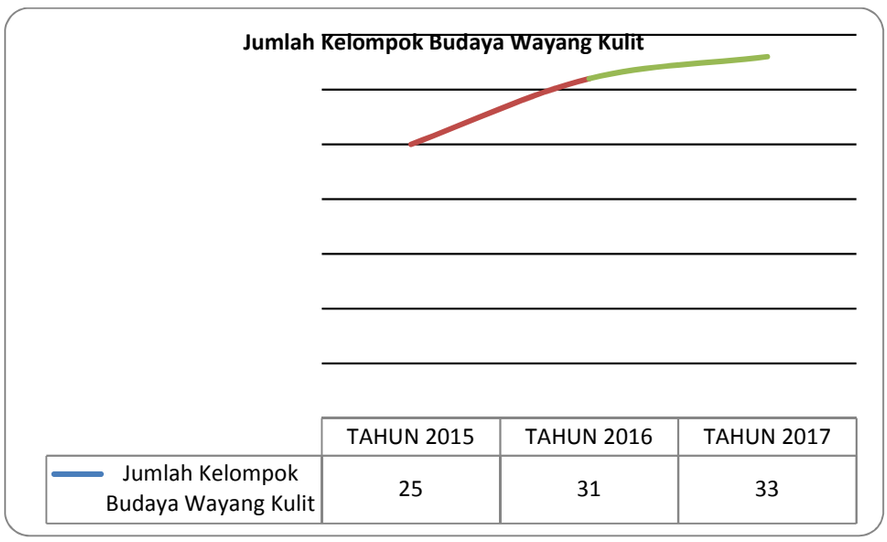

Sumber Data : dari Bidang Kebudayaan

2. Budaya daerah yang Dilestarikan

Untuk menopang pelestarian seni dan budaya daerah maka harus dijaga eksistensi kelompok seni dan budaya yang ada di masyarakat. Pada Tahun 2017, adat budaya yang dilestarikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo, antara lain sebagai berikut :

No.	Jenis / Macam Budaya	Keterangan
1.	Macapat	Dilaksanakan setiap malam Senin Wage atau malam Selasa Kliwon penaggalan Jawa di Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu bentuk wujud nguri-nguri budaya Jawa

2.	Aqiqah	Hampir di setiap desa ada acara aqiqah dan hampir setiap bulan ada pelaksanaan aqiqah
3.	Ruwatan	Dilaksanakan di masing-masing Desa
4.	Lelang Bandeng	Bulan Desember di Alun-alun Sidoarjo

Untuk melestarikan seni budaya, peran kelompok seni budaya yang ada di masyarakat sangat besar. Kelompok seni budaya yang terbentuk terbagi dalam beberapa bidang seni yaitu : Ludruk, Wayang Kulit, Reog Ponorogo, Patrol, Jaranan/Bantengan, Musik (Orkes Melayu, Hadrah, Samroh, Gambus, Al Banjari dan Keroncong), Kentrung,Tari,Teater, Karawitan, Campursari dan Mocopat.

Di Kabupaten Sidoarjo juga terdapat daerah pesisir yang melestarikan budaya nelayan pesisir. Sampai saat ini budaya nelayan pesisir dilestarikan oleh enam desa, yaitu :

1) Desa Balong Dowo Kecamatan Candi
2) Desa Balong Gabus Kecamatan Candi
3) Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi
4) Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo
5) Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati
6) Desa Kepetingan Kecamatan Sidoarjo

Tradisi ini sampai beberapa tahun terakhir masih terpelihara dan terjaga kelestariannya.

Upaya yang dilakukan untuk melestarikan tradisi tersebut antara lain :

1. Menyelenggarakan pentas seni budaya
2. Menyelenggarakan festival seni budaya
3. Mengadakan seminar, workshop, diskusi dan lain-lain tentang seni budaya
4. Memberikan penghargaan kepada seniman berprestasi

3. Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Pada Tahun 2017 telah diselenggarakan berbagai kegiatan demi usaha melestarikan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Sidoarjo, yaitu antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
1.	Mocopat	Senin, 20 Maret 2017 Pukul.19.00 s/d 01.00 Wib	Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo	Tema : Filsafat Jawa dan Pengejawantahannya dalam kehidupan sehari-hari, diikuti Oleh paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
2.	Mocopat	Senin, 3 Juli 2017 Pukul.19.00 s/d 01.00 Wib	Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo	Tema : Memaknai halal bi halal al, diikuti Oleh paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
3.	Mocopat	Senin, 7 Agustus 2017 Pukul.19.00 s/d 01.00 Wib	Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo	Tema : Pembelajaran Mocopat diikuti Oleh paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
4.	Mocopat	Senin 11 September 2017 Pukul.19.00 s/d 01.00 Wib	Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo	Tema : Pembelajaran Mocopat diikuti Oleh paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
5.	Mocopat	Senin 20 September 2017 Pukul.19.00 s/d 01.00 Wib	Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo	Tema : Pembelajaran Mocopat diikuti Oleh paguyuban Mocopat Sidoarjo dan sekitarnya
6.	Pawai Budaya dengan tema "Sidoarjo Exotic Carnival"(Candi Pari)	Minggu, 12 Maret 2017 Pukul : 07.00 Wib s/d selesai	Alun-alun	Diikuti oleh 52 peserta dari SKPD, BUMD, Masyarakat Umum
7.	Pesta Rakyat	Minggu, 12 Maret 2017 Pukul : 09.00 Wib s/d selesai	Parkir Timur Gor Sidoarjo	Pesta rakyat dengan makanan khas Sidoarjo di peruntukan untuk masyarakat (makan gratis, 7500 porsi)

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
8.	Lelang Bandeng	Rabu, 6 Desember 2017 Pukul : 19.00 Wib s/d selesai	Alun-alun Kab. Sidoarjo	Merupakan tradisi tahunan dalam rangka memperingati Maulud Nabi Muhammad SAW, disediakan 4 buah sepeda motor dan emas 4 buah masing-masing 10 gram untuk 4 pemenang
9.	Gelar Seni FKPU	Jum'at, Sabtu, Minggu 10 s/d 12 Maret 2017 Pukul : 19.00 Wib s/d selesai	Alun-alun Kabupaten Sidoarjo	Diikuti oleh 14 peserta dari Kab/Kota diwilayah pesisir utara Propinsi Jawa Timur dengan tema Budaya kelautan
10.	Sarasehan Budaya FKPU	Sabtu, 12 Maret 2017 Pukul : 08.00 Wib s/d selesai	Ruang Delta Karya Lt II Setda Kab.Sidoarjo	Diikuti oleh senima dan budayawan 100 peserta dari Kab/Kota diwilayah pesisir utara Propinsi Jawa Timur
11.	Pawai Budaya FKPU	Minggu, 12 Maret 2017 Pukul : 07.00 Wib s/d selesai	Alun-alun Kabupaten Sidoarjo	Diikuti oleh 14 peserta dari Kab/Kota diwilayah pesisir utara Propinsi Jawa Timur
12.	Pagelaran Drama Tari	Minggu, 7 Mei 2017 Pukul : 09.00 Wib s/d selesai	Anjungan Jawa Timur TMII Jakarta	Kolaborasi seniman-wati Kab. Sidoarjo dalam menampilkan Opera drama tari dengan judul "Banjaran Bumi Jenggolo "
13.	Festival Karya Tari	Jum'at, 19 Mei 2017 Pukul : 09 .00 Wib s/d selesai	Gedung Cak Durasim UPT.Taman Budaya Surabaya	Diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo mem-peroleh penghargaan sebagai Pe-nata Rias dan Busana Terbaik
14.	Jatim Specta Nigth Carnival	Sabtu, 7 Oktober 2017 Pukul 19.00 Wib s/d selesai	Kabupaten Malang	Diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur, Sidoarjo mendapat penghargaan Penyaji Terbaik

NO	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	KETERANGAN
15.	Pekan Seni Pelajar Jawa Timur	Rabu, Kamis,Jum'at 26 s/d 28 April 2017 Pukul : 08.00 Wib s/d selesai	Kabupaten Kediri	Diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur
16.	PPST	Rabu, Kamis tanggal 4,5 Oktober 2017 Pukul : 10 s/d selesai	Gedung Cak Durasim Surabaya	Diikuti oleh 38 Kab/Kota se Jawa Timur
17.	Siedex (Sidoarjo Education Expo)	Minggu, Senin tanggal 26 s/d 27 November 2017	GOR Sidoarjo	Diikuti oleh 19 peserta Band Remaja SMP sederajat se Kab.Sidoarjo, memperebutkan 10 piagam penghargaan dan Tropy dari Dikbud Kab.Sidoarjo

4. Prestasi dalam bidang seni Budaya

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya-upaya pembinaan terhadap seluruh potensi budaya yang ada. Hal ini di lakukan dalam rangka memelihara nilai-nilai kearifan lokal yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Prestasi di bidang budaya pada tahun 2017, antara lain :

No.	Event	Prestasi	Tingkat (Regional / Nasional / Internasional)
1	Lomba Pawai Budaya Tk. Propinsi Jawa Timur dalam rangka FKPU	1. Penyaji Terbaik Pawai Budaya FKPU 2. Icon Terbaik Pawai Budaya FKPU	Tingkat Nasional
2	Pekan Seni Pelajar Jawa Timur	1. Juara I Paduan Suara Tk SD 2. Juara III Tari Tk SMP 3. Juara Harapan III Baca Puisi Tk SD 4. Juara Harapan I Teater (Penulis Naskah Terbaik) Tk SMP	Tingkat Nasional

No.	Event	Prestasi	Tingkat (Regional / Nasional / Internasional)
3	Pagelaran dramatari dengan judul " Banjaran Bumi Jenggolo"	Piagam penghargaan dari Kantor Perwakilan Propinsi Jawa Timur di Jakarta atas partisipasinya dalam pagelaran budaya daerah di Anjungan Jawa Timur Taman Mini Indonesia Indah Jakarta	Tingkat Nasional
4	Festival Karya Tari Tk Propinsi Jawa Timur	1. Penata Rias dan Busana Terbaik	Tingkat Nasional
5	Lomba (PPST) Pembinaan dan Pengembangan Seni Tradisi	1. Juara Harapan II Tk SMP 2. Juara Harapan III Tk SMP 3. Juara Harapan III Tk SD	Tingkat Nasional
6	Jatim Specta Nigth Carnival 2017	1. Penyaji Unggulan Terbaik	Tingkat Nasional

23. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Hasil pelaksanaan program tersebut ditujukan untuk mendukung sasaran "***Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas, Berdaya Saing, dan Merata***" melalui peningkatan minat baca bagi masyarakat umumnya dan pelajar khususnya hal ini dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja:**"Indek Minat Baca"**yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Indeks ini digunakan untuk mengukur minat baca melalui Sistem Reading Record (RR) yaitu sistem yang menciptakan kontras (perbedaan yang benar – benar nyata) diantara mereka yang gemar membaca dan yang tidak. Hal ini dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui budaya gemar membaca.

Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD untuk indeks minat baca sebesar 42, sedangkan capaian tahun 2017 sebesar 42,95 sehingga tercapai 102,26%.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya gemar membaca di Kabupaten Sidoarjo cukup tinggi.

Indeks minat baca diukur dengan jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2017 sebanyak 70.598 orang dibanding dengan jumlah pengunjung Tahun 2017 sebanyak 164.385 orang.

Capain atas indikator Indek minat baca dapat dijelaskan melalui target kinerja utama SKPD/OPD dan target kinerja progam yaitu antara lain:

a. Meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan

Realisasi jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 tercapai sebanyak 164.385 pengunjung dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 140.297 pengunjung, maka realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 24.088 pengunjung atau 17,16%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 145.000 pengunjung, maka capaian target tingkat kunjungan perpustakaan telah tercapai sebesar 113,36%.

Perkembangan Jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2017 seperti terlihat pada grafik berikut ini

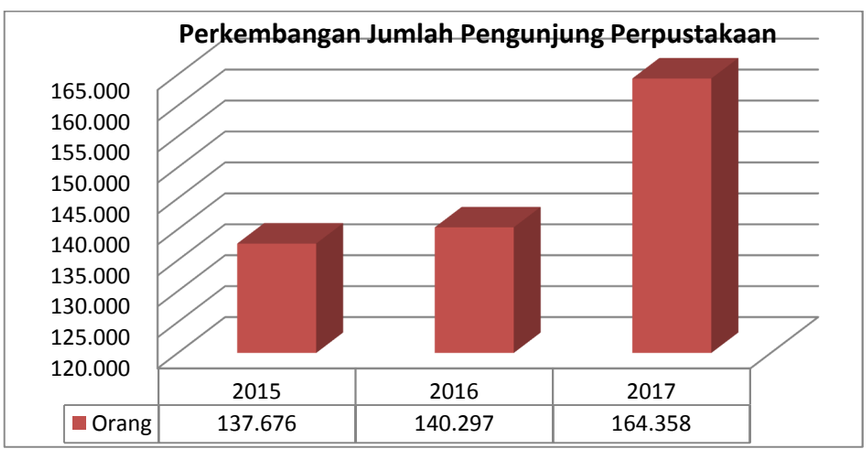

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan tersebut disebabkan oleh:

(1) Penambahan fasilitas free wifi

(2) Penambahan buku baru

(3) Adanya ruang laktasi

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, antara lain

(1) Promosi melalui Mobil Perpustakaan Keliling (MPK)

(2) Selayang pandang tentang perpustakaan

(3) Pemberian hadiah saat kunjungan ke perpustakaan

(4) Menghimbau pihak sekolah untuk mengajak siswanya berkunjung

b. Meningkatnya koleksi buku perpustakaan

Realisasi jumlah koleksi buku perpustakaan tahun 2017 tercapai sebanyak 88.656 eksemplar dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 87.554 eksemplar, maka realisasi tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 1.102 eksemplar atau 1,26% Bila dibandingkan dengan target tahun 2017 sebesar 89.000 eksemplar, maka capaian target jumlah koleksi buku perpustakaan telah tercapai sebesar 99,61%

Rincian koleksi buku perpustakaan, sebagai berikut :

GOLONGAN	JUMLAH	
	Judul	Eksemplar
000 KARYA UMUM	2.982	8.481
100 FILSAFAT	1.410	3.522
200 AGAMA	3.843	10.404
300 ILMU - ILMU SOSIAL	5.395	13.220
400 BAHASA	1.318	3.213
500 ILMU - ILMU MURNI	2.375	6.330
600 ILMU - ILMU TERAPAN	5.883	15.390
700 KESENIAN, OLAHRAGA	1.699	4.982
800 KESUSASTERAAN	4.313	11.130
900 SEJARAH, BIOGRAFI, GEOGRAFI	1.569	3.850
REFERENSI	3290	8134
JUMLAH	**34.077**	**88.656**

Dengan semakin banyaknya koleksi buku yang dimiliki oleh perpustakaan diharapkan akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi perpustakaan.

Perkembangan jumlah buku perpustakaan tahun 2017 seperti terlihat pada grafik berikut ini :

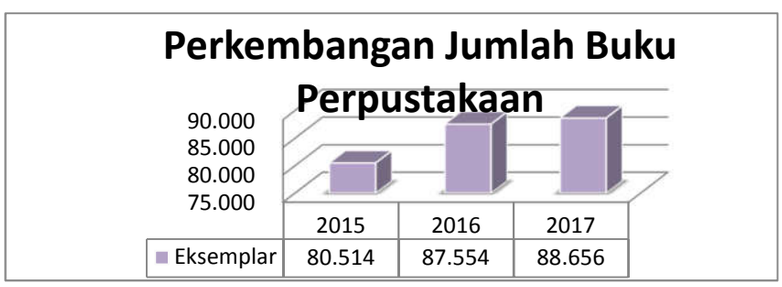

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

24. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengelolaan Kearsipan dan Dokumentasi

Hasil pelaksanaan program tersebut untuk mendukung pencapaian sasaran ”***Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan***” yang dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

a. Penerapan arsip secara baku

Realisasi Jumlah Lembaga yang menerapkan sistem kearsipan yang baku tahun 2017 sebanyak 74 Lembaga.

Upaya untuk peningkatan penerapan penyelenggaraan sistem kearsipan dengan standar yang ditentukan, antara lain melalui :

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan dalam penyelenggaraan sistem kearsipan sesuai standar yang dibakukan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan
3. Memberikan penghargaan terhadap lembaga yang sudah melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan standar kearsipan

Kegiatan pembinaan dan monitoring kearsipan yang dilakukan antara lain:

Kegiatan pembinaan kearsipan :

No.	Lokasi Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
1	a. Kelurahan Krian Kecamatan Krian	Senin, 13 Pebruari 2017
	b. Desa Kraton Kecamatan Krian	
2	a. Desa Tropodo Kecamatan Krian	Selasa, 14 Pebruari 2017
	b. Desa Sedengan Mijen Kecamatan Krian	
3	a. Desa Gamping Kecamatan Krian	Kamis, 16 Pebruari 2017
	b. Desa Terik Kecamatan Krian	
4	a. Kel.Tambakkemerakan Kecamatan Krian	Ju'mat, 17 Pebruari 2017
	b. Kelurahan Kemasan Kecamatan Krian	
5	a. Desa Terungkulon Kecamatan Krian	Senin, 20 Pebruari 2017
	b. Desa Terungwetan Kecamatan Krian	
6	a. Desa Jatikalang Kecamatan Krian	Selasa, 21 Pebruari 2017

No.	Lokasi Pembinaan	Waktu Pelaksanaan
	b. Desa Keboharan Kecamatan Krian	
7	a. Desa Barengkrajan Kecamatan Krian	Rabu, 22 Pebruari 2017
	b. Desa Sidorejo Kecamatan Krian	
8	a. Desa Sidomojo Kecamatan Krian	Kamis, 23 Pebruari 2017
	b. Desa Sidomulyo Kecamatan Krian	
9	a. Desa Tempel Kecamatan Krian	Senin, 27 Pebruari 2017
	b. Desa Watugolong Kecamatan Krian	
10	a. Desa Ponokawan Kecamatan Krian	Selasa, 28 Pebruari 2017
	b. Desa Junwangi Kecamatan Krian	
11	1. Desa Jerukgamping Kecamatan Krian	Rabu, 1 Maret 2017
	2. Desa Katerungan Kecamatan Krian	
12	a. Desa Waru Kecamatan Waru	Senin, 15 Mei 2017
	b. Desa Pepelegi Keacamatan Waru	
13	a. Desa Kureksari Kecamatan Waru	Selasa, 16 Mei 2017
	b. Desa Ngingas Kecamatan Waru	
14	a. Desa Tropodo Kecamatan Waru	Rabu, 17 Mei 2017
	b. Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru	
15	a. Desa Tambaksawah Kecamatan Waru	Kamis, 18 Mei 2017
	b. Desa Tambakrejo Kecamatan Waru	
16	a. Desa Tambakoso Kecamatan Waru	Senin, 22 Mei 2017
	b. Desa Tambaksumur Kecamatan Waru	
17	a. Desa Wadungasri Kecamatan Waru	Selasa, 23 Mei 2017
	b. Desa Berbek Kecamatan Waru	
18	a. Desa Janti Kecamatan Waru	Rabu, 24 Mei 2017
	b. Desa Wedoro Kecamatan Waru	
19	a. Desa Medaeng Kecamatan Waru	Senin, 29 Mei 2017
	b. Desa Bungurasih Kecamatan Waru	
20	Desa Kedungrejo	Selasa, 30 Mei 2017

Kegiatan Monitoring Kearsipan :

No.	OPD/BUMD/ DESA/KELURAHAN	Jumlah Monev Arsip Pada :	Rentang Waktu Pelaksanaan	Kesimpulan Hasil Monev
1.	Badan/Dinas	- 28 Badan/Dinas	1 s/d 31 Agustus 2017	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
2.	Bagian pada Setda	- 9 Bagian	16 s/d 22 Agustus 2017	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
3.	Kecamatan	- 18 Kecamatan	4 s/d 18 Agustus 2017	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
4.	BUMD	- 3 BUMD	24 s/d 28 Agustus 2017	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
5.	Pemerintahan Desa	- 55 Desa	6 Nopember s/d	16 Desa
			20 Desember 2017	Sesuai standar kearsipan yaitu pemakaian
				lembar disposisi, agenda surat masuk dan
				surat keluar, klasifikasi arsip, sarana
				penyimpanan arsip.
				39 Desa
				Belum sesuai standar kearsipan :
				Belum semua arsip disimpan berdasarkan
				klasifikasi arsip
	Jumlah	**113**		

Perkembangan Jumlah Lembaga yang telah menyelenggarakan sistem kearsipan dengan standar yang ditentukan seperti terlihat pada grafik berikut ini :

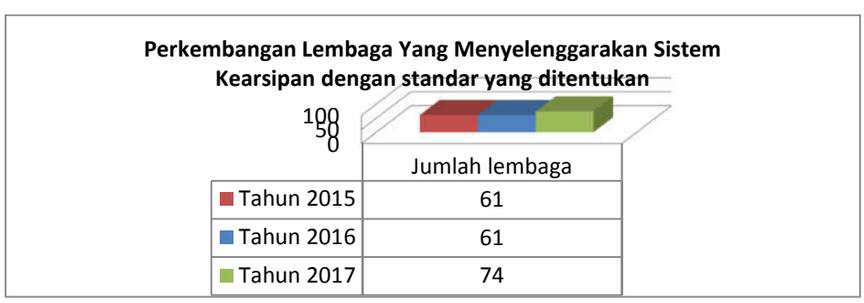

Sumber Data : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

URUSAN PILIHAN

25. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan perikanan dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap dan Kawasan Pesisir
2. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
3. Program Peningkatan Kualitas Usaha Perikanan

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran ***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan***, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase pertumbuhan PDRB sektor perikanan

PDRB Sektor Perikanan memiliki kontribusi sekitar 1,56% dari seluruh PDRB di Kabupaten Sidoarjo. Berikut nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

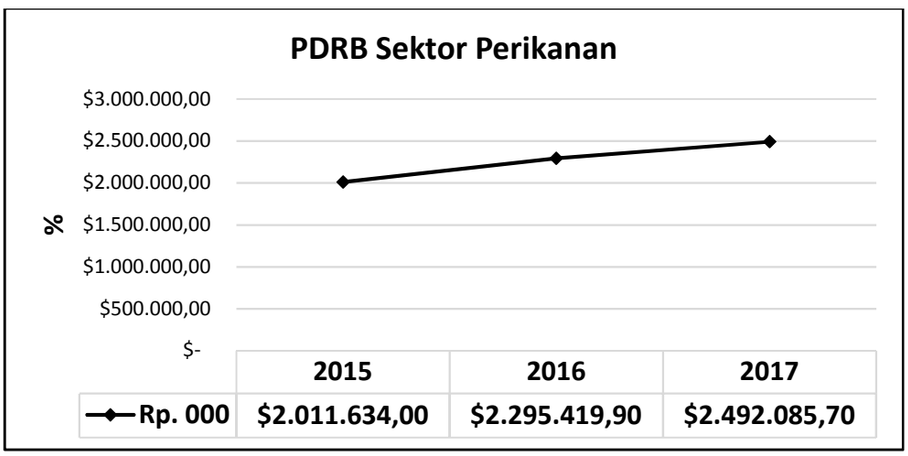

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

1. Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap terdiri dari hasil Penangkapan perikanan laut dan hasil penangkapan perairan umum. Meningkatnya produksi perikanan laut digambarkan dengan jumlah produksi perikanan yang dihitung dalam satuan kilogram (kg). Realisasi produksi hasil penangkapan perikanan laut pada tahun 2017 sebesar 15.057.400 kg meningkat

sebesar 148.640 kg apabila dibanding tahun 2016 sebesar 14.908.760 kg dan telah melampaui target tahun 2017 sebesar 15.050.000 kg

Realisasi produksi hasil penangkapan di perairan umum pada tahun 2017 sebesar 530.000 kg meningkat sebesar 4.950 kg dibandingkan tahun 2016 sebesar 525.050 kg dan pencapaian sesuai dengan target tahun 2017 sebesar 530.000 kg. Perkembangan jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2015, 2016 dan 2017 terlihat pada grafik berikut ini :

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Realisasi Produksi Perikanan Laut	14.898.400	14.908.760	15.057.400
Perairan Umum	521.710	525.050	530.000

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya – upaya untuk meningkatkan produksi perikanan tangkap adalah sebagai berikut :

- Penebaran benih ikan di perairan umum ;
- Pembinaan/pelatihan kepada nelayan dan masyarakat pesisir berupa pelatihan penangkapan ikan yang ramah lingkungan, kelembagaan, kapasitas nelayan ;
- Pengawasan perairan
- Penyempurnaan sarana prasarana perikanan tangkap

2. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya terdiri dari perikanan budidaya air tawar dan perikanan budidaya air payau. Meningkatnya produksi perikanan budidaya air tawar digambarkan dengan jumlah produksi perikanan yang

dihitung dalam satuan kilogram (kg). Realisasi hasil produksi perikanan budidaya air tawar pada tahun 2017 sebesar 19.796.050 kg meningkat sebesar 77.100 kg apabila dibanding tahun 2016 sebesar 19.718.950 kg dan telah melampaui target tahun 2017 sebesar 18.691.970 kg. Jenis komoditi Budidaya air Payau terdiri dari Bandeng, Udang Windu, Udang Vanamei, Nila dan Rumput Laut.

Realisasi hasil produksi perikanan budidaya air payau pada tahun 2017 sebesar 75.719.740 kg meningkat sebesar 834.940 kg dibandingkan tahun 2016 sebesar 74.884.800 kg dan melampaui target tahun 2017 sebesar 75.574.645 kg

Perkembangan jumlah produksi perikanan budidaya tahun 2015, 2016 dan 2017 terlihat pada grafik berikut :

PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

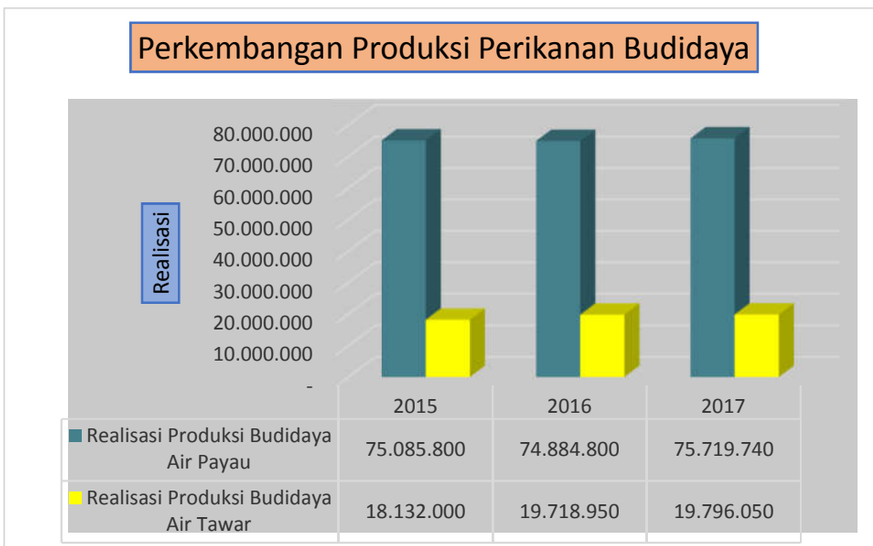

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya antara lain

- Pemberian hibah kepada pembudidaya berupa kolam, benih, pakan dan pupuk
- Penyediaan sarana prasarana budidaya
- Pengawasan pemakaian OIKB (obat ikan kimia dan biologi)
- Penerapan CBIB (cara budidaya yang baik)
- Penggunaan probiotik
- Pembinaan/pelathan terhadap pembudidaya air payau dan air tawar
- Layanan Posikandu (Pos kesehatan ikan terpadu) membantu pembudidaya dalam menangani permasalahan terhadap kesehatan ikan,

pengambilan sampel residu (ikan/udang dan tanah) , pelayanan vaksinasi, jasa konsultasi, maupun pusat informasi baik yang sifatnya aktif maupun pasif

Produktivitas hasil perikanan

Komoditi unggulan Kabupaten Sidoarjo adalah Bandeng dan Udang Windu yang mempunyai ciri khas yang berbeda dibanding daerah lain. Luas Tambak Kabupaten Sidoarjo 15.530 Ha. Dari luas tersebut 10.860 Ha ditebari Udang Windu dan 15.220 Ha ditebari Bandeng. Meningkatnya produktivitas udang Windu dan Bandeng digambarkan dengan jumlah produksi udang windu dan bandeng per hektar per tahun dengan satuan kg/ha/th.

Perkembangan produktivitas udang windu dan bandeng tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini

PERKEMBANGAN PRODUKTIVITAS UDANG WINDU DAN BANDENG

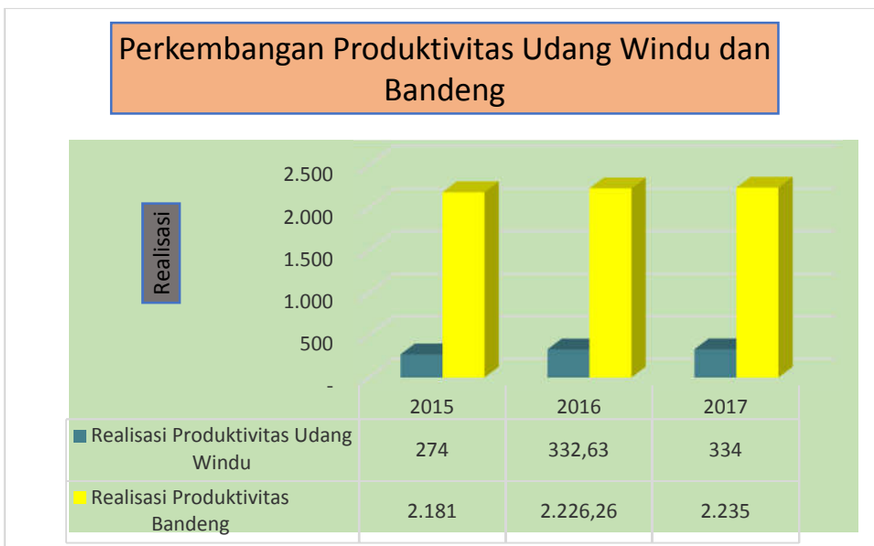

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

Realisasi produktivitas Udang Windu pada tahun 2017 sebesar 334 kg/ha/th meningkat sebesar 1,37 kg/ha/th dari tahun 2016 sebesar 332,63 kg/ha/th dan mencapai target tahun 2017 sebesar 333,7

Sedangkan realisasi produktivitas bandeng pada tahun 2017 sebesar 2.235 kg/ha/th meningkat sebesar 8,74 kg/ha/th dari tahun 2016 sebesar 2.226,26 kg/ha/th dan mencapai target 2017 sebesar 2.234 kg/ha/th

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas adalah :

- Padat penebaran tinggi
- Tingkat kelulusan hidup (SR) tinggi

3. **Peningkatan produksi olahan hasil perikanan**

Produk hasil olahan perikanan sudah beragam dari yang menggunakan nama lokal dengan bentuk yang spesifik sampai yang modern dengan formulasi khusus. Peluang usaha yang semakin terbuka untuk pasar produk olahan ikan memungkinkan setiap pembudidaya ikan atau nelayan terjun langsung menjadi pengolah dan pemasar produk olahan hasil perikanan . Jenis olahan perikanan antara lain : Bandeng Asap, otak-otak, bandeng presto, siomay, krupuk udang, petis, terasi, nugget, bakso, kripik kulit , dan lain sebagainya, dari jenis olahan tersebut yang menjadi produk unggulan adalah krupuk udang dan bandeng asap, krupuk udang Sidoarjo rasanya gurih dan tidak berbau karena bahannya dari udang segar dengan sentra produksi di wilayah Sidoarjo, buduran, Candi dan produktivitas krupuk udang tahun 2017 sebesar 244.955 kg. Bandeng Asap Sidoarjo yang sudah mendapatkan yang sudah mendapatkan indikasi geografis , ciri khas bandeng asap Sidoarjo berwarna kuning keemasan ,sentra produksi di wilayah Sedati dan Sidoarjo. Produksi bandeng asap tahun 2017 sebesar 65.321 kg. Realisasi produksi hasil olahan perikanan secara keseluruhan pada tahun 2017 sebesar 11.385.260 kg meningkat sebesar 228.819 kg apabila dibandingkan tahun 2016 sebesar 11.156.441 kg dan telah mencapai target tahun 2017 sebesar 11.379.569 Kg.

Upaya -upaya yang telah dilakukan utuk meningkatkan produksi hasil olahan perikanan sebagai berikut :

- Pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan POKLAHSAR (kelompok pengolah dan pemasar)
- Diversifikasi jenis olahan hasil perikanan

Perkembangan produksi hasil olahan perikanan tahun 2015,2016 dan 2017 terlihat pada grafik berikut ini :

PERKEMBANGAN PRODUKSI HASIL OLAHAN PERIKANAN

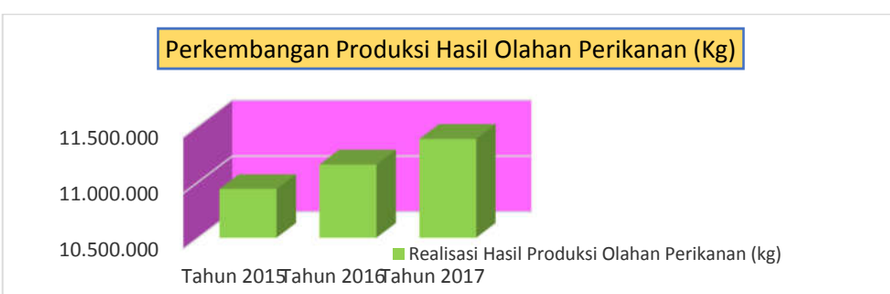

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

4. Tingkat konsumsi makan ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo tahun 2017 sebesar 30,51 kg/kapita/th dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 28,95 kg/kapita/th terjadi peningkatan konsumsi ikan sebesar 1,56 kg/kapita/th. Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat Sidoarjo karena meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, protein hewani asal ikan sudah terbukti mampu meningkatkan perkembangan sel-sel otak karena di dalam protein hewan asal ikan mengandung asam amino O mega 3 selain itu harga ikan relatif lebih murah.

Upaya untuk memotivasi masyarakat dalam mengkonsumsi ikan melalui :

- Menyelenggarakan gerakan makan ikan (gemar ikan) dan Forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan)
- Promosi , roadshow/safari gemarikan di sekolah-sekolah dasar dan taman kanak – kanak
- Bandeng murah untuk masyarakat Sidoarjo yang dilaksanakan dua kali dalam satu tahun pada saat bulan romadhon dan maulid nabi Muhammad SAW

Perkembangan tingkat konsumsi ikan tahun 2015, 2016 dan 2017 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

PERKEMBANGAN TINGKAT KONSUMSI IKAN

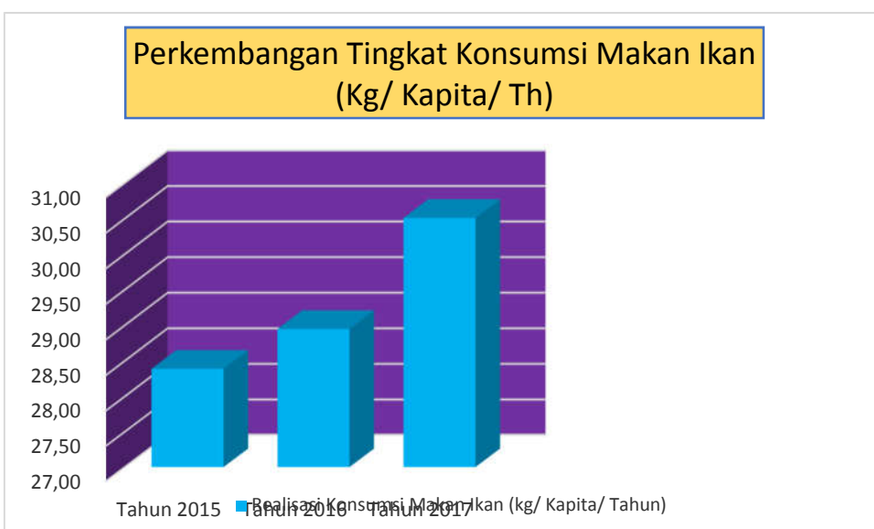

Sumber Data : Dinas Perikanan Kab. Sidoarjo

2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian ini dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Pangan dan Pertanian.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian
2. Program Peningkatan Produksi Hasil Perkebunan dan Pengelolaan Hasil Hutan
3. Program Peningkatan Kualitas Produksi Peternakan/Kehewanan dan Hasil Hewan

Keseluruhan program tersebut dipadukan untuk mencapai sasaran "***Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan".*** Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase pertumbuhan PDRB sektor pertanian

PDRB Sektor Pertanian memiliki kontribusi sekitar 0,77% dari seluruh PDRB di Kabupaten Sidoarjo. Berikut nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

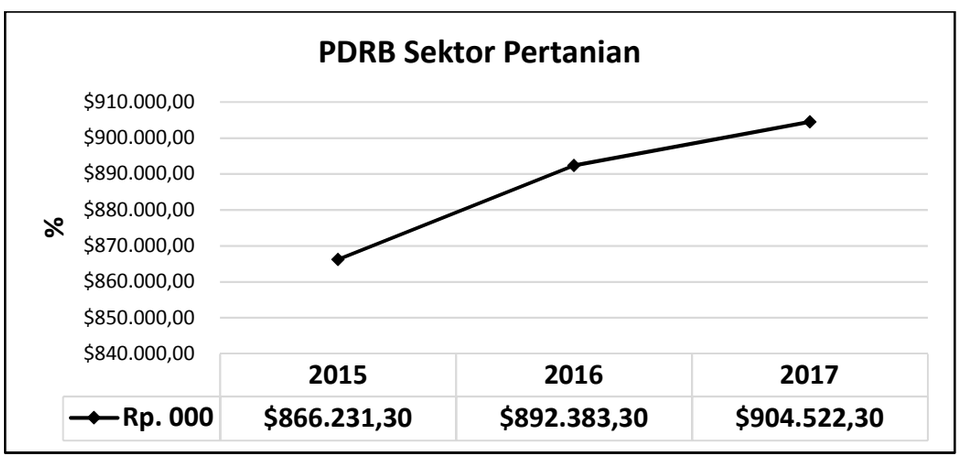

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

a. **Produksi dan Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.**

Perkembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Perkembangan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Kw)

JENIS/TAHUN	2015	2016	2017	Target 2017	% Capaian Target
Padi	2.325.190	2.186.310	2.058.900	2.371.926	86,80%
Jagung	6.510	7.170	11.788	6.773	174,04%
Kacang Hijau	20.233	15.702	15.704	20.640	76,09%
Kedelai	21.250	9.350	9.716	21.677	44,82%

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa produksi tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2017 rata-rata mengalami peningkatan, hanya komoditas padi mengalami penurunan sebesar 127.410 kw atau 5,8% dari 2.186.310 Kw menjadi 2.058.900 Kw,

Sedangkan komoditas lainnya seperti jagung, kacang hijau dan kedelai mengalami peningkatan dari tahun 2016 . Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada komoditas jagung yaitu meningkat sebesar 64,4% atau sebanyak 4.618 Kw dari 7.170 Kw menjadi 11.788 Kw. Hal ini disebabkan banyak petani yang beralih menanam dari komoditas padi menjadi jagung.

Apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada tahun 2017 rata-rata produksi tanaman pangan dan hortikultura belum mencapai target yang ditentukan kecuali produksi jagung. Realisasi jumlah Produksi jagung mencapai 174% dari target sebesar 6.773 Kw.

Perkembangan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :

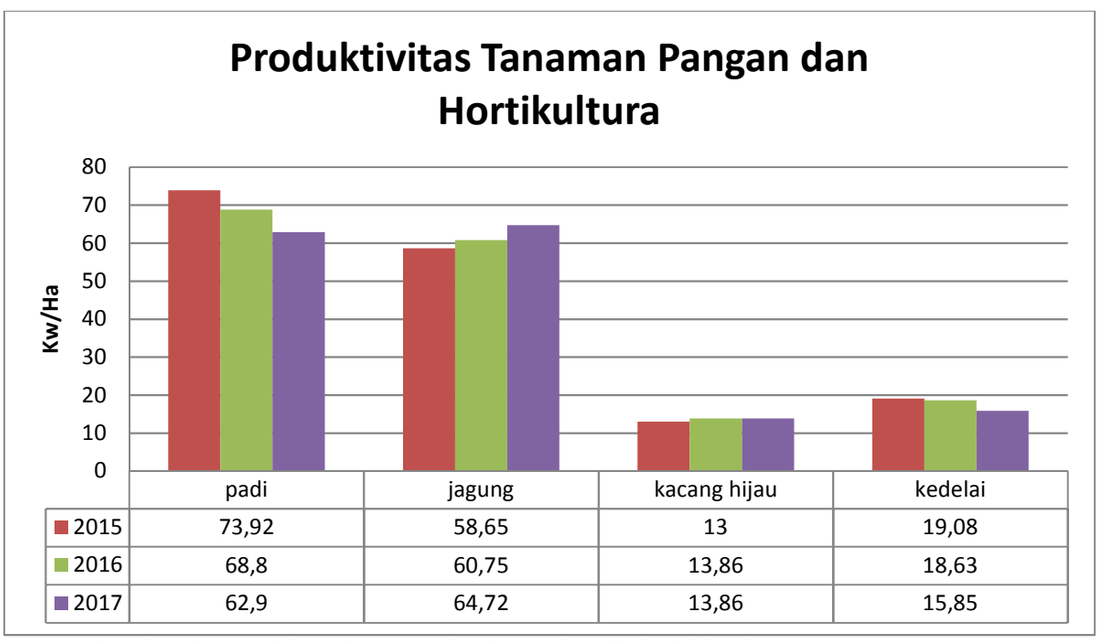

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Produktivitas tanaman pangan dan hortikultura pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan hanya komoditas jagung yaitu naik sebesar 6,65% atau 3,97 Kw/Ha. Sedangkan komoditas padi dan kedelai produktivitasnya menurun. Produktivitas padi menurun sebesar 8,9% atau 5,9 Ha/Kw. dari 68,8 Kw/Ha menjadi 62,9 Kw/Ha. Produktivitas kedelai menurun 2,78 kw/ha dari 18,63 Kw/Ha menjadi 15,85 Kw/Ha.

Apabila dibandingkan dengan target yang sudah ditentukan pada tahun 2017

produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang sudah mencapai target adalah komoditas jagung dan kacang hijau sedangkan komoditas padi dan kedelai belum mencapai target, Hal ini disebabkan:

a. adanya serangan OPT tikus, Wereng Batang Coklat (WBC) dan Xanthomonas sp.
b. cuaca ekstrim dan penyinaran yang tidak maksimal berdampak pada pengisian bulir padi dan pemasakan yang kurang maksimal,beberapa lahan sawah pada bulan Desember terkena banjir dan mengalami puso.
c. Produktivitas kedelai mengalami penurunan sebesar 14,9% atau 2,78 Kw/Ha dari 18,63 Kw/Ha menjadi 15,85 Kw/Ha karena adanya serangan karat daun dan puso di beberapa wilayah sentra kedelai seperti Prambon. Meskipun kedelai bisa dipanen namun polong kurang bagus sehingga mempengaruhi produktivitas kedelai.

Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura agar dapat mencapai target adalah sebagai berikut :

a. gerakan pengendalian bersama – sama untuk menekan populasi OPT sehingga kerusakan yang lebih parah dapat dihindari
b. menggunakan Klaim Asuransi Pertanian (AUTP) Untuk penanganan kendala puso
c. Melakukan sosialisai dan pendampingan penerapan teknologi tepat guna
d. Menyediakan dan menggunakan benih / bibit unggul berlabel.
e. Menambah persediaan pestisida agar penanganan/ pengendalian hama cepat dapat ditangani.
f. Menggunakan sarana dan prasarana mekanisasi pertanian.

a. **Produksi dan produktivitas perkebunan tebu**

Yang dimaksud dengan produktivitas tanaman perkebunan adalah khusus untuk tanaman tebu.

Perkembangan produksi perkebunan tebu dapat dilihat pada grafik berikut ini :

PERKEMBANGAN PRODUKSI TEBU

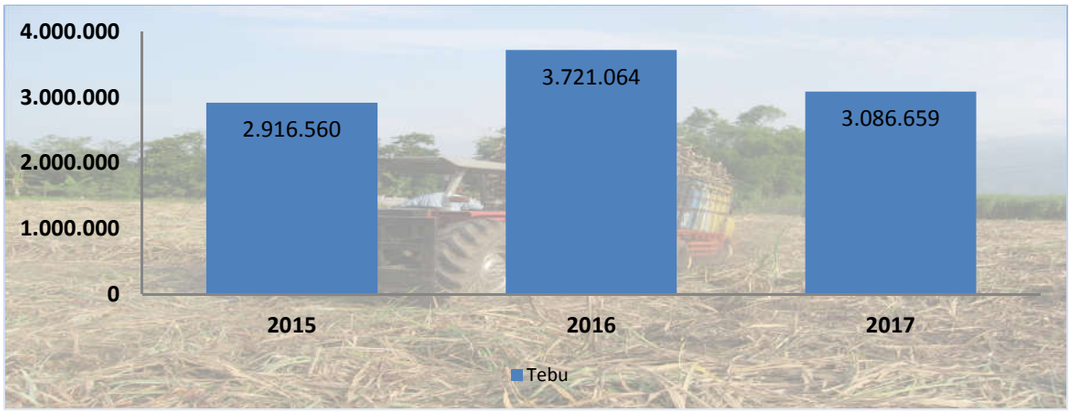

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Berdasarkan grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil produksi tebu tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 mengalami penurunan dari 3.721.064 Kw menjadi 3.086.659 Kw atau turun sebanyak 634.405 Kw. Hal ini dikarenakan jumlah ketersediaan pupuk masih kurang dan baku teknis budidaya tebu belum sesuai dengan ketentuan akibat dari semakin mahalnya biaya garap untuk usaha tani tebu. Meskipun produksi tebu menurun dari tahun sebelumnya capaian produksi tebu pada tahun 2017 sudah memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 2.945.799 Kw.

Produksi perkebunan tebu dipegaruhi beberapa faktor antara lain :

a. Bibit unggul/ Varietas unggul
b. Baku teknis budidaya tebu
c. Ketersediaan pupuk

Produktivitas perkebunan tebu pada tahun 2017 sebesar 742 kwintal/ha. Produktivitas ini turun sebesar 4,38% jika dibandingkan dengan produktivitas tahun 2016 yang sebesar 776 kwintal/ha. Namun capaiannya sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 728,13 Kw/Ha

Upaya-upaya yang telah dilakukan agar produksi dan produktivitas Tanaman tebu meningkat adalah :

a. Menanam tebu menggunakan varitas unggul sesuai masa tanam
b. Ketersediaan pupuk sesuai asas 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu, jumlah, tempat, jenis, harga dan mutu;
c. Melakukan budidaya tanaman tebu sesuai baku teknis yang berlaku.
d. Menebang tebu yang masak optimal

Perkembangan produktivitas perkebunan tebu sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

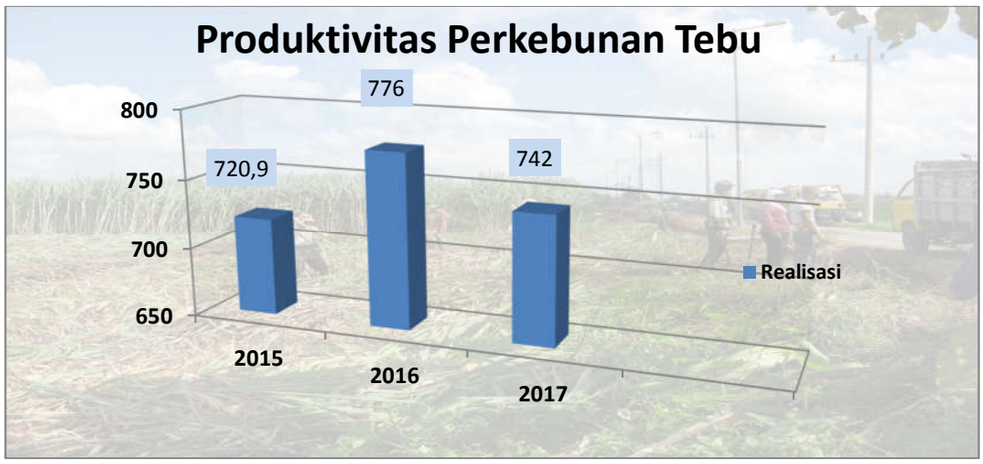

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

e. Produksi peternakan

1) Daging

Produksi daging tahun 2017 sebesar 21.019.421 kg. Apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2016 terjadi peningkatan produksi sebesar 4 % atau 818.136 Kg. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2017 produksi daging sudah mencapai target, realisasi produksi daging mencapai 102% atau sebesar 414.471 Kg dari target sebesar 20.604.950 Kg. Hal ini dikarenakan :

a. kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi daging ternak terutama daging sapi dan unggas semakin tinggi sehingga permintaan dan pemotongan ternak naik
b. harga daging yang terus naik (mahal) sehingga banyak peternak yang mengambil tindakan menjual hewan ternak untuk diambil dagingnya
c. adanya daging kerbau import tidak berpengaruh pada selera konsumen, sehingga konsumen tetap memilih daging sapi

d. karena harga daging sapi meningkat sehingga grosir produsen bakso membuat inovatif mencampuri bahan dasarnya dengan daging ayam.

Perkembangan produksi daging dapat dilihat pada grafik berikut ini :

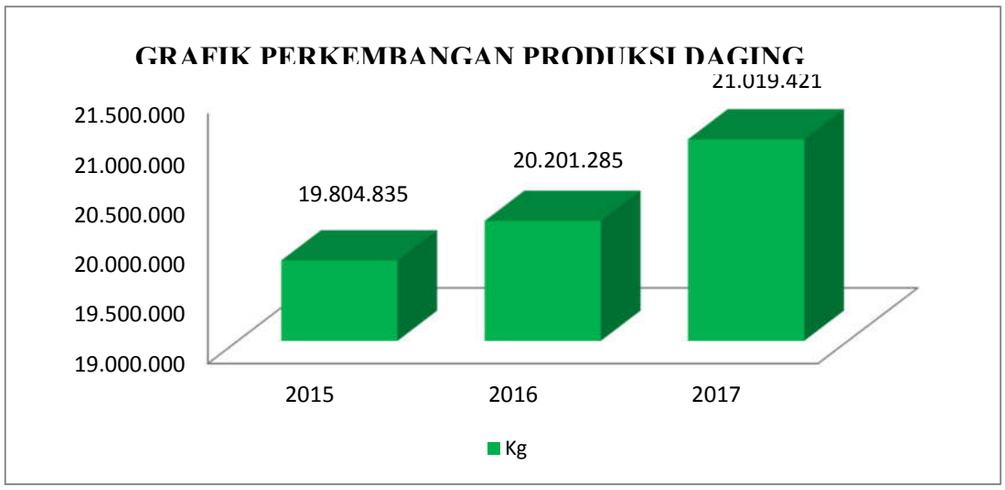

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

2) Telur (kg)

Produksi telur pada tahun 2017 sebesar 2.799.930 Kg, apabila dibandingkan dengan produksi telur 2016 sebesar 2.244.286 kg terdapat kenaikan sebesar 555.644 kg atau 25%. Capaian produksi tebu sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu 158% dari target tahun 2017 sebesar 1.772.485 Kg.

hal ini disebabkan pada Tahun 2017 Dinas Pangan dan Pertanian banyak melakukan kegiatan pelatihan dan pengawasan biosecurity pada peternak sehingga para peternak semakin menyadari pentingnya penanganan kesehatan, higienis sanitasi kandang dan manajemen pakan yang baik akan meningkatkan produktifitas telur yang dihasilkan, selain itu kami juga melakukan survey harga pasar yang sangat bermanfaat untuk menjaga stabilitas harga pemasokan antara farm, agen sampai konsumen

Perkembangan produksi telur dapat dilihat pada grafik berikut ini :

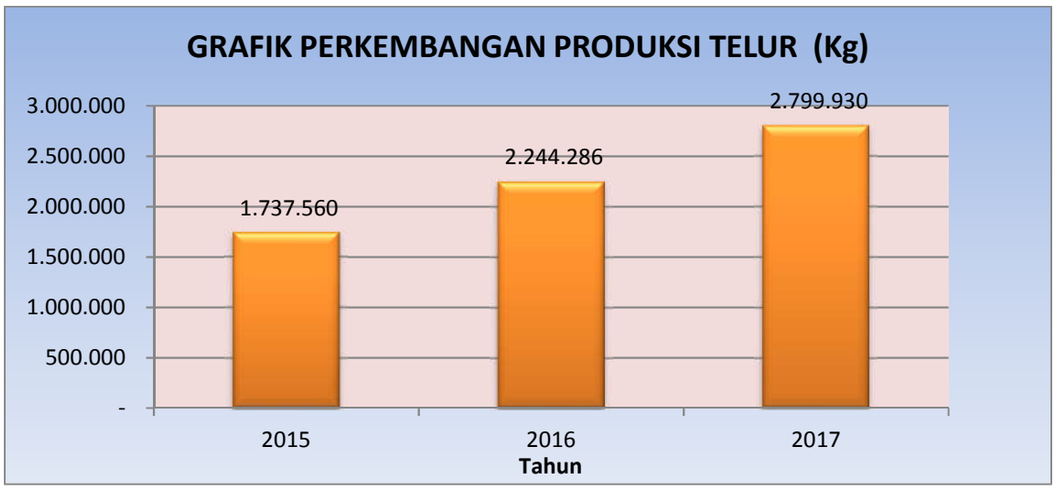

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

3) Susu (Liter)

Produksi susu pada tahun 2017 sebanyak 7.300.702 liter,apabila dibandingkan tahun 2016 dengan produksi sebanyak 6.942.150 liter terdapat peningkatan 358.552 liter atau 4,9%. Capaian produksi susu sudah melampaui target yang telah ditentukan yaitu sebesar 103% dari target sebesar 7.096.468 liter.

produksi susu meningkat dan mencapai target dikarenakan adanya kontrol veteriner terhadap kewaspadaan penyakit hewan menular (lalu lintas hewan, mutu hasil produksi susu secara laboratorium dan biosecurty serta gangguan reproduksi) sehingga sapi sehat, diinseminasi dan bunting kemudian beranak dan produksi susu meningkat. Selain itu melakukan perbaikan gizi pakan melalui pembinaan pembuatan pakan ternak secara sederhanakan mudah dilaksanakan. .

Perkembangan produksi susu dapat dilihat pada grafik berikut ini :

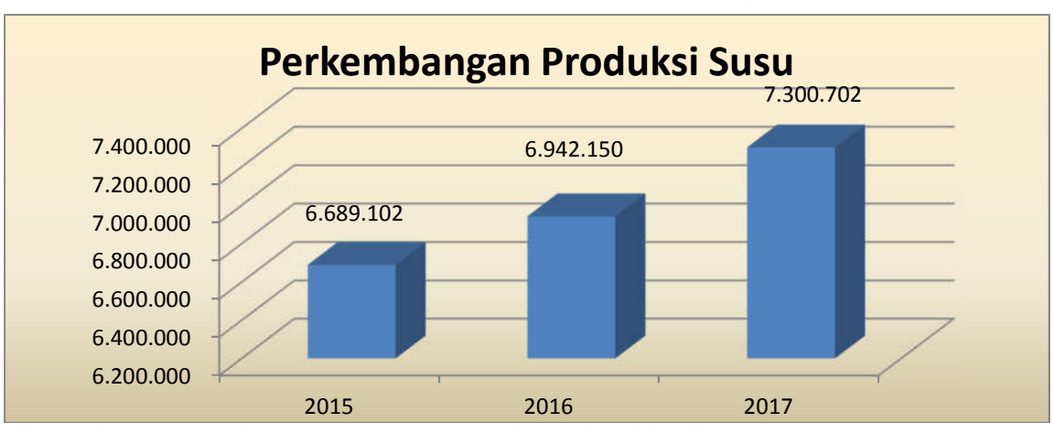

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

f. Populasi hewan ternak

Perkembangan populasi binatang ternak dan unggas sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

PERKEMBANGAN POPULASI HEWAN TERNAK

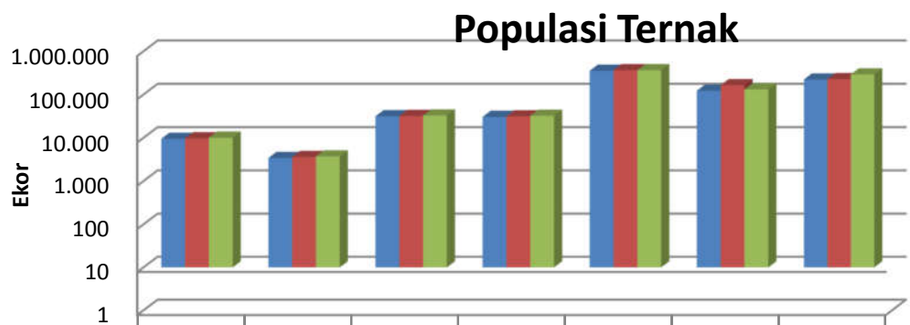

	Sapi	Sapi Perah	Kambing	Domba	Ayam Buras	Ayam Ras	Itik
2015	9.507	3.425	31.617	30.582	356.612	122.972	223.454
2016	9.802	3.632	32.169	31.359	367.542	165.300	227.954
2017	10.102	3.739	32.914	32.444	367.542	131.505	292.922

Sumber Data : Dinas Pangan dan Pertanian Kab. Sidoarjo

Populasi 2017 sebanyak 871.168 ekor meningkat dibanding tahun 2016 yang mencapai 837.758 ekor ternak. Populasi ternak rata – rata mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 dan sudah mencapai target tahun 2017.

Upaya yang telah dilakukan agar Populasi meningkat antara lain :

1) Pelatihan budidaya ternak, agribisnis peternakan, pengolahan hasil ternak dan pelatihan kesehatan hewan.
2) Pelayanan kesehatan hewan melalui vaksinasi, biosecurity, pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
3) Pelayanan Inseminasi Buatan (IB), pemeriksaan kebuntingan dan gangguan reproduksi.
4) Pengawasan mutu pakan ternak dan peredaran obat hewan
5) Pembinaan dan pengawasan langsung pada pelaku usaha baik usaha peternakan maupun usaha bahan asal hewan dan olahannya

3. Urusan Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Pengembangan Obyek, Promosi dan Usaha Pariwisata.

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran **Berkembangnya sektor pariwisata yang terintegrasi dengan industri kreatif**, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan

Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan adalah tingkat rata – rata lamanya seluruh wisatawan berada di suatu daerah atau negara tujuan wisatawan.

Untuk kunjungan wisatawan di Kabupaten Sidoarjo, rata–rata tinggal selama 2 hari (angka sementara) didasarkan pada tingkat hunian hotel di Sudoarjo pada tahun 2017.

Capaian ini memenuhi 100 % dari target RPJMD selama 2 hari tinggal.

Indikator Rata – Rata Lama Tinggal Wisatawan, didukung dengan Saran SKPD dengan Indikator sevagai berikut:

a. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Kabupaten Sidoarjo memiliki berbagai obyek wisata yang dipetakan dalam beberapa jenis antara lain adalah wisata religi, wisata sejarah dan budaya, wisata bahari, wisata air, wisata kuliner, wisata industri dan belanja, serta wisata olahraga dan ruang terbuka hijau. Berikut adalah beberapa objek unggulan dari masing-masing jenis obyek wisata tersebut diatas, yaitu :

Wisata Religi	8 Obyek
Wisata Sejarah dan Budaya	24 Obyek
Wisata Kuliner	7 Obyek
Wisata Industri dan Belanja	43 Obyek
Wisata Olahraga dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	9 Obyek

Realisasi kunjungan wisatawan tahun 2017 adalah sebanyak 1.942.079 pengunjung yang terdiri dari kunjungan hotel sebesar 313.345 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 3.855 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 309.490 pengunjung. Serta kunjungan obyek wisata

sebesar 1.628.734 pengunjung yaitu wisatawan mancanegara sebanyak 8.367 pengunjung dan wisatawan nusantara sebanyak 1.620.367 pengunjung. Obyek wisata yang paling sering dikunjungi dan data kunjungan hotel antara lain sebagai berikut :

No	Nama Obyek	Lokasi	Pengunjung		Total
			Wisman	Wisnus	
1	Kolam Renang Water Park Suncity	Jl. Pahlawan Sidoarjo	0	279.298	279.298
2	Kolam Pancing Delta Fishing	Desa Prasung Kec. Buduran	0	216.178	216.178
3	Kolam Renang Citra Garden	Sidoarjo	2	199.727	199.729
4	Kolam Renang Ketegan Waterpark	Tanggulangin	0	13.928	13.928
5	Kolam Renang Candi Pari	Porong	0	19.820	19.820
6	Kolam Renang Antares	Krian	0	1.813	1813
7	Kolam Renang Puri Surya Jaya	Gedangan	0	14.528	14.528
8	Permata water Park Tanggulangin	Tanggulangin	0	11.427	11.427
9	Kolam Renang Suko Asri	Sidoarjo	0	2.182	2.182
10	Kolam Renang Golden Aquatic	Sukodono	0	16.027	16.027
11	Kolam Renang GOR	Sidoarjo	0	106.685	106.685
12	Kusuma Tirta Minapolitan	Candi	0	10.812	10.812

13	Candi Tawang Alun	Sedati	0	2.965	2.965
14	Makam Dewi Ayu Sekardadu	Buduran	0	18.800	18.800
15	Kampung Batik Jetis	Sidoarjo	0	6.013	6.013
16	Permata tas dan Koper Tanggulangin	Tanggulangin	3.074	106.151	109.225
17	Alas Outbound Prambon	Prambon	0	19.128	19.128
18	Batik Al Huda	Sidoarjo	177	7.555	7.732
19	Wisata Bahari Tlocor	Jabon	0	4.905	4.905
20	Makam Mbah Ud	Pagerwojo	0	156.044	156.044
21	Intako	Tanggulangin	4.958	144.282	149.240
22	Kolam Renang Citra Harmoni	Sidoarjo	0	140.061	140.061
23	Candi Dermo	Wonoayu	0	1.240	1.240
24	Candi Pari	Porong	0	16.249	16.249
25	Candi Sumur	Porong	0	4.374	4.374
26	Candi Pamotan	Porong	0	714	714
27	Museum Mpu Tantular	Sidoarjo	156	96.063	96.219
28	Makam Adipati Terung	Krian	0	457	457
29	Prasasti Kemlagian	Krian	0	305	305
30	Situs Watu Tulis	Prambon	0	1.786	1.786
31	Candi Medalem	Tulangan	0	429	429
32	Candi Wangkal	Krembung	0	421	421

Adapun data kunjungan wisata terlampir di kolom berikutnya :

No	Nama Hotel	Pengunjung		Total
		Wisman	Wisnus	
1	Hotel Utami	0	30.441	30.441
2	The Sun Hotel (PT.Indraco)	26	7.056	7.082
3	Delta Sinar Mayang	102	6.098	6.200
4	Hotel Halogen	309	7.663	7.972
5	Hotel Ibis Budget	352	14.922	15.274
6	Hotel Istana Permata	0	3.072	3.072
7	Hotel Sinar Express I	395	10.431	10.826
8	Hotel Sinar Express II	332	4.024	4.356
9	Hotel Sinar Express III	243	2.987	3.230
10	Hotel New Cahaya	0	898	898
11	Penginapan Penantian	16	319	335
12	Penginapan Are Jaya	0	323	323
13	Hotel Bungurasih	0	2.586	2.586
14	Hotel Sumber Dharmawan	0	351	351
15	Penginapan Akor Jaya	0	477	477
16	Penginapan Laurent	0	7.020	7.020
17	Hotel Al-Munawaroh	15	1.991	2.006
18	Hotel Laksana Indah	0	690	690
19	Penginapan Bungurasih Indah	0	5.393	5.393
20	Losmen Pentra	0	316	316
21	Wisma Prambanan I	0	3.458	3.458

22	Losmen Nanda	0	1.936	1.936
23	Hotel Delta	0	126	126
24	Losmen Tumbuh	0	605	605
25	Garuda Express	0	181	181
26	Harapan Putra Jaya	0	6.171	6.171
27	Hotel Griya Noumi	0	1.830	1.830
28	Penginapan Eriysa	0	2.228	2.228
29	New Sinar	0	678	678
30	Hotel Global Inn	5	1.730	1.735
31	Hotel Karina	0	620	620
32	Hotel Mandiri 1 & 2	0	766	766
33	Hotel Asa Graha	0	1.352	1.352
34	Kartini Hotel	0	7.818	7.818
35	Hotel Wiston	20	2.056	2.076
36	Hotel Medaeng	2	20.330	20.332
37	Hotel Tilamas	64	8.993	9.057
38	Hotel Plasa Baru	0	4.425	4.425
39	Hotel Edotel	0	2.853	2.853
40	Hotel Kemuning	5	1.392	1.397
41	Hotel Permata	0	4.352	4.352
42	Penginapan Yuddys	6	1.366	1.372
43	Penginapan Shofwa	0	510	510
44	Home Stay Caisar	0	303	303
45	Penginapan Bangkit Hidayah	0	1.922	1.922
46	Diamon Hotel	0	1.933	1.933
47	Hotel Sarifah Zahrah	0	2.329	2.329

48	Hotel Front One	0	1.612	1.612
49	Penginapan Galaxi	0	304	304
50	Penginapan Hokki	0	2.494	2.494
51	Penginapan Armeda Jaya	0	3.015	3.015
52	Penginapan Prambanan 2	0	3.941	3.941
53	Penginapan Las Vegas	0	2.366	2.366
54	Hotel Walan Syariah	73	2.024	2.097
55	Hotel Prisma	0	2.512	2.512
56	Losmen Syariah	0	715	715
57	Menara Sakti Sejahtera	0	713	713
58	Wisma Nuansa (Transcity T & T)	0	1.398	1.398
59	Griya Melati Putih	0	524	524
60	Wisma Kartini	0	2.915	2.915
61	Losmen Laksana Indah Jaya	0	1.621	1.621
62	Penginapan Assafak	8	3.312	3.320
63	Pondok Wisata Untung Suropati	0	3.549	3.549
64	Losmen Surya	0	361	361
65	Losmen Rela Hati	0	268	268
66	Wisma PKP RI	0	1.098	1.098
67	Penginapan Raja Mulia	0	2.096	2.096
68	Penginapan Situ Kurir	0	1.090	1.090
69	Penginapan Wahyu Jaya	0	1.185	1.185
70	Hotel Benteng Portugis	0	301	301
71	Penginapan Buwono City	0	313	313
72	Penginapan Pondok Rizqi	0	458	458

73	Wisma Thamrin	0	2.534	2.534
74	Hotel Barcelono	0	413	413
75	Airy Waru Pondok Maspion	0	949	949
76	Penginapan Rafa Zilda	0	3.200	3.200
77	Penginapan RR Maria K	0	3.809	3.809
78	Penginapan Krisna	0	3.432	3.432
79	Penginapan Sumber Darmawati	0	2.542	2.542
80	Penginapan Pendowo	0	3.744	3.744
81	Penginapan Hafaro	0	1.973	1.973
82	Premiere Inn	1.752	48.285	50.037
83	Home Stay Pondok Nirwana	0	1.317	1.317
84	Chiaro Hotel	0	1.997	1.997
85	Penginapan Wahyu	0	902	902
86	Penginapan Cendana	0	602	602
87	PT. Sukses Bina Mitra (Trans Hotel)	0	1.909	1.909
88	Hotel Swiss Bell Inn Airport Juanda	128	915	1.043
89	Penginapan Lezat	0	852	852
90	Santo Guest Hotel	2	387	389
91	Hotel Surya	0	222	222

Perkembangan jumlah kunjungan wisata dari tahun 2015 sampai tahun 2017 menunjukkan tren meningkat sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini.

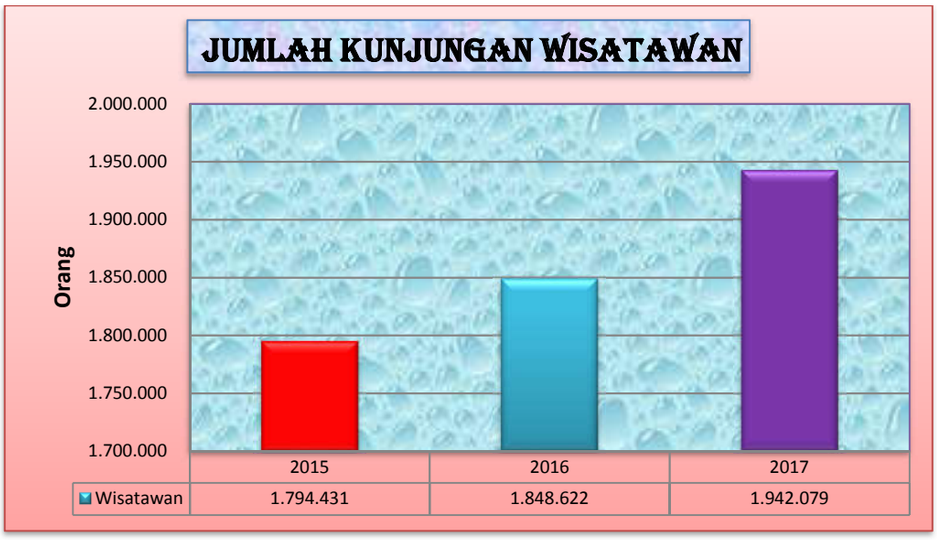

Sumber Data : Disporabudpar

Jika dilihat dari Grafik diatas terjadi peningkatan realisasi jumlah pengunjung dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 93.457 pengunjung atau 4,81%, dan sudah melampaui target RPJMD tahun 2017 yang direncanakan sebanyak 1.830.498 pengunjung.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisata, antara lain :

1) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menuju lokasi wisata.
2) Meningkatkan publikasi obyek-obyek wisata di wilayah Sidoarjo.
3) Meningkatkan pemasaran obyek wisata yang ada.
4) Meningkatkan sarana pendukung fasilitas obyek wisata.

b. Jumlah Industri Kreatif

Sebagaimana rencana Kabupaten Sidoarjo yang meningkatkan bidang pariwisata melalui penguatan sektor industri kreatif, maka dikembangkan usaha untuk meningkatkan jumlah industri kreatif.

Industri kreatif dapat diartikan sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan pengetahuan dan informasi.

Jumlah industri kreatif di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebanyak 21 unit usaha.

Berikut jenis industri kreatif dan jumlah unit usahanya :

NO	NAMA USAHA	PEMILIK	ALAMAT	KERAJINAN YANG DIHASILKAN
1	Athaya	Indriyati	Perumtas 2 Blok R2/40 Tanggulangin	Olahan Kain Perca
2	Mahakry Majapahit	Pudji Purwanto	Bogem RT. 04 RW. 01 Kebon Agung Sukodono	Olahan Buah Mojo
3	Crystal Accessories	Dwi Kriestin Natalia	Jl. Bawean 04 Perum Binangun	Bros, Gelang, Kalung
4	Mia Rose	Mia Rose	Jl. Pesantren 13 Porong	Bros, Gelang, Kalung
5	Permata Collection	Asih	Jl. Pesantren 13 Porong	Lampu Hias, Gelang, Bros
6	R. K. A	Nenny	Puri Indah CA-26 Sidoarjo	Accessories, Bros, Sandal
7	Soris	Riesmiyati	Desa Ketegan Tanggulangin RT. 05	Accessories, Handycraft
8	Wildan Collection	Zulaika Rosida	Desa Sepande RT. 13 RW. 04	Accessories, Bros
9	Dinnar Handmade	Minarsih	Perumtas 2 Blok R6/26	Bros Bahan Flanel
10	Rita Collection	Morita	Tawangsari Permai A/130 Taman	Bros, Accessories
11	Raisa Collection	Alida Yusfidar	Jl. Belimbing IV/28 Pondok Chandra	Accessories Kabochon

12	I-nung	Husnul Khotimah	Perum Bluru Permai Fg/13	Accessories, Tas Monte
13	Zfs	Sumiatin	Karangbong RT. 01 RW. 01 Kav. No. 4	Accessories, Souvenir
14	Queen Art	Musdaliva	Perum Gebang Raya Blok AI-9	Accessories Batu
15	Anfies Kraft	Dewi Kusumawati	Perum Citra Garden Blok D8/14	Accessories Rajut
16	Aafa Collection	Rossytasari Dita	Mutiara Citra Graha AI-17	Bros, Accessories
17	Kreasi Bu Kris	Dwi Krisnanto	BCF SS A-37	Bros, Accessories
18	Imuts Collection	Sunnaiyah (Acun)	Jl. Sultan Agung Magersari I No. 10	Accessories, Bros
19	Kyoza Handycraft	Evi Christiastutie	Jl. Jambu 1F/43 Pondok Chandra	Bros Rajut
20	Rania Collection	Nia Farida Wati	Perum Tawang Sari 8/114 Taman	Bros Accessories
21	Bandeng Ambe Urang	Latif Dwi Nuryanto	Perum Cabean Asri Blok 12/19 Candi	Kaos Sablon

4. Urusan Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Perindutrian dan Perdagangan.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Peningkatan, Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Industri

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan** dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Pengolahan

PDRB Sektor Industri Pengolahan memiliki kontribusi sekitar 57,80% dari seluruh PDRB di Kabupaten Sidoarjo. Berikut nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

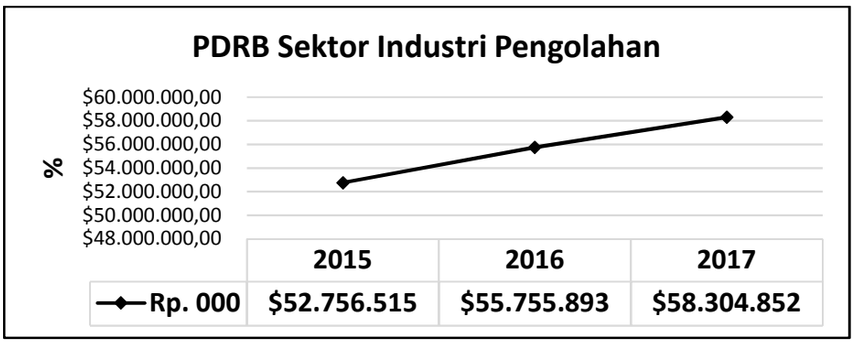

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

1. **Pertumbuhan Jumlah Industri**

   Industri kecil dan mikro 14.243 unit. Industri menengah sebesar 2.234 unit. Industri besar sebesar 368 unit. Jumlah unit usaha industri yang ada tahun 2017 sebanyak 16.891 unit usaha. Jumlah ini meningkat 121 unit atau 0,72% dibandingkan dengan jumlah industri pada tahun 2016 yang sebanyak 16.770 unit.

   Jenis Industri yang tumbuh dan berkembang diwilayah Kabupaten Sidoarjo utamanya adalah:

   1. Kerupuk
   2. Kulit dan Turunannya
   3. Batik Tulis, Bordir & Aksesoris
   4. Pengolahan Ikan, Produk Mamin lainnya

   Perkembangan jumlah industri terlihat pada grafik berikut ini :

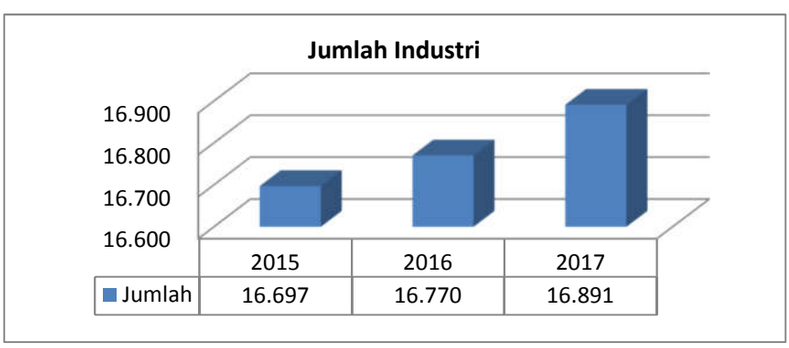

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo

2. Persentase IKM yang terstandarisasi

Menurut PP nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional atas Industri Kecil dan Mikro dimaksudkan untuk memperkuat IKM itu sendiri sehingga hasil produknya secara kualitas mampu bersaing di pasar yang lebih terbuka dan bebas, selain itu sebagai wujud persiapan pada arah menjadi Industri Menengah dan Besar.

Jumlah Industri Kecil dan Mikro di Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2017 yang telah terstandardisasi adalah sebagai berikut:

NO	Jenis Standar/HKI	2014	2015	2016	2017	Jmlh
					1	
1	SNI			2		2
2	Barcode				5	5
3	ISO				2	2
4	Halal				6	6
	Bimbingan Sertifikasi ISO				3	
5	Merk	60	25		88	173
6	PIRT		50			50
	Jmlh	60	75	2	101	238

IKM yang terstandardisasi sudah di dokumentasikan dalam database industri berdasarkan nama perusahaan dan alamat.

Jumlah IKM yang terstandarisasi pada tahun 2017 sebanyak 238 unit usaha dimana seluruhnya merupakan fasilitas dari anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur, jumlah ini apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh IKM sebanyak 16.523 unit usaha mencapai 0,65%.

Aspek – aspek yang mempengaruhi standarisasi IKM, diantaranya :

1. Regulasi pemerintah
2. Kebutuhan pasar
3. Kebijakan perusahaan

Sedikitnya /kecilnya IKM yang telah terstandardisasi disebabkan :

1. Kurangnya kesadaran IKM terhadap pentingnya standarisasi
2. Persyaratan yang diwajibkan memberatkan IKM dan kondisi di lapangan sulit menyesuaikan dengan kondisi yang ada
3. Tidak adanya dukungan anggaran

Upaya untuk meningkatkan standarisasi IKM diantaranya :

1. Meningkatkan kesadaran IKM mengenai pentingnya standardisasi
2. Pemberian insentif bagi IKM yang menerapkan standardisasi
3. Memberikan fasilitasi dan kemudahan dalam pengurusan standardisasi

5. Urusan Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan OPD yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah :

1. Program pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Pasar
2. Program Peningkatan Keamanan, Ketertiban dan Kebersihan Pasar
3. Program Peningkatan Kualitas Bangunan dan Sarana Penunjang Pasar
4. Program Peningkatan Daya Saing Pasar dan Produk Lokal

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian sasaran **Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor - sektor unggulan**, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

Persentase pertumbuhan PDRB sektor Industri Perdagangan

PDRB Sektor Perdagangan memiliki kontribusi sekitar 16,13% dari seluruh PDRB di Kabupaten Sidoarjo. Berikut nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 :

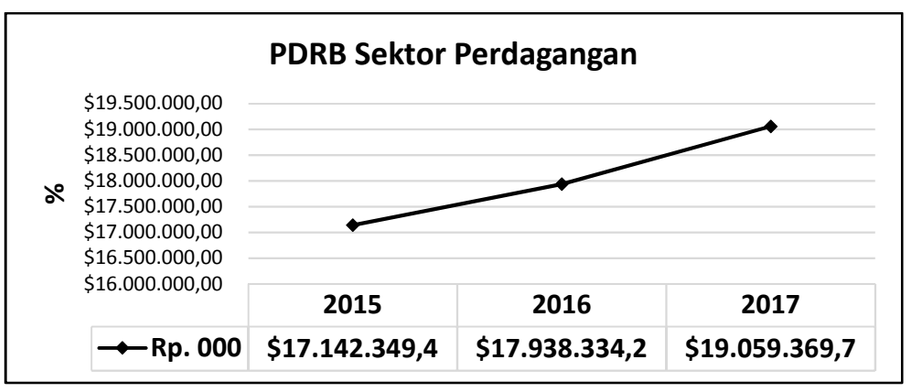

Sumber Data : BPS Kabupaten Sidoarjo

1. **Nilai ekspor dan Import Non Migas.**

   Realisasi nilai ekspor non-migas daerah tahun 2017 sebesar US$ 1.740.979.022,99 atau 100,49% dari target yang ditetapkan sebesar

US$ 1.740.212.000,00, dibanding dengan nilai eksport tahun 2016, yang sebesar US$ 1.748.281.120,84 maka naik sebesar 0,65%

Angka penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya permintaan luar negeri terutama komoditi hasil industry, komoditi hasil perikanan dan kelautan serta komoditi hasil hutan

Perkembangan nilai ekspor ditunjukkan oleh grafik berikut ini :

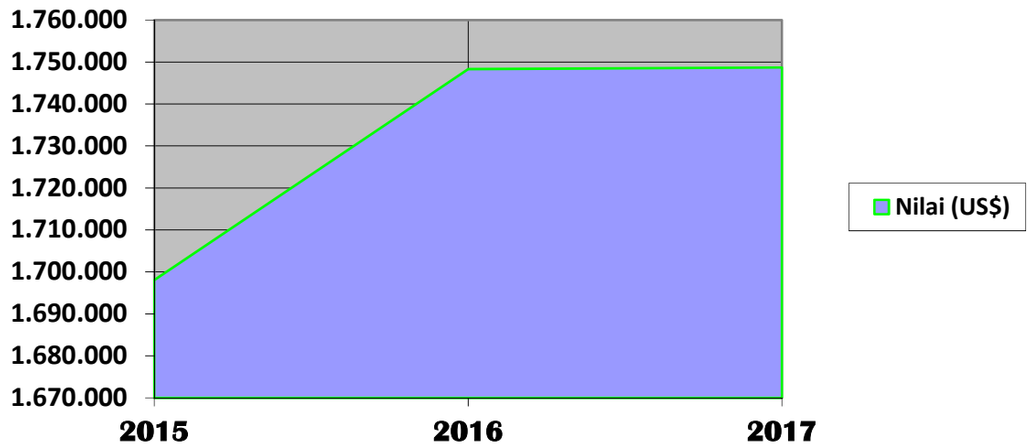

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut antara lain :

1. Pengembangan pasar luar negeri salah satunya melalui Pameran / Expo baik yang diselenggarakan di Luar Negeri maupun Dalam Negeri.
2. SDM yang melakukan pengelolaan tatakelola eksport secara jumlah dan kompentensi tidak sepenuhnya memadai.

2. Volume perdagangan

Realisasi volume perdagangan yang berhasil dicapai Tahun 2017 pada kisaran angka sebesar Rp. 19.059.365.000.000 atau 107,27 % dari target yang ditetapkan sebesar 17.767.543.268.000dan mengalami kenaikan sebesar 4,61% apabila dibandingkan dengan volume perdagangan tahun 2016 sebesar Rp. 18.218.829.000.000.

Peningkatan ini disebabkan karena iklim usaha di Kabupaten Sidoarjo yang semakin kondusif dan peningkatan informasi di sektor perdagangan. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target adalah meningkatkan promosi produk unggulan daerah melalui kegiatan pameran, misi dagang dan temu bisnis, serta membantu pelaku usaha dagang meningkatkan daya saing produk melalui kegiatan pelatihan.

Perkembangan volume perdagangan terdapat pada grafik berikut ini :

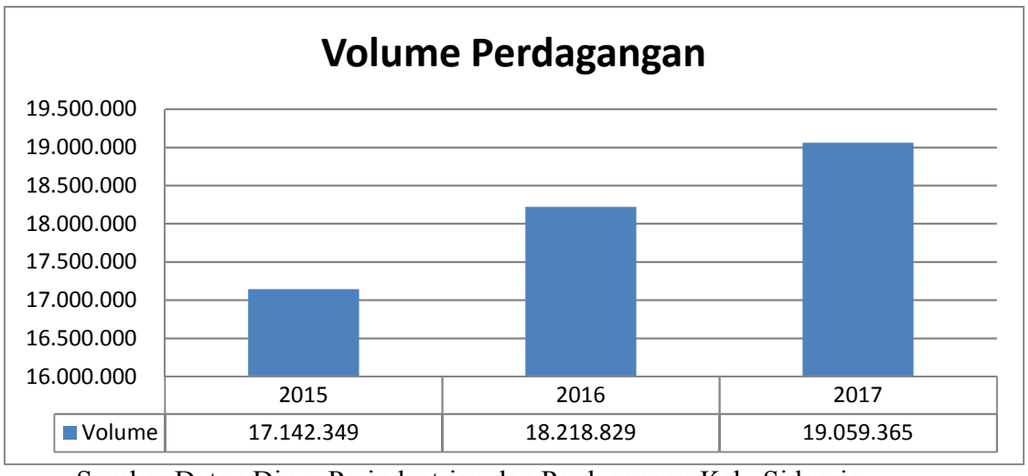

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Sidoarjo

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan volume perdagangan, antara lain:

1. Melalui promosi dengan memfasilitasi pameran lokal dan nasional,
2. Pada tahun 2017 event pameran/misi dagang sebanyak 14 (empat belas) kali pameran.
3. Memfasilitasi legalitas usaha
4. Bantuan sarana usaha

3. Persentase Pasar SNI

Jumlah pasar yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 18 Pasar yang dikelola oleh 3 (tiga) UPTD yaitu UPTD Pasar Sidoarjo, UPTD Pasar Porong dan UPTD Pasar Taman.

Sesuai dengan sasaran Renstra SKPD periode 2016 - 2021 yaitu meningkatnya layanan pasar dengan indikator Pasar SNI adalah pasar yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1) Jumlah pedagang yang terdaftar
2) Ukuran luas ruang dagang
3) Jumlah pos
4) Zonasi
5) Area parkir
6) Area bongkar muat barang
7) Akses keluar masuk kendaraan
8) Lebar koridor
9) Kantor pengelola

10) Lokasi toilet dan kamar madi (terpisah antara laki2 dan perempuan)
11) Jumlah toilet pada satu lokasi
12) Tempat menyimpan bahan pangan basah
13) Tempat cuci tangan
14) Ruang menyusui
15) CCTV
16) Ruang peribadatan
17) Ruang bersama
18) Pos kesehatan
19) Pos keamanan
20) Area merokok
21) Ruang disenfektan
22) Area penghijauan
23) Tinggi anak tangga
24) Tinggi meja tempat berjualan
25) Akses untuk kursi roda
26) Jalur evakuasi
27) Tabung pemadam kebakaran
28) Hidran air
29) Pengujian kualitas air bersih
30) Pengujian limbah cair
31) Ketersediaan tempat sampah
32) Alat angkut sampah
33) TPS sementara
34) Pengelolaan sampah berdasarkan 3R
35) Sarana telekomunikasi
36) Informasi identitas pedagang
37) Informasi kisaran harga
38) Informasi zonasi pasar
39) Prosedur kerja / sop
40) Struktur pengelola
41) Jumlah pengelola
42) Pelaksanaan sidang tera/tera ulang
43) Program pengembangan dan aktivasi pasar
44) Program pemberdayaan komunitas pasar

Rincian Pasa ber SNI sebagai berikut:

KRITERIA PEMENUHAN TARGET PASAR SNI	RENDAH (> 10 INDIKATOR)	SEDANG (10-20 INDIKATOR)	TINGGI (20-30 INDIKATOR)	SANGAT TINGGI (>30 INDIKATOR)	JUMLAH
TAHUN					
2016	1	11	4	0	16 Pasar
2017	0	12	5	0	17 Pasar

Untuk menjadikan pasar dengan Indikator ber SNI dengan para meter yang sangat tinngi memerlukan proses waktu dengan dukungan anggaran yang cukup tinggi karena harus melalui revitalisasi pasar, sehingga focus sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada pengembangan pasar ber SNI yang memenuhi parameter diatas 20 sampai dengan 30.

Pada tahun 2016 Pasar Tulangan dan tahun 2017 Pasar Wonoayu sedang direvitalisasi, sehingga tidak dimasukkan dalam kriteria.

Pemenuhan indikator Pasar ber SNI dari tahun 2016 ke 2017 mengalami peningkatan yang dialokasikan melalui anggaran revitalisasi pasar dari APBD maupun APBN.

Dari 44 parameter kriteria pasar SNI untuk Kabupaten Sidoarjo pada 18 Pasar Rakyat tahun 2017, masing-masing hanya memenuhi maksimal 21 kriteria pasar SNI, sedangkan dari kekurangan tersebut diusulkan untuk pengadaan sarana prasarana pada tahun anggaran PAK.

Namun demikian, pada tahun 2017 Kabupaten Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan sebagai Pasar Tertib Ukur dari Kementerian Perdagangan untuk Pasar Sukodono. Selanjutnya untuk tahun 2018, Sidoarjo diusulkan sebagai Daerah Tertib Ukur serta Pasar Tertib Ukur untuk Pasar Taman, Wadungasri, dan Gedangan.

6. Urusan Transmigrasi

Urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh OPD yaitu Dinas Tenaga Kerja.

Program pembangunan yang dilaksanakan untuk urusan ini pada tahun 2017 adalah Program Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Penyelenggaraan Transmigrasi.

Hasil pelaksanaan urusan transmigrasi mendukung tercapaianya sasaran pembangunan "***Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka***", dengan keberhasilan pemberangkatan transmigran.

Transmigran yang diberangkatkan

Pada tahun 2017 transmigran yang akan diberangkatkan sebanyak 3 KK, dengan realisasi pemberangkatan sebagai berikut :

No.	Tujuan Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang diberangkatkan
1	Kabuapten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara	3 KK

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 3 KK atau 100% transmigran yang berhasil diberangkatkan dari 3 KK kuota dari Provinsi Jawa Timur.

Selain itu untuk mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan transmigrasi, maka dilakukan monitoring terhadap para transmigran yang telah diberangkatkan, dimana terdapat 15 KK dari transmigran yang diberangkatkan pada tahun – tahun sebelumnya yang telah memperoleh tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya.

Diharapkan dengan upaya transmigrasi ini dapat mendorong dan memperlancar proses pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UNSUR PENUNJANG

Unsur Penunjang dilaksanakan oleh OPD yaitu Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pelayanan Pajak Daerah, serta 18 Kecamatan.

Program pembangunan untuk unsur penunjang yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah :

1. Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Umum dan Desa
2. Program Administrasi Kerjasama
3. Program Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi bidang kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan
4. Program Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan bidang perekonomian, pertanian, dan BUMD.
5. Program Koordinasi Rumusan Kebijakan Pengendalian Evaluasi dan pelaporan pembangunan

6. Program Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah dan Pelayanan Publik
7. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Bantuan dan Dokumentasi Hukum
8. Program Pelayanan Informasi dan Pemberitaan Pengelolaan, Pengaduan, Keprotokolan, dan Dokumentasi
9. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
10. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
11. Program Peningkatan dan Pengembangan Pajak Daerah
12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah
13. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
14. Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pemerintahan dan Aparatur
15. Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perekonomian dan SDA
16. Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring danEvaluasi Bidang Kesramas
17. Program Sinergitas Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengatasan Kemiskinan
18. Program Penyusunan, Monev, Data Perencanaan Pembangunan dan Kebijakan Anggaran
19. Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Tata Ruang, Permukiman dan Prasarana Wilayah
20. Program Penelitian dan Pengembangan
21. Program Pengelolaan Sumberdaya ASN
22. Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian
23. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
24. Program Bantuan Hukum dan Sosial, Pembinaan Potensi dan Kreatifitas anggota KORPRI
25. Program Koordinasi, Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Pemberdayaan Sosial Masyarakat dan Ketentraman Ketertiban umum.
26. Program Peningkatan Pelayanan Pelayanan Umum

Hasil pelaksanaan program tersebut dapat ditunjukkan pada pencapaian beberapa sasaran, diantaranya :

1. ***"Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan"***, melalui hasil pencapaian kinerja sebagai berikut :

   1) Nilai Sakip Kabupaten Sidoarjo

   Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan akuntabilitas kinerja menuju pemerintahan yang berorientasi hasil, adalah dengan dilakukan suatu evaluasi terhadap implementasi SAKIP.

   Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo yang dilakukan oleh Kementrian PAN dan RB tahun 2017 memperoleh kategori **BB** (**Sangat Baik**), hasil tersebut telah melampau dari target yang ditetapkan pada RPJMD yakni kategori **B**.

   Berikut Hasil Evaluasi SAKIP Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

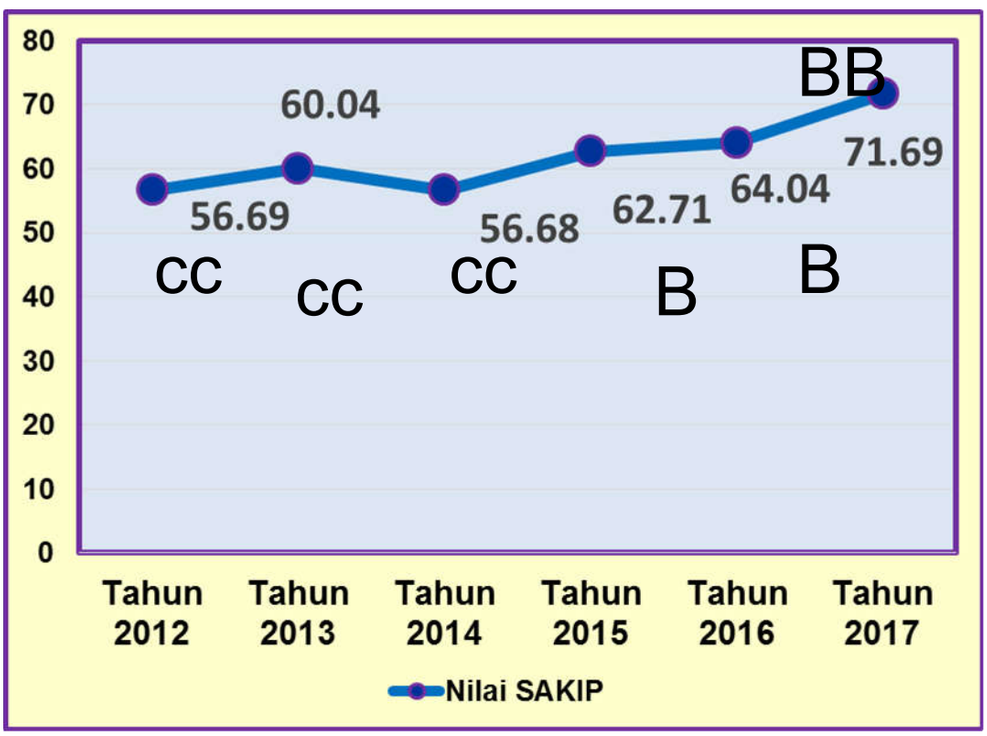

   Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa :

   a. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mampu mendorong penguatan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di hampir seluruh Perangkat Daerah sehingga mampu mewujudkan upaya perbaikan manajemen Pemerintah Daerah yang lebih baik;

b. Perbaikan dilakukan dengan revisi terhadap indikator kinerja utama dan diturunkan ke dalam Perjanjian Kinerja sampai ke level OPD, kondisi ini setidaknya telah menumbuhkan budaya kinerja pada sebagian besar Aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

2) Status Kinerja LPPD Kabupaten Sidoarjo

Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil EKPPD kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 memperoleh nilai (score) 3,4783 dengan status kinerja Sangat Tinggi (ST) dan mendapat peringat ke-**1 (pertama)** tingkat Nasional dan berhasil meraih penghargaan Samkarya Nugraha Parasamya Purnakarya Nugraha dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui Menteri Dalam Negeri pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI yang diselenggarakan di Alun – Alun Kabupaten Sidoarjo. Hasil tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yakni Sangat Tinggi.

Berikut Hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana grafik :

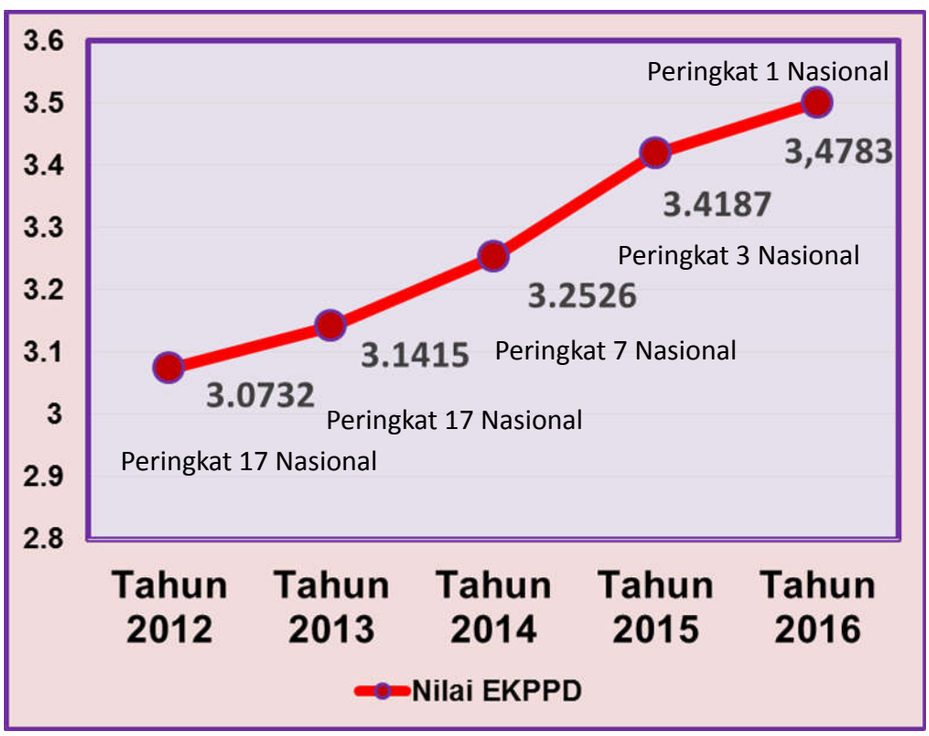

Sehubungan dengan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ini Kabupaten Sidoarjo harus mampu mempertahankannya dengan membuat inovasi – inovasi untuk percepatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Opini atas audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

Untuk menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah salah satunya adalah dengan menilai opini BPK atas laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah.

Untuk memperoleh kinerja keuangan yang baik, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah melakukan upaya pembinaan terhadap pegawai yang bertugas dibidang keuangan, penyempurnaan atas sistem aplikasi keuangan dan yang terbaru adalah penerapan kebijakan transaksi non tunai dalam pengeluaran belanja daerah.

Selain itu pengelolaan aset daerah juga diupayakan perbaikan melalui upaya:

a. menyelaraskan persepsi dan pemahaman serta peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan barang milik daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui kegiatan bimbingan teknis, workshop serta pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
b. peningkatan koordinasi antar instansi terkait (Badan Pertanahan Nasinal Kabupaten Sidoarjo), dalam rangka proses pensertifikatan aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, serta dalam rangka penelusuran dokumen kelengkapan pengurusan sertifikat tanah;
c. monitoring dan evaluasi pelaksanaan sewa barang milik daerah;
d. penetapan/kode rekening pendapatan dan belanja secara tepat pada jenis pendapatan/belanja, obyek pendapatan/belanja, rincian obyek pendapatan dan belanja sehingga realisasi pendapatan maupun belanja secara substansi tepat.
e. optimalisasi tatakelola barang pakai habis berbasis akrual.

Dengan upaya tersebut diharapkan pengelolaan keuangan dan aset dapat berjalan dengan baik.

Perkembangan Opini BPK untuk laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Opini
1	2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2017	Masih dalam proses penilaian

Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan mengambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

4) Maturitas SPIP

Tingkat Kematangan (maturity level) SPIP yang menggambarkan tahapan proses yang lebih diyakini akan mengarahkan pada output dan outcome yang lebih baik. Tingkat Maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Sebagaimana dalam target RPJMN bahwa di tahun 2019 tingkat kematangan SPIP harus sudah menunjukkan level 3, namun Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 tingkat maturitas SPIP berada pada nilai 2,893 (berkembang) sudah mendekati dengan niai 3,000 (terdefinisi) sesuai dengan target tahun 2017 dengan nilai 2,500 – 3,000 dan diharapkan tercapai diatas nilai 3,000 di tahun 2018.

Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian yang telah dikomunikasikan secara memadai, namun belum seluruhnya diimplementasikan pada seluruh kegiatan. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga terdapat kelemahan yang belum ditangani secara memadai.

Upaya untuk meningkatkan kematangan dalam pengendalian intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan :

1. Melakukan Bimbingan Teknis Peningkatan Maturitas SPIP;
2. Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Maturitas SPIP;
3. Membentuk Satgas SPIP di seluruh SKPD.

5) Konsistensi dokumen perencanaan dan Penganggaran OPD

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang berkualitas, maka diperlukan konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran yang meliputi RKPD, KUA-PPAS dan APBD.

Dari evaluasi analisa dokumen konsistensi antara RKPD, KUA-PPAS dan APBD pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dirinci sebagai berikut :

Konsistensi KUA-PPAS dengan RKPD

TAHUN	Jumlah Kegiatan	Kegiatan konsisten	Tingkat Konsistensi (%)
2016	1.848	1.806	97.72
2017	1.703	1.623	95.30

Sumber : Dokumen Evaluasi Konsistensi Tahun 2016 dan 2017

Tingkat konsistensi antara RKPD dan KUA-PPAS pada Tahun 2016 dan 2017 dapat dilihat bahwa untuk perbandingan tingkat konsistensi sedikit mengalami penurunan pada Tahun 2017 namun masih sesuai target yang ditetapkan sebesar 90,00%, hal ini dikarenakan pada Tahun 2017 terjadi perubahan OPD di Kabupaten Sidoarjo sehingga ada beberapa kegiatan yang sudah tidak relevan karena tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang baru serta adanya program/kegiatan baru dalam rangka pencapaian kinerja dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Konsistensi KUA-PPAS dengan APBD

TAHUN	Jumlah Kegiatan	Kegiatan konsisten	Tingkat Konsistensi (%)
2016	1.871	1.796	96,81
2017	1.706	1.695	99.35

Sumber : Dokumen Evaluasi Konsistensi Tahun 2016 dan 2017

Tingkat konsistensi antara KUA-PPAS dan APBD pada Tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu dari 96,81 % pada Tahun 2016 menjadi 99,35 % sesuai target yang ditetapkan sebesar 90,00%, pada tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya konsisten dalam penganggaran dalam APBD sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara pihak eksekutif dan legislatif. Dan hal ini akan terus ditingkatkan agar perencanaan dan

penganggaran sesuai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021.

Beberapa hal yang diperlukan untuk meningkatkan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran antara lain adalah :

1. Diperlukan komitmen bersama antara DPRD dan eksekutif untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran;
2. Optimalisasi fungsi kelembagaan tim perencana pada masing-masing OPD
3. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan pejabat perencana pada masing-masing OPD, BAPPEDA, dan Tim Anggaran.
4. Integrasi sistem informasi E-Planning dan E-Budgeting (Perencanaan dan Penganggaran)

Kedepan diharapkan agar tidak sekedar melihat konsistensi saja namun juga melihat keselarasan kinerja, dimana perencanaan dan penganggaran OPD telah berbasis kinerja guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun sesuai yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sidoarjo serta melihat kondisi sebenarnya yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Upaya untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, maka dilakukan dengan mengukur indikator – indikator pendukung sebagai berikut :

1) Produk hukum daerah yang ditetapkan

Untuk mengukur efektivitas jalannya pemerintahan salah satunya diukur dengan sampai sejauh mana kelengkapan peraturan perundangan sebagai kelengkapan hukum setiap aktivitas yang dilaksanakan. Kelengkapan hukum tersebut adalah keberadaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang sesuai dengan kebutuhan.

Jumlah produk Hukum yang dihasilkan selama tahun 2015 s.d 2017 adalah sebagai berikut :

No.	Produk Hukum	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
1.	Peraturan Daerah	11	17	10
2.	Peraturan Bupati	64	102	104
3.	Keputusan Bupati	1.268	1.443	721

2) Penyelesaian kasus permasalahan hukum

Untuk mengukur kepastian hukum dalam menjalankan Pemerintahan maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo harus tetap berusaha agar setiap permasalahan hukum / sengketa hukum yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Penyelesaian permasalahan tersebut dapat melalui jalur *Litigasi* (persidangan) maupun jalur *Non Litigasi* (di luar persidangan / mediasi).

Jumlah sengketa hukum yang ditangani sampai dengan akhir tahun 2017 sebanyak 21 sengketa hukum dan sebanyak 12 kasus sudah INKRACHT. Adapun sengketa hukum yang ditangani tersebut, diantaranya yaitu :

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan
1.	14/G/2017/PTUN.SBY	Slamet Wibisono, Dkk (Penggugat) **Melawan** Bupati Sidoarjo (Tergugat)	Proses Peninjauan Kembali (PK)
2.	10/G/2017/PTUN.SBY	PT. Sumber Rejeki Rahayu (Penggugat) Melawan Kepala Satpol PP Kab. Sidoarjo (Tergugat)	INKRACHT
3.	65/VII/KI-Prop.Jatim-PS/2016	Jimmy Rusni Rasyid (Pemohon) Melawan PPID Kabupaten Sidoarjo (Termohon)	INKRACHT
4.	03/KI/2017/PTUN.SBY	PPID Kabupaten Sidoarjo (Pemohon Keberatan) Melawan Jimmy Rusni Rasyid (Termohon Keberatan)	INKRACHT
5.	51/VII/KI-Prop.Jatim-PS/2016	Richard Butar Butar (Pemohon) Melawan PPID Kabupaten Sidoarjo (Termohon)	INKRACHT

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan
6.	186/G/2016/PTUN.SBY	PT. Naragita Dinamika Komunika (Penggugat) Melawan Kepala Dinas Perhubungan Kab. Sidoarjo (Tergugat)	INKRACHT
7.	01/G/2017/PTUN.SBY	PT. Naragita Dinamika Komunika (Penggugat) Melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo (Tergugat) PT.Semesta Anugerah (Tergugat II Intervensi)	INKRACHT
8.	39/Pdt.G/2016/PN.Sda	M. Kholik (Penggugat) Melawan Kepala Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon – Sidoarjo (Tergugat)	INKRACHT
9.	248/Pdt.G/2016/PN.Sda	Handy Hermawan (Penggugat) Melawan Kepala Desa Keboansikep Kec. Gedangan – Sidoarjo (Tergugat)	Proses BANDING
10.	39/Pdt.G/2016/PN.Sda	Zainul Arif, Dkk (Penggugat) Melawan Kepala Desa Sarirogo Kec. Sidoarjo (Tergugat I) Camat Sidoarjo (Tergugat II) Bupati Sidoarjo (Turut Tergugat I)	INKRACHT

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan
11.	137/G/2016/PTUN.SBY	Eddy Polandauw (Penggugat) Melawan Bupati Sidoarjo (Tergugat)	INKRACHT
12.	135/G/2016/PTUN.SBY	Aris Ardiansyah, Dkk (Penggugat) Melawan Bupati Sidoarjo (Tergugat)	INKRACHT
13.	05/P/FP/2017/PTUN.SBY	Ridho Lelono (Pemohon) Melawan Kepala Kelurahan Gebang Kec. Sidoarjo (Termohon)	INKRACHT
14.	118/G/2016/PTUN.SBY	Nur Yasin (Penggugat) Melawan Ketua Panitia Pilkades Medaeng (Tergugat I) Ketua BPD Medaeng Kec. Waru – Sidoarjo (Tergugat II)	INKRACHT
15.	86/Pdt.G/2014/PN.SDA	Solikin (Penggugat) Melawan Kepala Desa Seketi Kec. Balongbendo – Sidoarjo (Tergugat)	Proses Peninjauan Kembali (PK)
16.	210/Pdt.Plw/2017/PN.Sda	Kepala Desa Seketi Kec. Balongbendo – Sidoarjo (Pelawan) Melawan Solikin (Terlawan)	Pihak Pelawan KALAH Tingkat I dan akan mengajukan BANDING
17.	186/Pdt.G/2017/PN.Sda	PT. Avilla Prima Intra Makmur (Penggugat) Melawan Bupati Sidoarjo (Tergugat)	Proses Persidangan

No.	Nomor Perkara	Para Pihak	Keterangan
18.	98/G/20174/PTUN.SBY	Sarjono, Dkk (Penggugat) Melawan Kepala Satpol PP Kab. Sidoarjo (Tergugat)	Proses BANDING
19.	113/G/2017/PTUN.SBY	Sumiarsih, Dkk (Penggugat) Melawan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kab. Sidoarjo (Tergugat) PT. Bersatu Sukses Sejahtera (Tergugat II Intervensi)	Proses Persidangan
20.	260/Pdt.G/2017/PN.Sda	Prayitno (Penggugat) Melawan PG. Candi (Tergugat I) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (Tergugat II) Bupati Sidoarjo (Tergugat III)	Proses Persidangan
21.	28/Pdt.G/20185/PN.Sda	M. Chamim Mustofa, Dkk (Penggugat) Melawan Ketua BPD Panjunan Kec. Sukodono – Sidoarjo (Tergugat)	Proses Persidangan

3) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pada tahun 2017 telah dikelola pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan LPSE (Layanan Pengadan Secara Elektronik), dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Pengadaan	Pengumuman Lelang		Selesai Lelang				
		Jumlah Paket	Total Pagu	Jumlah Paket Selesai	Total Pagu Paket Selesai	Total Hasil Lelang	Selisih Pagu Paket Selesai dan Hasil Lelang	
							(Rp)	(%)
1	Pengadaan Barang - Jasa	17	Rp. 16,059,237,750	17	Rp. 15,389,757,551	Rp. 13,860,450,675	Rp. 2,198,787,075	13.69%
2	Jasa Konsultansi Badan Usaha	59	Rp. 18,917,994,210	58	Rp. 18,424,118,149	Rp. 4,055,493,950	Rp. 14,637,500,260	78.30%
3	Pekerjaan Konstruksi	182	Rp. 365,370,003,701	182	Rp. 358,926,796,800	Rp. 315,326,510,174	Rp. 50,043,493,527	13.70%
4	Jasa Lainnya	23	Rp. 30,353,342,162	23	Rp. 24,737,610,731	Rp. 23,336,778,333	Rp. 7,016,563,829	23.12%
TOTAL		281	Rp. 430,700,577,823	280	Rp. 417,478,283,231	Rp. 356,579,233,132	Rp. 73,896,344,691	17.70%

4) Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan

a). Jumlah temuan pemeriksaan BPK dan tindak lanjutnya**.**

Untuk menilai efektivitas pengawasan oleh aparat pengawas fungsional maka jumlah rekomendasi hasil audit dapat mewakili kinerja pengawasan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan), ditemukan hasil sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2015	
Uraian	**Jumlah**
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2015	635
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2015 yang telah ditindak lanjuti	635
Yang belum ditindak lanjuti	0
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2016	
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016	693
Rekomendasi BPK s/d Thn 2016 yang telah ditindak lanjuti	692
Yang belum ditindak lanjuti	1
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK 2017	
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017	746
Rekomendasi BPK s/d Tahun 2017 yang telah ditindak lanjuti	745
Yang belum ditindak lanjuti	1

*) data Semester 2 tahun 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi BPK dari tahun ke tahun sampai dengan tahun 2017 dapat ditindaklanjuti dengan baik. Tinggal 2 temuan yang belum tuntas yakni Pengelolaan Persediaan pada Enam SKPD Belum Tertib dan Pembangunan Aset Tetap Jalan *Frontage Road* Waru – Buduran Tidak Sesuai Ketentuan.

b). Jumlah rekomendasi pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dan tindak lanjutnya.

Sebagai bentuk upaya perbaikan Tata kelola Keuangan Daerah Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya telah melakukan tindak lanjut pengawasan/pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, ditemukah hasil sebagai berikut :

REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT 2015		
1	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2015	568
2	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2015 yang telah ditindak lanjuti	568
3	Yang belum ditindak lanjuti	0
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2016		
1	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016	860
2	Rekomendasi Inspektorat Tahun 2016 yang telah ditindak lanjuti	860
3	Yang belum ditindak lanjuti	0
REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH 2017		
1	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017	1796
2	Rekomendasi Inspektorat Daerah Tahun 2017 yang telah ditindak lanjuti	1434
3	Yang belum ditindak lanjuti	362

*) data per Desember 2017

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan Auditor Inspektorat Kabupaten Sidoarjo sampai dengan Tahun 2017 dapat ditindaklanjuti dengan baik. Hal ini berarti kinerja Inspektorat Daerah sudah semakin baik.

5) Kapabilitas APIP

Inspektorat memiliki tiga peran kunci yang diatur dalam PP 60 tahun 2008 yakni:

a) Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

b) Memberikan peringatan dini (early warning) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

c) Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Untuk melaksanakan peran kunci tersebut secara optimal dipengaruhi oleh kemampuan (kapabilitas) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Kapabiitas APIP Kabupaten Sidoarjo telah menunjukkan level 3, namun masih menunggu hasil panjaminan mutu (Quality Asssurance) untuk hasil penilaian level tersebut dari BPKP Pusat.

Upaya untuk meningkatkan level kapabilitas Inspektorat Kabupaten Sidoarjo, yaitu dengan :

1. Membuat rencana aksi
2. Mencukupi Infrastruktur yang belum ada di setiap elemen
3. Melaksanakan bimbingan teknis

6) Pemanfaatan dokumen perencanaan dan penelitian

Pada tahun 2017 telah disusun 72 (tujuh puluh dua) dokumen perencanaan dan penelitian sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan. Dari 72 (tujuh puluh dua) dokumen perencanaan dan penelitian yang utama sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen yang utama, dengan rincian sebagai berikut :

No	Bidang	Jumlah Dokumen
1	Ekonomi	2
2	Pengembangan Wilayah, Permukiman dan Prasarana Wilayah	7
3	Litbang dan Data	4
4	Pemerintahan dan Kemasyarakatan	15
5	Sekretariat	8

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebanyak 36 (tiga puluh enam) dokumen atau 50% dari keseluruhan dokumen yang telah disusun oleh BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tahapan waktunya.

2) "Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi", melalui hasil pencapaian kinerja sebagai berikut **:**

Rata - Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

Pada tahun 2017, dilakukan pengukuran pelayanan bidang pemerintahan, kesehatan, perijinan, pelayanan publik dengan nilai rata-rata 79,69 atau kategori B (baik).

Rincian pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	Jumlah Unit	UNIT PELAYANAN PUBLIK	KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	
1		2	3	4	
1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	75,02	B	BAIK
2	1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84,33	A	Sangat Baik
3	1	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	82,4	A	Sangat Baik
4	1	Dinas Perhubungan			
5	1	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	72,43	B	BAIK
6	1	UPT Izin Angkutan	73,93	B	BAIK
7	1	Badan Pelayanan Pajak Daerah	76,94	B	BAIK
8	1	UPT Pelayanan Pajak Daerah Sidoarjo	77	B	BAIK
9	1	UPT Pelayanan Pajak Daerah Taman	76,96	B	BAIK
10	1	UPT Pelayanan Pajak Daerah Krian	76,67	B	BAIK
11	1	UPT Pelayanan Pajak Daerah Tulangan	76,82	B	BAIK
12	1	Rumah Sakit Umum Daerah	86,12	B	BAIK
13	1	Badan Kepegawaian Daerah	77,56	B	BAIK
14	7	Nilai Rata-Rata Kecamatan dengan Skor B	565,24	B	BAIK
15	2	Nilai Rata-Rata Kecamatan dengan Skor C	140,50	C	Kurang Baik
16	2	Nilai Rata-Rata Puskesmas dengan Skor A	182,13	A	Sangat Baik
17	13	Nilai Rata-Rata Puskesmas dengan Skor B	1.038,26	B	BAIK
18	5	Nilai Rata2 Sekolah dengan Skor B (5 Sekolah)	405,12	B	BAIK
		RATA-RATA KONVERSI	**79,69**	**(B)**	**BAIK**

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi hasil SKM tahun 2017 telah memenuhi target RPJMD senilai 79,63. Hal ini menunjukkan persentase pencapaian target 100,06%

Upaya untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, maka dilakukan dengan mengukur indikator – indikator pendukung sebagai berikut :

1) Standart Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun OPD

Berdasarkan hasil evaluasi dapat disimpulkan bahwa dari 47 OPD yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 47 OPD telah memiliki SOP (Standart Operasional Prosedure) atau sekitar 100,00%.

Keseluruhan jumlah SOP yang disusun sebanyak 3.809 judul SOP dengan 3.809 SOP telah dimanfaatkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah penetapan tertulis mengenai aktivitas-aktivitas baku yang harus dilakukan dalam proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan melakukannnya, dimana dan oleh siapa aktivitas dilakukan.

Diperlukan adanya SOP oleh setiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan. Tersusunnya SOP pada setiap unit pelayanan agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat berjalan lebih baik.

Data Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Tahun 2017, sebagai berikut :

NO	SKPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14
2	Dinas Kesehatan	14
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24
4	Dinas Perhubungan	11
5	Inspektorat	3
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46
7	Badan Kepegawaian Daerah	52
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	6
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4
10	Satuan Polisi Pamong Praja	14
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	20
12	Rumah Sakit Umum Daerah	16
13	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3
14	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	53
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57
16	Dinas Perikanan	14
17	Dinas Pangan dan Pertanian	17
18	Dinas Pemuda Olah Raga, dan Pariwisata	14
19	Dinas Perumahan dan Permukiman	30
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	52
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	10
22	Badan Pelayanan Pajak Daerah	3
23	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	37

NO	SKPD PELAKSANA	JUMLAH SOP
24	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	5
25	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, Keluarga Berencana	25
26	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	18
27	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	5
28	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo	8
29	Bagian Perekonomian Dan SDA Sekretariat Daerah	4
30	Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah	10
31	Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa Sekretariat Daerah	32
32	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	17
33	Bagian Umum Sekretrariat Daerah	15
34	Bagian Protokol Dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	12
35	Dinas Tenaga Kerja	7
36	Dinas Sosial	15
37	Kecamatan (18 Kecamatan)	174
38	Kelurahan (31 Kelurahan)	307
39	Puskesmas (26 Puskesmas)	2.303
40	UPTD (19 UPTD)	338
	Jumlah	3.809

Sumber data : Bagian Organisasi Setda

3) **"Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan",** melalui hasil pencapaian kinerja sebagai berikut **:**

Indeks Profesionalitas ASN

Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa pembangunan aparatur negara diarahkan pada peningkatan profesionalitas aparatur negara. Dengan adanya aparat negara yang profesional maka diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal guna mendukung pembangunan nasional.

Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator tingkat profesionalitas ASN yang merupakan fungsi dari kesesuaian antara kompetensi pejabat dan jabatan yang disyaratkan, ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan, ditambah kompensasi dan ditambahkan kedisiplinan dalam organisasi sebagai bentuk budaya kerja.

Target yang ditetapkan di tahun 2017 dalam RPJMD untuk indeks profesionalitas ASN adalah 76, sedangkan realisasi tahun 2017 adalah 86,57, sehingga capaiannya 113,91% dimana perhitungan dilakukan pada pejabat struktural, yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut :

Nilai Rata -Rata Dari Indeks Variabel Koefisiennya				Indeks Profesionalitas Pegawai
Gap Kompetensi	Kinerja	Gap Kompensasi	Gap Indisipliner	
0,29	88,78	0,14	0,00	86,57
Nilai Variabel Koefisiennya dalam Skala 1-100				
Kompetensi	Kinerja	Kompensasi	Indisipliner	
71	89	86	100	

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2018

Hal ini menunjukkan bahwa bahwa profesionalitas aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah baik dan diatas target RPJMN di tahun 2019 sebesar 78,3 maupun target RPJMD Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 yaitu sebesar 76. Adapun dari masing-masing variabel Indeks Profesionalitas dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Variable Kompetensi didapatkan Gap Kompetensi sebesar 0,29 , adalah nilai yang terbesar dari variabel koefisien yang lain, hal ini menunjukkan bahwa prosentase ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam daftar penilaian ini (pejabat structural) telah sesuai dengan kompetensinya sebesar 71%
b. variabel koefisien kinerja terlihat bahwa rata-rata kinerja adalah sebesar 88,78. Penilaian dilakukan pada pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi kinerja SKP *online* atas kinerja tahun 2017
c. variabel koefisien Gap Kompensasi sebesar 0,14 menunjukkan bahwa 86 % ASN Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam daftar penilaian ini telah menerima kompensasi sesuai beban kerjanya, dengan asumsi perhitungan ini mengacu pada regulasi BKN atas kelas jabatan dan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang pemberian nilai Tunjangan
d. penilaian koefisien variabel indisipliner, menunjukkan data sampling ASN yang dinilai (jabatan struktural) tidak dalam kondisi indisipliner.

Keberhasilan pencapaian indikator tersebut didukung oleh indikator – indikator pendukung, sebagai berikut :

1) Prosentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensinya

Pada tahun 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo menetapkan target sasaran penempatan ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan kompetensinya sebesar 66,9%.

Berdasarkan penempatan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, diperoleh data pengukuran kompetensi ASN, sebagai berikut :

Uraian	Jumlah ASN	Terpetakan	ASN yang telah di tempatkan sesuai dengan kompetensinya	
Jumlah ASN Kab. Sidoarjo	12.229	8.752	8.457	**69,16%**
Jumlah ASN JFT	7.963	7.963	7.963	
Jumlah ASN JFU	3.470	248	174	
Jumlah ASN J. Struktural	796	689	320	

Upaya yang telah dilakukan dalam usaha penempatan ASN sesuai dengan kompetensinya yaitu :

1. Menyusun 4 buah Syarat Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
2. Menyusun Syarat Kompetensi Jabatan Administrator.
3. Menyusun Syarat Kompetensi Jabatan Pengawas.
4. Melakukan pemetaan kompetensi SDM dengan metode dan teknik yang sesuai untuk menggali kompetensi jabatan yang dibutuhkan dalam masing-masing jabatan yaitu untuk administrator sebanyak 119 orang, jabatan pengawas sebanyak 474 orang, dan jabatan pelaksana sebanyak 148 orang pada tahun 2017.
5. Membuat perencanaan karir PNS yang dimulai dengan pola karir dan talent pool.

4. **“Meningkatnya kapasitas fiskal daerah berbasis pada sumber-sumber penerimaan daerah yang fundamental”,** melalui hasil pencapaian kinerja sebagai berikut **:**

1) Rasio PAD terhadap total Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen pendapatan yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai operasional dan pembangunan daerahnya. Semakin besar PAD yang mampu dihimpun akan semakin menunjukkan kemandirian daerah dalam membiayai kebutuhannya.

Berdasarkan Laporan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1.557.772.194.420,59	1.671.485.430.546,00	107,30
1.2.	Dana Perimbangan	1.833.860.113.708,00	1.708.887.132.594,00	93,19
1.3.	Lain -Lain Pendapatan Yang Sah	637.434.593.928,44	664.991.409.822,00	104,32
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.029.066.902.057,03**	**4.045.363.972.962,00**	100,40

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah adalah 41,32%, apabila dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2017 sebesar 38,67% maka capaiannya sebesar 106,85%.

Upaya untuk meningkatkan kontribusi pendapatan yang besar dari sektor PAD, antara lain :

1. Peningkatan kapasitas aparatur
2. Peningkatan kualitas pelayanan
3. Pemutakhiran data dan estimasi potensi pajak

Upaya untuk mendukung keberhasilan pencapaian indikator tersebut, maka dilakukan dengan mengukur indikator – indikator pendukung sebagai berikut :

2) Peningkatan Penerimaaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2017 sebesar Rp1.671.485.430.546,00 atau tercapai sebesar 107,30% dari seluruh target PAD sebesar Rp1.557.772.194.420,59 dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 1.335.470.792.171,70 meningkat sebesar Rp336.014.638.374,30 atau 25,16%.

Rincian realisasi dan target PAD tahun 2017 adalah sebagai berikut :

PENDAPATAN ASLI DAERAH

KODE	URAIAN	ANGGARAN / TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / KURANG (Rp)	%
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1.	Pajak Daerah	831.150.000.000,00	925.569.237.852,49	94.419.237.852,49	111,36
1.1.2.	Retribusi Daerah	82.402.295.537,00	80.087.712.759,50	(2.314.582.777,50)	97,19
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	27.889.202.407,14	29.304.699.967,00	1.415.497.559,86	105,08
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	616.330.696.476,45	636.523.779.967,01	20.193.083.490,56	103,28
	JUMLAH	**1.557.772.194.420,59**	**1.671.485.430.546,00**	**113.713.236.125,41**	**107,30**

C. Pelaksanaan Tugas pembantuan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, selain melaksanakan urusan pemerintahan daerah juga melaksanakan tugas – tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat.

1. Tugas Pembantuan yang diterima

Pada tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk tugas pembantuan. Hal ini dikarenakan adanya amanat dari Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Pasal 108 yang menyebutkan bahwa ”Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara / lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang – undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus”. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah tidak mendapatkan Tugas Pembantuan dari Kementerian Negara / Lembaga, namun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat tersebut dialokasikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk berbagai urusan pemerintahan.

2. Tugas Pembantuan yang diberikan.

Selama tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tidak memberikan tugas pembantuan secara eksplisit kepada Desa / Kelurahan, yang diberikan dalam berbentuk bantuan stimulan pembangunan Desa dan Kelurahan. Bantuan ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi kepada Desa / Kelurahan untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan melaui kegiatan Musrenbang.

D. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai daerah otonom selain menyelenggarakan fungsi desentralisasi dan tugas pembantuan, juga harus menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Tugas ini bersifat koordinatif antar daerah otonom maupun instansi pemerintahan secara vertikal serta pelayanan dasar masyarakat.

Selama tahun 2017, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

A. Kerjasama Antar Daerah

Kerjasama Antar Daerah yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2017 sebanyak 2 kerjasama

B. Kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga

Kerjasama yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo di tahun 2017 adalah berupa penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Bupati Sidoarjo dengan Lembaga Pemerintah sebanyak 11 kerjasama, Universitas sebanyak 3 kerjasama dan dengan Lembaga Non Pemerintah / Swasta sebanyak 3 kerjasama.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Koordinasi pemerintah daerah dengan instansi vertikal dilakukan untuk mengoptimalkan fungsi dan kerja instansi vertikal tersebut di daerah. Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk merumuskan rencana kerja yang terintegrasi antara instansi vertikal dengan pemerintah daerah. Kegiatan yang yelah dilaksanakan berupa Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) dan Penyusunan Dokumen Statistik Daerah

D. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Pada tahun 2017, di Kabupaten Sidoarjo terjadi bencana alam yang memerlukan penanganan oleh pemerintah kabupaten. Bencana alam yang terjadi sebagai berikut :

1. Angin Puting Beliung, terjadi di 12 Kecamatan
2. Banjir, terjadi di 5 Kecamatan
3. Perahu tenggelam, terjadi di 1 kecamatan
4. Bencana Lainnya (Orang Hilang, Laka Air, Genangan, Angin Kencang), terjadi di 3 kecamatan
5. Kebakaran, terjadi sebanyak 273 kejadian

Upaya / Penanggulangan yang telah dilakukan adalah :

1) Koordinasi dengan instansi terkait (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kesehatan dan lain lain)
2) Melakukan kesiapsiagaan Pemadam kebakaran

3) Pengembangan WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran) atau menambah pos Pemadam kebakaran
4) Inventarisasi Data kasus kebakaran

Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana

Antisipasi daerah untuk menghadapi kemungkinan bencana antara lain, yaitu :

1) Pemanfaatan teknologi dalam Sistem Peringatan Dini melalui prakiraan cuaca dari BMKG Juanda
2) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran dengan melakukan kajian resiko kebakaran
3) Melakukan sosialisasi / pelatihan / pemberdayaan masyarakat (Sekolah aman bencana , Desa Tangguh Bencana, Sekolah Sungai)
4) Mengadakan sarana prasarana (Mobil Damkar, Pompa air dll)
5) Optimalisasi penggunaan Aplikasi SIGAP (Sidoarjo Tanggap – Adalah Aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dalam melaporkan kejadian bencana secara real time di Kabupaten Sidoarjo)

E. Pengelolaan Kawasan Khusus

Di Kabupaten Sidoarjo tidak terdapat daerah kawasan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perihal pembentukan daerah dan kawasan khusus.

F. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selama tahun 2017, di Kabupaten Sidoarjo tidak terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang mengarah kepada konflik yang berbasis SARA, separatisme dan anarkisme. Gangguan yang terjadi sangat bersifat lokal dan individual yang secara keseluruhannya masih mampu diselesaikan oleh masyarakat sendiri maupun aparat pemerintah mulai tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten.